

**DISERTASI**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN  
KETERLIBATAN MASYARAKAT DI DESA WISATA  
JATILUWIH KABUPATEN TABANAN**

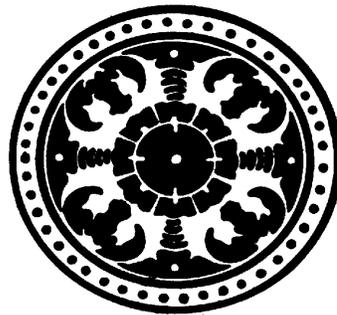


**DEWA PUTU OKA PRASIASA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
DENPASAR  
2010**

**DISERTASI**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN  
KETERLIBATAN MASYARAKAT DI DESA WISATA  
JATILUWIH KABUPATEN TABANAN**

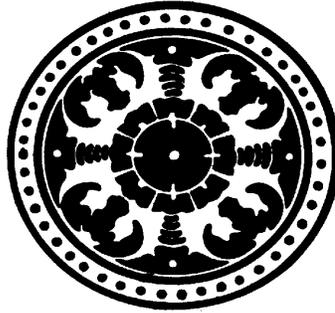


**DEWA PUTU OKA PRASIASA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
DENPASAR  
2010**

**DISERTASI**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN  
KETERLIBATAN MASYARAKAT DI DESA WISATA  
JATILUWIH KABUPATEN TABANAN**



**DEWA PUTU OKA PRASIASA  
NIM 0690371017**

**PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM STUDI KAJIAN BUDAYA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
DENPASAR  
2010**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN  
KETERLIBATAN MASYARAKAT DI DESA WISATA  
JATILUWIH KABUPATEN TABANAN**

**Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor  
pada Program Doktor, Program Studi Kajian Budaya,  
Program Pascasarjana, Universitas Udayana**

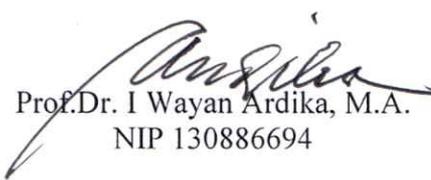
**DEWA PUTU OKA PRASIASA  
NIM 0690371017**

**PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM STUDI KAJIAN BUDAYA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
DENPASAR  
2010**

Lembar Pengesahan

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 7 JANUARI 2010

Promotor,

  
Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A.  
NIP 130886694

Kopromotor I,

  
Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U.  
NIP 130534228

Kopromotor II,

  
Prof. Dr. Emiliana Mariyah, M.S.  
NIP 131273589

Mengetahui

Ketua Program S3 Kajian Budaya  
Program Pascasarjana  
Universitas Udayana,

  
Prof. Dr. I Made Suastika, S.U.  
NIP 130818146

Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Udayana,

  
Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc.  
NIP 131475047

Disertasi Ini telah Diuji pada Ujian Tertutup  
Tanggal 1 Oktober 2009

Panitia Penguji Disertasi, Berdasarkan  
SK Rektor Universitas Udayana  
Nomor: 912/H14.4/HK/2009, Tanggal 11 September 2009

Ketua : Prof.Dr. I Made Suastika, S.U.

Anggota :

1. Prof.Dr. I Wayan Ardika, M.A.
2. Prof.Dr. I Nyoman Kutha Ratna, S.U.
3. Prof.Dr. Emiliana Mariyah, M.S.
4. Prof.Dr. I Gde Parimarta, M.A.
5. Prof.Dr. I Gde Semadi Astra
6. Prof.Dr. I Nyoman Sirtha, S.H.,M.S.
7. Dr. I Gede Mudana, M.Si.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), atas rahmat dan perkenan-Nya, akhirnya penulisan disertasi yang berjudul "Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan" dapat penulis selesaikan.

Penulisan disertasi ini, di samping untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menempuh studi pada Program Doktor (S3) Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana, juga merupakan salah satu bentuk sumbangan pemikiran terhadap permasalahan pembangunan yang terjadi. Dalam hal ini, khususnya yang terkait dengan pengembangan produk wisata berupa desa wisata dari sisi kajian budaya.

Penulisan disertasi ini berlangsung atas dorongan, bantuan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak di bawah ini.

(1) Prof.Dr. I Wayan Ardika, M.A., selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Udayana, juga selaku promotor. Dalam hal ini dengan kebijakannya telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan disertasi ini, yakni dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan perhatian memberikan masukan yang sangat bermanfaat terhadap disertasi ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof.Dr. I Nyoman Kutha Ratna, S.U., selaku kopromotor I dan selaku pembimbing akademik, yang juga telah meluangkan waktu untuk

membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Hal yang sama juga disampaikan kepada Prof.Dr. Emiliana Mariyah, M.S., selaku kopromotor II yang dengan naluri keibuannya, telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mereka serta kerja sama yang baik di antara ketiganya sangat berarti bagi proses penelitian dan penulisan disertasi ini.

- (2) Rektor Universitas Udayana Prof.Dr.dr. I Made Bakta, Sp.P.D. (K.) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi karyasiswa pada Program Doktor (S3) Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang dimulai pada Tahun Akademik 2006/2007.
- (3) Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof.Dr.Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc. dan Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof.Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A. yang memberikan kesempatan kepada penulis menempuh studi pada Program Doktor (S3) Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana dan usulan BPPS kepada Dirjen Dikti Depdiknas RI.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana Prof.Dr. I Made Suastika, S.U. dan Prof.Dr. I Nyoman Kutha Ratna, S.U. atas pemberian semua fasilitas pendidikan sejak awal perkuliahan.
- (5) Tim penguji, yakni Prof.Dr. I Gde Parimartha, M.A.; Prof.Dr. I Made Suastika, S.U.; Prof.Dr. I Gde Semadi Astra; Prof.Dr. I Nyoman Sirtha, S.H.,M.S.; dan

Dr. I Gede Mudana, M.Si. yang memberikan banyak masukan, kritik, dan saran bagi proses penyempurnaan disertasi ini.

- (6) Para dosen, yakni Prof.Dr. Nengah Bawa Atmadja, M.A.; Prof.Dr. I Gde Widja; Prof.Dr. Aron Meko Mbeté; Prof.Dr. A.A. Gde Putra Agung, S.U.; Prof.Dr. Irwan Abdullah; Prof.Dr. Sri Edy Ahimsa Putra, M.A.; Prof.Dr. I Wayan Dibia, S.S.T.,M.A.; Prof.Dr. Ir. Sulistyawati M.S.; Prof.Dr. I Wayan Tjatera, M.Sc.; dan Daniel Sparringa, Ph.D. yang telah membuka wawasan baru bagi penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana.
- (7) Almarhum Prof.Dr. I Gusti Ngurah Bagus (wafat tanggal 16 Oktober 2003) sebagai penggagas dan pendiri Program Magister (S2) Kajian Budaya dan Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana. Selain sebagai pendiri dan penggagas, beliau juga sebagai Ketua Program Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana (1996–2003) dan Ketua Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana (2001–2002). Karena tanpa perjuangan beliau, penulis tidak dapat menempuh studi di Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana.
- (8) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang sejak awal kuliah penulis (2006/2007) berkenan menyediakan BPPS untuk studi di Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana.
- (9) Koordinator Kopertis Wilayah III DKI Jakarta Prof.Dr.Ir. Budi Susilo Soepandji, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III DKI Jakarta Drs. Sjamsu

A. Makka, M.M., Ketua Dewan Pendiri dan Pembina Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Prof.DR. H. Sukamdani Sahid Gitosardjono, dan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta Drs. Yohanes Sulistyadi, M.Pd. yang telah memberikan izin serta mendukung penulis untuk melanjutkan studi pada Program Doktor (S3) Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana.

- (10) Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Udayana, dan Prof.Dr. I Wayan Ardika, M.A., selaku promotor, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program *Sandwich* Tahun 2008 di Prince of Songkla University, Phuket Thailand. Terkait dengan pelaksanaan Program *Sandwich* Tahun 2008 yang penulis laksanakan di Faculty of Hospitality and Tourism, Prince of Songkla University, Phuket Thailand, ucapan terima kasih dan penghargaan (*Kob Kun Krub* dan *Kob Kun Kah*) disampaikan kepada Assoc. Prof.Dr. Manat Chaisawat, Dr. Pathummalai Pattaro, dan Dr. Aree Tirasatayapitak, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk memberikan masukan terkait dengan *community based tourism development*. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada *International Affairs Center*, Prince of Songkla University, Phuket Thailand, yakni kepada Paphichaya Younghad, Nantikorn Thaicharoen, dan Peewara Noourai, yang telah membantu penulis selama berada di Kampus Phuket Thailand untuk mengikuti Program *Sandwich*.

- (11) Pemerintah Kabupaten Tabanan yang menerbitkan izin penelitian, termasuk pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan serta Camat Penebel yang memberikan data/informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian disertasi ini.
- (12) I Nengah Wirata, S.T. selaku Kepala Desa Jatiluwih, I Wayan Yasa selaku *Bendesa Adat* Jatiluwih, Wayan Pudja selaku *Bendesa Adat* Gunungsari sekaligus selaku *Pekaseh* Desa Jatiluwih, dan masyarakat Desa Jatiluwih yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian. Tanpa bantuan mereka, penelitian ini tidak mungkin dilaksanakan.
- (13) Karyawan dan karyawan Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana, yakni I Wayan Sukaryawan, A.A.A. Indrawati, C.I.P. Murniati, Ni Luh Witari, Putu Hendrawan, Ni Wayan Ariati, dan I Nyoman Candra, yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis mengikuti studi.
- (14) Teman-teman di Program Doktor (S3) Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana angkatan Tahun Akademik 2006/2007.
- (15) Ayahanda almarhum Dewa Putu Sedana, yang telah meletakkan dasar di hati sanubari penulis yang paling dalam, untuk selalu belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Oleh karena dengan ilmu pengetahuan dapat membuat hidup menjadi lebih baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ibunda Desak Putu Candra, yang telah mengandung dan melahirkan penulis.
- (16) Istri tercinta Dewa Ayu Diah Sri Widari, A.Par. yang telah mendampingi penulis dengan penuh kesabaran, perhatian, dan pengorbanan, baik material

maupun nonmaterial, diucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala yang telah dicurahkan untuk mendukung studi yang penulis tempuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ibu mertua Anak Agung Istri Anom, yang telah berperan dalam studi lanjut di Program S3 Kajian Budaya ini, yang selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan.

*Tiada gading yang tak retak.* Sejalan dengan pepatah tersebut, penulis telah mencoba melakukan yang terbaik dalam penelitian ini. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Akhirnya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih sehingga tidak terpinggirkan dalam pengembangan pariwisata.

Denpasar, 07 Januari 2010

Penulis

## ABSTRAK

Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat secara ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan. Namun kenyataannya, pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih berjalan jauh dari harapan masyarakat setempat, seperti masyarakat setempat tidak dilibatkan secara langsung dalam pengembangan pariwisata, pengelolaan desa wisata yang didominasi oleh desa dinas, terhegemoninya partisipasi masyarakat, dan timbulnya konflik kepentingan di antara *stakeholders*.

Berdasarkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan di atas, beberapa permasalahan yang dikaji dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. (1) Bagaimanakah pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan? (2) Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan? (3) Apa dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dipecahkan dengan menggunakan beberapa teori yang relevan seperti teori Hegemoni, teori Komodifikasi, teori Dekonstruksi, Teori Diskursus Kekuasaan /Pengetahuan, dan teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat.

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih menimbulkan komodifikasi pada bangunan tradisional *saka roras* dan konflik kepentingan. Adanya konflik kepentingan tersebut menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih melalui lima tahap, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasional, tahap pengembangan, dan tahap pengawasan. Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih berdampak terhadap pengelolaan desa wisata, pengambilan gambar oleh wisatawan, penyerapan pekerja dari masyarakat setempat, pelecehan *Trihita Karana* (*parhyangan, pawongan, serta palemahan*). Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat tersebut menimbulkan makna kesejahteraan, makna pelestarian, dan makna pemberdayaan.

Temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, masyarakat Desa Wisata Jatiluwih belum siap menerima pengembangan pariwisata. *Kedua*, terjadi hegemoni pada pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. *Ketiga*, terjadi fenomena ekonomi pasar pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

Adapun simpulan penelitian ini adalah (1) Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih menimbulkan komodifikasi dan konflik kepentingan. (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih berupa partisipasi pada tahap persiapan, perencanaan, operasional, pengembangan, dan pengawasan. (3) Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa

Wisata Jatiluwih berdampak terhadap pengelolaan desa wisata, pengambilan gambar oleh wisatawan, penyerapan pekerja dari masyarakat setempat, pelecahan *Trihita Karana* (*parhyangan, pawongan, dan palemahan*). Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat tersebut menimbulkan makna kesejahteraan, makna pelestarian, dan makna pemberdayaan.

**Kata-kata kunci:** pengembangan pariwisata, keterlibatan masyarakat, desa wisata, *Trihita Karana*.

## ABSTRACT

The tourism development and community involvement at the Tourist Village of Jatiluwih are expected to directly benefit the local community economically, socially, culturally, and environmentally. However in fact, the tourism development at the Tourist Village of Jatiluwih is far from what has been expected by the local community. This can be exemplified by the fact that the local community is not directly involved in the tourism development, the management of the tourist village is dominated by the administrative village, the community involvement gets hegemonized, and the conflict of interests among the stakeholders takes pace.

Based on the gap between the fact and what has been expected above, the problems investigated in this research are formulated in several research questions as follows. (1) how can the tourism development at the Tourist Village of Jatiluwih be described? (2) how can the community involvement in the tourism development at the Tourist Village of Jatiluwih be described? (3) What is the impact and meaning of the tourism development and community involvement at the Tourist Village of Jatiluwih?.

This research applies qualitative method, aiming at understanding and analyzing the tourism development and community involvement at Tourist Village of Jatiluwih. The problems in this research are solved by using some relevant theories such as hegemony theory, co-modification theory, deconstruction theory, discourse of power/knowledge theory, and community-based tourism development theory.

The tourism development at Tourist Village of Jatiluwih causes co-modification of traditional buildings of *saka roras* and conflict of interest. This conflict of interest causes division in community. The community involvement in the tourism development at the Tourist Village of Jatiluwih can be observed in five stages, namely preparation stage, planning stage, operating stage, development stage, and supervision stage. The tourism development and community involvement at the Tourist Village of Jatiluwih affected the management of the tourist village, the pictures taken by the tourist, the absorption of local workforce, the philosophy of *Trihita Karana* (*parhyangan*, *pawongan*, and *palemahan*) got despised. The tourism development and community involvement cause meaningfulness to the community welfare, meaningfulness to conservation, and meaningfulness to empowerment.

The novelties of this research are as follows. First, the community at the Tourist Village of Jatiluwih have not ready yet to receive the tourism development. Second, causes hegemony on the tourism development and community involvement at the Tourist Village of Jatiluwih. Third, causes market economic phenomena on the tourism development at the Tourist Village of Jatiluwih.

The conclusions of this research are as follows. First, the tourism development at the Tourist Village of Jatiluwih resulted in co-modification and conflict of interest. Second, the community got involved in the tourism development at the Tourist Village of Jatiluwih by participating in the preparation, planning, operating, development, and monitoring stages. Third, the tourism development and community

involvement at the Tourist Village of Jatiluwih affected the management of the tourist village, the pictures taken by the tourists, the absorption of the local workforce, the philosophy of *Trihita Karana* (*parhyangan*, *pawongan*, and *palemahan*) got despised. The tourism development and community involvement were meaningfulness to welfare, meaningfulness to conservation, and meaningfulness to empowerment.

**Key words:** tourism development, community involvement, tourist village, *Trihita Karana*.

**RINGKASAN DISERTASI**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT  
DI DESA WISATA JATILUWIH KABUPATEN TABANAN**

Penelitian ini terfokus pada pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, sebuah desa wisata di Kabupaten Tabanan. Fokus penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mengungkapkan pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. Pengungkapan pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di desa wisata menjadi penting, mengingat ciri khas desa wisata adalah dilibatkannya secara langsung masyarakat pada berbagai bidang kegiatan sehingga masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pengembangan pariwisata di desa wisata.

Namun kenyataannya, pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih berjalan jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat desa setempat, yakni masyarakat setempat tidak dilibatkan secara langsung dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, dominasi desa dinas dalam pengelolaan desa wisata, terhegemoninya partisipasi masyarakat, timbulnya konflik kepentingan di antara *stakeholders*, diabaikannya *Bhisama* tentang Kesucian Pura, adanya komodifikasi, serta pelecehan terhadap *Trihita Karana*.

Berkenaan dengan hal itu, pengkajian terhadap pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih menjadi menarik untuk dikaji. Dengan paradigma kajian budaya, fenomena Desa Wisata Jatiluwih tersebut dikaji dengan fokus pembahasan diarahkan pada (1) pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan; (2) keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan; dan (3) dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan.

Penelitian kualitatif dengan paradigma kajian budaya ini dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis, memberikan kontribusi analisis bagi khazanah pengembangan keilmuan, khususnya kajian budaya. Manfaat itu tampak, yakni untuk memahami suatu fenomena pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. Dengan mempergunakan teori-teori kritis, pengembangan produk wisata yang dilakukan oleh negara maju di negara berkembang berusaha untuk dipahami sehingga lebih memberikan pemahaman terhadap hegemoni dan relasi kuasa/pengetahuan pada Desa Wisata Jatiluwih. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan langsung kepada pariwisata Bali pada umumnya dan pariwisata Kabupaten Tabanan pada khususnya, serta bagi pengambil keputusan, pemerhati kebijakan, dan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat pada produk wisata yang berupa desa wisata. Pihak-pihak yang terlibat diharapkan secara konsisten melibatkan masyarakat setempat sesuai kemampuan yang dimiliki pada kegiatan pengembangan pariwisata sehingga masyarakat merasa ikut memiliki dan tidak terpinggirkan dalam pengembangan pariwisata di daerahnya.

Sebagai sebuah kajian budaya, maka untuk membahas permasalahan penelitian ini, dipergunakan teori-teori secara eklektik. Teori-teori yang dipergunakan adalah (1) teori Hegemoni, teori ini dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, terutama posisi hubungan antara Desa Dinas Jatiluwih sebagai representasi pemerintah dengan masyarakat serta hubungan antara masyarakat dengan pengusaha pariwisata, yang merupakan permasalahan kedua dalam penelitian ini. (2) Teori Komodifikasi, teori ini dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis komodifikasi yang terjadi pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih dan komodifikasi yang terjadi pada keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, yang merupakan permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian ini. (3) Teori Dekonstruksi, teori ini dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih,

yang merupakan permasalahan ketiga dalam penelitian ini. (4) Teori Diskursus Kekuasaan/Pengetahuan, teori ini dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih serta keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, yang merupakan permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian ini. (5) Teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat, teori ini dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih (yakni pada tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasional, tahap pengembangan, dan tahap pengawasan), serta dampak pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, yang merupakan permasalahan pertama, kedua, dan ketiga dalam penelitian ini.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, yakni dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial terkait dengan pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih.

Sumber data yang dipergunakan berupa Surat Keputusan Bupati Tabanan dan Surat Keputusan Gubernur Bali terkait dengan Desa Wisata serta sumber data primer. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang pariwisata, khususnya terkait dengan Desa Wisata Jatiluwih. Dalam hal ini agar mendapat kajian yang cermat, detail, kritis, dan mendalam, sumber data primer menjadi pijakan utama, didukung sumber data sekunder berupa dokumen, statistik, artikel, dan peta. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan deskriptif kualitatif dan interpretatif, yakni dengan tahapan (1) mendeskripsikan fenomena pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih; (2) melakukan verifikasi data pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, yaitu untuk mengetahui data yang dianalisis dan memaknai setiap bagian dari data; dan (3) merumuskan temuan lapangan secara komprehensif yang menjadi fokus tempat menyatunya hasil temuan

lapangan yang lain dengan mengadakan komparasi atau mencari hubungan antar kelompok yang bermanfaat. Selanjutnya dengan teori-teori yang relevan dilakukan interpretasi, sehingga diperoleh pemahaman baru terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian disertasi ini.

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih menimbulkan komodifikasi pada bangunan tradisional *saka roras*, semakin meningkatnya penjualan tanah di sekitar pura dan di hutan sebelah utara Pura Luhur Petali. Penjualan tanah tersebut terus berlanjut seiring pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. Penjualan tanah di sekitar pura terkait dengan sosio-religius, kultural, serta ekonomi masyarakat setempat, selanjutnya dari sisi *Bhisama* Kesucian Pura, yakni merupakan pelecehan terhadap matra *parhyangan*, matra *pawongan*, matra *palemahan*, adat, dan agama. Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih juga menimbulkan komodifikasi (*commodification*) pada bangunan tradisional *saka roras* sebagai akibat konflik kepentingan di antara *stakeholders*, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha pariwisata. Selanjutnya, dalam masyarakat, akibat konflik yang timbul, terjadi perpecahan sehingga masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih yang berwujud partisipasi, yakni dilihat pada lima tahap. *Pertama*, tahap persiapan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini, yakni mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk menyongsong kehadiran pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. *Kedua*, tahap perencanaan. Tahap ini terdiri atas identifikasi kebutuhan dan analisis kemampuan. Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat fungsional, artinya masyarakat setempat berpartisipasi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh tenaga ahli yang berasal dari luar desa setempat, termasuk yang diberi kepercayaan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. *Ketiga*, tahap operasional. Tahap ini terdiri atas partisipasi berbentuk fisik dan partisipasi berbentuk nonfisik. Pada partisipasi berbentuk fisik (*physical participation*), partisipasi masyarakat

setempat dilakukan dengan dua hal. (a) Mobilitas sendiri (*self mobilisation*), artinya masyarakat dengan penuh kesadaran membangun fasilitas fisik untuk menunjang pengembangan pariwisata di desanya. Wujudnya berupa pembangunan pos retribusi di *Dusun Kesambi* dan *Dusun Gunungsari* Desa, pembangunan *Cafe Jatiluwih*, dan salah seorang warga desa setempat mendirikan akomodasi berupa *Inn*. (b) Partisipasi untuk bahan insentif (*participation for material incentives*), artinya partisipasi dari masyarakat setempat dengan menyediakan sumber-sumber seperti bangunan tradisional (*saka roras*) yang mengalami komodifikasi menjadi "rumah contoh". Selanjutnya pada partisipasi berbentuk nonfisik (*nonphysical participation*), partisipasi masyarakat dilakukan dengan (a) mobilitas sendiri (*self mobilisation*), artinya masyarakat dengan penuh kesadaran mempelajari bahasa asing tertentu dalam kaitan pengembangan pariwisata di wilayah desa mereka, di samping mempelajari kesenian berupa gamelan dan tari-tarian, (b) partisipasi interaktif (*interactive participation*), yakni berupa pengiriman lima orang pemuda setempat untuk belajar perhotelan dan pariwisata pada lembaga pendidikan formal. *Keempat*, tahap pengembangan. Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat spontan (*spontaneous participation*), seperti mendirikan dan mengelola usaha-usaha yang terkait dengan kepariwisataan, yakni pengelolaan usaha penginapan, usaha cuci pakaian, usaha kerajinan perak, usaha warung makanan dan minuman, dan usaha yang menjual kebutuhan sehari-hari. *Kelima*, tahap pengawasan. Pada tahap ini, partisipasi masyarakat lebih kepada pengawasan yang bersifat praktis dan preventif, yakni untuk mencegah agar desanya sebagai daya tarik wisata tidak tercemar oleh tindakan-tindakan negatif. Secara umum partisipasi masyarakat pada tahap ini bersifat manipulatif (*manipulative participation*). Partisipasi yang bersifat manipulatif dari masyarakat terjadi karena di samping program-program yang dibuat untuk mendukung pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih tidak sepenuhnya berjalan. Oleh karena masyarakat setempat tidak memiliki kekuasaan (*power*) untuk mengatur dan mengawasi sendiri pengembangan desanya sebagai desa wisata.

Dengan demikian, penguatan dan revitalisasi desa dari pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih tidak dapat berjalan.

Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih berdampak terhadap pengelolaan desa wisata, pengambilan gambar oleh wisatawan, penyerapan pekerja dari masyarakat setempat, pelecehan *Trihita Karana* (*parhyangan, pawongan, serta palemahan*). Selanjutnya makna yang timbul adalah makna kesejahteraan, makna pelestarian, dan makna pemberdayaan. *Pertama*, makna kesejahteraan, yakni merupakan manifestasi dari konsep kesejahteraan menurut agama Hindu, yaitu *moksartham jagadhita*. Konsep ini dibingkai oleh *Caturpurusa Artha* (*dharma, artha, kama, dan moksa*) serta Upacara *Pancayadnya* untuk keharmonisan implementasi *Trihita Karana* bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat. Dengan mengedepankan makna keharmonisan dari *Trihita Karana*, upacara-upacara keagamaan tidak dikemas sebagai "daya tarik wisata", dengan tetap mempergunakan simbol yang ekspresif, di samping mengungkapkan makna yang multidimensional sesuai tempat, waktu, dan kondisi masyarakat setempat. *Kedua*, makna pelestarian, yaitu merupakan makna disharmonisasi pada budaya dan ekologi karena alih fungsi tanah hutan untuk kebutuhan akomodasi yang berada pada radius kesucian pura. Untuk mencapai keberlanjutan budaya, sosial, dan ekologi, maka makna keberagaman perlu dipertimbangkan dalam keterlibatan masyarakat pada pengembangan pariwisata di desa wisata. *Ketiga*, makna pemberdayaan, dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di desa wisata sudah mengungkapkan kesadaran kolektif, pendekatan dialogis, keterbukaan, saling mengasihi, dan saling menolong untuk melahirkan rasa kebersamaan, kolektivitas, serta solidaritas. Namun, aspek yang terkait pemberdayaan di atas hanya terjadi pada segelintir masyarakat setempat, sehingga ideologi pengembangan pariwisata yaitu kesejahteraan masyarakat setempat belum sepenuhnya terjadi.

Adapun temuan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Masyarakat Desa Wisata Jatiluwih belum siap menerima pengembangan pariwisata. (2) Terjadi hegemoni pada pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa

Wisata Jatiluwih. (3) Terjadi fenomena ekonomi pasar pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih menimbulkan komodifikasi dan konflik kepentingan. (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih berupa partisipasi pada tahap persiapan, perencanaan, operasional, pengembangan, dan pengawasan. (3) Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Wisata Jatiluwih berdampak terhadap pengelolaan desa wisata, pengambilan gambar oleh wisatawan, penyerapan pekerja dari masyarakat desa setempat, pelecahan *Trihita Karana* (*parhyangan, pawongan, dan palemahan*). Selanjutnya makna yang timbul dari pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih adalah makna kesejahteraan, makna pelestarian, dan makna pemberdayaan.

Beberapa hal yang disarankan adalah (1) dengan semakin membaiknya hubungan di antara *stakeholders* (masyarakat, pemerintah, dan pengusaha pariwisata), semua pihak hendaknya dapat menjaga keselarasan hubungan antara ketiga *stakeholders*; (2) pada pengembangan produk apa pun di bidang pariwisata, terlebih-lebih yang mempergunakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dengan cara apa pun masyarakat setempat (tempat produk pariwisata dikembangkan) harus dilibatkan; (3) masyarakat setempat harus diberdayakan, yakni dengan bentuk-bentuk pemberdayaan, seperti: pola swadaya, pola kemitraan dan pola pendampingan; (4) pemerintah perlu melakukan tindakan nyata dan positif yang langsung menyentuh masyarakat, yakni untuk memperbaiki trauma hubungan antara masyarakat dengan pemerintah pada masa lalu; dan (5) untuk mencapai kelebihbaikan, dalam konteks Bali, perlu berpegang pada pengetahuan lokal yang mengglobal serta keselarasan *Trihita Karana*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xiii
RINGKASAN .....	xv
DAFTAR ISI .....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxviii
DAFTAR GAMBAR .....	xxx
GLOSARIUM .....	xxxii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM .....	xli
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	17
1.3.1 Tujuan Umum .....	17
1.3.2 Tujuan Khusus .....	18

1.4 Manfaat Penelitian .....	18
1.4.1 Manfaat Teoretis .....	18
1.4.2 Manfaat Praktis .....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
2.1 Kajian Pustaka .....	20
2.2 Konsep .....	28
2.2.1 Pengembangan Pariwisata .....	28
2.2.2 Keterlibatan Masyarakat .....	31
2.2.3 Desa Wisata .....	34
2.2.4 Jatiluwih .....	38
2.3 Landasan Teori .....	42
2.3.1 Teori Hegemoni .....	43
2.3.2 Teori Komodifikasi .....	46
2.3.3 Teori Dekonstruksi .....	49
2.3.4 Teori Diskursus Kekuasaan/Pengetahuan .....	52
2.3.5 Teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat .....	54
2.4 Model Penelitian .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	61
3.2 Lokasi Penelitian .....	63

3.3 Jenis dan Sumber Data .....	65
3.4 Penentuan Informan .....	65
3.5 Instrumen Penelitian .....	66
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	67
3.6.1 Observasi .....	67
3.6.2 Wawancara .....	68
3.6.3 Studi Dokumen .....	69
3.7 Teknik Analisis Data .....	70
3.8 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data .....	72
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DESA JATILUWIH DAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TABANAN .....</b>	<b>73</b>
4.1 Gambaran Umum Desa Jatiluwih.....	73
4.1.1 Lokasi dan Geografi .....	73
4.1.2 Sejarah .....	79
4.1.3 Demografi .....	80
4.1.4 Sosial-ekonomi dan Pertanian .....	84
4.1.5 Agama dan Sosial-budaya .....	89
4.2 Awal Masuknya Pariwisata di Desa Jatiluwih .....	113
4.3 Gambaran Umum Kepariwisata Kabupaten Tabanan .....	114
4.3.1 Daya Tarik Wisata .....	116
4.3.2 Sarana Kepariwisata .....	119

4.3.3 Kunjungan Wisatawan .....	124
<b>BAB V PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA JATILUWIH .....</b>	<b>129</b>
5.1 Desa Jatiluwih Dalam Pengembangan Pariwisata .....	129
5.1.1 Sebelum Pengembangan Desa Wisata .....	129
5.1.2 Pengembangan Desa Wisata .....	143
5.2 Wacana Desa Wisata Terpadu Jatiluwih .....	168
5.3 Komodifikasi di Desa Wisata Jatiluwih.....	170
5.4 Konflik Kepentingan pada Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.....	199
<b>BAB VI KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA JATILUWIH .....</b>	<b>223</b>
6.1 Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih .....	227
6.1.1 Tahap Persiapan .....	230
6.1.2 Tahap Perencanaan .....	237
6.1.3 Tahap Operasional .....	240
6.1.4 Tahap Pengembangan .....	259
6.1.5 Tahap Pengawasan .....	263
6.2 Hegemoni Pemerintah terhadap Keterlibatan Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih .....	266
6.3 Kontra-hegemoni Masyarakat terhadap Hegemoni Pemerintah .....	272

6.3.1 Ideologi dan Objektif Gerakan Perlawanan Masyarakat .....	272
6.3.2 Hasil Kontra-hegemoni Masyarakat terhadap Hegemoni Pemerintah.....	287
<b>BAB VII DAMPAK DAN MAKNA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DI DESA WISATA JATILUWIH .....</b>	<b>300</b>
7.1 Dampak Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat.....	300
7.1.1 Pengelolaan Desa Wisata .....	301
7.1.2 Pengambilan Gambar oleh Wisatawan .....	307
7.1.3 Penyerapan Pekerja dari Masyarakat Setempat .....	309
7.1.4 Pelecehan <i>Trihita Karana (Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan)</i> ..	312
7.2 Makna Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat.....	331
7.2.1 Makna Kesejahteraan .....	333
7.2.2 Makna Pelestarian .....	341
7.2.3 Makna Pemberdayaan .....	354
7.3 Temuan Penelitian .....	359
7.4 Refleksi .....	360
<b>BAB VIII SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>363</b>
8.1 Simpulan .....	363
8.2 Saran .....	365
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>369</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>389</b>

Lampiran 1 Indeks Nama .....	389
Lampiran 2 Indeks Subjek .....	393
Lampiran 3 Daftar Informan .....	395
Lampiran 4 Pedoman Wawancara .....	397
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian .....	399
Lampiran 6 SK Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Nomor: 206/H.14.4/HK/2008 tentang Susunan Tim Promotor dan Kopromotor .....	404
Lampiran 7 SK Rektor Universitas Udayana Nomor: 912/H.14.4/HK/2009 Tentang Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) .....	407
Lampiran 8 Artikel di <i>Bali Post</i> terkait Desa Wisata Jatiluwih .....	410

## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
Tabel 1.1	Beberapa Isu pada Efektivitas Pendekatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pariwisata .....	4
Tabel 2.1	Penelusuran terhadap Penelitian Sebelumnya .....	22
Tabel 2.2	Kondisi Meso Desa Wisata Jatiluwih .....	41
Tabel 3.1	Hubungan antara Data, Kategori, dan Teori .....	72
Tabel 4.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan di Kecamatan Penebel Tahun 2006.....	76
Tabel 4.2	Penduduk Desa Jatiluwih menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006 .....	81
Tabel 4.3	Penduduk Desa Jatiluwih menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2005 .....	82
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Utama Penduduk Desa Jatiluwih Tahun 2006	85
Tabel 4.5	Luas Tanam dan Produksi Tanaman di Desa Jatiluwih Tahun 2006 .....	87
Tabel 4.6	<i>Bendesa Adat</i> Desa Jatiluwih sampai Tahun 2008 .....	97
Tabel 4.7	Nama-Nama Kepala Desa Jatiluwih sampai Tahun 2008 .....	99
Tabel 4.8	<i>Subak</i> Sawah dan <i>Subak Abian</i> di Desa Jatiluwih .....	106
Tabel 4.9	Potensi Kesenian di Desa Jatiluwih Tahun 2008 .....	112
Tabel 4.10	Daya Tarik Wisata, Alamat, dan Nama Pengelola .....	118
Tabel 4.11	Sarana Pokok Berupa Akomodasi di Kabupaten Tabanan sampai Juni 2008 .....	121
Tabel 4.12	Jumlah Wisatawan ke Kabupaten Tabanan Tahun 1998—2007..	126

Tabel 4.13	Jumlah Wisatawan ke Kabupaten Tabanan menurut Daya Tarik Wisata yang Dikunjungi Tahun 2003–2007.....	128
Tabel 5.1	Perbandingan Nilai Estetis Terasering Sawah Desa Jatiluwih Sebelum dan Sesudah sebagai Daya Tarik Wisata .....	151
Tabel 5.2	Sarana Pokok Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih sampai Tahun 2008 .....	157
Tabel 5.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Desa Wisata Jatiluwih selama Sepuluh Tahun (1998–2007) .....	166
Tabel 5.4	Daya Tarik Wisata di Kecamatan Penebel menurut Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998, Nomor 33 Tahun 2004, dan Nomor 266 Tahun 2007 .....	175
Tabel 5.5	Urutan/ <i>Ranking</i> Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih Tahun 1998–2007.....	176
Tabel 5.6	Jumlah Masyarakat yang Bekerja Secara Langsung pada Usaha Sarana Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Tahun 2008 .....	186
Tabel 5.7	Analisis Keterlibatan Masyarakat pada Usaha Sarana Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih .....	188
Tabel 5.8	Distribusi Pembagian <i>Entrance Fee</i> Desa Wisata Jatiluwih.....	196
Tabel 5.9	Konflik Kepentingan yang Menyebabkan Terjadinya Hegemoni Pemerintah dan Perlawanan Masyarakat dalam Pembangunan ”Vila Petali” .....	208
Tabel 6.1	Sosialisasi di Desa Jatiluwih .....	232
Tabel 6.2	Besarnya Sumbangan Retribusi Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2003–2007 .....	243
Tabel 6.3	Sikap Elite terhadap Pengembangan Sarana Pokok di Desa Wisata Jatiluwih .....	277
Tabel 6.4	Bentuk, Teknik/Cara, dan Hasil Kontra-hegemoni Masyarakat terhadap Hegemoni Pemerintah .....	291

## DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
Gambar 2.1	Konsep dan Arti Penting Pembangunan Pariwisata Berbasis Kerakyatan .....	56
Gambar 2.2	Model Penelitian Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan.....	58
Gambar 4.1	Peta Desa Jatiluwih .....	78
Gambar 4.2	Struktur Organisasi <i>Desa Adat</i> Jatiluwih .....	96
Gambar 4.3	Struktur Pemerintahan Desa Jatiluwih .....	98
Gambar 5.1	Kedudukan Pura Luhur Petali terhadap Pura-Pura Lainnya di Desa Jatiluwih .....	132
Gambar 5.2	Pura Luhur Petali di Desa Jatiluwih .....	134
Gambar 5.3	Skematis Letak "Vila Petali" terhadap Pura Bujangga dan Pura Luhur Petali .....	136
Gambar 5.4	Pemandangan Terasering Sawah di Desa Wisata Jatiluwih sebagai Daya Tarik Utama Pariwisata .....	148
Gambar 5.5	Aktivitas Segelintir Masyarakat Petani yang Membakar Jerami sebelum Sawah Diolah untuk Penanaman Padi Bali di Desa Wisata Jatiluwih .....	163
Gambar 5.6	Suasana Rapat Membahas RPJM Desa Jatiluwih Tahun 2008	180
Gambar 5.7	Struktur Organisasi <i>Steering Committee</i> Desa Wisata Jatiluwih .....	193
Gambar 5.8	Pihak-Pihak yang Berkonflik Terkait Pembangunan "Vila Petali" .....	204
Gambar 5.9	Hutan Lokasi "Vila Petali" di Desa Wisata Jatiluwih.....	212

Gambar 5.10 "Vila Petali" (Tampak Samping) .....	218
Gambar 6.1 Kondisi Terakhir Bangunan "rumah contoh" <i>Saka Roras</i> yang Sudah Dipugar .....	256

## GLOSARIUM

- ajeg* : langgeng, abadi, dikaitkan dengan Bali yang *ajeg*, berarti Bali yang lestari, tidak berubah, tidak terpengaruh oleh berbagai dinamika
- angkul-angkul* : pintu masuk ke sebuah rumah yang terbelah menjadi dua secara simetris dan memakai atap
- apit lawang/candi bentar* : gapura Bali berbentuk bangunan candi yang terbelah menjadi dua secara simetris tanpa atap
- artefak : benda apa saja yang dihasilkan kecerdasan manusia, benda tersebut menjadi saksi sejarah peradaban manusia
- awig-awig* : hukum adat yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan desa di Bali
- bale* : tempat berkumpul warga dari satu pekarangan, terdiri atas *bale daja*, *bale dangin* dan *bale dauh*
- balih-balihan* : salah satu bagian dari konsep pembagian tiga seni tari pertunjukan Bali yang merupakan seni hiburan
- banjar* : sistem organisasi sosial kemasyarakatan di Bali, terdiri atas *banjar adat* dan *banjar dinas*
- barung* : beberapa kelompok penabuh gamelan secara bersama-sama di satu tempat memainkan gamelan
- bati* : keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha, setelah hasil penjualan seluruhnya dikurangi modal
- batu-batu* : persentase pembagian upah dari pementasan *sekaa gong*, besarnya merupakan kesepakatan antara desa adat dengan *sekaa gong*
- bedugul* : bangunan pemujaan bagi seluruh anggota *subak*, terletak di tengah-tengah areal sawah
- bendesa* : pemimpin *desa adat*, yang bertanggung jawab atas terse-

<i>buah</i>	: lenggaranya berbagai aktivitas terkait adat di suatu desa : buah dari pohon pinang yang dipergunakan untuk <i>mabase</i> bagi orang-orang tua, terdiri atas <i>gambir</i> , <i>buah</i> , kapur, dan sirih
<i>bhisama</i>	: fatwa keagamaan dari agama Hindu yang dikeluarkan untuk melindungi adat, budaya dan agama
<i>braye</i>	: tetangga atau saudara di luar keluarga batih, yang terikat dalam hubungan sosial kemasyarakatan
<i>carik</i>	: sawah, yang dapat terdiri atas sawah dengan irigasi teknis atau sawah tadah hujan
<i>desa adat</i>	: sering pula disebut desa <i>pekraman</i> , merupakan sistem sosial tradisional Bali yang ditandai dengan kepemilikan <i>kahyanan tiga</i> (tiga pura utama)
<i>dusun</i>	: sama dengan <i>banjar</i> , yang merupakan unit terkecil dari sebuah desa
<i>empelan</i>	: bendungan tradisional yang dipergunakan untuk mengatur air oleh <i>subak</i>
<i>gamelan</i>	: perangkat alat musik Bali yang dibentuk oleh sekumpulan alat-alat perkusi
<i>Ida Sang Hyang Widhi</i>	: sebutan Tuhan yang digunakan oleh umat Hindu Bali
<i>ilang</i>	: artinya hilang, salah satunya dipergunakan pada peribahasa Bali, yaitu <i>ngalih sampi galang bulan</i> , <i>ngalih bati ilang kemulan</i>
<i>inih</i>	: hemat, tindakan menghemat sesuatu untuk bekal di kemudian hari agar tidak susah
<i>istri</i>	: sebutan perempuan, merupakan pasangan dari <i>lanang</i> atau laki-laki
<i>jalan jaran</i>	: jalan yang lebarnya tidak melebihi lebar kuda ditambah lebar satu orang manusia

<i>jineng</i>	: lumbung tempat menyimpan padi setelah panen di sawah, dapat berupa padi yang masih ada batangnya atau berupa <i>jijih</i> (padi yang sudah dirontokkan)
<i>jukung</i>	: perahu tradisional yang dilengkapi katir dan layar, ada yang bermesin dan ada yang bergerak mengandalkan <i>dayung</i> atau kayuhan
<i>juruh/saya</i>	: petugas pengirim pesan atau informasi kepada <i>krama banjar</i> , <i>dadia</i> , atau anggota <i>subak</i>
<i>kaja</i>	: arah ke utara, yang juga terdiri atas penjuru yang lain seperti <i>kelod</i> (selatan), <i>kangin</i> (timur), dan <i>kauh</i> (barat), menunjuk tempat yang tinggi atau gunung sebagai tempat yang suci, dipandang sebagai arah <i>ulu</i> (kepala)
<i>karang</i>	: pekarangan
<i>kasinoman</i>	: petugas pengawas saluran air yang terdapat pada organisasi pengairan seperti <i>subak</i>
<i>kelod</i>	: arah ke selatan, menunjuk ke arah lebih rendah, juga berorientasi sebagai arah hilir atau <i>teben</i>
<i>kemulan</i>	: <i>rong tiga</i> pada <i>sanggah/merajan</i> , pada ungkapan <i>ngalih sampi galang bulan</i> , <i>ngalih bati ilang kemulan</i> , <i>kemulan</i> berarti modal awal
kepentingan	: apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan satu pihak yang membedakan dengan pihak lain
<i>kesungkemin</i>	: kepatuhan terhadap suatu aturan yang dibuat secara bersama-sama oleh <i>krama</i> agar mencapai tujuan yang baik
<i>kidang</i>	: kijang, merupakan binatang yang disucikan dan hidup di hutan atau <i>alas</i> , diburu untuk kepentingan upacara-upacara yang tergolong besar
<i>koh/ngekoh</i>	: malas atau enggan, biasanya dikaitkan dengan malas berbicara yang dalam bahasa Bali disebut <i>ngekoh ngomong</i>
konflik	: sama dengan sengketa, terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan

konsensus	: mufakat, suatu keputusan yang dihasilkan dengan suara bulat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan
<i>krama</i>	: anggota masyarakat dari suatu desa di Bali, yang terikat dengan aturan <i>desa adat</i> atau <i>desa dinas</i>
<i>kramak-krimik</i>	: berbisik-bisik, berbicara dengan lawan bicara yang nyaris tidak terdengar oleh orang lain
<i>leteh</i>	: suatu kondisi yang digolongkan kotor secara <i>niskala</i> (alam yang tidak nyata)
libido	: nafsu dari kapitalis untuk menguasai sumber daya secara keseluruhan yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi
<i>males</i>	: malas untuk melakukan sesuatu, yang didahului oleh adanya budaya <i>ngekoh</i> sehingga terjadi <i>ngekoh tur males</i>
<i>matemahan</i>	: berubah menjadi baik atau menjadi buruk, pada <i>merta matemahan wisia</i> berarti rezeki berubah menjadi petaka
<i>mebebasenan</i>	: seni membaca pustaka suci dalam bentuk nyanyian diikuti dengan penerjemahan arti
<i>meboros</i>	: berburu ke tengah hutan, mencari binatang yang diperlukan untuk upacara atau untuk keperluan konsumsi
<i>mekakidung</i>	: seni menyanyikan lagu-lagu <i>sekar madya</i> untuk mengiringi upacara yang memerlukan kelengkapan <i>Pancagita</i> (lima suara, yaitu suara mantra, suara genta, suara <i>kakidung</i> , suara gamelan dan suara kentungan dari <i>lesung</i> atau <i>kulkul</i> )
<i>makelar</i>	: orang yang menjadi perantara dari suatu transaksi (barang atau jasa) dan mereka ini sering disebut calo
<i>mantenin</i>	: mempersembahkan <i>sesajen</i> kepada <i>Betara Sri</i> sebagai manifestasi Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan) yang telah memberikan keberhasilan dari menanam hingga panen padi
<i>mendag/magpag</i>	: aktivitas <i>krama banjar/desa</i> untuk menjemput segala sesuatu yang terkait dengan upacara, dengan terlebih dahulu mengikuti ritual tertentu

<i>metandur</i>	: aktivitas menanam padi atau tanaman lainnya yang dilakukan oleh petani di sawah
<i>meten</i>	: areal dalam rumah yang berfungsi sebagai tempat istirahat seluruh anggota keluarga
<i>menyame</i>	: bersaudara atau <i>mesemeton</i> , bisa merupakan saudara kandung atau bukan saudara kandung, tetapi masih ada hubungan keluarga
<i>natah</i>	: halaman suatu rumah, merupakan areal suatu pekarangan yang tidak berisi bangunan
<i>napet</i>	: sudah ada dan tidak diketahui awal keberadaannya serta merupakan warisan dari pendahulunya
<i>nawasanga</i>	: sembilan penjuru mata angin
<i>newasain/nuasen</i>	: awal memulai pekerjaan pada hari baik yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan Bali
<i>niskala</i>	: dunia atau alam tidak nyata, yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kepercayaan seseorang
<i>nungkasin</i>	: juga disamakan dengan <i>metungkas</i> (berbeda pendapat), sebagai suatu tindakan yang selalu menonjolkan pendapat yang berbeda
<i>ngalih</i>	: mencari sesuatu, apakah sesuatu yang dicari itu sudah pernah dimiliki atau pun belum pernah dimiliki
<i>ngaturang</i>	: mempersembahkan sesuatu sebagai wujud bakti kepada <i>Ida Sang Hyang Widhi</i> (Tuhan) atau kepada orang yang dihormati
<i>ngayah</i>	: melaksanakan suatu pengabdian suci kepada kepentingan masyarakat atau tugas pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sering pula disebut dengan istilah <i>ngaturang ayah</i>
<i>ngembak nyepi</i>	: sehari setelah Nyepi
<i>ngetohin</i>	: dukungan orang tua kepada anak, dengan mengorbankan segala sesuatu untuk keberhasilan anak

- ngusaba* : kegiatan ritual yang terkait dengan aktivitas pertanian, dilaksanakan oleh subak di *pura bedugul*, merupakan perwujudan rasa syukur dari hasil yang telah dicapai
- nyakap* : menggarap sawah yang bukan milik sendiri, dengan memperoleh bagian sesuai kesepakatan antara pemilik sawah dengan orang yang mengontrak (*penyakap*)
- nyeraki* : barang yang dijual sangat bervariasi dengan jumlah atau kuantitas setiap produk sedikit-sedikit
- nyejer* : istilah yang dipakai untuk menyebut suatu pelaksanaan upacara ritual yang berlangsung beberapa hari sesuai aturan adat yang berlaku sehingga benda-benda suci yang berada di tempat (*pura*) selama waktu yang ditentukan
- paon* : bangunan yang difungsikan sebagai tempat memasak, lokasinya ada yang menyatu dengan rumah dan ada juga yang terpisah dengan rumah
- parhyangan* : hubungan antara manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi* (Tuhan) yang merupakan bagian dari *Trihita Karana*
- pawukon* : sistem perhitungan waktu yang lamanya tujuh hari; ada 30 minggu atau 210 hari (enam bulan Bali), yaitu *Sinta, Landep, Ukir, Kulantir, Tulu, Gumbreg, Wariga, Warigadian, Julungwangi, Sungsang, Dunggulan, Kuningan, Langkir, Medangsia, Pujut, Pahang, Krulut, Merakih, Ttambir, Medangkungan, Matal, Uye, Menail, Perangbakat, Bala, Ugu, Wayang, Kelawu, Dukut, Watugunung*.
- pecalang* : petugas yang berfungsi membantu aparat keamanan dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran suatu aktivitas dalam sebuah *desa adat* atau *desa pakraman*.
- pekaseh* : pimpinan organisasi pengairan tradisional di Bali, memimpin *subak abian* dan subak sawah
- pemangku* : sebutan bagi seorang rohaniwan Hindu yang bertugas, baik memimpin dan memangku suatu *pura* maupun upacara di sebuah *pura* yang menjadi kewajibannya

- pemedek* : masyarakat yang datang *pedek tangkil* sembahyang ke suatu pura, pada waktu hari raya atau *piodalan*
- pengemong* : anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga, menunggu, memelihara, dan melaksanakan keberlangsungan upacara yadnya, sering juga disebut *pengempon* pura
- penglingsir* : tokoh atau para tetua yang sangat dihormati dan disegani dalam tatanan kehidupan budaya di lingkungan masyarakat Bali
- penyarikan* : warga masyarakat yang bertanggung jawab untuk memelihara tata cara ritual dan menjaga kelangsungan bangunan suci.
- penyenger* : tembok keliling, berfungsi sebagai batas dan melindungi bangunan rumah atau bangunan suci dari hal-hal yang *leteh* secara *niskala*
- perbekel* : sebutan untuk seorang kepala desa di Bali yang secara administratif belum berstatus sebagai kelurahan atau disebut *mekel*
- pianak* : sebutan untuk seorang anak, bisa terdiri atas *pianak luh* (anak perempuan) dan *pianak muani* (anak laki-laki)
- pula pali* : langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang wajib diikuti dan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang baik
- purusa* : suatu istilah untuk menyebut simbol yang mengandung makna pria atau laki-laki sebagai suatu pasangan seimbang dari unsur *pradana* (perempuan atau wanita)
- pura kahyangan tiga* : tiga pura utama yang ada di setiap desa (*pura desa*, *pura puseh*, dan *pura dalem*) yang dimiliki oleh setiap desa di Bali
- sakanem* : bangunan atau *bale* tradisional Bali yang memiliki tiang sebanyak enam, ada juga *bale sake kutus* (bertiang delapan) dan *bale saka roras* (bertiang dua belas)
- saka roras* : *saka* berarti 'tiang', *roras* berarti 'dua belas', sebuah bangunan tradisional Bali yang memiliki tiang dua belas

<i>sangkep</i>	: rapat yang diselenggarakan oleh <i>krama banjar</i> atau <i>krama desa adat</i> untuk membahas sebuah permasalahan
<i>sasih</i>	: bulan pada penanggalan Bali yang terdiri atas 12 yaitu <i>Kasa, Karo, Ketiga, Kapat, Kelima, Kenam, Kepitu, Kawulu, Kesanga, Kedasa, Jiyestha, Sadha</i>
<i>sekaa</i>	: organisasi informal yang anggota-anggotanya terdiri atas orang yang memiliki profesi yang sama
<i>sekaa gong</i>	: perkumpulan memainkan gamelan gong, terdiri atas <i>sekaa gong lanang</i> dan <i>sekaa gong istri</i>
<i>sekaa manyi</i>	: perkumpulan memanen padi
<i>sekaa meboros</i>	: perkumpulan berburu binatang untuk upacara
<i>sekaa numbeg</i>	: perkumpulan mencangkul
<i>sekaa ngigel</i>	: perkumpulan menari
<i>sekaa pesantian</i>	: perkumpulan seni suara vokal dalam kerawitan Bali, yang menyanyikan lagu-lagu <i>Sekar Agung</i> dengan syair-syairnya berbahasa Jawa Kuna
<i>sekaa teruna</i>	: perkumpulan pemuda-pemudi di <i>desa adat</i> , dengan aktivitas yang bersifat sosial dan religius
<i>sekala</i>	: untuk menyebut dunia atau alam nyata, kebalikan dari <i>niskala</i> (alam tidak nyata)
<i>sesengakan</i>	: ungkapan dalam bahasa Bali yang mengandung ajaran-ajaran luhur, baik ajaran luhur yang harus dilaksanakan maupun ajaran luhur yang harus dihindari
<i>subak abian</i>	: bagian dari areal <i>subak</i> yang merupakan kelompok lahan kering seperti tegalan
<i>subak carik</i>	: bagian dari areal <i>subak</i> yang merupakan kelompok lahan basah terdiri atas sawah-sawah
<i>sukla</i>	: sesuatu yang belum terpakai, atau sesuatu yang masih bersih secara <i>sekala</i> atau secara <i>niskala</i>

- satu bulan bali* : jumlah hari yang berdasarkan penanggalan Bali yaitu satu bulan terdiri atas 35 hari
- tangsi/bui* : sebutan untuk penjara, yaitu tempat yang dipergunakan untuk menghukum seseorang yang dinyatakan bersalah secara hukum
- tat twam asi* : aku adalah kamu dan kamu adalah aku, adalah kearifan lokal Bali untuk menyatakan kesejajaran kedudukan sebagai makhluk Tuhan, yang berlaku untuk semua orang
- tegal* : bagian dari lahan subak yang berupa tegalan atau lahan kering
- tetabuhan* : alunan suara gamelan yang merupakan hasil kombinasi dari beberapa jenis gamelan (tiup, gesek, petik, dan pukul) dan mengisahkan lakon tertentu
- trihita karana* : konsep keseimbangan dan keharmonisan dalam budaya Bali yang menjadi sumber kebahagiaan hidup meliputi, keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*)
- trimandala* : konsep untuk pembagian ruang/wilayah yang terdiri atas tiga tingkatan yaitu *jeroan* (ruang dalam), *jaba tengah* (ruang tengah) dan *jaba sisi* (ruang paling luar)
- ulun carik/andungan* : sama dengan pengalapan, petak sawah yang paling atas
- utamaning madya* : tingkatan tengah-tengah yang tertinggi dalam sistem upacara di Bali, dari urutan tertinggi ke terendah, terdiri atas *utamaning utama*, *utamaning madya*, *utama*, *madyaning utama*, *madyaning madya*, *madya*, *nistaning utama*, *nistaning madya* dan *nista*
- wali* : salah satu bagian dari konsep seni pertunjukan tradisional Bali, yang mencakup *wali*, *bebali*, dan *balih-balihan* (upacara, serimonial, dan tontonan)

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga
BT	: Bujur Timur
BPD	: Badan Perwakilan Desa
BPLP	: Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPOW	: Badan Pengelola Objek Wisata
Depparpostel	: Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Diparda	: Dinas Pariwisata Daerah
Dispenda	: Dinas Pendapatan Daerah
DTW	: Daerah Tujuan Wisata
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
ha	: hektar
ICOMOS	: <i>International Council of Monument and Site</i>
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
km <sup>2</sup>	: kilometer persegi
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUD	: Koperasi Unit Desa
LPD	: Lembaga Perkreditan Desa
LS	: Lintang Selatan
MCK	: Mandi Cuci Kakus
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
DTWK	: Daya Tarik Wisata Khusus
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Perda	: Peraturan Daerah
PHDI	: Parisada Hindu Dharma Indonesia
PKK	: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RSTRP	: Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi
RUTR	: Rencana Umum Tata Ruang
SC	: <i>Steering Committee</i>
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas

SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SNPPTR	: Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang
TK	: Taman Kanak-kanak
Tripika	: Tiga Pimpinan Kecamatan
t.t.	: tanpa tahun
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
WBD	: Warisan Budaya Dunia
WSSD	: <i>World Summit on Sustainable Development</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengembangan pariwisata, termasuk produk wisata yang akan ditawarkan kepada wisatawan tidak bisa dilepaskan dari motivasi yang ada dalam diri wisatawan, baik motivasi untuk berlibur maupun motivasi ketertarikan kepada budaya. Motivasi ketertarikan terhadap budaya dapat dipenuhi dengan melaksanakan kegiatan pariwisata budaya (*cultural tourism*).

Pariwisata budaya sebagai wisata andalan dalam operasionalnya bertumpu pada budaya serta kehidupan masyarakat di lokasi pengembangan pariwisata. Hal ini berarti permintaan terhadap produk wisata oleh wisatawan terkait dengan kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, akan terjadi hubungan timbal balik antara kebudayaan dengan masyarakat setempat. Hubungan timbal balik tersebut harus saling menguntungkan, artinya pariwisata harus mampu meningkatkan kebudayaan dan sebaliknya dapat menumbuhkan kemajuan pariwisata. Hubungan antara pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional diharapkan menimbulkan akselerasi yang optimal dari kedua bidang tersebut sehingga dapat menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan, dan pemerataan pembangunan, seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata.

Dalam mengapresiasi budaya dan kehidupan masyarakat setempat, peranan Destinasi Pariwisata akan menjadi sangat penting, terutama dalam mengemas kehidupan masyarakat dan budaya lokal menjadi sebuah daya tarik wisatawan. Menurut Richie dan Zein (dalam Ardika, 2003) ada sepuluh elemen budaya yang menjadi daya tarik wisatawan, yakni (1) kerajinan, (2) tradisi, (3) sejarah dan suatu tempat/daerah, (4) arsitektur, (5) makanan lokal/tradisional, (6) seni musik, (7) cara hidup suatu masyarakat, (8) agama, (9) bahasa, dan (10) pakaian lokal/tradisional.

Dari sepuluh elemen budaya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan tersebut, seluruhnya terkait dengan budaya lokal. Oleh karena itu, budaya lokal seperti dimuat di *Bali Post* (18 September 2006) mutlak dikedepankan dan bahkan budaya lokal dapat menjadi "magnet" utama untuk menarik wisatawan mancanegara berwisata ke Indonesia. Adanya perbedaan ruang, waktu, cara, dan keadaan pengemasan sepuluh elemen budaya di atas akan dapat menimbulkan interpretasi lain dari produk wisata yang akan ditawarkan kepada wisatawan, baik produk wisata yang ditawarkan dalam bentuk terpisah maupun produk wisata yang berbentuk paket wisata (*package tour*).

Bali merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Utama di Indonesia yang memiliki berbagai aset wisata dan telah banyak menarik perhatian wisatawan. Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan (wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara), Pemerintah Daerah Bali bersama-sama masyarakat, di samping melakukan tindakan menjaga keamanan yang merupakan investasi bagi industri pariwisata (Bali Post, 22 April 2006), juga

meningkatkan Sadar Wisata masyarakat setempat dan melakukan penganekaragaman (diversifikasi) produk wisata.

Diversifikasi produk wisata yang dilakukan pada intinya mengacu pada potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh daerah Bali dengan mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai inti dalam pengembangan pariwisata. Dalam melakukan diversifikasi, produk wisata yang dihasilkan diharapkan tidak bertentangan dengan kebudayaan Bali serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk wisata sehingga dapat menarik kunjungan "wisatawan baru". Wisatawan baru oleh Mowforth dan Munt (1998:53) dimasukkan sebagai bagian dari *Postmodernisme* yang berbentuk *new tourism* yang banyak mendapat pengaruh dari *Postfordism*.

*Postmodernisme* sebagai 'misi hegemonisasi' dalam kaitan dengan analisis pariwisata di negara berkembang (negara Dunia Ketiga) memiliki ciri-ciri, yakni (1) munculnya agen-agen spesialis dalam penyelenggaraan perjalanan (paket liburan yang fleksibel dan individual), (2) meleburnya pariwisata dengan kegiatan-kegiatan lain, (3) tumbuhnya minat terhadap budaya, lingkungan, dan hal-hal lain seiring munculnya gerakan sosial baru (Mowforth dan Maunt, 2000:75).

Untuk menarik kunjungan "wisatawan baru" tersebut dan sejalan dengan perkembangan diskursus pembangunan kepariwisataan, selain dominasi diskursus tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan, yang tidak kalah populernya adalah diskursus tentang pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*). Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini merupakan sebuah pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang sangat berbeda dengan

pendekatan konvensional yang selama ini dijalankan, yaitu dengan sistem *top-down* dan sentralistik. Pendekatan pembangunan dengan sistem *top-down* dan sentralistik ini sangat kental terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak membatasi ide-ide yang ada di dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, ada beberapa isu yang berkembang terkait dengan efektivitas pendekatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata, seperti terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1  
Beberapa Isu pada Efektivitas Pendekatan Partisipasi Masyarakat  
dalam Perencanaan Pariwisata

Ruang Lingkup Isu	Isu-Isu yang Spesifik
Bidang partisipasi oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah jarak partisipasi dari masyarakat menunjukkan semua <i>stakeholders</i> yang relevan.</li> <li>2. Jumlah yang berpartisipasi di antara masyarakat <i>stakeholders</i> yang relevan.</li> </ol>
Intensitas partisipasi oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tingkatan mana semua masyarakat partisipan yang terlibat langsung menghargai dialog terbuka.</li> <li>2. Seberapa sering masyarakat <i>stakeholders</i> yang relevan terlibat.</li> <li>3. Pada tingkatan mana semua partisipan belajar antara satu dengan yang lain.</li> </ol>
Pada tingkat yang mana muncul konsensus antara masyarakat dan partisipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tingkatan mana dukungan masyarakat menunjukkan suatu konsensus tentang masalah dan kebijaksanaan.</li> <li>2. Pada tingkat mana tidak terjadi konsensus.</li> </ol>

Sumber: Richards and Derek Hall (2000:28)

Pada Tabel 1.1 ditunjukkan bahwa ruang lingkup isu keterlibatan masyarakat dalam suatu perencanaan pariwisata dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat meliputi tiga hal, yaitu bidang partisipasi, intensitas partisipasi, dan masalah

konsensus. Dalam *cultural studies*, masalah konsensus dibuat oleh para penguasa, tetapi konsensus tersebut dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan yang dikuasai. Oleh karena itu, hegemoni kelihatan mengekspresikan apa-apa yang menjadi keinginan yang dikuasai.

Ada sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh dalam pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat. Menurut Karyono (1997:95-99), keuntungan tersebut, seperti (1) makin luasnya kesempatan usaha, (2) makin luasnya lapangan kerja, (3) meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah, (4) mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah, (5) mendorong terpeliharanya lingkungan hidup, (6) terpeliharanya keamanan dan ketertiban, (7) mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pengembangan sektor lainnya, dan (8) memperluas wawasan Nusantara serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Dengan mengacu pada *Postmodernisme* dalam bidang pariwisata, isu efektivitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan pariwisata serta sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh dalam pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat, maka partisipasi serta pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) perlu dilakukan pada setiap tahapan dalam pengembangan pariwisata. Hal ini perlu dilakukan karena partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata akan dapat memacu inovasi serta daya kreativitas untuk menghasilkan produk wisata, mengambil peran sesuai keahlian masing-masing, serta pelestarian budaya.

Dalam kerangka *cultural studies*, pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat setempat sebagai intinya merupakan suatu reaksi terhadap kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh modernisasi Dunia Pertama terhadap Dunia Ketiga, serta merupakan koreksi terhadap penciptaan produk wisata dari pendekatan *Fordisme* (produk dibuat dalam jumlah besar dan homogen) menuju pada pendekatan *Postfordism* (produk yang dibuat dalam jumlah kecil dan variatif) serta untuk menarik kunjungan "wisatawan berkualitas". Menurut Hassal et al. (1992) ciri-ciri wisatawan berkualitas adalah (1) mempunyai daya beli yang tinggi sehingga pengeluaran per hari atau pun total juga tinggi, (2) mempunyai penghargaan terhadap kebudayaan lokal, dan (3) mempunyai kepedulian terhadap pelestarian lingkungan alam.

Dalam pengembangan pariwisata, keterlibatan masyarakat setempat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek. Menurut Ascherson (dalam Ardika, 2007:121) keterlibatan masyarakat setempat/lokal adalah karena masyarakat lokal memiliki hak asasi untuk menginterpretasikan, memelihara, dan mengelola sumber daya budaya yang mereka miliki.

Untuk menciptakan pengelolaan sumber daya di bidang pariwisata yang mampu melibatkan masyarakat setempat/lokal dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup, sumber daya dan kepuasan wisatawan guna keberlanjutan sistem sosial, budaya, dan ekonomi, maka pengembangan pariwisata di Bali tidak bisa dilepaskan dari kearifan lokal *Trihita Karana*. Dalam hal ini *Trihita Karana* merupakan tiga unsur keseimbangan hubungan, yakni terdiri atas *parhyangan*

(hubungan antara manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan manusia dengan manusia lainnya), dan *palemahan* (hubungan manusia dengan alam lingkungannya).

Pengelolaan sumber daya di bidang pariwisata dengan melibatkan masyarakat setempat memiliki sejumlah alasan. Menurut Korten (dalam Moeljarto, 1993:45), alasan yang mendasari adalah (1) variasi antardaerah (*local variety*), yakni setiap daerah tidak dapat diberikan perlakuan yang sama karena setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain sehingga sistem pengelolaannya akan berbeda, di samping masyarakat setempat sebagai pemilik daerah adalah pihak yang paling mengenal dan paling mengetahui situasi daerahnya; (2) adanya sumber daya lokal (*local resources*), yang secara tradisional dikuasai oleh masyarakat setempat, merekalah yang lebih mengetahui bagaimana cara mengelola sumber daya lokal tersebut, yang bersumber dari pengalaman generasi ke generasi; (3) tanggung jawab lokal (*local accountability*), dalam hal ini pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal biasanya lebih bertanggung jawab karena kegiatan tersebut secara langsung akan mempengaruhi hidup mereka.

Bali sebagai Destinasi Pariwisata Utama di Indonesia bahkan di dunia, telah menetapkan pengembangan pariwisata budaya seperti tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 1991. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 1991, Bab I, Pasal 1, Ayat j dinyatakan, "Pariwisata budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai potensi dasar yang dominan, yang di dalamnya tersirat satu cita-cita akan

adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras, dan seimbang”.

Sebagai potensi dasar yang dominan, potensi pokok kebudayaan Bali dapat diformulasikan dari aspek unsur, struktur, dan pengalaman sejarah, yaitu sebagai berikut (1) kebudayaan Bali memiliki variasi dan diversifikasi yang tinggi sesuai dengan adagium *desa, kala, patra* (tempat, waktu, keadaan); (2) kebudayaan Bali merupakan suatu sistem yang unik dengan identitas yang jelas; (3) kebudayaan Bali memiliki akar dan daya dukung lembaga-lembaga tradisional yang kokoh; (4) kebudayaan Bali merupakan suatu kebudayaan yang hidup dan fungsional, yang selalu berkembang dan dikembangkan untuk memelihara keserasian hubungan dari *Trihita Karana*; (5) kebudayaan Bali dalam keterbukaannya terhadap kebudayaan asing menunjukkan sifat fleksibel, selektif, dan adaptif serta mampu menerima unsur-unsur asing untuk menjadi milik dan kekayaan budaya sendiri tanpa kehilangan kepribadian (Mantra, 1996:2-4 dan 41; Atamadja, 2001:6).

Konsepsi pariwisata budaya yang mengharapkan terciptanya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara penyelenggaraan pariwisata dengan kebudayaan Bali dapat mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dalam hal ini terpeliharanya mutu dan kelanjutan sumber daya alam dan budaya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dan terwujudnya keseimbangan antara sumber daya alam dan budaya, kesejahteraan masyarakat lokal serta kepuasan wisatawan (Gee and Fayos-Sola, 1999; Natori, 2001; dan Ardika, 2002) dalam Ardika (2004:22).

Untuk memenuhi harapan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan pariwisata, diperlukan konsep pengembangan pariwisata yang (1) lebih mengerti budaya dan kembali ke alam (Naisbitt, 1994:137); (2) paradigma baru pengembangan berkelanjutan berwawasan budaya dan lingkungan khusus di sektor pariwisata adalah pariwisata inti rakyat (Pengarahan Menteri Negara Pariwisata dan Seni tanggal 1 Desember 1999 bertempat di *The Grand Bali Beach*); (3) mengimbangi konsep kawasan wisata tertutup (*enclave*); dan (4) untuk menyesuaikan dengan daya dukung Bali di bidang sumber daya budaya dan juga lingkungan alam yang serba terbatas (Mandra, 1999). Bila pengembangan pariwisata model *enclave* terus dilaksanakan tanpa diimbangi dengan konsep lain dikhawatirkan pengembangan pariwisata di Bali yang banyak mempergunakan sumber daya budaya akan rusak dan bahkan mungkin hancur.

Dalam sejarah pengembangan pariwisata di Bali, khususnya sejak pengangkatan Ida Bagus Oka sebagai Gubernur Bali tahun 1988 yang berada pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak sekali tuduhan masyarakat terhadap pemerintah terkait pengembangan pariwisata. Tuduhan tersebut adalah tentang perusakan lingkungan, ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengontrol pertumbuhan liar pariwisata, pelanggaran tata ruang yang tidak ditindak, perampasan pulau oleh kapitalis, peralihan fungsi tanah pertanian, serta hal-hal lain yang menyebabkan reputasi Bali semakin ternodai. Belum lagi pariwisata dijadikan ajang pertarungan politik yang bersifat terbuka, yang melahirkan oposisi yang kian meningkat terhadap pemerintah dan perbedaan pandangan antara Bali dan Jakarta. Jakarta [Pusat]

menginginkan agar pariwisata Bali dikembangkan tanpa batas, sedangkan cendekiawan Bali menganjurkan supaya beberapa di antara desa yang paling "khas" dilestarikan dalam keadaan asli demi menarik wisatawan.

Atas dasar berbagai tuduhan di atas dan untuk mengakomodasi kedua tekanan itu, maka pada *International Conference on Cultural Tourism* di Yogyakarta tahun 1992, Ida Bagus Oka pada konferensi itu membawakan makalah berjudul *Universal Tourism: Enriching or Degrading Culture?*, mengumumkan untuk menjadikan tiga desa, yaitu Penglipuran (Kabupaten Bangli), Sebatu (Kabupaten Gianyar), dan Jatiluwih (Kabupaten Tabanan) sebagai desa wisata. Selanjutnya, untuk mengoperasionalkan keputusan tersebut, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992 melakukan Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknis Desa Wisata Terpadu di Bali, dan menjadikan desa dengan kehidupan keseharian masyarakatnya sebagai produk wisata.

Menurut Hadinoto (1996:188-189), pengembangan desa wisata didasarkan pada ciri budaya tradisional yang ada di desa atau ciri atraksi alam yang berdekatan dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wisatawan yang berkunjung ke atraksi alam tersebut. Selain itu, menurut Erawan (2003) pengembangan desa wisata sejalan dengan paradigma pembangunan pariwisata yang saat ini diimplementasikan oleh Bali, yaitu pembangunan pariwisata kerakyatan berkelanjutan (*sustainable community tourism development*) yang menggunakan beberapa pendekatan. *Satu*, pendekatan peran serta masyarakat (*community based*

*approach*) yang bertujuan memberdayakan dan memampukan masyarakat di semua peringkat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Bank Dunia, 1986). Pendekatan peran masyarakat diartikan sebagai pendorong pemerintah pada semua peringkat untuk memformulasikan kebijakan, strategi, rencana, dan implementasi serta pengendalian pembangunan melalui "proses konsultasi" dan "dialog" dengan *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha pariwisata).

*Dua*, pengembangan kepariwisataan berkelanjutan memiliki karakteristik (a) mengedepankan "kualitas pengalaman"; (b) menekankan pada keadilan sosial dan peran serta masyarakat; (c) pengembangan disesuaikan dengan "limit" atau keterbatasan sumber daya; (d) menawarkan kegiatan yang luas mencakup elemen rekreasi, pendidikan, dan budaya; (e) menonjolkan karakter wilayah; (f) memberikan kesempatan kepada para wisatawan untuk mengambil pelajaran, mengenali wilayah yang dikunjunginya; (g) tidak berkompetisi dengan (mematikan) sektor industri lain yang ingin berkelanjutan; serta (h) terpadu dengan rencana dan prioritas kabupaten, provinsi dan regional.

*Tiga*, kepariwisataan kerakyatan (*community based tourism*) memiliki karakteristik (a) berskala kecil; (b) dimiliki oleh anggota/kelompok masyarakat setempat sehingga memberikan manfaat pada masyarakat setempat; (c) memberikan kesempatan kerja dan peluang ekonomi pada ekonomi setempat; (d) lokasi tersebar atau tidak terkonsentrasi di suatu tempat; (e) desain dan kegiatan mencerminkan karakter wilayah setempat, (f) mengedepankan kelestarian warisan budaya (*cultural*

*heritage*), (g) tidak mematkan industri dan kegiatan lainnya yang bersifat saling melengkapi, (h) menawarkan pengalaman yang berkualitas pada wisatawan, dan (i) merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan.

Pengembangan pariwisata diharapkan secara optimal mampu melibatkan masyarakat setempat melalui aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam kerangka pengembangan pariwisata, keterlibatan masyarakat tersebut dapat diwujudkan melalui produk daya tarik wisata berupa desa wisata.

Desa Wisata Jatiluwih sebagai salah satu desa wisata di Bali, sesuai Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998 memiliki beberapa daya tarik wisata. Adapun tempat-tempat yang ditetapkan sebagai daya tarik wisata sesuai Keputusan Bupati Tabanan tersebut di atas berjumlah 24, yakni sebagai berikut (1) Ulun Danu Beratan, (2) Kebun Raya Eka Karya, (3) Bedugul, (4) Yeh Panes dan Hutan Bambu Angseri, (5) Taman Pujaan Bangsa Margarana, (6) Alas Kedaton, (7) Tanah Lot, (8) Sanggar Tari Whratnala, (9) Museum Subak, (10) Pantai Yeh Gangga, (11) Taman Kupu-Kupu Lestari, (12) Areal Batukaru, (13) Jatiluwih, (14) Yeh Panes Belulang, (15) Yeh Panes Penatahan, (16) Pantai Pasut, (17) Pantai Kelating, (18) Puri Gede Kerambitan, (19) Puri Anyar, (20) Pantai Soka, (21) Pantai Suraberata, (22) Sarinbuana, (23) Hutan Mekori, serta (24) Air Terjun dan Perkebunan Pujungan.

Sebagai daya tarik wisata, Desa Jatiluwih sudah dikenal sejak kekuasaan Belanda di Bali (1910–1942) karena di sebelah barat Desa Jatiluwih pernah didirikan Markas Besar Keamanan Belanda yang dikenal dengan nama *tangsi* Belanda (Diparda Bali, t.t.:107). Dampaknya adalah Desa Wisata Jatiluwih tidak luput dari

kunjungan wisatawan. Meskipun secara realitas jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Jatiluwih menunjukkan peningkatan, tetapi sebagian besar masyarakat setempat belum merasakan dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. Selain itu, keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di desanya juga sangat terbatas, bahkan masyarakat setempat ada yang terkesan acuh tak acuh dan tidak berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di desanya. Lebih lanjut, timbul konflik antara desa dinas dengan *desa adat* dalam hal pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, dan bahkan muncul "perlawanan" masyarakat terhadap pembangunan fasilitas pendukung desa wisata yang berupa akomodasi.

Terkait *stakeholders* pariwisata, khususnya dari sisi *Threefolding* Perlas (2000), perlawanan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih dapat dilihat dari konteks (1) hubungan masyarakat setempat dengan pemerintah, (2) hubungan masyarakat setempat dengan kapitalis (pengusaha pariwisata), dan (3) hubungan kapitalis (pengusaha pariwisata) dengan pemerintah. Selanjutnya, jika *stakeholders* pariwisata tersebut dikaitkan dengan pariwisata berbasis masyarakat (Natori, 2001:6), maka pengunjung (*visitors*) merupakan salah satu komponen *stakeholders*, sedangkan sumber daya merupakan modal yang akan diolah oleh ketiga komponen *stakeholders* (pemerintah, pengusaha pariwisata, dan masyarakat) yang hasilnya akan dinikmati oleh pengunjung.

Dengan mengacu pada hubungan di antara *stakeholders* tersebut, dari sisi *cultural studies* dapat dilihat hegemoni pemerintah kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat *top down* dan sentralistik dengan mempergunakan

diskursus yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kondisi demikian, terjadi kontra-hegemoni berupa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat. Dari konteks hubungan masyarakat setempat dengan kapitalis (pengusaha pariwisata), yakni dapat dilihat komodifikasi yang dilakukan oleh kapitalis terhadap potensi desa (alam, budaya, tempat yang memiliki daya tarik berupa keunikan, dan bangunan tradisional) tanpa memperhatikan keberlangsungan Desa Wisata Jatiluwih untuk generasi mendatang. Akhirnya, jika dilihat dari konteks hubungan antara kapitalis (pengusaha pariwisata) dengan pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang berorientasi pada pengembangan budaya serta masyarakat, seharusnya posisi pemerintah (negara) adalah netral. Hoogendijk (1996:69-70) menunjukkan posisi negara yang memihak pengusaha (kapitalis) adalah seperti berikut ini.

Negara lazim digambarkan sebagai semacam wasit yang netral antara pekerja dan modal, yang merupakan antagonisme tradisional. Namun, negara kenyataannya sangat tergantung pada ekonomi pasar untuk memperoleh pendapatan dan karena itu negara lebih menjadi pelayan bagi pemodal daripada pekerja atau kita sebut saja masyarakat pada umumnya dan kepentingan umum. Oleh karena itu, salah satu kesulitan sekarang adalah bagaimana mempertahankan lingkungan menghadapi kepentingan ekonomi dan pembangunan jangka pendek.

Hal senada juga diwacanakan oleh *Bali Post* (9 September 2006) yang pada intinya menyatakan, "Selama ini dukungan pemerintah ke pemilik modal besar terlalu besar, sehingga keberpihakan terhadap rakyat yang menjadi cikal bakal pariwisata melemah". Wacana ini menunjukkan adanya kesangsian terhadap netralitas pemerintah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, muncul wacana untuk menjadikan terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih sebagai *World Heritage* (Bali Post, 4 September 2006). Wacana untuk menjadikan terasering sawah sebagai Warisan Budaya Dunia menurut Kode Etik Pariwisata Dunia, *International Council of Monument and Site* (ICOMOS) pada sidangnya Oktober 1999 telah mengadopsi *International Cultural Tourism Charter* (dalam Ardika, 2007:55) yang menyebutkan sebagai berikut.

Konservasi pusaka budaya merupakan media atau sarana untuk melakukan pertukaran budaya antara wisatawan domestik ataupun internasional dengan masyarakat lokal, dan pemahaman tentang pusaka budaya haruslah menjadi prioritas pertama. Apabila terjadi konflik kepentingan antara wisatawan di satu sisi dan masyarakat lokal di lain pihak, maka pengelolaan sumber daya budaya harus dilaksanakan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi kini maupun yang akan datang. Masyarakat lokal atau penduduk asli harus dilibatkan dalam perencanaan konservasi dan pariwisata, serta konservasi dan pariwisata tersebut harus menguntungkan masyarakat lokal.

Lebih lanjut Ardika (2007:56) mengemukakan bahwa dengan mengacu pada *International Cultural Tourism Charter* di atas bahwa pengelolaan pusaka budaya untuk kepentingan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal, baik dalam perencanaan maupun implementasinya. Konservasi dan pemanfaatan pusaka budaya untuk pariwisata harus menguntungkan masyarakat lokal dan bermanfaat pula untuk generasi yang akan datang.

Pusaka budaya sebagai *cultural capital*, yakni merupakan salah satu daya tarik wisatawan untuk berwisata ke Destinasi Pariwisata. Dalam hal ini terkait dengan wacana menjadikan terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih sebagai *World*

*Heritage*, maka autentisitas dan identitas menjadi suatu permasalahan baru bagi masyarakat dan budaya setempat.

Berdasarkan latar belakang yang menguraikan kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*), fokus penelitian ini adalah pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, serta dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih.

Dari sisi *cultural studies* penelitian ini merupakan pemahaman baru mengenai kebudayaan atau nilai budaya, di samping sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial (Milner, 1996:11; Kleden, 2002). Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pemaknaan baru atau pemaknaan kebudayaan yang semakin luas sebagai sesuatu yang aktif dan bukan pasif (Burke, 2001:178) atau kebudayaan sebagai kata kerja (Fay, 2002:87).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang diteliti dapat dirumuskan seperti berikut ini.

1.2.1 Bagaimanakah pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan ?.

1.2.2 Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan ?.

1.2.3 Apa dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan ?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Seperti telah diuraikan pada latar belakang, Desa Wisata Jatiluwih adalah sebuah produk wisata yang bernuansa desa di Bali. Sampai saat ini Desa Wisata Jatiluwih yang menerapkan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, fokus penelitian ini terletak pada pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. Sejalan dengan fokus penelitian yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memahami realitas sosial terkait pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. Selanjutnya, dari sisi kajian budaya (*cultural studies*), penelitian ini menjadi menarik karena mengkaji hegemoni pemerintah dalam pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih dan kontra-hegemoni yang merupakan perlawanan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas pendukung Desa Wisata Jatiluwih. Kemudian, dari konteks pemberdayaan masyarakat setempat (*empowerment*), akan dapat dikaji keterlibatan masyarakat pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Dengan mengacu pada rumusan masalah, tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan.
- b. Untuk memahami keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan.
- c. Untuk menginterpretasi dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan hasil guna untuk pelaksanaan pengembangan pariwisata di desa wisata. Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya yang terkait dengan hubungan antara budaya, pariwisata dan masyarakat sebagai satu kesatuan produk wisata yang berupa desa wisata.
- b. Dalam kerangka konseptual diharapkan pengembangan pariwisata di desa wisata akan mampu menjadi jembatan bagi harmonisasi hubungan antara budaya, pariwisata, dan masyarakat sehingga dapat menarik wisatawan global.

- c. Secara teoretis penelitian pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih ini dapat dijadikan sebagai salah satu ajang bagi pengembangan cakrawala keilmuan dari kajian budaya (*cultural studies*), khususnya dalam mengaplikasikan teori kritis pada model-model pembangunan yang dikembangkan oleh negara-negara maju (Dunia Pertama) terhadap negara-negara berkembang (Dunia Ketiga).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil keputusan (*policy makers*) atau kepada pemerhati kebijakan yang menyangkut pengembangan pariwisata di desa wisata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, wawasan, serta kesadaran akan arti serta peran penting pengembangan pariwisata yang mengedepankan keterlibatan masyarakat setempat, budaya lokal, harmonisasi dalam pengelolaan, serta operasionalisasi yang terarah sehingga membawa keuntungan dan bermakna secara budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan.
- c. Penelitian ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan produk wisata yang melibatkan masyarakat sebagai implementasi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*), diharapkan secara konsisten melibatkan partisipasi nyata masyarakat setempat lebih awal sehingga masyarakat merasa ikut memiliki dan tidak terpinggirkan dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Hal ini tentunya sesuai dengan roh penelitian ini sebagai sebuah kajian budaya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan tinjauan analisis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan relevan dengan rancangan penelitian yang telah dilaksanakan untuk melengkapi disertasi ini. Kajian pustaka disertasi ini mengacu pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta teori-teori yang memiliki relevansi dengan penelitian disertasi ini untuk memperkuat bahwa penelitian ini penting dilakukan.

Terkait dengan penelitian tentang desa wisata, yakni ada dua penelitian yang disajikan sebagai kajian pustaka. Penelitian tersebut masing-masing pada Desa Wisata Terpadu Penglipuran (Kabupaten Bangli) dan Desa Wisata Jatiluwih (Kabupaten Tabanan).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arka (1999) di Desa Wisata Terpadu Penglipuran (Kabupaten Bangli), menunjukkan bahwa setelah masuknya pariwisata ke dalam *desa adat*, terjadi perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada semakin terbukanya berbagai kegiatan ekonomi yang mendukung pariwisata. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan mendorong *desa adat* semakin penting melestarikan (merevitalisasi) nilai budaya, khususnya bangunan adat dan *angkul-angkul*. Oleh karena diyakini unsur budaya itulah yang menjadi salah satu

potensi dasar, di samping potensi alam dengan hutan bambunya.

Dengan dimulainya ketegasan mempertahankan potensi budaya yang unik itu, maka proses pemberdayaan semakin kuat. Hal ini dibuktikan bahwa setiap gejala yang bertentangan dengan ide pelestarian telah mampu diatasi oleh *desa adat*. Cara yang dipergunakan adalah dengan menyebarkan pengaruh wewenang yang bersumber dari bawah dengan mengajak *krama desa adat* untuk memecahkan masalah bersama, duduk bermusyawarah dalam tata krama beretika yang ditaati/dipatuhi (*kesungkemin*). Usaha untuk menyadarkan *krama adat* dilakukan dengan mempergunakan berbagai nilai budaya yang masih hidup, yakni *Caturpurusa Artha, Trihita Karana*, dan juga diperkuat oleh adanya nilai histori yang masih hidup.

Terbentuknya *Desa Adat Penglipuran* adalah sebuah proses kesamaan nasib, sebuah penghargaan yang bernilai sejarah dari Raja Bangli yang masih patut dijadikan pegangan hidup di *desa adat* itu. Kondisi ini tercermin dari kerukunan dan hidup bersama dalam komunitas dan kekerabatan yang masih kental.

Penelitian yang dilakukan oleh Pitana (1999) di Desa Wisata Jatiluwih (Kabupaten Tabanan) mengemukakan bahwa Desa Dinas Jatiluwih jauh lebih mendominasi sehingga *Desa Adat* Jatiluwih tidak berperan dalam operasionalisasi desa wisata tersebut. Dominasi ini merupakan penyimpangan dari ide awal pada saat perencanaan, yakni desa wisata ini direncanakan dikelola oleh *desa adat*. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan penelitian ini, yakni dikaji hegemoni yang terjadi pada keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

Dari penelusuran terhadap kedua penelitian tentang desa wisata di atas, berikut ini disajikan Tabel 2.1 yang berisi pendekatan dan substansi penelitian tersebut.

Tabel 2.1  
Penelusuran terhadap Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Pendekatan	Substansi
1.	Arka (1999)	Paradigma Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Permasalahan yang dibahas adalah latar belakang <i>Desa Adat</i> Penglipuran dikembangkan menjadi desa wisata terpadu, upaya pemberdayaan <i>desa adat</i> dalam pengembangan desa wisata terpadu, dan makna pemberdayaan bagi masyarakat <i>Desa Adat</i> Penglipuran.</li> <li>□ Subjek penelitian adalah masyarakat <i>Desa Adat</i> Penglipuran.</li> </ul>
2.	Pitana (1999)	Sosiologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Membahas hal-hal yang bersifat umum seperti penataan ruang, pembuatan tempat parkir, serta dominasi desa dinas terhadap <i>desa adat</i> dalam operasional Desa Wisata Jatiluwih.</li> <li>□ Subjek penelitian adalah masyarakat <i>Desa Adat</i> Jatiluwih.</li> </ul>

Dilihat dari kedua penelitian di atas, jika dikaitkan dengan penelitian ini, secara substantif penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian di atas. Perbedaan tersebut dapat dilihat, baik dari sisi ontologi (subjek dan objek penelitian) maupun epistemologi (konsep, teori, model, dan metode penelitian) dan aksiologi (tujuan dan manfaat penelitian). Walaupun ada kemiripan-kemiripan, hal itu hanya pada permukaan dan tidak pada substansi. Semangat *cultural studies* tetap dipertahankan untuk memberikan *positioning* yang jelas pada penelitian ini.

Penelitian lain yang pernah dilakukan di Bali dalam kaitan pengembangan rutin pariwisata Bali atau strategi pariwisata yang harus diterapkan oleh Bali sesuai sumber daya yang dimiliki, pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta pariwisata berbudaya sudah juga dilakukan oleh Burns dan Holden (1997). Selanjutnya, penelitian pariwisata di Bali untuk penerapan pariwisata berbasis komunitas dan pariwisata Bali yang memiliki kearifan lokal telah diteliti oleh Bagus (2002a; 2002b; dan 2002c) serta penelitian Ardika (2003) yang mengemukakan bahwa pariwisata Bali diarahkan pada upaya penyelamatan lingkungan hidup, penghargaan terhadap konsep preservasi, penghargaan terhadap konsep konservasi, dan penghargaan pada masyarakat serta budaya lokal. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, hasil penelitian tersebut dijadikan acuan untuk melihat pengaruh pariwisata terhadap lingkungan, baik alam maupun budaya dan masyarakat di lokasi penelitian ini.

Selain penelitian di atas, beberapa buku yang relevan dengan penelitian disertasi ini, yakni buku yang membahas pengembangan pariwisata di Asia Tenggara, pariwisata di Indonesia, dan pariwisata di Bali dianalisis dalam buku yang berjudul *Tourism in South-East Asia*. Buku ini menelaah pariwisata dunia, khususnya pariwisata di Asia Tenggara dalam berbagai dimensi. Buku yang merupakan suntingan Hitchcock, King, dan Parnwell tahun 1993 ini memuat tulisan yang banyak dibicarakan para pengembang pariwisata di Bali dan Indonesia pada dekade belakangan ini. Adapun uraian dari tulisan-tulisan tersebut adalah sebagai berikut.

Tulisan-tulisan yang menelaah pengembangan pariwisata di Asia Tenggara adalah tulisan yang merupakan suntingan Hitchcock, King, dan Parnwell (1993:4-70) yang berjudul *Tourism in South Asia-East Asia: Introduction*, yakni tulisan pertama pada buku tersebut yang membahas pariwisata Asia Tenggara. Tulisan yang berisi pandangan umum tentang kepariwisataan di Asia Tenggara itu tidak hanya merekomendasikan beberapa visi dan misi pariwisata Asia Tenggara, kaitan antara pariwisata dan budaya (*tourism and culture*) pariwisata Asia Tenggara, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, tetapi juga memaparkan *image* pariwisata Asia Tenggara serta rekomendasi beberapa aspek pariwisata yang pantas untuk ditindaklanjuti untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini terkait dengan penelitian disertasi ini, tulisan di atas memberikan inspirasi hubungan antara pariwisata dan budaya dalam kerangka pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Selanjutnya, tulisan Wilson yang berjudul *The Anthropology of Tourism*, dan juga tulisan Wood (1984) tentang pengembangan pariwisata budaya dan sosiologi yang banyak mengkritisi teori-teori dan kajian-kajian pariwisata di Asia Tenggara. Tulisan Wilson dan Wood membuat kerangka tersendiri dalam kaitan pengembangan pariwisata, terutama dari aspek antropologi, sosiologi, budaya, dan *cultural studies*. Tulisan di atas mengilhami penelitian ini terkait dengan penerapan teori kritis yang merupakan kritisasi terhadap model pengembangan pariwisata yang sedang dilaksanakan.

Selain tulisan-tulisan yang mengkaji pengembangan pariwisata di Asia Tenggara secara keseluruhan, ada juga tulisan yang menitikberatkan kajian pada

pariwisata pada salah satu negara di Asia Tenggara. Beberapa tulisan tersebut (suntingan Hitchcock, King, dan Parnwell, 1993:99-116) adalah tulisan King yang berjudul *Tourism and Culture in Malaysia*, tulisan Cohen yang berjudul *Open-ended Prostitution as a Skill Full Game of Luck: Opportunities, Risk and Security Among Tourist Oriented Prostitutes in a Bangkok Soi*, tulisan Parnwell yang berjudul *Tourism and Rural Handicrafts in Thailand*, dan tulisan Stockwell yang berjudul *Early Tourism in Malaya*. Tulisan-tulisan tersebut antara lain menyoroti, mengkritisi dan menteoritisasikan pengembangan pariwisata di Malaysia, Bangkok, dan Thailand terutama dalam kaitan pariwisata berwawasan kebudayaan lokal, kerajinan tangan masyarakat lokal, pelacuran, dan cendera mata. Tulisan ini dijadikan acuan untuk melihat peranan kebudayaan lokal dalam pariwisata global.

Dalam rangka pengembangan pariwisata di Indonesia, tulisan Cochrane (1993) yang berjudul *Tourism and Conservation in Indonesia and Malaysia* yang menganjurkan pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) untuk Indonesia dan Malaysia dapat dijadikan acuan. Pengembangan pariwisata menurut Cochrane harus diarahkan pada upaya penyelamatan lingkungan hidup, penghargaan terhadap konsep preservasi dan konservasi, serta penghargaan terhadap budaya lokal. Kegiatan wisata *back to nature* hendaknya dijadikan ajang pendidikan bagi wisatawan dalam kerangka strategi pengembangan pariwisata lingkungan (*ecotourism*), *nature based tourism*, dan *cultural tourism*. Terkait dengan penelitian ini, tulisan Cochrane tersebut dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana

penerapan pengembangan pariwisata berkelanjutan pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

Selanjutnya, khusus untuk mengkaji pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Bali, tulisan yang dijadikan rujukan adalah tulisan Picard (1993). Tulisan Picard yang berjudul *Cultural Tourism* tersebut banyak memberikan ide-ide inovatif kreatif dalam pengembangan pariwisata di Bali. Selain itu, Picard merekomendasikan agar pengembangan pariwisata Bali berinisiatif lokal, seperti dalam pernyataannya, ”*On the one hand, it deals with tourism as if it were an agent external to the society under consideration, instead of trying to understand how it becomes part of the local reality*” (dalam Hitchcock, King, dan Parnwell, 1993:72). Tulisan Picard dipergunakan untuk menambah wawasan dalam penelitian ini, khususnya pelaksanaan pengembangan pariwisata budaya yang berdasarkan potensi lokal.

Selain tulisan Picard di atas, dalam mengkaji pengembangan pariwisata di Bali, khususnya dari aspek sumber daya manusia, tulisan Guerrier dalam buku *Human Resources Issues in International Tourism* suntingan Baum (1994) juga dijadikan acuan. Tulisan tersebut memfokuskan pada orientasi pariwisata Bali dengan sumber daya manusia Bali. Menurutnya, pariwisata Bali harus mengacu pada kultur lokal dalam upaya menarik wisatawan mancanegara ke Bali. Dalam hal ini Baum juga menyebutkan bahwa Bali adalah kunci pariwisata Indonesia dan menjadi tuan rumah pariwisata dunia. Tulisan Baum (1994:108-111) juga mengutarakan kaitan Bali dalam konteks Indonesia, yakni sebagai berikut (1) bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat pemersatu; (2) Pancasila sebagai dasar dan filosofi negara; (3) pengelolaan pariwisata

Bali menganut pola bapakisme (*bapakism*) yang terpusat dari atas (*top down*); (4) Bali secara geografis terletak di sebuah pulau kecil yang mayoritas beragama Hindu, tetapi "dikepung" oleh pulau-pulau lainnya seperti Jawa yang mayoritas beragama Islam; (5) Bali memiliki unit-unit sosial yang disebut *banjar*; dan (6) *banjar* adalah sebuah badan yang mengelola kegiatan-kegiatan ritual. Dalam tulisan ini juga disebutkan bahwa *banjar* di Bali sangat berperan dalam mengelola dan meningkatkan kepariwisataan Bali ke tingkat internasional. Selain itu, acara-acara yang bersifat seremoni yang dikelola oleh *banjar* diharapkan dapat menarik para wisatawan dari Australia, Amerika, dan Eropa. Tulisan yang disunting Baum jika dikaitkan dengan penelitian ini, yaitu dipergunakan untuk menambah pemahaman terkait dengan keterlibatan masyarakat lokal (desa setempat) dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

Dari kajian pustaka di atas, jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diperoleh gambaran tentang pariwisata dari lingkup kajian di Bali hingga kajian di Asia Tenggara. Gambaran yang diperoleh terkait dengan kajian pustaka di atas adalah tentang pariwisata berkelanjutan, pariwisata berwawasan lingkungan, kesan (*image*) terhadap pariwisata, pariwisata berwawasan kebudayaan lokal, kajian tentang masyarakat lokal dalam kaitan dengan pengembangan pariwisata, cendera mata yang berupa kerajinan tangan masyarakat lokal, pariwisata dalam kaitan dengan konservasi dan preservasi, sumber daya manusia lokal dalam pengembangan pariwisata, peran *banjar* dalam pengembangan pariwisata, pariwisata berbasis masyarakat, dan pariwisata dengan kearifan lokal.

## **2.2 Konsep**

Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa konsep yaitu pengembangan pariwisata, keterlibatan masyarakat, desa wisata, dan Jatiluwih.

### **2.2.1 Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan secara etimologi berasal dari kata "kembang". Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989:414), kata "kembang" diartikan (1) mekar, terbuka, atau membentang; (2) menjadi besar; (3) menjadi bertambah sempurna; dan (4) menjadi banyak. Dengan mengacu pada arti kata "kembang" yang merupakan kata dasar dari "pengembangan", maka kata "pengembangan" tampaknya mempunyai makna dan interpretasi yang berbeda, di samping mengisyaratkan suatu proses evolusi dengan konotasi positif atau sekurang-kurangnya bermakna "tidak jalan di tempat".

Perbedaan interpretasi terjadi karena kata "pengembangan" dapat dikaitkan dengan dua hal, yaitu "proses" dan "tingkat" perkembangan sesuatu. Lebih lanjut Pearce (dalam Sammeng, 2000:227) menemukan lima konteks dan konotasi penggunaan kata "pengembangan", yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, (2) modernisasi, (3) pemerataan keadilan, (4) transformasi sosio-ekonomi, dan (5) pengorganisasian kembali tata ruang. Pearce juga menyatakan bahwa pengembangan merupakan konsep yang dinamis sehingga interpretasi atas maknanya telah dan akan berubah seiring dengan perjalanan waktu.

Menurut Page (1995:120) dalam pengembangan pariwisata dapat diidentifikasi lima pendekatan. Kelima pendekatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Boostring approach*, yaitu suatu pendekatan sederhana yang melihat pariwisata sebagai sebuah atribut positif untuk suatu tempat dan penghuninya. Namun, masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan daya dukung wilayah tidak dipertimbangkan secara matang.
2. *The economic industry approach*, yaitu pendekatan pengembangan pariwisata yang tujuan ekonominya lebih didahulukan dari tujuan sosial dan lingkungan serta menjadikan pengalaman pengunjung dan tingkat kepuasan sebagai sasaran utama.
3. *The physical approach*, yaitu pendekatan ini didasarkan pada tradisi "penggunaan lahan" geografis, dengan penekanan pada prinsip keruangan dan kurang mempertimbangkan dampak sosial serta budaya dari pengembangan pariwisata.
4. *The community approach*, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pentingnya keterlibatan maksimal dari masyarakat setempat di dalam proses pengembangan pariwisata.
5. *Sustainable approach*, yaitu pendekatan berkelanjutan dan berkepentingan atas masa depan yang panjang serta atas sumber daya dan efek-efek pembangunan ekonomi pada lingkungan yang mungkin menyebabkan gangguan budaya dan sosial yang memantapkan pola-pola kehidupan dan gaya hidup individual.

Saat ini, konteks kata "pariwisata (*tourism*)" biasanya selalu dimaknai sebagai sebuah proses pengembangan pariwisata (*tourism development*) yang secara otomatis

di dalamnya mencakup pihak pengembangan pariwisata (*tourism developer*) dan kawasan (*tourism area*) atau tempat dilakukannya pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata sering dipahami sebagai realisasi pembangunan (*developmentalism*) di bidang (sektor atau subsektor) pariwisata. Secara sangat baik Mill dan Marisson (1985:316) menjelaskan pengembangan pariwisata sebagai berikut.

Ketika melaksanakan pengembangan pariwisata, mereka yang berada di daerah tujuan wisata akan memandang perlu untuk pertama-tama membuat panduan-panduan pengembangan keseluruhan untuk memastikan bahwa ketika pengembangan dilakukan hal itu mencakup kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan ekonomis, sosial/budaya, dan lingkungan kawasan tersebut. Perlu juga bagi mereka yang berada di daerah tujuan tersebut untuk mendaftar panduan-panduan yang lebih spesifik yang menjelaskan karakteristik-karakteristik dasar mengenai cakupan, kualitas, dan jenis pengembangan yang diinginkan untuk didorong.

Berdasarkan seluruh uraian dalam subsub-bab ini sebelumnya, panduan pengembangan dalam proses dalam pengembangan pariwisata menjadi penekanan utama. Tanpa panduan yang tepat dan pelaksanaannya secara konsisten, pengembangan pariwisata potensial mengalami kegagalan. Dalam kaitan pariwisata berbasis masyarakat, entitas masyarakat yang bersangkutan menjadi kekuatan yang tidak bisa ditawar, lebih-lebih dalam konteks pengembangan di tingkat desa.

Secara operasional, indikator pengembangan pariwisata dimaksudkan adalah pentahapan proses pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, berupa (1) produk-produk yang dikembangkan seperti akomodasi, restoran, dan daya tarik wisata; (2) keterlibatan entitas masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata;

- (3) wacana yang berkembang terkait pengembangan pariwisata; (4) komodifikasi; dan (5) konflik yang terjadi terkait pengembangan pariwisata.

### **2.2.2 Keterlibatan Masyarakat**

Sebelum sampai pada uraian tentang keterlibatan, terlebih dahulu dikemukakan tiga pilar pembangunan pariwisata, yaitu pemerintah, pengusaha pariwisata, dan masyarakat. Pemerintah sebagai dimensi politik, memberikan legalitas terhadap pembangunan yang dilaksanakan; pengusaha pariwisata sebagai dimensi ekonomi, memiliki modal untuk melaksanakan pembangunan; dan masyarakat sebagai dimensi sosial/budaya, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Selanjutnya, untuk memahami lebih jauh tentang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, PBB memberikan definisi keterlibatan sebagai partisipasi aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan (a) di dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan, (b) pelaksanaan program secara sukarela, (c) pemanfaatan hasil-hasil suatu program atau proyek, dan (d) adanya kemungkinan penolakan program atau proyek oleh masyarakat.

Terkait dengan masyarakat, menurut Mayo (1998:162) masyarakat dapat dilihat dari dua konsep, yaitu (1) masyarakat sebagai sebuah "tempat bersama", yaitu sebuah wilayah geografis yang sama; (2) masyarakat sebagai "kepentingan bersama", yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Selanjutnya, terkait dengan penelitian ini, masyarakat meliputi kedua konsep di atas, yaitu mencakup "tempat bersama" dan "kepentingan bersama".

Dari definisi keterlibatan dan konsep tentang masyarakat di atas, maka keterlibatan masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dengan masyarakat sebagai inti dari pengembangan tersebut. Dengan demikian, karena inti dari pengembangan pariwisata yang dilaksanakan adalah masyarakat, maka konsep keterlibatan masyarakat dalam penelitian ini disamakan dengan pariwisata berbasis masyarakat.

Konsep pariwisata berbasis masyarakat berbeda dengan konsep pengembangan pariwisata yang bersifat konvensional, yaitu dengan sistem *top-down* dan mempergunakan pendekatan teknokratik-sentralistik. Menurut Nasikun (2000:26), pariwisata berbasis masyarakat memiliki karakteristik (a) berskala kecil (*small scale*) sehingga lebih mudah diorganisasikan, bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman, dan tidak menimbulkan banyak dampak negatif; (b) lebih berpeluang untuk dikembangkan dan diterima oleh masyarakat setempat/lokal; (c) lebih memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, yakni dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun penerimaan manfaat, dan keuntungan; (d) selain menekankan partisipasi masyarakat, pembangunan berwawasan kerakyatan juga sangat mementingkan keberlanjutan kultural (*cultural sustainability*), di samping secara keseluruhan berupaya untuk membangkitkan "rasa hormat" dan "penghargaan" wisatawan terhadap kebudayaan setempat/lokal.

Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) sudah diusulkan tahun 1990-an. Jika pariwisata berbasis masyarakat ini dikaitkan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, khusus untuk di Bali (lihat Bagus 2002a;

2002b; 2002c; Ardika, 2003), pengembangan pariwisata berkelanjutan (*tourism of sustainable development*) dimaksudkan bahwa pariwisata Bali diarahkan pada upaya penyelamatan lingkungan hidup, penghargaan terhadap konsep preservasi, penghargaan terhadap konsep konservasi, dan penghargaan pada masyarakat serta budaya lokal. Dengan demikian, *community based tourism* yang dikemukakan oleh France (1997:16-17) dan terkait dengan masyarakat Bali dapat dikatakan bahwa semua komponen yang ada di masyarakat seperti komunitas *desa adat*; pemerintah termasuk dinas pariwisata; *banjar*; serta para intelektual sangat dituntut perannya dalam pengembangan aset-aset di Bali yang memiliki nilai dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Jika mengacu pada pendapat Inskeep (1991:29), Picard (dalam Hitchcock, King, dan Parnwell, 1993:72) dan France (1997:16-17), program-program strategis yang perlu dilakukan pelaku pariwisata dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di desa wisata adalah sebagai berikut: (1) melibatkan masyarakat desa dalam seluruh proses pengembangan desa wisata mulai tahap persiapan, perencanaan, operasional, pengembangan serta pengawasan termasuk pemilikan semua fasilitas yang diperlukan untuk mendukung operasional desa wisata; (2) pengembangan desa wisata atas dasar kemampuan sumber daya lokal yang memiliki nilai jual nasional dan internasional; (3) meningkatkan kemampuan manajemen budaya masyarakat desa sehingga dapat berperan dalam pengelolaan desa wisata yang syarat dengan *local genius*, *local contents*, dan *local culture*; (4) menjadikan *culture capital* sebagai tiang penyangga pengembangan desa wisata; (5) menyadarkan masyarakat setempat akan

arti penting lingkungan serta menumbuhkan kemampuan masyarakat lokal untuk ikut menjaga kelestarian produk wisata yang ada di desa setempat.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menurut Natori (2001:5) dalam bukunya *A Guidebook for Tourism Based Community Development* adalah aktivitas masyarakat lokal untuk mendorong pertukaran dan menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati dan menghargai alam, budaya, sejarah, industri, bakat-bakat masyarakat, dan sumber daya lokal lainnya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa penekanan aktivitas pengelolaan sumber daya dimulai dari masyarakat setempat, baik dalam hal identifikasi kebutuhan maupun analisis kemampuan, termasuk pengawasan terhadap sumber daya lokal tersebut.

Dengan demikian, pada penelitian ini, konsep keterlibatan masyarakat merupakan implementasi dari pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), dimaksudkan sebagai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

### **2.2.3 Desa Wisata**

Desa Wisata dengan berbagai istilahnya seperti *village tourism*, *rural tourism*, *farm tourism*, atau *agro tourism* (Leu, 1992:212; Naisbit, 1994:137; Saglio, 1995:110; Dolors, 1995:49; Iakovidou, 1995:87; Oppermann, 1996:212; Dowling, 1996:220) telah banyak dilaksanakan di berbagai negara, seperti: di Swiss, Kenya, Senegal, Yunani, Jerman, dan Muangthai. Di sisi lain, pengembangan desa wisata merupakan alternatif yang sensitif, karena jika salah dalam pengembangannya akan

menimbulkan dampak bagi keberadaan *desa pakraman* tempat desa wisata itu dikembangkan (Pitana, 1999:105). Selanjutnya, berkaitan dengan pariwisata di Tanah Toraja, Adams (1990:33) mengatakan bahwa kenyataan suatu desa disebut sebagai "objek wisata" hanya memperkuat kecenderungan pejabat-pejabat Direktorat Jenderal Pariwisata untuk menganggap penduduknya sebagai "objek" pasif, yakni sebagai komoditas yang siap dipasarkan.

Konsep Desa Wisata tidak muncul begitu saja, tetapi sebagai akibat dari suatu proses pembangunan pariwisata di Indonesia, khususnya setelah mengamati pengalaman Bali mengembangkan kawasan wisata yang bersifat tertutup (*enclave*) seperti yang dikembangkan di Kawasan Wisata Nusa Dua. Pembangunan pariwisata diduga banyak menimbulkan sisi negatif bagi masyarakat Bali. Atas dasar pertimbangan bahwa pembangunan pariwisata harus mampu mengatasi berbagai kelemahan konsep yang diterapkan, maka dirancang konsep model alternatif, yaitu desa wisata. Desa wisata menurut Tim Konsultan (dalam Pitana, 1999:108) mendefinisikannya sebagai berikut.

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan dengan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian "pedesaan Bali", baik dari struktur tata ruang, arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial-budaya masyarakatnya, serta mampu menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok wisatawan, seperti: akomodasi, makanan dan minuman, cendera mata, serta atraksi-atraksi wisata.

Desa wisata sebagai sebuah konsep alternatif dalam pengembangan pariwisata, terkait dengan pengalaman negara Senegal (Afrika Barat) mengembangkan desa wisata yang disebut dengan istilah *integrated village tourism* dapat dijadikan konsep

alternatif. Program desa wisata terpadu di Senegal ini bukan satu-satunya jenis pariwisata yang diinginkan negara tersebut, tetapi lebih ditujukan untuk menambah bentuk-bentuk wisata konvensional sebagai salah satu jenis pariwisata alternatif.

Menurut buku Perencanaan Pariwisata Nasional dan Regional: Metodologi dan Studi Kasus (2000:126-129), yang menjadi latar belakang pengembangan *integrated village tourism* di Senegal berawal pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Pada waktu itu pariwisata di negara tersebut umumnya didasarkan pada kawasan wisata di pantai dan hotel-hotel di perkotaan serta kadang-kadang ekskursi wisata ke daerah pedalaman. Jenis wisata ini tidak menawarkan kesempatan bagi wisatawan untuk mendapatkan pengalaman dari gaya hidup orang Afrika dan bertemu dengan orang-orang Afrika hanya secara spontan. Penduduk lokal Senegal memandang kondisi ini sebagai degradasi sosial. Penduduk lokal sering merasa bahwa mereka harus memenuhi harapan-harapan para wisatawan. Di samping itu, ada juga pertimbangan tentang perlunya penyediaan lapangan kerja yang beragam dan pendapatan bagi generasi muda pedesaan di Senegal sehingga mereka tidak berpindah ke kota untuk memperbaiki kehidupannya.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan akan akomodasi, maka akomodasi sederhana dibangun, dikelola, dan dioperasikan oleh penduduk desa di Senegal. Penginapan-penginapan didesain dengan gaya tradisional dan dibangun dengan bahan-bahan lokal. Menurut model tersebut, pengelolaan penginapan disebut sebagai *camp* sepenuhnya diserahkan kepada penduduk desa. Kerja sama dilakukan agar mereka bertanggung jawab terhadap pengoperasian *camp*. Makanan direncanakan

menggunakan produk makanan lokal dan masakan tradisional. Promosi dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ditawarkan oleh *integrated village tourism* tersebut.

Dari uraian tersebut tampak bahwa apa yang terjadi di Senegal antara tahun 1960-an dan tahun 1970-an memiliki kemiripan dengan yang terjadi pada awal tahun 1990-an sampai awal tahun 1992 di Bali, yaitu dengan pengembangan desa wisata di tiga kabupaten di Bali. Pengembangan desa wisata di Bali adalah untuk mengimbangi konsep kawasan wisata tertutup (*enclave*) dan untuk melengkapi konsep pengembangan *enclave*. Bila di Bali desa wisata menawarkan alam pedesaan beserta budayanya, maka di Senegal juga demikian, yaitu sarana akomodasi dengan sebutan *camp* yang serba sederhana mempergunakan bentuk dan bahan bangunan lokal, jumlah kamar maksimal 30 kamar, kenyamanan yang ditawarkan amat minimal, dan makanan yang disajikan adalah makanan tradisional.

Untuk memahami konsep desa wisata, akan menjadi semakin jelas apabila membandingkannya dengan konsep ekowisata (*ecotourism*) yang sama-sama memiliki konsep kembali ke alam. Menurut Audumon (dalam Naisbitt, 1994:137) memberikan batasan tentang ekowisata sebagai berikut.

Perjalanan dengan tujuan daerah-daerah alam guna mengerti budaya dan sejarah alam lingkungan, sementara (mempertahankan) integritas ekosistem dan memberikan peluang ekonomi yang memperkuat pelestarian sumber daya alam menguntungkan secara finansial bagi penduduk di kawasan tuan rumah.

Konsep ekowisata secara substansi tidak banyak berbeda dengan konsep desa wisata. Karena keduanya kembali ke alam dan mempergunakan alam sebagai daya

tarik wisata. Untuk kasus Bali, desa wisata dijadikan salah satu subsistem pariwisata budaya. Konsep pariwisata budaya di sini dianggap sebuah konsep yang mempergunakan budaya bukan saja untuk pariwisata, melainkan yang terpenting adalah pariwisata untuk budaya. Dalam pembangunan pariwisata budaya, karena desa wisata sebagai subsistem pariwisata budaya maka sudah sepatutnya budaya sebagai bagian integral senantiasa harus dievaluasi agar tetap *cost and benefit* berimbang dan berlanjut (Picard, 1996:100).

Alternatif pengembangan kawasan wisata model *enclave* untuk Bali sudah menjadi tuntutan yang tidak boleh ditunda agar secepatnya pemerataan hasil pariwisata dapat memberdayakan masyarakat Bali. Desa di Bali yang sudah memenuhi syarat dapat mengembangkan dan menerapkan model desa wisata. Oleh karena pada dasarnya desa-desa di Bali memiliki keunikan masing-masing yang tercermin pada adagium *desa, kala, dan patra*.

Dengan demikian, yang dimaksud desa wisata dalam penelitian ini adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan di Bali, baik dari segi kehidupan sosial, budaya, adat istiadat keseharian, dan alam yang menarik bagi wisatawan.

#### **2.2.4 Jatiluwih**

Jatiluwih adalah nama sebuah desa yang ada di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Menurut Parimartha (2004:15), desa sebagai wadah sekelompok masyarakat terdapat di seluruh wilayah kepulauan, hanya istilahnya

berbeda-beda sesuai dengan keadaan setempat. Secara tradisional istilah desa, terutama dikenal di Jawa dan Bali, sementara di Lombok disebut *dasan* atau *gubug*, di Sumatera Barat disebut *nagari*, di Sumbawa disebut *kampong*, di Timor disebut *ketemukungan*, dan di Sumatera Selatan disebut *marga*.

Pandangan masyarakat Bali terhadap desa, yakni dimengerti sebagai suatu tempat tinggal bersama, memiliki kekayaan (*laba*) desa, wilayah, warga (*krama desa*), *prajuru*, dan tempat-tempat suci yang disebut *kahyangan* desa (Parimarta, 2004:27). Desa memiliki tradisi yang satu, terikat dengan keberadaan pura *kahyangan tiga*, memiliki wilayah tertentu, dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri, yang sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1986, pada Bab I, Pasal 1 huruf e, yakni dinyatakan sebagai berikut.

Desa Adat Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* (*kahyangan desa*) yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Lebih lanjut dalam perda yang sama, khususnya pada Bab III, Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang Kedudukan dan Fungsi *Desa Adat* dalam kaitan hubungan dengan lembaga di atasnya disebutkan sebagai berikut.

Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi membantu pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa/pemerintah kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Sesuai dengan perkembangan pandangan di masyarakat, Parimarta (2003, 2004) menyatakan bahwa wujud desa itu (*desa adat* dan *desa dinas*) patut dipahami sebagai unsur laki-laki dan perempuan dalam kehidupan manusia. Keduanya penting dan relevan dalam kehidupan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dalam struktur pemerintahan, *desa dinas* merupakan bentuk formal dari sistem pemerintahan terbawah, sedangkan *desa adat* merupakan bentuk informal dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Untuk menghapus kesan (*image*) bahwa *desa adat* merupakan desa sebagai hasil ciptaan kolonial, maka muncullah istilah *desa pakraman* sebagai pengganti *desa adat* dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001. Secara substantif penggantian istilah tersebut tidak menimbulkan perbedaan arti. Istilah *desa pakraman* juga masih dipakai sampai sekarang sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2003 yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*.

Terkait dengan penelitian ini, Jatiluwih sebagai sebuah desa dapat dilihat dari tiga kondisi, yaitu kondisi makro, kondisi meso dan kondisi mikro. Desa Jatiluwih terdiri atas satu *desa dinas*, dua *desa adat* dan tujuh *banjar/dusun*. Nama *banjar* sama dengan nama *dusun*-nya. Oleh karena berbagai pertimbangan yang ada di masyarakat setempat, nama *desa pakraman* sebagai pengganti nama *desa adat* sampai saat ini belum sepenuhnya dipergunakan.

Dalam hal ini pembedaan antara *desa adat* (*desa pakraman*) dengan *desa dinas*, jika dikaitkan dengan ketiga kondisi desa di atas, maka pembedaan tersebut akan

termasuk pada ruang lingkup kondisi desa meso. Adapun gambaran kondisi meso Desa Wisata Jatiluwih adalah seperti tabel berikut.

Tabel 2.2  
Kondisi Meso Desa Wisata Jatiluwih

Nama Desa Dinas	Nama <i>Desa Adat</i>	Nama <i>Banjar/Dusun</i>
Jatiluwih	Jatiluwih	(1) Jatiluwih Kawan (2) Jatiluwih Kangin (3) Kesambahan Kaja (4) Kesambahan Kelod (5) Kesambi
	Gunungsari	(1) Gunungsari Desa (2) Gunungsari Umakayu

Sumber: Monografi Desa Jatiluwih Tahun 2006

Selanjutnya, jika dilihat dari kondisi desa makro, akan menggambarkan letak geografis Desa Jatiluwih, luas wilayah, serta batas desa. Dalam hal ini yang juga termasuk dalam kondisi desa makro adalah luas lahan pertanian, perladangan, hidrologi, serta suhu udara. Lebih lanjut, pada kondisi desa mikro, termasuk di dalamnya adalah orientasi *banjar-banjar* yang menuju *kaja* atau gunung. Dalam kondisi desa mikro ini Desa Wisata Jatiluwih tidak menjadikan Gunung Agung sebagai pusat orientasi, tetapi berorientasi pada gunung terdekat, yaitu Gunung Batukaru. Hal ini tampak pada tata letak komponen *karang* dalam setiap *banjar*.

Desa Jatiluwih adalah sebuah desa dinas atau desa administratif yang juga secara keseluruhan merupakan sebuah *desa adat*. Dalam penelitian ini yang dimaksud

Desa Jatiluwih dapat mencakup salah satu atau keduanya. Namun, tentang kapan Desa Jatiluwih digunakan tersendiri sebagai desa dinas dan *desa adat*, tergantung pada konteks dari pembahasan yang dilakukan.

### 2.3 Landasan Teori

Untuk mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan topik penelitian diperlukan landasan teori. Dalam penelitian *cultural studies* dikombinasikan berbagai teori dan metode, sehingga bersifat sangat dinamis, terus bergerak, dan terus menjadi (*becoming*). Sebagai sebuah pendekatan, *cultural studies* merekombinasikan secara eklektik dan *bricolage* berbagai pendekatan dan metode analisis yang telah ada (Piliang, 2005:2). Lebih lanjut, dikemukakan bahwa teori dan metode yang dikembangkan dalam *cultural studies* sesungguhnya bukan merupakan hasil *genuine* di dalam tubuh *cultural studies* itu sendiri, melainkan lebih banyak merupakan "pinjaman", "kombinasi" atau "rekomendasi" dari berbagai teori dan metode yang ada secara eklektik.

Untuk mengkaji permasalahan yang terkait dengan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, serta dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, maka dalam penelitian ini dipergunakan lima teori secara eklektik. Kelima teori tersebut adalah teori Hegemoni, teori Komodifikasi, teori Dekonstruksi, teori Diskursus Kekuasaan /Pengetahuan, dan teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat.

### 2.3.1 Teori Hegemoni

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani dari kata *hegeisthi*, berarti 'memimpin' atau 'kepemimpinan'. Dalam praktiknya, di Yunani diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota. Hegemoni mengacu kepada pengertian kepemimpinan hegemoni *proletariat* serta perwakilan-perwakilan politik mereka serta aliansi-aliansi dengan kelompok lain seperti kaum borjuis kritis dan intelektual yang berkeinginan bersama untuk menjatuhkan pemerintah. Batasan ini kemudian dijadikan basis material oleh tokoh Marxis Rusia dalam mendefinisikan perjuangan politiknya (Patria, 1999:115-116). Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, teori Hegemoni kemudian berkembang di Inggris, Italia, dan Jerman. Pengembangan teori Hegemoni di Italia dilakukan oleh filsuf Marxis Italia Antonio Gramsci (1891-1937). Hegemoni mengacu pada cara kelompok dominan dalam masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok subordinasi melalui proses kepemimpinan intelektual dan moral (Gramsci, 1971:57). Oleh karena dijabak dengan diskursus tertentu, pihak yang dikuasai dibuat setuju atau berkonsensus untuk dikuasai.

Teori Hegemoni yang dicetuskan oleh Gramsci juga dapat dielaborasi melalui penjelasannya tentang basis dari supremasi kelas, yang artinya bahwa supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep, yaitu kepemimpinan dan dominasi. Dominasi lebih menekankan pada pembentukan kepatuhan dengan cara memberikan hadiah,

baik uang maupun sumbangan atau bisa juga dalam bentuk hukuman (Sugiono, 1999; Fakhri, 2001). Hubungan dua momen disebut oleh Gramsci sebagai perspektif ganda. Gramsci menggunakan simbol *centaur* dalam mitologi Yunani makhluk setengah binatang setengah manusia. *Centaur* digunakan untuk melukiskan manusia sebagai perspektif ganda gabungan antara kekuasaan dan kesepakatan, otoritas, hegemoni, kekerasan, serta kesopanan.

Gramsci menyatakan bahwa hegemoni bukanlah dominasi dan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan pendekatan kepemimpinan politik dan ideologi. Menurutnya ada dua syarat yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan kelas hegemoni, yaitu (1) hegemoni tidak berarti memaksakan ideologi kelas tertentu seperti dipahami masyarakat luas; (2) ideologi tidak terbentuk secara serta merta, proses kelahirannya tergantung pada pola-pola hubungan kekuatan selama terjadi aliansi. Hegemoni tidak dipaksakan dari atas, hegemoni diperoleh melalui negosiasi dan kesepakatan (Gramsci, 1971; Ratna, 2004:9-10; Patria, 1999:117-119).

Hegemoni merupakan penguasaan berdasarkan konsensus atau persetujuan yang secara langsung atau tidak langsung dan secara terbuka atau diam-diam mempengaruhi struktur-struktur kognitif dan afektif yang dikuasai. Dalam hal ini semakin canggih hegemoni dilaksanakan semakin tidak kelihatan kekuasaan yang dijalankan. Hal itu terjadi karena yang dikuasai sudah masuk dalam pola-pola berpikir, berkata, dan bertindak yang menguasai. Jadi, pihak-pihak yang dihegemoni menerima gagasan-gagasan, nilai-nilai, dan kepemimpinan kelompok penghegemoni

bukan karena dipaksa, baik secara fisik maupun karena dibujuk untuk melakukannya, tetapi mereka sendiri memiliki alasan-alasan tersendiri untuk menerimanya. Dalam hegemoni, konsensus memang dibuat oleh para penghegemoni, tetapi konsensus tersebut dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan yang terhegemoni.

Implementasi teori ini dipergunakan melihat hegemoni pemerintah—pengusaha pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. Pada hegemoni pengusaha pariwisata terhadap pemerintah, berawal dari keinginan pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas bisnis pariwisata. Pengusaha pariwisata sebagai pedagang besar (*whole salers*) dapat mewujudkan keinginan pemerintah tersebut, sepanjang pemerintah mampu memenuhi keinginan pengusaha pariwisata. Dalam hal ini hegemoni kapitalis lebih dominan menjadi faktor pengikat terhadap segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas pariwisata, khususnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

Sebagai akibat pengaruh globalisasi, budaya pariwisata menimbulkan vilanisasi pada zona-zona yang strategis, termasuk vilanisasi di kawasan suci. Vilanisasi yang terjadi memerlukan tanah yang tidak sedikit sehingga terjadi hubungan antara masyarakat, khususnya petani penjual tanah dengan pengusaha pariwisata. Hubungan tersebut menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan berbagai "iming-iming" yang dijanjikan, akhirnya para petani tersebut menjual tanah mereka yang seharusnya tidak perlu dijual. Dalam kondisi tersebut, masyarakat petani sebenarnya sudah tergiring dalam problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Dengan demikian, masyarakat petani penjual tanah telah terhegemoni.

Masyarakat umum di luar petani penjual tanah, yang sadar akan arti tanah, terutama keterkaitan tanah di Bali dengan budaya Bali, mereka melakukan kontra-hegemoni. Kontra-hegemoni yang dilakukan tidak saja terhadap upaya mempertahankan agar penggunaan tanah di wilayah desa mereka mengacu pada *awig-awig*, *Bhisama*, *Trihita Karana* serta peraturan yang dipandang benar (secara moral dan intelektual), tetapi juga melakukan kontra-hegemoni terhadap pembangunan fasilitas pendukung pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih yang berupa akomodasi. Kontra-hegemoni yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk mempertahankan kesucian wilayah pura.

Untuk mengkaji hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, yakni dilihat dari surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Dalam hal ini yang terkait dengan operasionalisasi dan pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih dan kesediaan masyarakat setempat untuk menerima kehadiran pariwisata. Teori Hegemoni dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, yang merupakan permasalahan kedua dalam penelitian ini.

### **2.3.2 Teori Komodifikasi**

Komodifikasi adalah kapitalisme menjadikan sesuatu secara langsung dan sengaja (dengan penuh kesadaran dan perhitungan) sebagai sebuah komoditas belaka. Barker (2004:408) mengemukakan bahwa komodifikasi sebagai proses yang

diasosiasikan dengan kapitalisme di mana objek, kualitas, dan tanda dijadikan sebagai komoditas dan komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar.

Sebagai sebuah gejala ekonomi yang cenderung mengacu pada gejala kontemporer (kemasakinian), pariwisata tidak terelakkan lagi sebagai komodifikasi. Komodifikasi memiliki pengertian yang sangat luas, tidak saja terkait dengan produksi dan diperjualbelikan, tetapi aspek konsumsi dan distribusi juga menjadi lingkup dari komodifikasi. Dalam hal ini Fairclough (1995:207) mengatakan sebagai berikut.

*Commodification is the process whereby social domains and institutions, whose concern is not producing commodities in the narrower economic sense of goods for sale, come nevertheless to be organized and conceptualized in terms of commodity production, distribution, and consumptions.*

Sementara itu, Karl Marx dan George Simmel menyatakan bahwa munculnya gejala komodifikasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia lebih disebabkan oleh ekonomi uang yang didasarkan atas semangat menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya (Turner, 1992:115-138). Dengan semangat tersebut, para pelaku bisnis pariwisata berusaha melakukan berbagai upaya agar bisa meng-komodifikasi-kan semua produk untuk dijual, baik berupa barang maupun jasa kepada wisatawan. Dengan demikian, proses komodifikasi tersebut sebenarnya sudah bisa terjadi dari proses penciptaan produk sampai produk terdistribusi dan kemudian dinikmati oleh wisatawan sehingga semua siklus yang dilalui syarat dengan komodifikasi.

Lebih lanjut Burns dan Holden (dalam Ardika, 2007:94) menyatakan bahwa pariwisata dapat menimbulkan proses komodifikasi terhadap budaya masyarakat lokal karena budaya dianggap sebagai daya tarik wisata. Di sisi lain, pariwisata juga dapat menjaga ke-*ajeg*-an dan kelestarian budaya masyarakat lokal.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori Komodifikasi dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis komodifikasi yang terjadi pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, yang merupakan permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian ini. Pemanfaatan berbagai potensi desa (sumber daya, geografis, dan berbagai aktivitas kehidupan masyarakatnya) sebagai daya tarik wisata, merupakan suatu bentuk komodifikasi yang dilakukan oleh kapitalis (pengusaha/dunia usaha pariwisata). Tujuannya, hanya semata-mata berdasarkan kepentingan akan perolehan uang, tanpa memperhatikan kelestarian budaya masyarakat lokal. Dengan mengatasmakan uang, kawasan suci yang menjadi simbol religiusitas masyarakat setempat dikorbankan demi mendukung fasilitas yang dibutuhkan oleh desa wisata, termasuk juga rumah masyarakat yang sarat dengan budaya lokal (memiliki tiang dua belas atau *saka roras*) dikorbankan dan di rubah menjadi rumah yang bernilai komersial, hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Hal ini terjadi karena hubungan yang erat antara kapitalis (pengusaha pariwisata) dengan kekuasaan pemerintah, sehingga hubungan ini merupakan sumber terjadinya komodifikasi.

### 2.3.3 Teori Dekonstruksi

Dalam teori kontemporer, dekonstruksi sering diartikan sebagai pembongkaran, perlucutan, penghancuran, penolakan dan berbagai istilah dalam kaitannya dengan penyempurnaan arti semula. Dalam hal ini, pembongkaran yang dilakukan memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu penyusunan kembali ke dalam tatanan dan tataran yang lebih signifikan, yakni sesuai dengan hakikat objek sehingga aspek-aspek yang dianalisis dapat dimanfaatkan semaksimalnya. Menurut Kristeva (1980:36-37) dekonstruksi merupakan gabungan antara hakikat destruktif dan konstruktif.

Derrida sebagai tokoh utama teori ini, dalam perkembangannya muncul sebagai seorang yang membuat "makna ganda" dan "makna tersembunyi" yang merupakan cara baru dalam membaca dan menulis. Pandangannya dikategorikan sebagai poststrukturalis karena semua yang ada dianggap teks. Bahan pokok semua teks atau apa pun adalah makna-makna yang perlu diurai atau didekonstruksi. Pandangan mengenai realitas yang objektif harus dicurigai, kemudian terhadap makna-makna itu harus dilakukan interpretasi baru secara kritis (Lajar, 2005:163).

Teori Dekonstruksi berusaha mengadakan perubahan dengan sesuatu yang dihasilkan sendiri, sesuatu yang tidak hanya sekadar mengambil begitu saja atau mengambil alih dari yang sudah tersedia dalam tradisi pemikiran yang hendak dikritiknya. Oleh karena itu, untuk melawan kesewenangan cara berpikir yang selalu menemukan makna tunggal sebuah teks, Derrida melakukan dekonstruksi terhadap konsep yang merupakan titik awal pemikiran dan usaha berpikir modern. Pemikiran Barat Modern terlebih dahulu harus dibongkar agar dapat dibangun kembali cara

berpikir yang baru dan terbuka, yang menerima model pendekatan apa saja terhadap realitas sebagai teks.

Menurut Derrida, strukturalisme telah mencapai keterbatasannya dan gagal membahas hakikat struktur. Gerakan ini tidak pernah mencapai simpulan mengenai peranan "pusat" yang pernah paradoks, dalam hal ini bahwa pusat yang berdasarkan definisinya bersifat unik memang merupakan pusat dalam suatu struktur yang di samping mengendalikan struktur, sekaligus terlepas dari strukturalitas. Hal ini disebabkan oleh pemikiran klasik mengenai struktur bisa mengatakan bahwa pusat, secara paradoksal, berada di dalam struktur dan sekaligus di luarnya (Hart, 2002:73).

Kaum strukturalisme menganggap teks adalah otonom yang lepas dari konteks sehingga teks lepas dari dunia yang melahirkan teks itu sendiri. Menurut pandangan ini, makna yang tersurat dan tersirat dalam teks yang otonom harus dicari dalam teks tanpa harus mengaitkan dengan konteksnya. Dengan kehadiran pandangan ini, muncul pemahaman baru, yaitu poststrukturalisme yang memberikan tempat pada konteks dalam menentukan makna sebuah teks. Kaum poststrukturalisme menolak sebuah makna yang sudah tenang dan mapan. Poststrukturalisme berpandangan bahwa makna senantiasa berada dalam proses menjadi atau tidak pernah final sehingga makna adalah suatu arus interpretasi atas interpretasi.

Dalam pandangan Derrida terdapat dua interpretasi atas interpretasi, yaitu pertama berupaya memaparkan impian-impian suatu kebenaran atas asal-usul, sedangkan yang kedua mendukung permainan dan berupaya melampaui manusia atau humanisme. Jenis yang pertama merupakan interpretasi metafisik dan jenis yang

kedua merupakan interpretasi non-metafisik. Menurut Derrida apa pun jenis interpretasi itu tidak dapat dinilai benar dan salah, tetapi harus dinilai kuat dan lemah. Hal ini disebabkan interpretasi bukanlah dipilih oleh subjek, melainkan ia memaksakan dirinya sendiri kepada subjek. Jadi, ketika seorang peneliti membaca teks, ia senantiasa memasuki wilayah konflik antara kekuatan-kekuatan yang telah mendahului subjektivitas pembaca (Hart, 2002:77).

Dalam konteks inilah pemikiran Derrida diperdebatkan karena usahanya untuk memikirkan kembali kategori-kategori pemikiran yang merupakan problem bagi semua pandangan kolonialisme, modernisme, strukturalisme, dan yang lainnya. Jadi, dekonstruksi adalah suatu metode analisis yang dikembangkan oleh Derrida dengan membongkar struktur dan kode-kode bahasa, khususnya struktur oposisi pasangan, ucapan / tulisan, ada / tiada, murni / tercemar, sehingga menciptakan satu permainan tanda yang tanpa akhir dan tanpa makna akhir (Piliang, 2004:318).

Terkait dengan penelitian ini, teori Dekonstruksi dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, yang merupakan permasalahan ketiga dalam penelitian ini. Teori Dekonstruksi juga dipergunakan untuk mendukung uraian tentang pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan, sebagai hasil pen-dekonstruksi-an terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. Karena keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih adalah implementasi pariwisata berbasis masyarakat.

### **2.3.4 Teori Diskursus Kekuasaan/Pengetahuan**

Diskursus adalah cara menghasilkan pengetahuan beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial, serta saling keterkaitan di antara semua aspek tersebut (Foucault, 2002:9). Diskursus memuat kepentingan pembuatnya sehingga merupakan akumulasi konsep ideologis yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga, dan berbagai macam modus penyebaran pengetahuan. Diskursus lebih luas pengertiannya dari wacana atau pernyataan yang berupa kata-kata yang sifatnya hanya di permukaan.

Teori diskursus kekuasaan/pengetahuan dimasukkan ke dalam ranah teori Poststrukturalisme. Poststrukturalisme secara sederhana dapat dikatakan berarti 'melawan', sehingga poststrukturalisme ini pada intinya melawan teori-teori yang sudah lama menguasai khazanah pengetahuan. Foucault (2002:13) menyatakan bahwa poststrukturalisme merupakan reaksi terhadap strukturalisme yang membongkar setiap klaim akan oposisi pasangan, hierarki dan validitas kebenaran universal, sebaliknya menjungjung tinggi permainan bebas tanda serta kestabilan makna dan kategori intelektual.

Foucault dengan analisis genealogi poststrukturalis, yang diadopsi dari Nietzsche, membahas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan serta jalinan hubungan dalam formasi diskursif. Hal ini berarti dalam genealogi ada kerangka kerja konseptual yang memungkinkan diterimanya beberapa moda pemikiran dan ditolaknyanya beberapa moda pemikiran lainnya. Lebih lanjut Storey (2003:132) juga

mengemukakan bahwa analisis genealogi berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Dalam hal ini beroperasinya kekuasaan dan pengetahuan itu pada formasi diskursif, juga dapat menolak dan menerima moda sebuah pemikiran.

Dalam teori Diskursus Kekuasaan/Pengetahuan, Foucault memaknai kekuasaan tidak berada dalam konteks kepemilikan yang terkait dengan sumber-sumber kekuasaan tertentu, tetapi kekuasaan itu dipraktikkan dalam suatu lingkup, yakni dalam lingkup itu ada posisi-posisi strategis yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Setiap kekuasaan selalu menimbulkan pretensi akan timbulnya rezim kebenaran tertentu yang disebarkan dengan media wacana dari sebuah kekuasaan (Eriyanto, 2001:67). Terkait dengan hal itu, ada pernyataan Mills (1997:18) yang patut disimak, yakni seperti berikut ini.

*Truth is the world; it is produced by virtue of multiple constrain. Each society has its regime of truth; its general politics of truth; that is the types of discourse it harbours and causes to functions as true; the mechanisms and instances which enable one to distinguish true from false statements, the way in which each is sanctioned; the techniques and procedures which are valorized for obtaining truth; the status of those who are charged with saying what count as true.*

Foucault juga menyatakan bahwa kerangka kerja yang dibuat oleh mereka yang berkuasa akan ditetapkan melalui hubungan-hubungan kekuasaan yang mendasarinya (Fakih, 1997:169). Hal ini berarti bahwa setiap wacana yang terkait dengan kebudayaan akan bisa dilepas dari magnet "kepentingan" dan "kekuasaan".

Jika dikaitkan dengan penelitian pengembangan dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, teori Diskursus Kekuasaan/Pengetahuan dipergunakan untuk

mengkaji dan menganalisis kepentingan yang ada pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, serta beroperasinya kekuasaan/pengetahuan pada keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, yang merupakan permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian ini.

### **2.3.5 Teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Mengacu pada wacana dalam pembangunan kepariwisataan, salah satu wacana yang saat ini kembali menghangat adalah tentang pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*tourism based community development*). Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini berbeda dengan pembangunan pariwisata yang bersifat konvensional (yang selama Orde Baru begitu kuatnya dilaksanakan). Jika pada pembangunan yang bersifat konvensional, kebijakan dalam bidang pembangunan pariwisata dengan sistem *top-down*, yakni menggunakan pendekatan sentralistik, sedangkan pada pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menggunakan pendekatan dari bawah ke atas atau menekankan pada sistem *bottom-up*.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat diartikan sebagai teori yang menekankan pada ekonomi rakyat dan pemberdayaan rakyat. Teori ini dipergunakan sebagai reaksi dari kegagalan modernisasi yang diterapkan selama ini di negara-negara berkembang. Pengambilan kebijakan *top-down* dianggap telah melupakan hakikat dasar pembangunan itu sendiri sehingga rakyat bukannya semakin meningkat kualitas hidupnya, tetapi malah dirugikan dan cenderung termarginalkan di lingkungan miliknya sendiri (Pitana, 1999:75). Dengan demikian, kunci utama

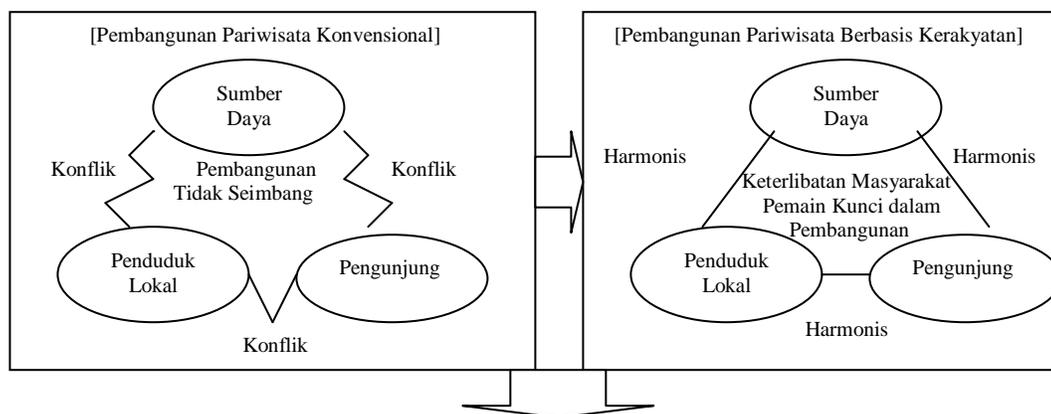
pembangunan (Natori, 2001) adalah keseimbangan dan keharmonisan antara lingkungan hidup, sumber daya, dan kepuasan wisatawan yang diciptakan oleh kemauan masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor tersebut menjadi prioritas untuk keberlanjutan sistem sosial, budaya, dan ekonomi.

Menurut Erawan (2003) pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) memiliki karakteristik (a) berskala kecil, (b) dimiliki oleh anggota/kelompok masyarakat setempat sehingga memberikan manfaat pada masyarakat setempat, (c) memberikan kesempatan kerja dan peluang ekonomi pada ekonomi setempat, (d) lokasi tersebar dan tidak terkonsentrasi di suatu tempat, (e) disain dan kegiatan mencerminkan karakter wilayah setempat, (f) mengedepankan kelestarian warisan budaya (*culture heritage*), (g) tidak mematikan industri dan kegiatan lainnya yang bersifat saling melengkapi, (h) menawarkan pengalaman yang berkualitas pada wisatawan, dan (i) merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan.

Teori pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dianggap sebagai kebalikan dari teori konvensional yang sangat menekankan pembangunan, yakni diawali dari bawah (*bottom-up*). Pada kondisi seperti ini akan terjadi proses *social learning* sehingga masyarakat setempat disyaratkan terlibat dalam berbagai tahap pembangunan. Dengan demikian pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan itu sendiri (Pitana, 1999:76).

Lebih lanjut Natori (2001:6) dalam bukunya *A Guidebook for Tourism-Based Community Development*, membedakan pembangunan pariwisata konvensional

dengan pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan. Pada model pembangunan pariwisata konvensional, interaksi antara sumber daya, penduduk, dan pengunjung tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik. Namun, pada model pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan, sumber daya, penduduk lokal, dan pengunjung berinteraksi secara harmonis, di samping menjadikan masyarakat sebagai pemain kunci dalam pembangunan pariwisata. Adapun penggambaran perbedaan pembangunan pariwisata konvensional dengan pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan adalah sebagai berikut.



- Pembangunan diartikan untuk kesejahteraan hidup masyarakat
- Revitalisasi masyarakat melalui penggunaan sumber daya
- Promosi pariwisata harmonis dengan kehidupan lokal dan lingkungan hidup
- Kapasitas merespon untuk meningkatkan permintaan pariwisata

Gambar 2.1

Konsep dan Arti Penting Pembangunan Pariwisata Berbasis Kerakyatan

Sumber: Natori (2001:6)

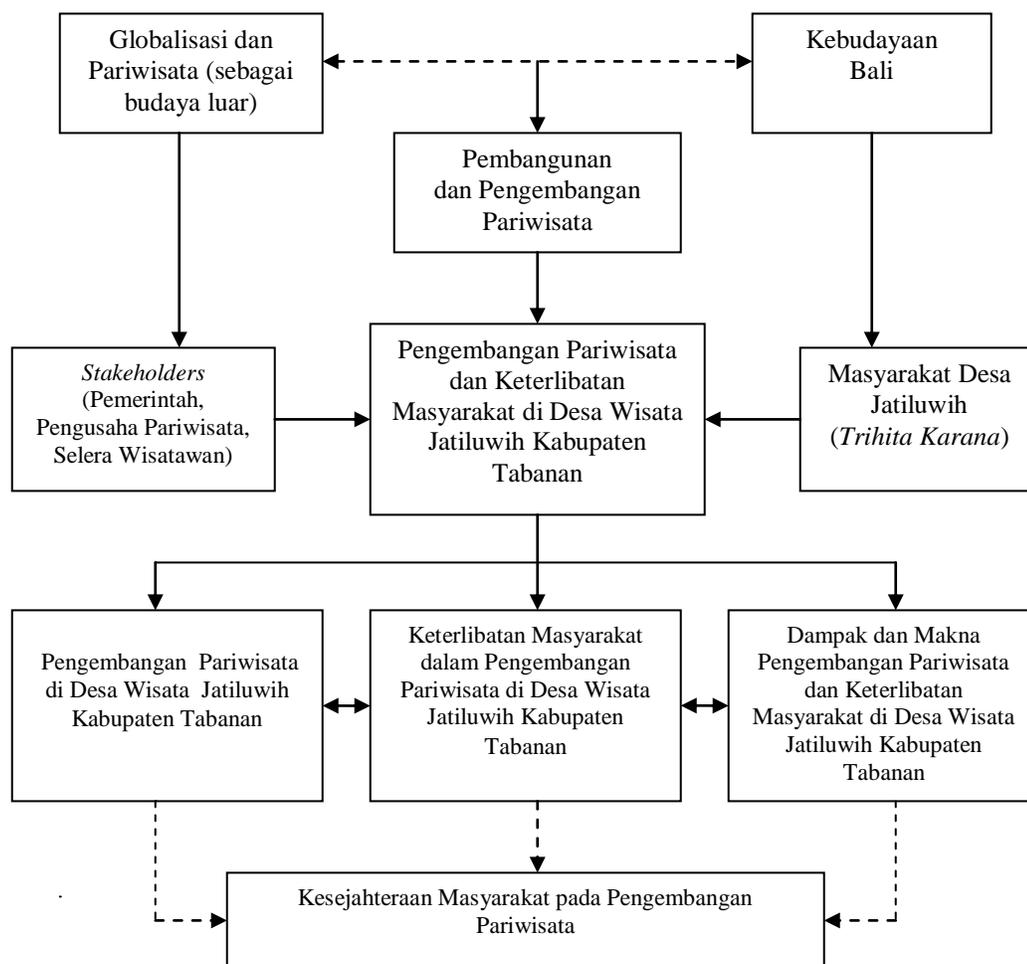
Teori pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, jika dikaitkan dengan penelitian ini, merupakan hasil kristalisasi dari teori-teori kritis yang sudah diuraikan

sebelumnya. Teori ini mempertegas akan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dengan berbagai potensi dan sumber daya lokal yang dimilikinya pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. Keterlibatan masyarakat setempat menjadi penting, mengingat kenyataan selama ini, yaitu manfaat pariwisata lebih banyak berpihak pada pemilik modal yang umumnya berasal dari luar masyarakat setempat. Akhirnya harapan untuk menyejahterakan masyarakat setempat dari pengembangan pariwisata yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat terlaksana.

Teori pembangunan pariwisata berbasis masyarakat sebagai kristalisasi dari teori-teori kritis adalah pembangunan yang berfokus pada penggunaan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) atau merupakan kebalikan dari pembangunan konvensional, dengan menekankan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan pariwisata untuk menyejahterakan masyarakat. Teori ini dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, dan dampak pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, yang merupakan permasalahan pertama, kedua, dan ketiga dalam penelitian ini.

#### **2.4 Model Penelitian**

Dalam penelitian tentang "Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan" diajukan model penelitian seperti Gambar 2.2 berikut ini.



Keterangan tanda gambar:

- ↔ garis yang menunjukkan keterkaitan satu dengan lainnya
- garis yang memberi hubungan atau pengaruh secara sepihak
- ← - - → garis yang memberi pengaruh tidak langsung secara timbal balik
- - - → garis yang memberi pengaruh tidak langsung secara sepihak

Gambar 2.2

Model Penelitian Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan

Secara teoretis dan konseptual, dalam model penelitian ini, tampak ada kekuatan globalisasi dan pariwisata di satu sisi serta kebudayaan Bali di sisi lain. Globalisasi pariwisata disini berupa konsep global, yaitu pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), sedangkan kebudayaan Bali berupa kearifan lokal Bali terkait pariwisata budaya. Selanjutnya, pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih digerakkan oleh dua kekuatan besar, yaitu masyarakat Desa Jatiluwih yang berpegang pada kearifan lokal *Trihita Karana* dalam pengembangan pariwisata dan *stakeholders* (pemerintah dan pengusaha pariwisata), termasuk wisatawan dengan berbagai selernya. Wisatawan dengan berbagai selernya dimasukkan sebagai *stakeholders* karena dalam pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan, menurut Natori (2001:6), yakni ada tiga pilar yang berperan, yaitu sumber daya, penduduk lokal, serta wisatawan/pengunjung.

Fenomena yang berkembang memunculkan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih. Terkait dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian, ada tiga permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis sebagai berikut. *Pertama*, bagaimanakah pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan. Untuk mengkaji dan menganalisis masalah ini akan meminjam teori Komodifikasi, teori Diskursus Kekuasaan/Pengetahuan, dan teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Kedua*, bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan. Untuk mengkaji dan menganalisis masalah ini akan meminjam teori

Komodifikasi, teori Diskursus Kekuasaan/Pengetahuan, teori Hegemoni, dan teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Ketiga*, apa dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan. Untuk mengkaji dan menganalisis masalah ini (khususnya aspek dampak) akan meminjam teori Dekonstruksi dan teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Akhirnya, dalam analisis tahap akhir diharapkan dapat memperoleh pemahaman baru dan bersifat mendalam tentang pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan. Dari penelitian ini diharapkan memberi pengaruh secara tidak langsung berupa tercapainya kesejahteraan masyarakat pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bab III yang merupakan metode dari penelitian ini berisi delapan subbab. Adapun subbab itu adalah rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penentuan informan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis data.

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Sesuai dengan karakteristik kajian budaya, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan analisis deskriptif-kualitatif. Dengan analisis seperti ini, menurut Bungin (2006:34) paradigma penelitian ini adalah interpretivisme (postpositivisme) dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial.

Menurut Soedarsono (2001:46), penelitian kualitatif pada dasarnya adalah suatu penelitian yang dilakukan secara cermat dan detail terhadap suatu subjek, kemudian menganalisisnya. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, sumber-sumber lisan, artefak, peninggalan sejarah, dan rekaman. Sementara itu, menurut Kirk dan Miler (dalam Moleong, 2002:3) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Kajian budaya menurut Barker (2000:383) dipahami sebagai, "An interdisciplinary or post-disciplinary field of inquiry which explores the production and inculcation of maps of meaning; a discursive formation, or regulated way of speaking, concerned with issues of power in the signifying practices of human formation". Dari uraian Barker ini dapat dikemukakan bahwa pembentukan dan penanaman makna (*meaning*) merupakan konsep terpenting dalam kajian budaya (*cultural studies*) sebagai sebuah disiplin yang sifatnya interdisipliner dan bahkan pascadisipliner. Dalam kajian budaya makna berhubungan dengan pembentukan makna (*discursive formation*), yang tidak terpisah dengan kekuasaan (*power*) dalam berbagai macam praktiknya. Lebih lanjut, Barker (2005:36) menegaskan bahwa kajian budaya lebih menyukai metode-metode kualitatif dengan perhatiannya pada makna kebudayaan.

Menurut Danim (2002:60-64), ciri-ciri dominan penelitian kualitatif adalah (1) sumber datanya langsung berupa data situasi alami dan peneliti adalah instrumen kunci, (2) bersifat deskriptif, (3) lebih menekankan pada makna proses daripada hasil, (4) analisis datanya bersifat induktif, dan (5) makna merupakan perhatian utama dalam pendekatan penelitian. Ciri-ciri ini sejalan dengan kajian budaya, termasuk kajian yang dilakukan dalam penelitian ini.

Kaplan dan Manner (1999:256-258) memberikan acuan bahwa pendekatan *emic* adalah pengategorian fenomena budaya menurut warga setempat (pemilik budaya). Namun, jika dilihat dari kecamata peneliti, menurut Bungin (2006:81) pandangan *emic*, artinya peneliti harus menaruh perhatian pada "masalah penting yang diteliti

dari orang yang diteliti”. Selanjutnya, dalam pandangan Levi-Strauss (dalam Harris, 1999:32) pendekatan *etic* dianggap kurang natural dan *emic* lebih natural dalam merepresentasikan fenomena budaya.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Desa ini meliputi tujuh *dusun*, yaitu *Dusun* Jatiluwih Kangin, *Dusun* Jatiluwih Kawan, *Dusun* Kesambahan Kaja, *Dusun* Kesambahan Kelod, *Dusun* Kesambi, *Dusun* Gunungsari Desa, dan *Dusun* Gunungsari Umakayu.

Dalam hal ini yang menjadi dasar pertimbangan dipilihnya Desa Wisata Jatiluwih sebagai lokasi penelitian sebagai berikut.

1. Desa Wisata Jatiluwih memiliki potensi daya tarik wisata yang sangat besar karena keindahan alam berupa terasering sawah, autentisitas tinggalan arkeologi berupa Pura Luhur Petali, aneka kesenian (*sakral* dan *profan*), serta keberadaan *jineng* di depan rumah penduduk.
2. Diusulkan sebagai *World Heritage*.
3. Ada fenomena menarik, yakni berupa ”perlawanan” masyarakat pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih terhadap pembangunan fasilitas pendukung berupa akomodasi, konflik antara pemerintah dengan masyarakat, dan masyarakat terpinggirkan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

4. Adanya realitas di lokasi penelitian bahwa secara ekonomi sebagian besar masyarakat tidak menerima dampak secara langsung dari pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.
5. Pada saat perencanaan pengembangan pariwisata yang berupa Desa Wisata Jatiluwih pada tahun 1992, di Bali sedang gencar-gencarnya terjadi perlawanan rakyat terhadap pengembangan pariwisata, termasuk perlawanan rakyat terhadap hegemoni pemerintah di bidang pariwisata (Bagus, 2004:266-279). Kenyataannya Desa Wisata Jatiluwih berhasil dilaksanakan pengembangannya.
6. Potensi utama yang dimiliki Desa Wisata Jatiluwih (Kabupaten Tabanan) adalah pemandangan alam yang asri dan budaya petani yang masih kental; potensi Desa Wisata Sebatu (Kabupaten Gianyar) adalah seni budaya yang sangat tinggi, baik *visual art* (berupa kerajinan patung dan ukir) maupun *performing art* (berupa pementasan kesenian); dan potensi Desa Wisata Terpadu Penglipuran (Kabupaten Bangli) berupa pola desa/arsitektur yang kuat dan komunalitas yang sangat tinggi. Dengan memperhatikan permintaan (*demand*) dari desa wisata yang meliputi kelompok wisatawan yang tertarik pada budaya, alam pedesaan, dan interaksi antarmanusia (Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknis Desa Wisata Terpadu di Bali, 1992:15), maka penelitian ini sangat tepat dilaksanakan di Desa Wisata Jatiluwih.

Atas dasar pertimbangan itulah, peneliti tertarik untuk meneliti Desa Wisata Jatiluwih dari tiga aspek, yaitu pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih,

serta dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Sebagai sebuah kajian budaya, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif (sebagai data sekunder). Sumber data dalam penelitian ini, di samping sumber data primer juga sumber data sekunder. Sumber data primer adalah informan, sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen, statistik, dan monografi.

### **3.4 Penentuan Informan**

Informan ditentukan dengan cara *purposive*. Menurut Arikunto (1989:113), *purposive* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, *random*, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Mengacu pada batasan di atas, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan pariwisata, keterlibatan masyarakat, serta dampak dan makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, maka informan yang dipilih adalah yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang pariwisata, khususnya terkait dengan pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. Adapun informan dari penelitian ini adalah (1) anggota masyarakat Desa Jatiluwih yang terdiri atas anggota *sekaa-sekaa*, mantan *bendesa adat*, *pemangku*, petani, pegawai (PNS, pegawai swasta dan

ABRI); (2) aparat Desa Jatiluwih; (3) pengurus *Desa Adat* Jatiluwih dan *Desa Adat* Gunungsari; (4) aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan; dan (5) aparat Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Selanjutnya untuk mengetahui kualitas keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, termasuk kualitas produk wisata yang ditawarkan, wisatawan juga diambil sebagai informan.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini instrumen yang dipergunakan adalah (1) peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan penginterpretasian data; (2) daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*), berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan setiap pertanyaan berkembang ke arah yang lebih spesifik; (3) catatan lapangan (*field notes*), dipergunakan untuk mencatat apa yang dilihat, dialami, dan didengar selama pengumpulan data di lapangan; dan (4) alat perekam (*tape recorder* dan kamera) sebagai alat bantu merekam hasil wawancara.

Pencatatan data wawancara menurut Koentjaraningrat (1997:151) ada lima cara, yaitu (1) pencatatan langsung, (2) pencatatan dari ingatan, (3) pencatatan dengan alat *recording*, (4) pencatatan dengan *field rating*, dan (5) pencatatan dengan *field coding*. Dalam penelitian ini data wawancara dicatat dengan mempergunakan alat *recording* dan dibantu dengan pencatatan langsung yang mempergunakan catatan lapangan (*field notes*).

Pedoman wawancara adalah alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan informan yang berbentuk sejumlah pertanyaan yang diajukan dan dijawab secara lisan oleh informan. Menurut Payne (dalam Koentjaraningrat, 1997:144), penggunaan pedoman wawancara untuk menghindari keadaan "kehabisan pertanyaan", karena keadaan seperti itu dapat memacetkan wawancara.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa teknik. Adapun teknik tersebut berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen.

#### **3.6.1 Observasi**

Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan berperan serta. Pengamatan berperan serta ini dilakukan pada aktivitas masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Pengamatan berperan serta ini dilakukan terhadap aktivitas penduduk yang terkait dengan pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, baik berupa aktivitas rutin, insidental, formal, maupun nonformal, termasuk ikut dalam pertemuan-pertemuan di desa (rapat dan penyuluhan).

Menurut Bungin (2006:126) pengamatan juga digunakan sebagai metode utama, di samping wawancara tak terstruktur, yakni untuk mengumpulkan data. Adapun pertimbangan digunakannya teknik ini adalah bahwa apa yang dikatakan orang sering

kali berbeda dengan apa yang orang lakukan. Dalam melakukan pengamatan dilakukan strategi non-intervensi.

Tugas seorang pengamat (*observer*) bukanlah sekadar menjadi penonton dari apa yang menjadi perhatiannya, melainkan menjadi pengumpul sebanyak mungkin keterangan atas dasar apa yang terlihat dan didengar mengenai segala sesuatu yang terkait dengan masalah penelitian. Jadi, seorang pengamat harus mencatat segala sesuatu dengan segera, mengingat ingatan manusia sangat terbatas (Bachtiar, 1993:114).

### **3.6.2 Wawancara**

Wawancara dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan kepada informan sebagai orang yang akan diwawancarai (*interviewee*). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara *face to face* untuk mewawancarai masyarakat. Selanjutnya, untuk mewawancarai pengurus *desa adat*, pengurus desa dinas serta *sekaa* yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, yakni dilakukan wawancara secara terbuka.

Wawancara dalam suatu penelitian, menurut Endraswara (2003:212), bertujuan: (1) menggali pemikiran konstruktif seorang informan yang menyangkut peristiwa, organisasi, perasaan, perhatian, dan sebagainya yang terkait dengan aktivitas budaya; (2) untuk merekonstruksi pemikiran ulang tentang hal ihwal yang dialami informan pada masa lalu atau sebelumnya; dan (3) mengungkap proyeksi pemikiran informan tentang kemungkinan budaya miliknya pada masa mendatang.

Dalam penelitian, seorang peneliti dapat berperan ganda, yaitu bertindak sebagai orang luar (*outsider experience*) dengan harapan agar dapat memperoleh data murni yang memang diperoleh dari informasi para informan, di samping peneliti juga dapat bertindak sebagai orang dalam (*insider experience*) agar lebih mudah untuk memahami apa yang dirasakan dan menangkap pengetahuan yang sulit dikomunikasikan oleh seorang informan (Spradley, 1997). Dalam penelitian ini, peneliti memerankan diri sebagai orang luar (*outsider experience*) pada saat melakukan wawancara dengan harapan dapat memperoleh informasi murni dari informan, dan berperan sebagai orang dalam (*insider experience*) pada saat melakukan analisis data.

Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara mendalam (*indept interview*). Menurut Bungin (2006:145-146) wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, yakni dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

### **3.6.3 Studi Dokumen**

Dalam penelitian ini studi dokumen dimaksudkan sebagai pemanfaatan dokumen dengan cara mengumpulkan dokumen yang terkait dengan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, baik yang diperoleh dari aparat Desa Wisata Jatiluwih maupun dari instansi lain yang terkait dengan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. Dokumen yang berasal dari aparat Desa Jatiluwih dan instansi

terkait tersebut antara lain Monografi Desa Tahun 2005, Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Jatiluwih Tahun 2006, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih, Kecamatan Penebel dalam Angka 2006/2007, Tabanan dalam Angka 2007, Data Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Tabanan Tahun 1998–2007, Sekilas Bali 2007, *Bali Tourism Statistics* 2007, dan Data Bali Membangun 2007. Selanjutnya, dari tokoh masyarakat dan mantan pengurus Lembaga Pertimbangan Desa, peneliti mendapatkan dokumen kasus ”rumah contoh” dan dokumen kasus ”Vila Petali” yang berupa guntingan berita dari surat kabar, surat dari Kepala Desa Jatiluwih, surat dari *Bendesa Desa Adat* Jatiluwih, surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tabanan, surat dari Bupati Tabanan, serta surat keputusan terkait Desa Wisata Jatiluwih.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif dan interpretatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu (1) mendeskripsikan fenomena pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, yang merupakan tahap pengembangan deskripsi yang komprehensif dari hasil penelitian; (2) melakukan verifikasi data pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, yaitu untuk mengetahui data yang dianalisis dan memaknai setiap bagian dari data; (3) merumuskan temuan lapangan secara komprehensif yang menjadi fokus tempat menyatunya hasil temuan lapangan yang lain dengan mengadakan komparasi atau

mencari hubungan antar kelompok yang bermanfaat. Selanjutnya, dilakukan analisis dengan teori yang relevan, diinterpretasikan, dan dibuat simpulan sehingga peneliti memperoleh pemahaman baru terhadap permasalahan, yakni dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan interpretatif.

Dalam melakukan analisis data, menurut Glaser dan Strauss (Mulyana, 2002:174), yakni ada tiga tahap yang perlu dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu (1) mengembangkan kategori-kategori untuk menjelaskan data, (2) menjenuhkan kategori dengan kasus-kasus yang relevan, dan (3) mengembangkan kategori ke dalam kerangka analitik yang lebih umum (induktif). Hubungan antara data, kategori, dan teori yang dipergunakan untuk menganalisis disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1  
Hubungan antara Data, Kategori, dan Teori

No.	Data	Kategori	Teori
1.	Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih	<input type="checkbox"/> Awal Pengembangan Desa Wisata <input type="checkbox"/> Wacana Pengembangan Desa Wisata Terpadu <input type="checkbox"/> Komodifikasi di Desa Wisata Jatiluwih <input type="checkbox"/> Konflik Kepentingan pada Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih	<input type="checkbox"/> Teori Komodifikasi <input type="checkbox"/> Teori Diskursus Kekuasaan /Pengetahuan <input type="checkbox"/> Teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat
2.	Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih	<input type="checkbox"/> Partisipasi Masyarakat <input type="checkbox"/> Hegemoni Pemerintah terhadap Keterlibatan Masyarakat <input type="checkbox"/> Kontra-hegemoni Masyarakat terhadap Hegemoni Pemerintah	<input type="checkbox"/> Teori Hegemoni <input type="checkbox"/> Teori Komodifikasi <input type="checkbox"/> Teori Diskursus Kekuasaan /Pengetahuan <input type="checkbox"/> Teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat
3.	Dampak dan Makna Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih	<input type="checkbox"/> Dampak Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih <input type="checkbox"/> Makna Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih	<input type="checkbox"/> Teori Dekonstruksi <input type="checkbox"/> Teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2008

### 3.8 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data

Sebagai sebuah penelitian kualitatif, hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan secara informal dengan mendeskripsikan secara induktif-analitik melalui kata-kata dan secara formal dengan mempergunakan tabel, gambar, serta foto. Penyajian hasil analisis data dalam bentuk angka-angka hanya merupakan pendukung analisis kualitatif. Hasil analisis data dituangkan ke dalam delapan bab penelitian ini.



**BAB IV**  
**GAMBARAN UMUM DESA JATILUWIH DAN KEPARIWISATAAN**  
**KABUPATEN TABANAN**

**4.1 Gambaran Umum Desa Jatiluwih**

**4.1.1 Lokasi dan Geografi**

Sebelum sampai pada uraian tentang Desa Jatiluwih, karena desa ini berada di Kabupaten Tabanan, untuk memberikan latar terhadap penelitian ini maka secara singkat diuraikan tentang Kabupaten Tabanan. Adapun uraiannya adalah seperti di bawah ini.

Kabupaten Tabanan sampai dengan tahun 2006 memiliki 784 *banjar*, 344 *desa pekraman*, 123 desa, dan 10 kecamatan (BPS Kabupaten Tabanan, 2007). Sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan tersebut adalah Kecamatan Selemadeg, Kerambitan, Tabanan, Kediri, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, Selemadeg Barat, dan Selemadeg Timur. Selanjutnya, untuk distribusi desa, *desa pekraman*, dan *banjar* dinas adalah Kecamatan Selemadeg dengan ibu kota kecamatannya Bajera memiliki delapan desa, 36 *desa pekraman*, dan 56 *banjar* dinas; Kecamatan Kerambitan dengan ibu kota kecamatannya Kerambitan memiliki 15 desa, 28 *desa pekraman*, dan 89 *banjar* dinas; Kecamatan Tabanan dengan ibu kota kecamatannya Tabanan memiliki 11 desa, 12 *desa pekraman*, dan 80 *banjar* dinas; Kecamatan Kediri dengan ibu kota kecamatannya Kediri memiliki 15 desa, 22 *desa pekraman*, dan 93 *banjar* dinas; Kecamatan Marga dengan ibu kota kecamatannya Marga memiliki 14

desa, 28 *desa pekraman*, dan 68 *banjar* dinas; Kecamatan Baturiti dengan ibu kota kecamatannya Baturiti memiliki 12 desa, 53 *desa pekraman*, dan 64 *banjar* dinas; Kecamatan Penebel dengan ibu kota kecamatannya Penebel memiliki 18 desa, 72 *desa pekraman*, dan 129 *banjar* dinas; Kecamatan Pupuan dengan ibu kota kecamatannya Pupuan memiliki 12 desa, 24 *desa pekraman*, dan 63 *banjar* dinas; Kecamatan Selemadeg Barat dengan ibu kota kecamatannya Antosari memiliki sembilan desa, 37 *desa pekraman*, dan 71 *banjar* dinas; serta Kecamatan Selemadeg Timur dengan ibu kota kecamatannya Megati memiliki sembilan desa, 32 *desa pekraman*, dan 71 *banjar* dinas.

Kabupaten Tabanan terletak di sebelah selatan Pulau Bali, dengan batas-batasnya sebelah utara merupakan daerah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, sebelah selatan Samudra Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Secara geografis Kabupaten Tabanan berada pada posisi 8°14'30"—8°30'07" Lintang Selatan (LS) dan 114°54'52"—115°12'57" Bujur Timur (BT) serta dengan luas wilayah mencapai 839,33 km<sup>2</sup> atau 11,90% dari luas Provinsi Bali.

Desa Jatiluwih sebagai salah satu desa di Kecamatan Penebel secara topografi berada pada ketinggian antara 500–700 meter di atas permukaan laut, terletak di kaki gunung Batukaru dan merupakan desa yang terkenal dengan pertaniannya. Oleh karena kondisi tanahnya yang berbukit-bukit dengan perbedaan ketinggian yang besar, maka sawah-sawah yang ada membentuk sawah bertingkat (*terasering*). Hasil pertanian yang utama adalah padi, dan merupakan desa yang mendukung Kabupaten

Tabanan sebagai lumbung padinya Bali. Beras yang terkenal dihasilkan oleh Desa Jatiluwih adalah "beras merah".

Desa yang terkenal dengan beras merahnya ini, dalam kaitan dengan pembangunan kepariwisataan di Bali pada tahun 1990-an mengalami pengembangan dari desa pertanian menjadi desa wisata. Pengembangan tersebut dilakukan di samping Desa Jatiluwih memiliki potensi pertanian dengan organisasi tradisionalnya berupa *subak*, juga karena desa ini memiliki potensi kepariwisataan yang besar, seperti: pemandangan alam, terasering sawah, budaya pertanian, dan *jineng* yang berada di depan rumah-rumah penduduk. Selain potensi tersebut, di bagian lain terdapat daya tarik wisata budaya dan alam Pura Luhur Batukaru. Pura yang merupakan salah satu Pura *Sadkahyangan* di Bali ini di sekelilingnya terdapat hutan dengan udara yang bersih. Di pura ini banyak peninggalan purba berupa arca dan pusaka. Potensi yang dimiliki Pura Luhur Batukaru secara tidak langsung akan mendukung pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata.

Desa Jatiluwih sebagai lokasi penelitian memiliki luas 22,33 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk tahun 2006 mencapai 2.518 orang terdiri atas 1.287 lak-laki dan 1.231 perempuan. Tingkat kepadatan penduduknya adalah 113 orang per km<sup>2</sup>. Dalam hal ini Desa Jatiluwih merupakan desa terluas ketiga di Kecamatan Penebel setelah Desa Wongaya Gede dan Senganan. Sementara itu, jika dilihat dari jumlah keluarga, Desa Jatiluwih berada pada urutan kelima bersama-sama Desa Jegu dengan 803 keluarga setelah Desa Senganan, Penebel, Riang Gede dan Wongaya Gede. Dari kepadatan penduduk, Desa Jatiluwih berada pada urutan kedua terendah setelah Desa

Wongaya Gede. Adapun luas wilayah, jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk (laki-laki maupun perempuan) serta kepadatan penduduk untuk masing-masing desa yang ada di Kecamatan Penebel dapat disajikan seperti Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1  
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan  
di Kecamatan Penebel Tahun 2006

No	Desa / Keluarahan	Luas (km <sup>2</sup> )	K.K.	Penduduk			Kepadatan (km <sup>2</sup> )
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Penebel	4,56	995	2.041	2.205	4.246	931
2.	Pitra	2,66	503	882	1.092	1.974	742
3.	Buruan	4,33	489	928	896	1.824	421
4.	Biaung	4,99	508	1.401	1.393	2.794	560
5.	Babahan	4,32	801	1.683	1.758	3.441	797
6.	Senganan	24,12	1.508	2.789	2.727	5.516	229
7.	Jatiluwhi	22,33	803	1.287	1.231	2.518	113
8.	Mengesta	7,51	756	1.342	1.396	2.738	365
9.	Wongaya Gede	30,23	804	1.359	1.367	2.726	90
10.	Tengkudak	5,06	603	1.176	1.184	2.360	466
11.	Penatahan	3,59	467	982	1.056	2.038	568
12.	Rejasa	3,71	406	831	872	1.703	459
13.	Riang Gede	5,29	903	1.566	1.842	3.408	644
14.	Jegu	3,80	803	1.397	1.491	2.888	760
15.	Tajen	3,13	718	1.693	1.914	3.607	1.152
16.	Pesagi	5,41	504	951	1.017	1.968	364
17.	Tegal- linggah	2,44	415	741	808	1.549	635
18.	Sangketan	4,50	572	891	1.118	2.009	446

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Tabanan Tahun 2007

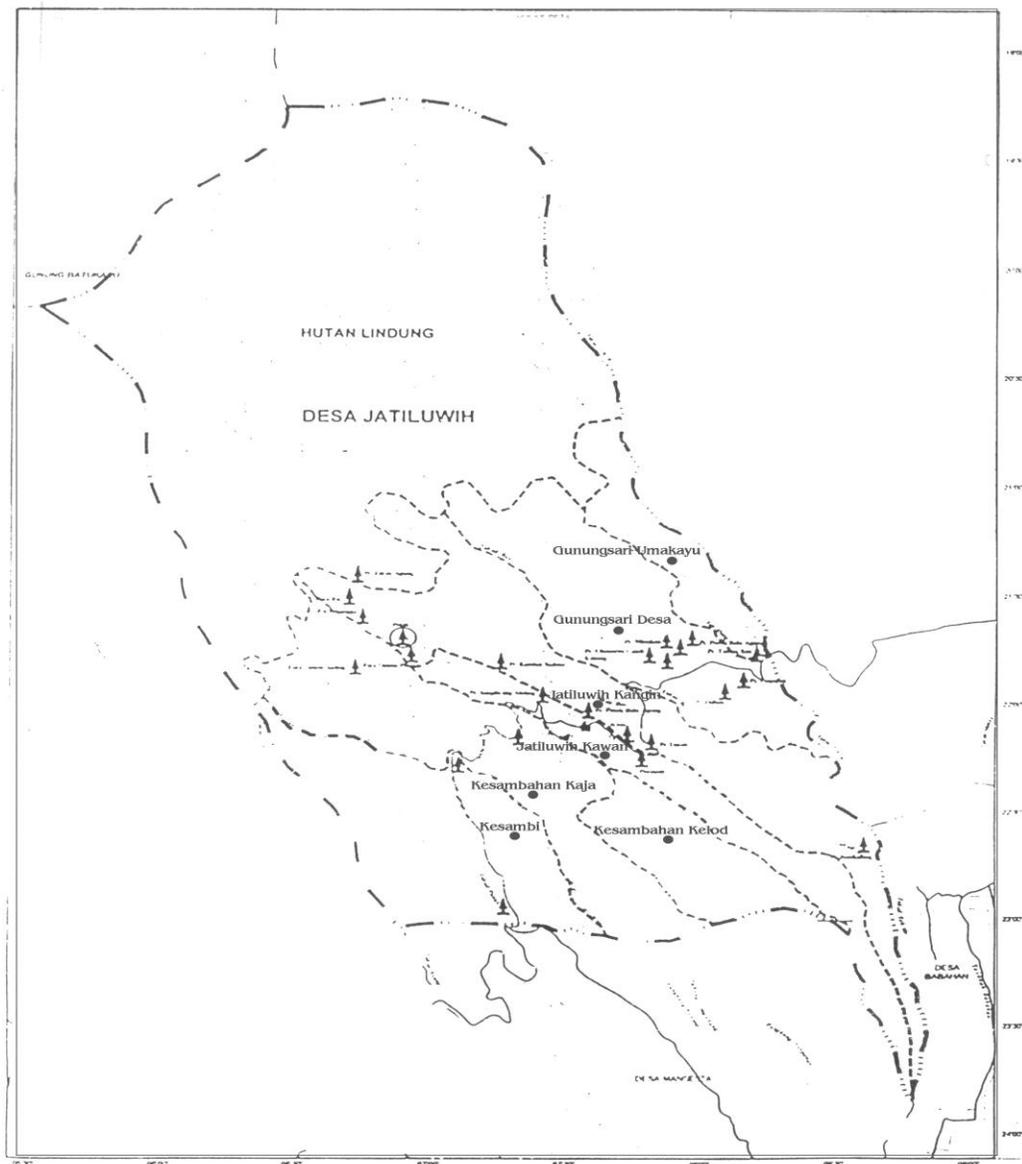
Dilihat dari iklimnya, Desa Jatiluwhi tergolong beriklim sedang dengan suhu udara berkisar antara 24°C–32°C, dengan curah hujan rata-rata 2900 mm/tahun. Hujan jatuh sekitar Oktober sampai dengan April, dan hujan terbanyak jatuh pada Desember dan Januari. Hawanya sejuk dan cenderung kering, siang hari sejuk, tetapi

pada waktu cuaca cerah (tak berawan) matahari cenderung menyengat kulit. Pada malam hari suhu udara di Desa Jatiluwih berkisar antara 18°C–22°C.

Desa Jatiluwih berjarak 27 kilo meter dari ibu kota Kabupaten Tabanan atau 47 kilo meter dari ibu kota Provinsi Bali (Denpasar) dapat dijangkau dengan alat transportasi berupa kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kendaraan umum berupa colt/minibus melalui Penebel dan berakhir di Senganan dan Jatiluwih. Namun, jika mempergunakan kendaraan pribadi, ada empat alternatif jalur yang dapat dilalui untuk menuju Jatiluwih, yaitu 1) Tabanan–Penebel–Wongaya Gede–Jatiluwih; 2) Tabanan–Penebel–Senganan–Jatiluwih; 3) Mengwi–Marga–Senganan–Jatiluwih; dan 4) Mengwi–Pacung–Senganan–Jatiluwih. Seluruh jalur tersebut berupa jalan raya beraspal dengan kondisi yang sebagian relatif baik dan dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan empat. Kondisi jalan desa yang menghubungkan antara *dusun* yang satu dengan yang lain (sekitar 16,5 kilo meter) sebagian besar berupa jalan tanah yang diperkuat dengan beton dan batu. Jalan kabupaten yang berada antara Desa Jatiluwih hingga *Dusun* Kesambi, lebih kurang sepanjang lima kilo meter, kondisinya rusak parah dan sering ”dikomplain” oleh wisatawan.

Desa Jatiluwih apabila dilihat dari batas-batas wilayahnya adalah di sebelah utara berbatasan dengan hutan negara, Kabupaten Buleleng dan Desa Pujungan; di sebelah timur berbatasan dengan Desa Senganan; di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Babahan dan Desa Mengesta; serta di sebelah barat berbatasan dengan Desa Wongaya Gede. Sebagai sebuah wilayah desa, secara administratif Desa Jatiluwih terdiri atas tujuh *dusun*, yaitu Jatiluwih Kangin, Jatiluwih Kawan,

Gunungsari Desa, Gunungsari Umakayu, Kesambi, Kesambahan Kaja, dan Kesambahan Kelod seperti Gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 4.1

Peta Desa Jatiluwih

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005  
tentang RDTR Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih

#### 4.1.2 Sejarah

Sejarah Desa Jatiluwih sejauh yang bisa digali tidak/belum dapat ditemukan dalam sumber tertulis, tetapi hanya dari penuturan sesepuh masyarakat atau tokoh masyarakat. Informasi yang diperoleh dari sesepuh masyarakat atau tokoh masyarakat tersebut berkisar pada asal usul nama Desa Jatiluwih serta riwayat asal masyarakat yang bermukim di desa setempat.

Ada dua sumber yang mengemukakan mengenai asal usul nama *jatiluwih*. Sumber pertama mengemukakan bahwa *jatiluwih* berasal dari kata *jaton* dan *luwih*. *Jaton* artinya 'jimat' dan *luwih* artinya 'bagus'. Bertitik tolak dari kata-kata tersebut, *jatiluwih* berarti sebuah desa yang memiliki jimat yang benar-benar bagus. Namun, sumber kedua mengemukakan bahwa karena di desa tersebut terdapat kuburan burung Jatayu, maka nama Jatayu menjadi lekat dengan tempat ini. Lama kelamaan berubah lafal menjadi *jaton ayu* (*jaton* berarti 'jimat', *ayu* berarti *luwih* atau 'bagus') dan akhirnya menjadi *jatiluwih*.

Mengenai penduduknya, semua penduduk Desa Jatiluwih adalah pendatang dari berbagai daerah pada masa yang berbeda-beda. Oleh karena itu ada beberapa nama kelompok yang dipercayai berkaitan erat dengan asal mereka. Ada kelompok masyarakat yang merupakan pelarian dari daerah Kusamba (Klungkung) yang datang pada masa Patih I Dewa Agung Putu Maruti dari Puri Kaleran Karangasem menyerbu Klungkung. Kelompok ini dipercayai berhubungan erat dengan penduduk *Dusun/Banjar* Kesambahan. Kata Kesambahan berasal dari kata "sambeh" (bahasa Bali) yang berarti terpencah. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di kaki Gunung

Batukaru adalah pencaran dari Kusamba, wilayah Kabupaten Klungkung, dan tempat tinggal pendatang dari Kusamba itu dinamakan Kesambahan. Sedangkan penduduk lainnya berasal dari daerah Singaraja, yang merupakan keturunan dari Pasek Gobleg yang lari karena difitnah dan dihukum mati oleh Raja Buleleng (Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknis Desa Wisata Terpadu Di Bali, 1992:28).

#### **4.1.3 Demografi**

Dilihat dari jumlah penduduk, Desa Jatiluwih pada tahun 2006 berpenduduk 2.518 orang yang terdiri atas 1.287 orang laki-laki dan 1.231 orang perempuan. Mereka berusia antara 0 sampai dengan lebih dari 80 tahun.

Jika dikaitkan dengan usia kerja, sebagian besar (2.138 orang) atau 84,91% penduduk Desa Jatiluwih berusia dari 0 sampai 54 tahun atau berada pada usia kerja, sedangkan sisanya 380 orang atau 15,09% berusia lebih dari 55 tahun. Dari jumlah penduduk yang mencapai 2.518 orang tersebut, terdiri atas 803 keluarga dan tiap-tiap keluarga terdiri atas rata-rata tiga orang. Jumlah terbesar dari distribusi keluarga menurut kelompok umur dan jenis kelamin tersebut adalah sebanyak 253 orang merupakan penduduk berusia antara 25 tahun sampai dengan 29 tahun, sedangkan jumlah terkecil adalah penduduk berusia lebih dari 80 tahun yang berjumlah 30 orang. Kecuali kelompok umur 0 tahun sampai 4 tahun dan 5 tahun sampai 9 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki tahun 2006 adalah 1.287 orang atau 51,11% dari total jumlah penduduk Desa Jatiluwih yang mencapai 2.518 orang.

Adapun distribusi penduduk Desa Jatiluwih menurut kelompok umur dan jenis kelamin adalah seperti Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2  
Penduduk Desa Jatiluwih menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Tahun 2006

No.	Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 – 4	67	68	135
2.	5 – 9	88	89	177
3.	10 – 14	104	101	205
4.	15 – 19	97	97	194
5.	20 – 24	113	108	221
6.	25 – 29	127	126	253
7.	30 – 34	119	113	232
8.	35 – 39	117	109	226
9.	40 – 44	95	91	186
10.	45 – 49	87	83	170
11.	50 – 54	72	67	139
12.	55 – 59	55	48	103
13.	60 – 64	52	47	99
14.	65 – 69	36	31	67
15.	70 – 74	24	21	45
16.	75 – 79	17	19	36
17.	80 +	17	13	30
	J u m l a h	1.287	1.231	2.518

Sumber: BPS Kabupaten Tabanan Tahun 2007

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, penduduk Desa Jatiluwih sebagian besar berpendidikan tamat Sekolah Dasar mencapai 625 orang atau 37,79% dari jumlah penduduk tahun 2005. Adapun distribusinya adalah seperti Tabel 4.3.

Untuk mendukung proses belajar mengajar, di Desa Jatiluwih pada tahun 2006 terdapat dua gedung TK milik swasta dengan 28 orang murid dan dua orang guru, tiga gedung SD Impres Negeri dengan 214 orang murid dan 22 orang guru. Gedung

SMP dan SMA di Desa Jatiluwih belum ada, sehingga penduduk Desa Jatiluwih yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP mereka akan bersekolah ke Desa Senganan dan untuk SMA mereka akan pergi ke Desa Penebel. Namun tidak tertutup kemungkinan di antara mereka ada juga yang melanjutkan pendidikan SMA atau SMK ke kota Tabanan dan bahkan ke Denpasar. Selanjutnya, untuk yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi (Diploma I hingga S1) ada yang menempuh di Kabupaten Tabanan dan ada juga yang ke Denpasar serta kabupaten lainnya di Bali, termasuk ke luar Bali.

Tabel 4.3

## Penduduk Desa Jatiluwih menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2005

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Tamat SD/ sederajat	625	37,79
2.	Tamat SLTP/ sederajat	342	20,68
3.	Tamat SLTA/ sederajat	430	26,00
4.	Tamat Diploma I	40	2,42
5.	Tamat Diploma II	37	2,24
6.	Tamat Diploma III	52	3,14
7.	Tamat Sarjana (S1)	128	7,73
	Jumlah	1.654	100,00

Sumber: Diolah dari Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2005

Jika dilihat dari umur penduduk yang meninggal sebagai cerminan dari angka harapan hidup, angka harapan hidup penduduk Desa Jatiluwih pada tahun 2005 berkisar antara 55–80 tahun, dengan usia termuda yang meninggal adalah 10 hari. Nama-nama penduduk Desa Jatiluwih yang meninggal tahun 2005 beserta umurnya adalah sebagai berikut: I Ketut Jenjer (60 tahun), I Made Kamar (80 tahun), I Ketut Kenjir (60 tahun), I Made Rumpig (65 tahun), I Made Degeg (55 tahun), I Made

Gasir (60 tahun) dan I Wayan Ratna (10 hari). Pada tahun 2005 tercatat 23 orang ibu yang melahirkan bayi. Selanjutnya, pada tahun 2006, jika dilihat dari aspek mutasi penduduk yang terdiri atas jumlah kelahiran (natalitas), jumlah kematian (mortalitas), jumlah pendatang dan jumlah penduduk yang pergi, menunjukkan angka-angka sebagai berikut: (1) jumlah kelahiran sebanyak 20 orang terdiri atas 11 orang laki-laki dan sembilan orang perempuan; (2) jumlah kematian sebanyak 16 orang terdiri atas lima orang laki-laki dan 11 orang perempuan; (3) pendatang berjumlah 14 orang terdiri atas sembilan laki-laki dan lima perempuan; dan (4) penduduk pindah berjumlah sepuluh orang terdiri dari lima laki-laki dan lima perempuan. Penduduk lahir lebih banyak daripada yang mati dan pendatang lebih banyak daripada penduduk yang pindah (Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa, 2005/2006:70-71).

Dalam rangka menjaga kesehatan lingkungan dan menjamin agar sanitasi terpelihara dengan baik, penduduk Desa Jatiluwih dalam melakukan aktivitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) sebanyak 788 keluarga sudah mempergunakan kamar mandi dan jamban, sisanya sebanyak 15 keluarga saja yang masih pergi ke sungai untuk melaksanakan aktivitas MCK. Namun, jika mereka mengalami gangguan kesehatan, sebagian besar penduduk Desa Jatiluwih berobat ke dokter di Puskesmas terdekat. Untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, Puskesmas yang ada di desa setempat menyiapkan tenaga medis berupa bidan desa sebanyak dua orang dan dokter sebanyak satu orang. Namun demikian, masih ada sebagian kecil masyarakat setempat, yakni bila mengalami gangguan kesehatan, mereka berobat ke

dukun atau mempergunakan obat tradisional (Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa, 2005/2006:72).

#### **4.1.4 Sosial-ekonomi dan Pertanian**

Dalam rangka menggairahkan kondisi perekonomian, diperlukan keberadaan suatu sarana perekonomian baik yang berupa pasar maupun KUD dan koperasi non-KUD. Sarana perekonomian yang berupa pasar umum, pasar hewan, KUD dan koperasi non-KUD pada saat penelitian ini dilaksanakan Desa Jatiluwih belum memiliki.

Sebagai upaya untuk mengatasi ketiadaan dari sarana perekonomian tersebut di atas, Desa Jatiluwih memiliki sebuah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dalam hal ini LPD dimaksudkan sebagai salah satu lembaga konsentrasi *desa adat* yang bergerak di bidang perekonomian, terutama pada kegiatan simpan pinjam. Demikian pula LPD ini merupakan sebuah lembaga modern yang dipersiapkan oleh struktur tradisional, dalam hal ini oleh *Desa Adat* Jatiluwih. Keanggotaan LPD *Desa Adat* Jatiluwih adalah seluruh anggota *Desa Adat* Jatiluwih, artinya tidak terbatas pada mereka yang melakukan aktivitas simpan pinjam saja. Sekretariat LPD *Desa Adat* Jatiluwih berada pada ruangan di Balai Banjar *Desa Adat* Jatiluwih.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, penduduk Desa Jatiluwih memiliki mata pencaharian utama yang sangat beragam. Mata pencaharian utama penduduk Desa Jatiluwih Tahun 2006, yakni di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, industri kecil, pengangkutan, dan pemerintah/jasa. Dari mata

pencaharian utama tersebut terlihat bahwa pertanian mendominasi pekerjaan penduduk Desa Jatiluwih yang mencapai 77,65% dari total penduduk yang bekerja pada tahun 2006, kemudian disusul oleh mereka yang bekerja pada berbagai bidang di pemerintahan, termasuk bidang jasa sebesar 7,01%; bidang peternakan sebesar 5,99%; bidang perkebunan mencapai 5,16%; bidang perdagangan sebesar 3,69%; bidang pengangkutan 0,36%; dan pada bidang industri 0,14%. Adapun secara terinci mata pencaharian utama penduduk Desa Jatiluwih tahun 2006, yakni seperti Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4

## Mata Pencaharian Utama Penduduk Desa Jatiluwih Tahun 2006

No.	Mata Pencaharian Utama	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Pertanian	1.685	77,65
2.	Peternakan	130	5,99
3.	Perikanan	0	0,00
4.	Perkebunan	112	5,16
5.	Perdagangan	80	3,69
6.	Industri	3	0,14
7.	Pertambangan	0	0,00
8.	Listrik/PAM	0	0,00
9.	Pengangkutan	8	0,36
10.	Perbankan	0	0,00
11.	Pemerintahan/Jasa	152	7,01
12.	Lainnya	0	0,00
	J u m l a h	2.170	100,00

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Tabanan Tahun 2007

Tabel 4.4 menunjukkan jumlah penduduk menurut mata pencaharian utama tahun 2006 lebih kecil dari jumlah penduduk tahun 2006 yang mencapai 2.518 orang. Hal ini karena ada penduduk yang tidak memiliki mata pencaharian, di samping ada yang belum termasuk pada usia kerja.

Dalam rangka mendukung pembangunan desa, diperlukan pendanaan, baik yang bersumber dari luar desa maupun yang bersumber dari desa. Tahun 2005 menurut Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa, jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa Jatiluwih sebesar Rp 844.070.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah). Penerimaan tersebut berasal dari bantuan Kabupaten Tabanan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau 2,96%, bantuan pusat Rp 2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) atau 0,24%, pendapatan asli desa Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 1,72%, swadaya masyarakat Rp 689.175.355,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) atau 81,65% dan dari lainnya Rp 113.354.645,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) atau 13,43%.

Dari luas Desa Jatiluwih yang mencapai 22,33 km<sup>2</sup> atau 2.233 hektar, tanah sawahnya mencapai 303 hektar dan tanah kering mencapai 1.930 hektar. Dari luas tanam serta produksi tanaman tersebut, padi merupakan tanaman yang paling dominan ditanam di Desa Jatiluwih, dengan luas tanam mencapai 606 hektar dengan produksi 2.236,80 ton; kelapa dengan luas tanam mencapai 64,85 hektar dengan produksi 48,02 ton; kopi dengan luas tanam mencapai 37,51 hektar dengan produksi 8,32 ton; kakao dengan luas tanam mencapai 31,65 hektar dengan produksi 7,5 ton; cengkeh dengan luas tanam mencapai 9,7 hektar dengan produksi 0,12 ton; dan panili dengan luas tanam mencapai 1,5 hektar dengan produksi 0,02 ton. Selanjutnya, tanaman pertanian serta perkebunan lainnya yang tidak dijumpai ditanam adalah padi

ladang, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, serta tembakau. Tabel 4.5 di bawah ini menyajikan luas tanam dan produksi masing-masing jenis tanaman yang ditanam.

Tabel 4.5

## Luas Tanam dan Produksi Tanaman di Desa Jatiluwih Tahun 2006

No.	Jenis Tanaman	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)
1.	Padi Sawah	606,00	2.236,80
2.	Kopi	37,51	8,32
3.	Cengkeh	9,70	0,12
4.	Panili	1,50	0,02
5.	Kelapa	64,85	48,02
6.	Kakao	31,65	7,60
	J u m l a h	751,21	2.300,88

Sumber: BPS Kabupaten Tabanan Tahun 2007

Padi Bali sebagai tanaman yang dominan ditanam di Desa Jatiluwih, dalam pelaksanaan penanamannya mengikuti beberapa tahapan. Tahapan penanaman padi Bali oleh masyarakat setempat disebut sebagai *pula pali metandur* padi bali *ring carik*. Adapun *pula pali metandur* padi bali *ring carik* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Jatiluwih adalah sebagai berikut.

1. *Mendak/magpag toya*, upacara ini ditujukan agar air mengalir melalui jalur yang sudah ditentukan. Upacara ini dilaksanakan pada sumber air seperti *empelan* yang ada di lokasi Desa Jatiluwih.
2. Pada pembagian air pertama (*tembuku aya*) diadakan upacara dengan tujuan untuk membersihkan air. Upacara ini ditujukan kepada *Hyang Brahma*.
3. Pada *ulun carik (andungan)*, diadakan upacara *peparipurna* yang ditujukan kepada *Hyang Iswara*.
4. Mulai dilakukan pengolahan tanah (*ngendagin*). Pada tahap ini di sawah diadakan upacara agar petani selamat dan peralatan dapat berfungsi sesuai kegunaannya.
5. *Mewinih/ngurit*, tahapan ini ditandai dengan upacara agar benih padi bisa tumbuh dengan baik dan tidak diganggu hama atau penyakit.

6. *Ngerasakin*, tujuannya adalah (1) membersihkan sawah menjelang penanaman padi, (2) *ngelabain* hama dan penyakit, tujuannya agar bibit padi yang akan ditanam tidak dirusak hama. Upacara ini dilaksanakan sebelum benih padi tersebar di sawah.
7. Setelah bibit padi ditanam di sawah, selanjutnya dilaksanakan upacara *newasain/nuasen*. Upacara ini tujuannya agar bibit tumbuh dengan baik.
8. Setelah padi berumur satu bulan tujuh hari (menurut penanggalan Bali) atau 42 hari, dilaksanakan upacara *tutug kambuhan*. Tujuan upacara ini adalah agar padi tumbuh dengan baik.
9. Menjelang padi berbuah, menghaturkan buah-buahan yang rasanya asam (minimal tiga jenis). Tujuannya adalah agar bunga padi tumbuh dengan sempurna.
10. Menjelang panen (empat bulan Bali atau 140 hari), diadakan upacara *ngusaba*. *Ngusaba* dilaksanakan di dua tempat, yaitu (1) *ngusaba* di *ulun carik* atau *bedugul*, dilaksanakan dua kali *ngusaba* kecil dan satu kali *ngusaba* besar; (2) *ngusaba* di *carik/sawah* sebanyak satu kali. Pada upacara *ngusaba* secara simbolis padi diketam sebanyak satu genggam. Setelah dikeringkan, padi tersebut ditumbuk, dan beras hasil tumbukan itu dipakai untuk mengisi ketupat sebanyak satu buah. Setelah dimasak, ketupat tersebut disajikan dengan mempergunakan daun *dadap* dan dipersembahkan kepada sawah, *merajan*, di halaman rumah (*natah*), saluran air dan tempat suci, serta tempat-tempat menghaturkan *saiban* sehari-hari. Tujuannya adalah meminta penghematan atau *penginih-inih*.
11. Sebelum panen dilakukan, diadakan upacara *ngadegang dewa nini* atau hari baik. Untuk mewujudkan *purusa pradana*, diambil 66 batang padi. Padi tersebut dibagi dua, 33 batang padi diambil sebagai simbol *purusa* dan 33 batang padi sisanya sebagai simbol *pradana*.
12. Panen.
13. Setelah padi di rumah dilakukan upacara *nyangket*, tujuannya adalah agar pe-*ngadeg*-an *Betara Sri* dapat berlangsung sempurna. Setelah upacara ini dilanjutkan dengan penyimpanan padi di lumbung.
14. Setelah padi naik di lumbung, padi diupacarai. Upacara ini dikenal dengan istilah *mantenin*. Tujuannya agar *Betara Sri* datang dari empat penjuru berkumpul di lumbung padi.
15. Tiga hari setelah *mantenin*, mulai menurunkan padi secara simbolis sebanyak satu ikat.
16. Padi yang satu ikat tersebut setelah diturunkan dari lumbung langsung ditumbuk, selanjutnya dimasak dan nasinya dipersembahkan ke sawah dan tempat-tempat suci di lingkungan pemilik padi tersebut.

17. Penurunan padi secara keseluruhan dari lumbung untuk diolah sesuai dengan keperluan pemiliknya (Tuntunan Gunaning Masasawahan, 1978:14-33).

Selain komoditas pertanian, di Desa Jatiluwih juga terdapat peternakan, baik untuk mendukung pengolahan sawah maupun untuk diperdagangkan dan konsumsi masyarakat setempat. Adapun populasi ternak di Desa Jatiluwih pada tahun 2006, yakni sapi sebanyak 1.366 ekor, babi 1.622 ekor, kerbau 25 ekor, ayam kampung 2.766 ekor, ayam ras 350.000 ekor dan itik 1.000 ekor (Kecamatan Penebel dalam Angka, 2006/2007:50-51).

#### **4.1.5 Agama dan Sosial-budaya**

Seperti di desa-desa lain di Bali, di Desa Jatiluwih berkembang dan bertahan sistem nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari agama Hindu. Sistem nilai yang sebagian besar tercermin pada *awig-awig* tersebut mengatur praktik keagamaan, sistem sosial, dan interaksi antarindividu, di samping mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar serta manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang dikenal dengan *Trihita Karana*.

Sedemikian kuatnya peranan agama Hindu sehingga berbagai aktivitas sosial dan ekonomi tidak bisa terlepas dari berbagai upacara agama. Upacara tersebut mulai dari upacara bayi di dalam perut ibunya hingga upacara orang meninggal. Selain itu, ada juga upacara pada aktivitas pertanian, peternakan, serta upacara yang terkait dengan peralatan untuk kehidupan sehari-hari.

Dari jumlah penduduk Desa Jatiluwih tahun 2006 sebanyak 2.518 orang, seluruh warga (*krama*) beragama Hindu. Masing-masing warga terikat pada kekerabatan keluarga batih. Beberapa keluarga batih secara bersama-sama *menyungsong* sarana peribadatan yang disebut *sanggah pesimpangan*. Sementara itu, beberapa kelompok keluarga batih yang memiliki hubungan garis keturunan berdasarkan sistem patrilineal, *menyungsong* sarana peribadatan yang disebut *sanggah gede*.

*Desa Adat* Jatiluwih memiliki 22 buah pura, baik yang bersifat pura keluarga, pura desa, maupun pura *kahyangan jagat*. Adapun nama-nama ke-22 pura tersebut adalah (1) Pura Dalem, (2) Pura Desa, (3) Pura Taksu Agung, (4) Pura Batur, (5) Pura Dukuh, (6) Pura Merajapati, (7) Pura Luhur Petali, (8) Pura Sang Hyang Meling, (9) Pura Saro Wanen, (10) Pura Jero Made, (11) Pura Luhur Rambut Sedana, (12) Pura Batu Madeg, (13) Pura Manik Galih, (14) Pura Rsi, (15) Pura Bujangga, (16) Pura Dalem Two, (17) Pura Dalem Sading, (18) Pura Lingga Sari, (19) Pura Manik Selaka, (20) Pura Bukit Jambul, (21) Pura Puseh Petali, dan (22) Pura Simpang.

Oleh karena mayoritas penduduk Desa Jatiluwih adalah petani, mereka mempunyai keyakinan dan kebudayaan sesuai profesinya. Upacara-upacara yang menonjol di desa ini adalah upacara yang khas dilakukan oleh petani, yaitu persembahyangan untuk memohon kepada *Ida Sang Hyang Widhi* agar berhasil dalam mengolah tanahnya, airnya tetap lancar, dan tiadanya hama yang menyerang tanaman mereka. Upacara tersebut dilakukan, baik pada sawah mereka masing-masing maupun upacara yang dilakukan pada pura milik *subak* yaitu Pura *Bedugul*.

Pelaksanaan upacara menjadi menarik karena dilaksanakan di sawah-sawah dengan latar belakang pemandangan Gunung Batukaru dan terasering sawah.

Upacara-upacara yang dilakukan oleh para petani di Desa Jatiluwih tersebut dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, baik berdasarkan *sasih* (bulan), *thithi suklapaksa* (tanggal) maupun berdasarkan sistem *pawukon* yang digabung dengan *pancawara* (sistem hari yang berjumlah lima), *sadwara* (sistem hari berjumlah enam) dan *saptawara* (sistem hari berjumlah tujuh). Namun demikian terdapat pula upacara yang bersifat insidental seperti upacara *Pancayadnya*.

Sebagai masyarakat yang bercorak agraris, upacara keagamaan yang ditujukan bagi kehidupan dan keberlangsungan pertanian mendapat tempat yang istimewa. Upacara tersebut diselenggarakan oleh *subak* dan berlangsung mulai Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan berakhir Juni.

Desa Jatiluwih, seperti umumnya desa di Bali, orientasinya berpedoman pada konsep *kaja-kelod*. Dalam hal pembagian kawasan suci, desa ini tidak berpedoman pada konsep *nawasanga*, tetapi berorientasi pada *kaja* atau gunung. Desa Jatiluwih tidak menjadikan Gunung Agung sebagai pusat orientasi seperti desa-desa lain di Bali, tetapi berorientasi pada gunung terdekat, yaitu Gunung Batukaru. Hal ini tampak pada komponen-komponen yang ada di tiap-tiap pekarangan.

Komponen di pekarangan yang paling jelas memperlihatkan orientasi ini adalah *sanggah*. Area paling suci dalam pekarangan berada pada zona paling dekat ke arah gunung. Letak *sanggah* di Desa Jatiluwih juga berorientasi ke arah jalan. Pekarangan yang memanjang tegak lurus terhadap jalan mempunyai pembagian ruang menurut

*Tritirta Karang* menentukan bahwa daerah *utama* adalah dekat gunung dan jalan. Semakin jauh dengan gunung dan jalan nilai ruang semakin menurun, yaitu menjadi *madya* dan *nista*.

Dalam satu pekarangan terdapat beberapa kepala keluarga yang di antara mereka mempunyai hubungan kekeluargaan. Mereka masing-masing mempunyai beberapa bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda. Dalam pola pekarangan yang masih asli jenis rumah yang dimiliki oleh tiap-tiap keluarga adalah sama. *Meten* tempat untuk tinggal dan tidur, dapur (*paon*) untuk memasak, dan lumbung merupakan tempat yang spesifik dan sebagai realitas bahwa penduduk setempat adalah petani. Dengan pesatnya pertumbuhan jumlah warga, saat ini pemilikan bangunan sudah tidak sama. Hal ini terjadi karena bangunan sudah diwariskan sehingga bangunan beserta tanahnya terbagi-bagi sesuai dengan jumlah keturunan yang berhak memperoleh warisan.

Dalam pekarangan, selain terdapat bangunan milik pribadi juga terdapat bangunan milik bersama, yaitu *bale*. *Bale* biasanya dipergunakan untuk melangsungkan kegiatan yang bersifat kebersamaan atau komunal dari warga dalam pekarangan tersebut. Satu pekarangan dalam pola aslinya memiliki satu *bale*. Jika ada bangunan dengan pekarangan luas dan memanjang dengan jumlah kepala keluarga yang banyak, bisa terdapat *bale* lebih dari satu.

*Bale* komunal di Desa Jatiluwih jika dibandingkan dengan tipe *bale* di Bali adalah seperti *bale sakenem*. Tetapi di Desa Jatiluwih *bale* ini bertiang 12 dan ada juga yang bertiang sembilan, dengan dua sisi tertutup tembok, beratap *tajug*. Namun,

untuk atap ada yang tanpa tiang penyangga tengah dan ada pula yang dengan tiang penyangga tengah. Selanjutnya, permukaan atap aslinya adalah alang-alang/*sirap* dan sekarang banyak yang sudah diganti dengan seng atau genteng.

Bangunan-bangunan *meten* dan *paon* kondisi aslinya berdinding tanah dengan konstruksi utama dari atap kayu. Saat ini bangunan-bangunan tersebut sudah banyak yang dipugar dengan mempergunakan bahan-bahan modern seperti semen dan batu bata. Sedangkan yang masih bertahan adalah lumbung berbentuk panggung dengan tiang enam dan empat. Lumbung bertiang enam dibuat lebih dahulu daripada yang bertiang empat. Dinding lumbung terbuat dari kayu, dan untuk atapnya yang asli terbuat dari alang-alang. Kondisi lumbung tersebut sudah banyak yang di rubah, atapnya tidak lagi menggunakan alang-alang, tetapi menggunakan seng.

Letak lumbung berderet atau berkelompok di tempat yang paling dekat dengan arah *kaja* atau paling selatan. Lumbung ini mendapatkan perawatan yang istimewa dari pemiliknya karena merupakan kebutuhan utama dari petani yang mendasarkan hidupnya pada padi yang disimpan dalam lumbung tersebut. Bahkan ada pemilik lumbung yang secara ekonomi mampu, mendandani lumbungnya dengan berbagai hiasan ukiran, di samping tetap menjaga kekokohan konstruksinya.

Dalam memahami sistem organisasi sosial budaya, dipergunakan pendekatan dengan mengamati aspek kelembagaannya. Dalam hal ini, yang dimaksud aspek kelembagaan adalah semua lembaga adat, baik yang berkedudukan sejajar dengan *desa adat* maupun yang di bawah koordinasi *desa adat*.

Lembaga adat yang dikoordinasikan oleh *Desa Adat Jatiluwih* adalah *sekaa teruna, sekaa pesantian, sekaa gong* dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Selain lembaga adat yang dikoordinasikan oleh *Desa Adat Jatiluwih*, ada juga lembaga adat yang kedudukannya sejajar dengan *Desa Adat Jatiluwih*. Lembaga adat tersebut adalah *subak* (meliputi *subak abian* dan *subak carik*) dan *sekaa joged bumbung*.

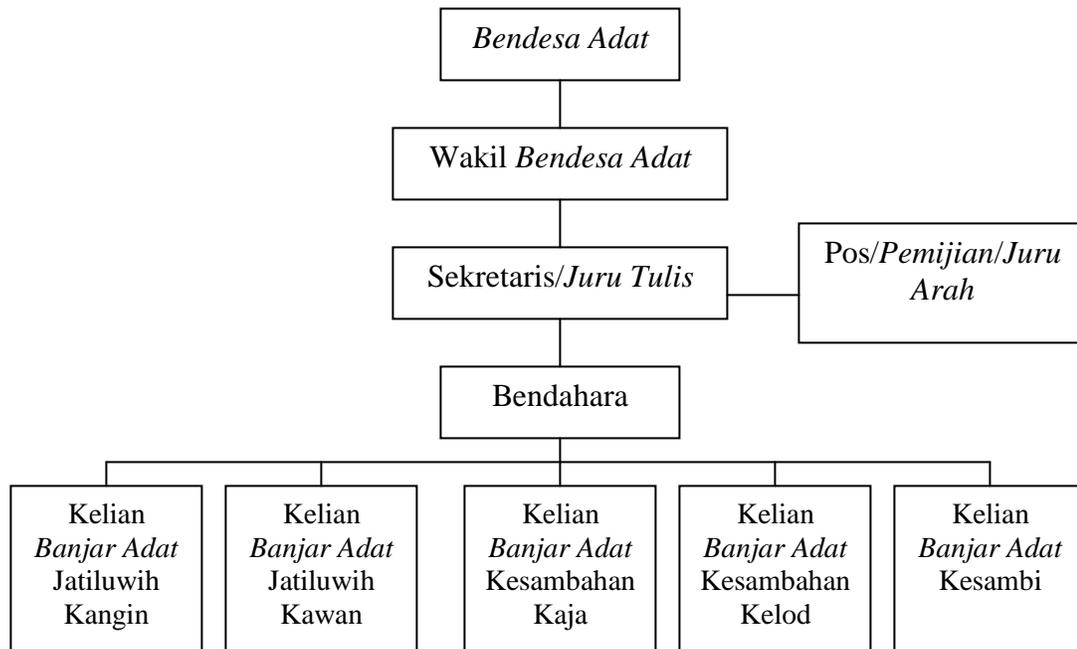
*Desa adat* adalah lembaga masyarakat yang bersifat sosial religius yang berada di tingkat desa, mempunyai luas wilayah tertentu dengan sistem manajemen dan keuangan tersendiri. Dengan demikian, *Desa Adat Jatiluwih* adalah perkumpulan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan (agama Hindu) untuk mengelola aktivitas sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk anggotanya. Keanggotaan *Desa Adat Jatiluwih* adalah mereka yang berada di wilayah *Desa Adat Jatiluwih*, yang memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri serta memeluk agama Hindu. Keanggotaannya bukan perorangan, tetapi satuan terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga.

Berdasarkan *awig-awig* yang dimiliki oleh *Desa Adat Jatiluwih*, pengurus *desa adat* terdiri atas pengurus di tingkat *desa adat* dan pengurus di tingkat *banjar adat*. Dalam *awig-awig* juga disebutkan bahwa, baik pengurus *desa adat* maupun *banjar adat* dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Masa jabatan *bendesa adat* adalah lima tahun, sedangkan masa jabatan *kelian banjar* ditentukan oleh masing-masing *banjar adat*. Menurut *Awig-awig Desa Adat Jatiluwih*, pengurus di tingkat *desa adat* terdiri atas *bendesa adat, penyarikan, petengan* dan *juru arah*. Selanjutnya, pengurus di tingkat *banjar adat* terdiri atas *kelian adat, penyarikan, petengan, juru arah* dan

*pecalang*. Kenyataan yang ada di lapangan, pengurus di tingkat *desa adat* terdiri dari *bendesa adat*, wakil *bendesa adat*, sekretaris (*juru tulis*), pos/*pemijian* (*juru arah desa adat*), bendahara adat dan *kelian adat* (masing-masing *banjar adat*) sekaligus merangkap sebagai *juru arah*.

*Desa Adat Jatiluwih* dibagi menjadi lima *banjar adat*, yaitu *Banjar Adat Jatiluwih Kangin*, *Banjar Adat Jatiluwih Kawan*, *Banjar Adat Kesambahan Kaja*, *Banjar Adat Kesambahan Kelod*, dan *Banjar Adat Kesambi*. Selanjutnya, *Desa Adat Gunungsari* dibagi menjadi dua *banjar adat*, yaitu *Banjar Adat Gunungsari Umakayu* dan *Banjar Adat Gunungsari Desa*. Sampai saat ini belum ada informasi tentang luas *Desa Adat Jatiluwih*. Dalam *Awig-awig Desa Adat Jatiluwih* ditentukan batas-batas wilayahnya, yakni sebelah timur adalah Sungai Yeh Baat, sebelah barat adalah Sungai Yeh Pusut, sebelah utara adalah Hutan Batukaru, dan sebelah selatan adalah *Subak Umaduwi/Desa Adat Wongaya Gede, Desa Adat Mengesta*.

Secara administratif wilayah *Desa Adat Jatiluwih* hanyalah sebagian dari wilayah *Desa Jatiluwih*. Dengan kata lain, secara administratif wilayah *Desa Jatiluwih* meliputi dua wilayah *desa adat*, yaitu *Desa Adat Gunungsari* dan *Desa Adat Jatiluwih*. Secara administratif *Desa Jatiluwih* dibagi menjadi tujuh *dusun*, yaitu *Dusun Jatiluwih Kangin*, *Dusun Jatiluwih Kawan*, *Dusun Kesambahan Kaja*, *Dusun Kesambahan Kelod*, *Dusun Kesambi*, *Dusun Gunungsari Desa*, dan *Dusun Gunungsari Umakayu*. Adapun struktur organisasi *Desa Adat Jatiluwih* adalah seperti Gambar 4.2 berikut ini.



Gambar 4.2

Struktur Organisasi *Desa Adat* Jatiluwih

Sumber: *Bendesa Adat* Desa Jatiluwih Tahun 2008

Terkait dengan penelitian ini, khususnya pada kasus ”rumah contoh” yang mencuat pada tahun 1993, pada saat itu yang menjadi *bendesa adat* di Desa Jatiluwih adalah I Nengah Cerana (jabatan periode ke-2, yaitu 1989–1993) dan I Nyoman Murtika (1993–1997). Kemudian, pada kasus ”Vila Petali” yang terjadi pada tahun 2002, pada saat itu yang menjabat sebagai *bendesa adat* di Desa Jatiluwih adalah I Nyoman Murtika (jabatan ke-2, yaitu 1999–2003), dan juga yang tidak kalah gencarnya ikut menolak pelaksanaan pembangunan vila tersebut adalah pada masa jabatan *bendesa adat* di Desa Jatiluwih, yaitu Wayan Sukabuana (2003–2007). Para *bendesa adat* tersebut berperan dalam urusan kehidupan adat. Berikut ini Tabel 4.6 menyajikan nama-nama *Bendesa Adat* Desa Jatiluwih.

Tabel 4.6  
*Bendesa Adat* Desa Jatiluwih Sampai Tahun 2008

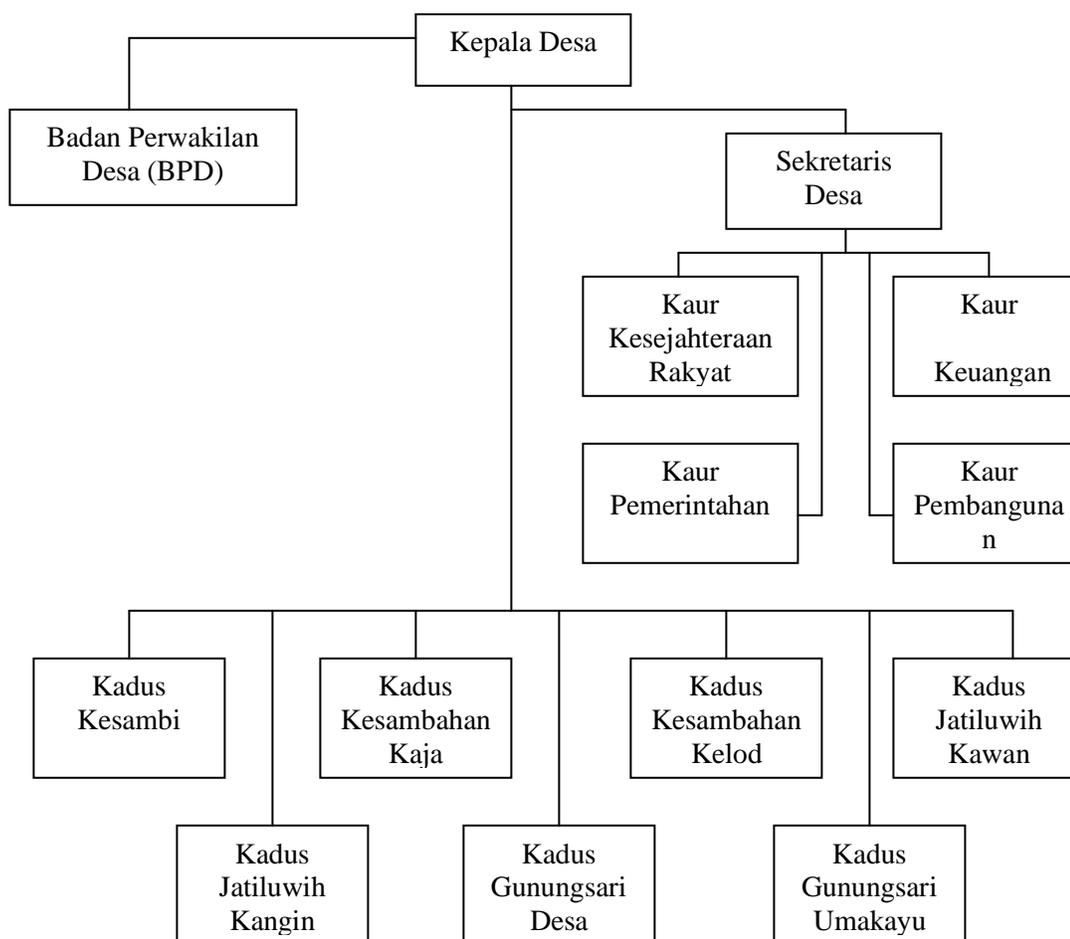
No.	Bendesa Adat	Masa Kepemimpinan
1.	Pan Wetri	tidak diketahui
2.	Pan Wetra	tidak diketahui
3.	Pan Mulu	1963–1964
4.	Pan Kajin	tidak diketahui
5.	Wayan Mustika	1981–1985
6.	I Nengah Cerana	1985–1989
7.	I Nengah Cerana	1989–1993 (tahun 1992 Desa Jatiluwih dikembangkan sebagai Desa Wisata, mencuat kasus "rumah contoh")
8.	I Nyoman Murtika	1993–1997
9.	I Ketut Nuadi	1997–1999
10.	I Nyoman Murtika	1999–2003 (muncul kasus "Vila Petali" tahun 2002)
11.	Wayan Sukabuana	2003–2007
12.	Wayan Yasa	2007–2011

Sumber: Kantor Kepala Desa Jatiluwih, *Bendesa Adat* Jatiluwih, dan Tokoh Masyarakat Desa Jatiluwih Tahun 2008

Dalam rangka kelancaran peran *bendesa adat* menjalankan tugas untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan adat di wilayah yang menjadi kekuasaannya, diperlukan adanya koordinasi dengan penguasa wilayah, yang secara administratif berbentuk desa. Desa sebagai wilayah administratif dipimpin oleh kepala desa.

Desa Jatiluwih secara administratif dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa serta beberapa kepala urusan (*kaur*) dan *kelian banjar* dinas atau kepala *dusun (kadus)*. Pada saat penelitian ini dilakukan, ada rencana untuk memekarkan *Banjar Dinas/Dusun* Gunungsari Umakayu menjadi dua yaitu *Banjar Dinas/Dusun* Gunungsari Umakayu Desa dan *Banjar Dinas/Dusun* Gunungsari Umakayu. Rencana pemekaran ini didasarkan pada pertimbangan luas

wilayah serta jumlah penduduk yang ada saat ini di *Banjar Dinas/Dusun* Gunungsari Umakayu. Namun, hingga saat ini pemekaran *Banjar Dinas/Dusun* Gunungsari Umakayu tersebut belum terlaksana. Adapun struktur pemerintahan Desa Jatiluwih adalah seperti Gambar 4.3 berikut ini.



Gambar 4.3

Struktur Pemerintahan Desa Jatiluwih

Sumber: Kantor Kepala Desa Jatiluwih Tahun 2008

Terkait dengan Gambar 4.3, dalam struktur pemerintahan Desa Jatiluwih, desa tersebut dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh beberapa kepala urusan serta kepala *dusun* (*kadus*). Adapun nama-nama kepala desa yang pernah memimpin Desa Jatiluwih hingga penelitian ini dilakukan, yakni seperti Tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7  
Nama-Nama Kepala Desa Jatiluwih sampai Tahun 2008

No.	Kepala Desa	Masa Kepemimpinan
1.	Nang Desi	tidak diketahui
2.	Nang Jempol	tidak diketahui
3.	I Ketut Rajin	1986–1991
4.	I Nengah Sukra	1991–1995 (Desa Jatiluwih dikembangkan sebagai desa wisata, rumah yang bersangkutan dijadikan rumah contoh, dan timbul kasus ”rumah contoh”)
5.	I Nengah Sukra	1995–1999
6.	I Made Sumerjaya	1999–2003 (muncul kasus ”Vila Petali”)
7.	I Nengah Wirata, S.T.	2003–2007
8.	I Nengah Wirata, S.T.	2007–2011

Sumber: Diolah dari Kantor Kepala Desa Jatiluwih Tahun 2008

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, ada delapan kepala desa yang pernah memimpin dan memerintah di Desa Jatiluwih. Selanjutnya, terkait dengan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih serta kasus-kasus dan konflik yang ditimbulkan, ada tiga Kepala Desa yang terkait, yaitu I Nengah Sukra (1991–1995 dan 1995–1999), I Made Sumerjaya (1999–2003) dan I Nengah Wirata, S.T. (2003–2007 dan 2007–2011).

*Sekaa teruna* merupakan suatu wadah pembinaan generasi muda yang mempunyai hubungan koordinasi secara vertikal dengan *desa adat*. Organisasi kepemudaan ini bersifat sosial religius, artinya aktivitas lembaga ini dapat

melaksanakan peran sosial, seperti membantu memelihara kebersihan lingkungan sekitar desa dengan cara melaksanakan kerja bakti pada waktu-waktu tertentu, di samping melaksanakan peran yang bersifat religius, seperti membantu kelancaran pelaksanaan upacara pada pura-pura yang ada di lingkungan desa setempat yang mereka sebut dengan *ngayah*. Bagi anggota *sekaa teruna* yang bisa menari, mereka akan menari saat upacara di pura, di samping aktif pada berbagai kegiatan yang bersifat religius lainnya.

*Desa Adat Jatiluwih* memiliki tiga *sekaa teruna* yaitu *Sekaa Teruna Ayu Mandalagiri*, *Sekaa Teruna Tunas Mekar*, dan *Sekaa Teruna Dwi Tunggal*. *Sekaa Teruna Ayu Mandalagiri* meliputi wilayah *Banjar Adat Jatiluwih Kangin* dan *Banjar Adat Jatiluwih Kawan*. *Sekaa Teruna Tunas Mekar* meliputi wilayah *Banjar Adat Kesambi*. *Sekaa Teruna Dwi Tunggal* meliputi wilayah *Banjar Adat Kesambahan Kaja* dan *Banjar Adat Kesambahan Kelod*.

Keanggotaan *sekaa teruna* adalah warga *desa adat/banjar adat* yang belum menikah. Tidak ada batas usia yang pasti dalam keanggotaan *sekaa teruna* yang ada di *Desa Jatiluwih*, kecuali jika sudah diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) ada kemungkinan keanggotaan *sekaa teruna* akan dibatasi. Sampai saat ini ketiga *sekaa teruna* tersebut belum memiliki AD/ART.

Dalam rangka pengembangan kepariwisataan, khususnya pada pengembangan *Desa Wisata Jatiluwih*, selayaknya keterlibatan seluruh komponen masyarakat pada seluruh aktivitas kepariwisataan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata ini. Namun, untuk di *Desa Jatiluwih* khususnya, dengan

pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata, peran serta atau keterlibatan *sekaa teruna* sebagai salah satu komponen masyarakat yang berbentuk kelembagaan dalam kepariwisataan sama sekali tidak pernah terlibat, baik berupa penyambut tamu/wisatawan, pementasan tarian atau gamelan dihadapan wisatawan, serta aktivitas lainnya terkait kepariwisataan. *Sekaa teruna* hanya berpartisipasi berupa *ngaturang ngayah* pada saat *piodalan* di pura-pura yang ada di Desa Jatiluwih, pada saat *ngembak* Nyepi atau acara ritual lainnya, dalam bentuk menari, memainkan gamelan, dan membersihkan pura.

Gambaran kondisi di atas menunjukkan bahwa sudah ada komponen masyarakat yang tidak terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, khususnya dari sisi generasi muda. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi, mengingat generasi muda merupakan generasi yang memiliki potensi untuk berkembang (dari sisi internal) dan dikembangkan (dari sisi eksternal) dalam rangka kepariwisataan.

*Sekaa pesantian* di Desa Jatiluwih merupakan wadah untuk membina mental dan spiritual yang berlandaskan pada ajaran agama Hindu. *Sekaa pesantian* di desa ini tidak memiliki struktur organisasi, sedangkan keanggotaannya tidak terbatas pada usia ataupun jenis kelamin. Aktivitas *sekaa pesantian* berkisar pada partisipasi berupa *ngaturang ngayah* pada saat *piodalan* di pura-pura yang ada di Desa Jatiluwih dalam bentuk *mekekidung* serta *mebebasanan*. Dalam rangka kepariwisataan, *sekaa pesantian* ini tidak banyak berperan karena lebih ditujukan pada aktivitas spiritual dan keagamaan, khususnya pada saat upacara di pura-pura desa setempat.

*Sekaa gong* sebagai suatu unit kesenian yang menyajikan *tetabuhan*, dengan seperangkat alat musik berupa gamelan, merupakan salah satu lembaga yang ada di bawah koordinasi *Desa Adat Jatiluwih*. *Sekaa gong* berperan, baik dalam upacara keagamaan maupun dalam kesenian, khususnya seni tari. Dalam hal ini *Desa Adat Jatiluwih* memiliki dua *sekaa gong*, yaitu *Sekaa Gong Lanang* (laki-laki) dan *Sekaa Gong Istri* (perempuan). Khusus untuk *Sekaa Gong Istri*, di *Desa Adat Jatiluwih* terdapat dua *barung* (kelompok), yaitu *barung Jatiluwih* yang meliputi *Jatiluwih Kangin* dan *Jatiluwih Kawan* dengan jumlah anggota 22 orang serta *barung Kesambahan* yang meliputi *Kesambahan Kaja*, *Kesambahan Kelod*, dan *Kesambi* dengan jumlah anggota 23 orang. Kedua *barung* tersebut tetap berada di bawah satu orang koordinator.

*Sekaa Gong Lanang* dengan jumlah anggota 35 orang penabuh, dalam rangka kepariwisataan di *Desa Jatiluwih* pernah tampil untuk menyambut tamu atau rombongan wisatawan. *Sekaa Gong Lanang* ini pentas atas pesanan dari *travel agent*. *Travel agent* datang kepada *perbekel*, selanjutnya *perbekel* memberitahukan *bendesa adat*, dan *bendesa adat* memerintahkan *Sekaa Gong Lanang* untuk pentas. Pada saat pementasan *gong* tersebut, disertai juga dengan pementasan tari penyambutan, yaitu tari panyembrama. Selain itu, juga dipentaskan tari "topeng monyer". Tari "topeng monyer" adalah jenis tarian yang dipentaskan pada saat upacara sebelum tari "topeng sidakarya" dipentaskan. Hasil pementasan *Sekaa Gong Lanang* tersebut dibagi dengan *batu-batu* (persentase pembagian) untuk *Desa Adat Jatiluwih* 20% dan untuk *Sekaa Gong Lanang* 80%.

Dalam satu kali pentas, untuk di Desa Jatiluwih dikenakan biaya Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per satu setengah jam, sedangkan jika pentas di luar Desa Jatiluwih dikenakan biaya per jam adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hasil yang diterima dari pementasan yang sudah dilakukan dipergunakan untuk membeli kostum, sedangkan untuk memanggil pelatih guna membuat *tabuh* baru belum dimungkinkan karena pendapatan yang masih kecil. Dalam hal ini, untuk tetap berkreasi menghasilkan *tabuh* baru, yakni digunakan kaset. Dari *tabuh* yang ada pada kaset tersebut, para penabuh *Sekaa Gong Lanang* Desa Jatiluwih belajar untuk menghasilkan *tabuh* baru.

Untuk berpartisipasi pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, *Sekaa Gong Lanang* mengharapkan agar dikontrak oleh Desa Jatiluwih. Oleh karena dengan pertimbangan agar urusan atau manajemen pementasan tidak terlalu kompleks, di samping dan orang-orang yang mengatur pementasan sudah dikenal, pementasan hanya di desa setempat, dan aktivitas sehari-hari anggota *sekaa* yang sebagian besar petani dapat berjalan. *Sekaa Gong Lanang* menolak dikontrak untuk pentas di luar Desa Jatiluwih dalam rangka pariwisata karena alasan frekuensi pentas yang tidak pasti dan dapat mengganggu aktivitas keseharian anggota *sekaa* yang sebagian besar petani. Namun, jika untuk upacara, mereka siap tampil di mana pun di luar Desa Jatiluwih.

Selain *Sekaa Gong Lanang*, di Desa Jatiluwih juga ada *Sekaa Gong Istri*. *Sekaa Gong Istri* memiliki dua *barung*, yaitu *barung* Jatiluwih dan *barung* Kesambahan. *Sekaa Gong Istri* juga sudah pernah tampil untuk menyambut wisatawan serta tamu-

tamu atau pejabat yang datang ke Desa Jatiluwih. Penyambutan tersebut selain berupa gamelan, juga disertai dengan pementasan tari yaitu berupa tari panyembrama. Untuk satu kali pentas di Desa Jatiluwih, *Sekaa Gong Istri* dibayar antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tergantung pada jauh dekatnya tempat pementasan. Dari hasil pementasan yang diperoleh tersebut, 5% disetor kepada *Desa Adat* Jatiluwih, sedangkan sisanya dibagi oleh anggota *sekaa* atau sebagian dipergunakan untuk membeli kostum dan keperluan *sekaa* yang lainnya. Namun, jika *sekaa* ini tampil pada aktivitas upacara keagamaan di pura-pura yang ada di Desa Jatiluwih, mereka tidak memungut bayaran.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan *Desa Adat* Jatiluwih, yang bergerak di bidang perekonomian, khususnya pada kegiatan simpan pinjam. Lembaga Perkreditan Desa merupakan sebuah lembaga modern yang dipersiapkan oleh sebuah struktur tradisional dalam hal ini oleh *desa adat*. Keanggotaan Lembaga Perkreditan Desa *Desa Adat* Jatiluwih adalah seluruh warga *Desa Adat* Jatiluwih dan tidak terbatas bagi mereka yang melaksanakan aktivitas simpan pinjam saja. Untuk melaksanakan aktivitasnya, Lembaga Perkreditan Desa *Desa Adat* Jatiluwih dilengkapi dengan pengurus yang terdiri atas kepala lembaga perkreditan desa, bagian pembukuan, kasir serta petugas keliling. Selanjutnya, untuk sekretariatnya, yakni berada di Balai *Banjar Desa Adat* Jatiluwih.

*Subak* merupakan masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio agraris, religius, ekonomis, dan dinamis yang berkembang terus menerus sebagai organisasi dalam bidang pengaturan air untuk persawahan dari suatu sumber air dalam suatu

daerah atau wilayah. Apabila suatu wilayah *subak* terlalu luas, maka wilayahnya akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yang dinamakan *tempekan* (Kabupaten Bangli, Gianyar dan Klungkung); dinamakan *banjaran* atau *lanyahan* (Kabupaten Buleleng); dinamakan *munduk* (Kabupaten Badung); dan *arahan* (Kabupaten Jembrana). *Kelian subak* atau *pekaseh* dibantu oleh *kesinoman* yang bertugas untuk mengawasi saluran air dan bangunan-bangunan sarana per-*subak*-an lainnya, di samping dibantu oleh petugas yang dinamakan *juru arah* atau *saya*, yang mempunyai tugas untuk menyampaikan panggilan-panggilan atau pengumuman atau perintah-perintah, baik dari *kelian subak* maupun dari pemerintah.

Kalau dilihat dari tanah garapannya, *subak* dibagi menjadi dua yaitu *subak abian* (lahan kering) dan *subak carik* (lahan basah). Sumber mata air yang penting dan mengairi areal *subak* irigasi Jatiluwih adalah Mata Air Pura Ulun Siwi, Mata Air Candi Kuning, Mata Air Gembrong, Mata Air Tukad Yeh Baat, dan Mata Air Tukad Yeh Aya.

*Subak* irigasi Jatiluwih memiliki luas 303 hektar, terbagi atas tiga bagian, yaitu *Subak* Gunungsari (di bagian utara), *Subak* Jatiluwih (di tengah), dan *Subak* Kedamean (di bagian selatan). Desa Jatiluwih memiliki beberapa *subak* yang dipimpin oleh satu orang *pekaseh*, yaitu *Pekaseh* Jatiluwih. Wilayahnya meliputi *Subak* Kedamean, *Subak* Besi Sekalung, *Subak* Kesambi, *Subak* Kesambahan, *Subak* Gunungsari, dan *Subak* Gunungsari Umakayu. Adapun *subak* sawah dan *subak abian* di Desa Jatiluwih seperti Tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8

*Subak Sawah dan Subak Abian di Desa Jatiluwih*

No.	Desa Adat	Dusun / Banjar	Subak Sawah	Subak Abian
1.	Jatiluwih	1. Jatiluwih Kangin 2. Jatiluwih Kawan 3. Kesambahan Kaja 4. Kesambahan Kelod 5. Kesambi	4    1	1 1 1 1 1
2.	Gunungsari	1. Gunungsari Desa 2. Gunungsari Umakayu	1 1	1 1
	J u m l a h	7	7	7

Sumber: Monografi Desa Jatiluwih Tahun 2006

Keberadaan *subak* juga dapat menjadi daya tarik wisata, khususnya dalam melihat sistem pertanian sebagai suatu produk budaya. Jika dikaitkan dengan upaya untuk menjadikan terasering sawah sebagai Warisan Budaya Dunia yang berupa *Natural and Cultural Landscape*, secara tidak langsung *subak* juga akan terkait karena merupakan satu kesatuan sistem. Dengan demikian, terasering sawah yang semula dibuat untuk difungsikan sebagai pengatur pengairan, menjadi pendukung pengembangan pariwisata. Dalam hal ini diharapkan pertanian di Desa Jatiluwih tetap *ajeg*, dalam arti sekitar Januari setiap tahunnya petani desa setempat selalu menanam padi bali. Hal ini dilakukan agar apa yang telah diatur dalam *pula pali metandur* padi bali *ring carik* bagi masyarakat setempat dapat berjalan secara *ajeg*, seperti yang telah diwarisi oleh masyarakat setempat dari para leluhur mereka terdahulu.

Cara penanaman padi yang masih bersifat tradisional serta keberadaan terasering sawah di Desa Jatiluwih merupakan daya tarik wisata, baik yang berwujud

produk budaya pertanian maupun berupa daya tarik terhadap alam. Budaya pertanian dan daya tarik alam itu merupakan salah satu unsur pendukung keterpaduan dari Desa Wisata Terpadu Jatiluwih. Dalam hal ini produk budaya dimaksudkan bahwa terasering tersebut merupakan hasil karya manusia yang dibuat dengan mempergunakan cipta, rasa, dan karsa, di samping saat ini masih terpelihara dan menyatu dengan budaya bercocok tanam padi yang tradisional. Kedudukan dan bentuk terasering sawah mengikuti bentang alam atau yang dikenal dengan *landscape*.

Daya tarik wisata yang berupa cara penanaman padi yang bersifat tradisional itu diartikan lain oleh segelintir petani di Desa Jatiluwih. Mereka sebelum mengolah tanah sawah untuk ditanami padi, ada yang membakar jerami. Dalam hal ini harapan *Pekaseh* Jatiluwih agar tidak membakar jerami setelah selesai panen atau menjelang menanam padi tidak sepenuhnya ditaati oleh masyarakat petani setempat. Kondisi ini dari sisi pariwisata dapat mengganggu kenyamanan wisatawan yang secara kebetulan menikmati keindahan terasering sawah dengan berjalan-jalan di parit-parit sawah. Udara sekitarnya juga akan tercemar, sehingga dapat berakibat wisatawan tidak betah menikmati daya tarik wisata berupa terasering sawah serta hilangnya *gumatat-gumitit* yang menjadi penyebab suburnya tanah sawah.

Selain kondisi di atas, ternyata *subak* di Desa Jatiluwih tidak memiliki *bale subak* (tempat pertemuan anggota *subak*). Kondisi ini menghambat pelaksanaan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh *subak* sehingga segala informasi dari *pekaseh* lebih banyak disampaikan melalui *juru arah* kepada para anggotanya, atau

bahkan melalui pesan berantai antaranggotanya. Efektivitas pesan yang disampaikan akan terganggu, apalagi sebaran masyarakat petani yang merupakan anggota *subak* sangat luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan atau menyosialisasikan keputusan atau informasi terkait dengan permasalahan tertentu.

*Sekaa joged bumbung* merupakan organisasi swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kesenian, khususnya seni tari pergaulan. Sebagai suatu jenis tarian yang diiringi oleh musik bambu, pementasannya selalu dikaitkan dengan acara syukuran setelah panen padi. *Sekaa joged bumbung* yang ada di Desa Jatiluwih bernama *Sekaa Joged Bumbung Dharma Susila*, didirikan pada tahun 2005 dengan empat orang penari dan 25 orang penabuh. Selama ini *sekaa joged bumbung* hanya pentas di sekitar Desa Jatiluwih, dan sekitar Juni 2008 sempat pentas ke luar Desa Jatiluwih, yaitu ke Desa Asah Gobleg Buleleng. *Joged Bumbung Dharma Susila* ini dijuluki sebagai "Joged Ajeg Bali" karena penarinya berpakaian tidak buka-bukaan. Para penari pentas memakai kebaya serta kain yang tertutup.

Pengurus *Sekaa Joged Bumbung Dharma Susila* terdiri atas ketua (Ketut Landra), sekretaris (I Nyoman Arnawa), bendahara (I Wayan Mendri), *juru arah* (Nengah Sudiana), dan *pemangku* (Pan Subrat). Dalam hal ini untuk sekali pentas, seorang penari *joged bumbung* akan dibayar sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jika pentas di luar Desa Jatiluwih; dan sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jika pentas di Desa Jatiluwih. Namun, untuk penabuh, upahnya tidak dibayar dengan uang, tetapi dibayar dengan mempergunakan daging babi, yang biasanya

dibagi setiap hari raya Galungan. Dengan demikian, untuk penabuh, hasil pentas tersebut akan dibagi setiap enam bulan sekali.

Dalam rangka pengembangan pariwisata di Desa Jatiluwih, *Sekaa Joged Bumbung* Dharma Susila belum pernah tampil, baik untuk menyambut kedatangan tamu atau wisatawan maupun menyambut pejabat yang datang ke desa setempat. Bahkan ada *tour leader* yang sengaja membawa *sekaa* dari luar Desa Jatiluwih (seperti *sekaa bale ganjur*, *sekaa cak*, dan *sekaa okokan*) untuk menghibur tamu atau wisatawan pada saat makan siang di *Café* Jatiluwih.

Desa Jatiluwih memiliki potensi kesenian yang cukup beragam, oleh karena kehidupan beragama pada masyarakat Bali umumnya dan di Desa Jatiluwih khususnya, terintegrasi dengan kehidupan budaya, termasuk kehidupan seni sebagai salah satu unsur dalam kebudayaan. Oleh karena adanya keterkaitan antara budaya dengan kesenian, maka kesenian di Desa Jatiluwih dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kesenian *wali* (yang masih disakralkan), kesenian *bebali* (semi sakral), dan kesenian *balih-balihan* (profan atau tontonan).

Pada beberapa jenis kesenian, saat ini ada yang masih bertahan hidup dan ada pula yang sudah punah. Dalam hal ini kesenian yang mengalami kepunahan disebabkan beberapa hal, yaitu (1) tidak adanya regenerasi yang dilakukan terhadap generasi muda, (2) kurangnya minat generasi penerus untuk mewarisi suatu jenis kesenian, (3) tidak adanya peralatan yang dipakai untuk mendukung kesenian, dan (4) adanya perubahan orientasi terhadap budaya setempat yang lebih cenderung ke arah ekonomis.

Di samping kurangnya regenerasi terhadap kesenian yang ada, ada beberapa kesenian yang dulu berupa kesenian *sakral*, tetapi sekarang ini sudah ada tanda-tanda bergeser, meskipun pergeseran tersebut belum sampai menjadi kesenian *bebali* atau bahkan menjadi kesenian *balih-balihan*. Kesenian yang dimaksud adalah tarian *Baris Memedi*. Menurut masyarakat setempat, tarian *Baris Memedi* dari dulu sudah ada (*napet*) di Desa Jatiluwih. Tarian ini dipentaskan pada saat upacara *ngaben*, terutama pada tingkatan *utamaning madya* ke atas. Pada saat *ngaben*, penari *Baris Memedi* tidak membawa *takilan* (sejenis tempat makanan yang terbuat dari *tapis pohon buah*). Namun, jika digunakan selain untuk upacara *ngaben*, seperti menyambut tamu pada lomba desa, penari *Baris Memedi* membawa *takilan*, itupun dengan upacara berupa menghaturkan *pelelabaan* di *waduan setra* untuk memohon agar penari selamat. Selanjutnya, setelah selesai menari dilakukan penyucian (penari *dilukat*).

Selain itu, pada masyarakat setempat berkembang wacana berupa keinginan untuk melakukan pergeseran fungsi tari *Baris Memedi*, dari fungsinya sebagai *seni tari wali* yang disakralkan menjadi *seni tari bebali*. Bahkan ada keinginan dari para penari *Baris Memedi* untuk mengkomersialkan tarian ini, yakni dengan cara mementaskan tidak saja pada pelaksanaan upacara keagamaan, tetapi juga dipentaskan selain untuk upacara keagamaan. Mereka mengusulkan bahwa jika disuguhkan kepada para tamu, tempat *mepayas* dipindahkan dari *setra* (kuburan) ke *tegalan* sehingga tidak perlu melakukan upacara berupa menghaturkan *pelelabaan* di *waduan setra*.

Dalam konteks kesenian *wali*, kesenian tradisional yang berupa tarian *Baris Memedi* tersebut perlu dijaga agar tidak bergeser ke arah kesenian *bebali* atau bahkan kesenian *balih-balihan*. Jika terjadi pergeseran, pada suatu titik jenuh terhadap permintaan pementasan oleh wisatawan, kesenian tersebut tidak diminati lagi. Kondisi ini akan mempercepat dilupakannya kesenian tersebut oleh peminatnya dan jika tidak dibarengi dengan upaya-upaya pencegahan serta pelestarian, maka kesenian tersebut dikhawatirkan akan mengalami kepunahan.

Desa Jatiluwih sebagai sebuah desa agraris dilihat dari potensi kesenian menunjukkan adanya potensi yang besar. Oleh karena adanya keengganan dari generasi penerus yang sebagian besar generasi muda dalam mempelajari kesenian sehingga beberapa jenis kesenian di Desa Jatiluwih mengalami kepunahan. Meskipun ada yang mengalami kepunahan, tetapi sebagian besar dari kesenian tersebut masih ada dan terus eksis. Kesenian yang masih ada dan terus eksis tersebut kurang menunjukkan kinerja dan penampilan (*performance*) seperti yang diharapkan.

Masyarakat setempat masih menyediakan waktu untuk berkesenian. Waktu yang dipergunakan untuk berkesenian biasanya pada petang hingga malam hari. Aktivitas berkesenian tersebut selain untuk menghilangkan kepenatan setelah seharian bekerja, juga untuk menyalurkan hobi, di samping untuk tetap menjaga agar kesenian yang ada terus berkembang dan *ajeg*. Selanjutnya, Tabel 4.9 menyajikan potensi kesenian yang ada di Desa Jatiluwih, baik dilihat dari keberadaannya (eksis dan punah) serta dilihat dari kategorinya (*wali*, *bebali*, dan *balih-balihan*).

Tabel 4.9  
Potensi Kesenian di Desa Jatiluwih Tahun 2008

No	Nama Kesenian	Keberadaan		Kategori		
		Eksis	Punah	Wali	Bebali	Balih-Balihan
1.	Gong Lanang	X			X	
2.	Gong Istri	X			X	
3.	Joged Bumbung	X				X
4.	Wayang Kulit		X			X
5.	Pesantian	X			X	
6.	Baris Memedi	X		X		
7.	Tari Rejang Dewa	X		X		
8.	Baris Gede	X			X	
9.	Tari Kreasi	X				X
10.	Baris Tunggal	X			X	
11.	Topeng		X			X
12.	Joged Bunga	X				X
13.	Geguntangan	X			X	
14.	Gambuh		X			X
15.	Tanteri		X			X
	J u m l a h	11	4	2	6	7

Sumber: Diolah dari Daftar Isian Potensi Desa Tahun 2006

Dari Tabel 4.9 di atas terlihat bahwa ada empat kesenian di Desa Jatiluwih yang mengalami kepunahan, yaitu wayang kulit, *topeng*, *gambuh* dan *tanteri*. Namun, jenis kesenian yang bernilai *sakral* dan masih ada di Desa Jatiluwih adalah *baris memedi* dan tari *rejang dewa*. Dalam kerangka pengembangan pariwisata, potensi kesenian ini akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang berwisata ke Desa Jatiluwih, di samping daya tarik berupa terasering sawah. Untuk menjaga nilai ke-*sakral*-an sebuah kesenian, pementasan kesenian perlu memperhatikan rambu-rambu yang ada guna menjamin eksistensi kesenian yang bersifat *sakral*.

#### 4.2 Awal Masuknya Pariwisata di Desa Jatiluwih

Desa Jatiluwih sebagai objek wisata, khususnya objek wisata alam, sesungguhnya sudah dikenal sejak kekuasaan Belanda di Bali (1910–1942). Hal ini karena di sebelah barat Desa Jatiluwih didirikan Markas Besar Keamanan Belanda, yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai *tangsi* Belanda.

Sebagai objek wisata alam, pada saat itu Desa Jatiluwih menawarkan keindahan terasering sawah dan wisata berjalan kaki (*trecking*) menyusuri jalan setapak dari *Dusun* Gunungsari Desa menuju Danau Tamblingan. Jalan setapak tersebut dibuat oleh Belanda di masa kekuasaannya, yang oleh masyarakat setempat jalan setapak tersebut dikenal sebagai ”jalan *jaran*”.

Selain menawarkan wisata alam, Desa Jatiluwih juga menawarkan wisata sejarah. Hal ini karena adanya *tangsi* dan ”jalan *jaran*” buatan Belanda. Dengan adanya daya tarik berupa wisata sejarah tersebut, berdasarkan penuturan sesepuh masyarakat Desa Jatiluwih, sekitar 1970-an untuk pertama kalinya datanglah wisatawan mancanegara asal Belanda berwisata ke Desa Jatiluwih. Wisatawan mancanegara tersebut melakukan aktivitas *trecking* menyusuri ”jalan *jaran*”. Perjalanan menyusuri ”jalan *jaran*” dari *Dusun* Gunungsari Desa menuju Danau Tamblingan yang dilakukan oleh wisatawan tersebut merupakan suatu bentuk nostalgia mengenang masa-masa kejayaan kekuasaan Belanda di desa tersebut.

Pada saat kehadiran wisatawan mancanegara ke Desa Jatiluwih sekitar 1970-an, di Desa Jatiluwih belum tersedia sarana kepariwisataan. Sarana kepariwisataan di Desa Jatiluwih baru ada sekitar 1990, yaitu dengan berdirinya penginapan Galang

Kangin *Inn*, yang berlokasi di seberang terasering sawah yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Dengan demikian, kehadiran pariwisata modern di Desa Jatiluwih boleh dikatakan sudah terjadi pada 1970-an, atau dua dasawarsa sebelum terbentuknya organisasi kepariwisataan modern di Kabupaten Tabanan yang berbentuk Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991, dan diundangkan ke dalam Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 26 tanggal 12 Desember 1994 Seri D Nomor 21.

### **4.3 Gambaran Umum Kepariwisataan Kabupaten Tabanan**

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tabanan merupakan suatu sub-sistem dan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan menurut arahan Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang (SNPPTR) dan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) dengan tetap mempertimbangkan aspek peluang, potensi, dan keterbatasan sumber daya yang ada di daerah. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga diamanatkan bahwa pembangunan harus mengupayakan keserasian dan keseimbangan antarkawasan dan interkawasan sesuai dengan potensi alam, mengupayakan kesatuan-kesatuan politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan sebagai perwujudan dari wawasan nusantara, di samping pemanfaatan sumber daya alam dalam mencapai tujuan yang dilakukan secara efisien, tertib, dan aman.

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali, Provinsi Bali memiliki 15 kawasan pariwisata yang tersebar di seluruh Bali. Lima belas kawasan pariwisata tersebut adalah (1) Nusa Dua, (2) Tuban, dan (3) Kuta masing-masing di Kabupaten Badung; (4) Sanur di Kota Denpasar, (5) Ubud, dan (6) Lebih di Kabupaten Gianyar; (7) Soka di Kabupaten Tabanan, (8) Perancak, dan (9) Candikusuma di Kabupaten Jembrana; (10) Batuampar dan (11) Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng; (12) Nusa Penida di Kabupaten Klungkung; (13) Candidasa, (14) Ujung, dan (15) Tulamben di Kabupaten Karangasem.

Dalam hal ini khusus untuk Kawasan Pariwisata Soka di Kabupaten Tabanan, yakni meliputi Desa Lalanglinggah di Kecamatan Selemadeg Barat, Desa Antap di Kecamatan Selemadeg, Desa Brembeng di Kecamatan Selemadeg, Desa Beraban di Kecamatan Selemadeg Timur, Desa Tegalmengkeb di Kecamatan Selemadeg Timur, Desa Kelating di Kecamatan Kerambitan, dan Desa Tibuhin di Kecamatan Kerambitan.

Selain Kawasan Pariwisata, berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2005 juga ditetapkan Kabupaten Tabanan memiliki dua daya tarik wisata khusus (DTWK) masing-masing DTWK Bedugul/Pancasari dan DTWK Tanah Lot. Dalam hal ini DTWK Bedugul/Pancasari meliputi Desa Batunya dan Desa Candikuning masing-masing berlokasi di Kecamatan Baturiti, dan DTWK Tanah Lot meliputi Desa Beraban di Kecamatan Kediri, Desa Belalang di Kecamatan Kediri, Desa Pangkung

Tibah di Kecamatan Kediri, Desa Pandak Gede di Kecamatan Kediri, dan Desa Sudimara di Kecamatan Tabanan.

#### **4.3.1 Daya Tarik Wisata**

Kabupaten Tabanan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, tidak luput dari usaha untuk menyediakan daya tarik wisata sesuai kebutuhan wisatawan. Daya tarik wisata yang disediakan tersebut terdiri atas daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa terdiri atas keadaan alam, flora, serta fauna. Sedangkan daya tarik wisata yang berwujud hasil karya manusia terdiri atas museum, peninggalan purbakala, peninggalan bersejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan. Sampai dengan Juni 2008 Kabupaten Tabanan memiliki 26 daya tarik wisata.

Daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Tabanan tersebar pada sembilan kecamatan, tetapi hanya Kecamatan Selemadeg Timur yang tidak memiliki daya tarik wisata. Dilihat dari pengelolanya, daya tarik wisata tersebut dikelola dengan jenis yang sangat variatif, mulai dikelola oleh Badan Pengelola Objek Wisata (BPOW) yang berbentuk swasta, perorangan, lembaga pemerintah, yayasan, aparat desa hingga *desa pakraman*. Sebagian terbesar dari 26 daya tarik wisata tersebut dikelola oleh *desa pakraman*.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998, Nomor 337 Tahun 2004, dan Nomor 266 Tahun 2007, yakni dari 26 daya tarik wisata di

Kabupaten Tabanan, tersebar pada beberapa kecamatan, seperti: (1) Kecamatan Kediri tiga daya tarik wisata, (2) Kecamatan Marga tiga daya tarik wisata, (3) Kecamatan Baturiti empat daya tarik wisata, (4) Kecamatan Penebel empat daya tarik wisata, (5) Kecamatan Kerambitan lima daya tarik wisata, (6) Kecamatan Wanasari satu daya tarik wisata, (7) Kecamatan Tabanan satu daya tarik wisata, (8) Kecamatan Selemadeg dua daya tarik wisata, dan (9) Kecamatan Pupuan dua daya tarik wisata.

Berdasarkan daya tarik wisata yang disuguhkan, dari 26 daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Tabanan, daya tarik yang disajikan sangat bervariasi. Daya tarik yang disajikan tersebut seperti keindahan pura dengan latar belakang keindahan laut, flora dan fauna, monumen bersejarah, mata air, puri, air terjun, perkebunan, kawasan hutan, sangar tari, desa wisata, bendungan, dan museum *subak* sebagai miniatur organisasi sosial di bidang pertanian Bali.

Jika dilihat dari pengelolanya, daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan pengelolanya berbentuk BPOW (Badan Pengelola Objek Wisata), Perorangan, Lembaga Pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), Yayasan, Kepala Desa, *Desa Pakraman*, dan PT (Perseroan Terbatas). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998, daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan berjumlah 24. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 337 Tahun 2004 dan Nomor 266 Tahun 2007, ada tambahan dua daya tarik wisata, yaitu Desa Wisata Pinge dan Bendungan Telaga Tunjung. Adapun daya tarik wisata di kabupaten Tabanan beserta alamat dan pengelolanya disajikan seperti Tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10  
Daya Tarik Wisata, Alamat, dan Nama Pengelola

No.	Daya Tarik Wisata	Alamat	Nama Pengelola	Keterangan
1.	Tanah Lot	Desa Beraban, Kec. Kediri	BPOW Tanah Lot (Ketua: I Made Sujana)	SK Bupati Tabanan No. 470 Th. 1998 (No. 1 s.d 24)
2.	Alas Kedaton	Desa Kukuh, Kec. Marga	<i>Desa Adat</i> Kukuh	
3.	Bedugul	Desa Baturiti, Kec. Baturiti	I Wayan Purnayasa	
4.	Ulun Danu Beratan	Desa Candikuning, Kec. Baturiti	BPOW Ulun Danu Beratan (Ketua: I.G.N. Budana Artha, S.T.)	
5.	Kebun Raya Eka Karya Bali	Desa Candikuning, Kec. Baturiti	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	
6.	Taman Pujaan Bangsa Margarana	Desa Marga	Yayasan Kebaktian Proklamasi Propinsi Bali	
7.	Museum Subak	Banjar Anyar Kec. Kediri	Disbudpar Kab. Tabanan/UPTD Museum Subak	
8.	Yeh Panes Penatahan	Desa Penatahan Kec. Penebel	Tidak ada	
9.	Puri Anyar	Desa Baturiti Kec. Kerambitan	A.A.N. Oka Silagunada dan A.A. Rai Giri Gunadi	
10.	Puri Gede Kerambitan	Desa Kerambitan Kec. Kerambitan	A.A.N. Anom Mayun	
11.	Jatiluwih	Desa Jatiluwih Kec. Penebel	Kepala Desa Jatiluwih	
12.	Yeh Panes Belulang	Desa Mengesta Kec. Penebel	<i>Desa Pakraman</i>	
13.	Pantai Kelating	Desa Kelating, Kec. Kerambitan	<i>Desa Pakraman</i>	
14.	Pantai Pasut	Desa Tibubiu, Kec. Kerambitan	<i>Desa Pakraman</i>	
15.	Pantai Yeh Gangga	Desa Sudimara Kec. Tabanan	<i>Desa Pakraman</i>	
16.	Pantai Soka	Desa Antap Kec. Selemadeg	<i>Desa Pakraman</i>	
17.	Air Terjun dan Perkebunan Rakyat Pujungan	Desa Pujungan Kec. Pupuan	<i>Desa Pakraman</i>	
18.	Kawasan Hutan Mekori	Desa Belimbing Kec. Pupuan	<i>Desa Pakraman</i>	
19.	Sarinbuana Pura Pucaksari	Desa Wanagiri Kec. Selemadeg	<i>Desa Pakraman</i>	
20.	Sanggar Tari Wiratnala	Desa Abiantuwung Kec. Kediri	I Gst. Ngr. Suparta, S.ST (Alm)	
21.	Yeh Panes dan Hutan Bambu Angseri	Desa Angseri Kec. Baturiti	<i>Desa Pakraman</i> / Kelompok Pengelola Objek Wisata Alam Desa Angseri	
22.	Taman Kupu-Kupu Lestari	Desa Wanasari	PT Taman Kupu-Kupu Lestari	
23.	Areal Pura Batukaru	Desa Wongaya Gede Kec. Penebel	<i>Desa Pakraman</i>	
24.	Pantai Suraberata	Desa Lalanglinggah Kec. Selemadeg Barat	<i>Desa Pakraman</i>	
25.	Desa Wisata Pinge	Desa Adat Pinge, Kec. Marga	<i>Desa Pakraman</i>	
26.	Bendungan Telaga Tunjung	Desa Timpag Kec. Kerambitan	BPOW Bendungan Telaga Tunjung (Ketua: Putu Ika Wahyuni)	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2008

### 4.3.2 Sarana Kepariwisataan

Agar wisatawan tertarik untuk mengunjungi daya tarik wisata, diperlukan sarana kepariwisataan yang dapat disediakan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang kepariwisataan. Sarana kepariwisataan tersebut diperlukan agar wisatawan betah tinggal di suatu daya tarik wisata sehingga dapat memperpanjang lama waktu tinggal serta pengeluaran uang selama mereka berwisata.

Sarana kepariwisataan (*tourism superstructures*) adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung ataupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak bergantung pada kedatangan wisatawan. Dalam hal ini sarana kepariwisataan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sarana pokok kepariwisataan (*main tourism superstructures*), sarana pelengkap kepariwisataan (*suplementing tourism superstructures*) dan sarana penunjang kepariwisataan (*supporting tourism superstructures*).

Sarana pokok kepariwisataan (*main tourism superstructures*) adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat bergantung pada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Perusahaan yang termasuk pada kelompok ini adalah *travel agent* atau biro perjalanan wisata (BPW), perusahaan angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya, bar, restoran, rumah makan, serta daya tarik wisata.

Sarana pelengkap kepariwisataan (*suplementing tourism superstructures*) adalah perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi agar para wisatawan dapat lebih lama tinggal pada suatu Destinasi

Pariwisata. Yang termasuk kelompok ini adalah (1) sarana olahraga, seperti: lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang, permainan *bowling*, daerah perburuan, tempat berlayar, dan tempat bersilancar; dan (2) sarana ketangkasan, seperti: permainan bola sodok/*bilyard*, berkuda, dan olah raga ketangkasan lainnya.

Sarana penunjang kepariwisataan (*supporting tourism superstructures*) adalah perusahaan yang tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu Destinasi Pariwisata, tetapi agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi. Dalam hal ini yang termasuk kelompok ini adalah *night club*, *steambaths*, dan *casinos*.

Kabupaten Tabanan dalam bidang kepariwisataan juga telah memiliki sarana kepariwisataan, yakni berupa sarana pokok kepariwisataan. Sarana pokok kepariwisataan tersebut berupa hotel berbintang, hotel melati, pondok wisata, restoran, rumah makan, dan biro perjalanan atau penyedia angkutan wisata.

Sarana pokok yang berupa akomodasi di Kabupaten Tabanan sebagian besar (36 unit) berupa pondok wisata, 32 unit berupa hotel melati dan sebanyak dua unit berupa hotel berbintang. Secara keseluruhan akomodasi di Kabupaten Tabanan berjumlah 70 unit terdiri atas hotel berbintang, hotel melati, dan pondok wisata. Dari jumlah tersebut jika dilihat dari kelasnya, yakni menunjukkan bahwa sebanyak 587 kamar berkelas kamar hotel melati (Melati I, Melati II, dan Melati III), sedangkan sebanyak 312 kamar berkelas kamar hotel berbintang (Bintang 3 dan Bintang 5). Selanjutnya, jika dirinci menurut tipenya, sebanyak 431 kamar *double* (satu kamar terdiri atas dua

tempat tidur), 416 kamar *single* (satu kamar dengan satu tempat tidur), dan sebanyak 52 kamar bertipe *suite*. Adapun akomodasi yang tersedia, yakni seperti Tabel 4.11.

Tabel 4.11

Sarana Pokok Berupa Akomodasi di Kabupaten Tabanan sampai Juni 2008

No.	Kategori	Jumlah Unit	Jumlah Kamar				Fasilitas
			Dbl.	Sgl.	Suite	Jml.	
1.	Hotel Berbintang	2	279	12	21	312	Kolam renang, lapangan <i>golf</i> , spa, lapangan tenis, <i>fitness center</i> , restoran, <i>amphiteater</i> , <i>children club</i> , <i>meeting room</i> .
2.	Hotel Melati						Kolam renang, restoran, rumah makan, spa, <i>art shop</i> , tempat rekreasi, dan lapangan tenis.
	1. Kec. Tabanan	7	45	62	19	126	
	2. Kec. Kediri	3	15	25	0	40	
	3. Kec. Selemadeg Barat	4	14	26	11	51	
	4. Kec. Penebel	1	16	0	0	16	
	5. Kec. Baturiti	15	44	281	1	326	
	6. Kec. Pupuan	2	18	10	0	28	
3.	Pondok Wisata						
	1. Kec. Tabanan	8					
	2. Kec. Selemadeg	2					
	3. Kec. Selemadeg Barat	4					
	4. Kec. Kediri	7					
	5. Kec. Kerambitan	2					
	6. Kec. Penebel	2					
	7. Kec. Marga	1					
	8. Kec. Pupuan	2					
	9. Kec. Baturiti	8					
	Jumlah	70	431	416	52	899	

Sumber: Diolah dari Disbudpar Kabupaten Tabanan Tahun 2008

Keterangan:

Dbl singkatan dari *double* (satu kamar dengan dua tempat tidur).

Sgl singkatan dari *single* (satu kamar dengan satu tempat tidur).

Dari Tabel 4.11 di atas terlihat sarana pokok kepariwisataan yang ada di Kabupaten Tabanan sampai Juni 2008, dalam hal ini Kecamatan Baturiti mendominasi dalam jumlah kamar hotel melati, jumlah kamar pondok wisata, jumlah restoran serta jumlah rumah makan. Namun, untuk jumlah kamar hotel berbintang, didominasi oleh Kecamatan Kediri, khususnya di Desa Beraban dengan keberadaan hotel Le Meridien/Nirwana Bali.

Untuk mendukung kebutuhan wisatawan akan makanan dan minuman selama berwisata, keberadaan restoran dan rumah makan yang menyediakan aneka makanan (baik makanan tradisional maupun makanan internasional) sangatlah diperlukan. Restoran dan rumah makan tersebut di samping menyediakan aneka makanan juga memperhatikan standar kebersihan (*hygiene and sanitation*). Standar kebersihan yang diperlukan berupa kebersihan makanan, kebersihan petugas atau pelayanan yang menyajikan makanan, kebersihan peralatan makan, termasuk kebersihan lingkungan di sekitar lokasi restoran dan rumah makan.

Kabupaten Tabanan sampai dengan Juni 2008 memiliki 13 restoran yang tersebar pada empat kecamatan, yaitu masing-masing Kecamatan Kediri satu restoran, Kecamatan Baturiti sepuluh restoran, Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Penebel masing-masing satu restoran. Selanjutnya, untuk rumah makan, di Kabupaten Tabanan sampai Juni 2008, terdapat 44 rumah makan yang tersebar di tujuh kecamatan. Adapun sebaran rumah makan tersebut adalah Kecamatan Tabanan tujuh rumah makan, Kecamatan Kediri 12 rumah makan, Kecamatan Pupuan lima rumah makan, Kecamatan Penebel tiga rumah makan (termasuk *Café Jatiluwih*), Kecamatan

Selemadeg Timur satu rumah makan, Kecamatan Selemadeg Barat tiga rumah makan, dan Kecamatan Baturiti 13 rumah makan.

Agar selama berwisata wisatawan dapat mempergunakan waktunya secara efisien dan efektif untuk menikmati daya tarik wisata, maka keberadaan agen perjalanan wisata memiliki peran yang penting bagi wisatawan. Sampai dengan Juni 2008 Kabupaten Tabanan memiliki empat agen perjalanan wisata. Dari empat agen perjalanan wisata tersebut, tiga di antaranya berada di Kecamatan Tabanan dan satu berada di Desa Beraban, Kecamatan Kediri.

Untuk sarana pelengkap kepariwisataan, di samping telah disediakan oleh masing-masing hotel, Kabupaten Tabanan juga memiliki lokasi aktivitas wisata tirta. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 359 Tahun 1993, lokasi wisata tirta di Kabupaten Tabanan adalah Pantai Nyanyi (Kedungu); Pantai Pasut dan Pantai Kelating untuk aktivitas selancar dan layar tradisional; Danau Beratan Bedugul untuk aktivitas *parasailing*, ski air, sepeda air dan *jukung*; serta Sungai Balian untuk aktivitas *rafting*.

Untuk mengantisipasi beroperasinya produk wisata berupa wisata kapal pesiar antar pulau di sekitar Provinsi Bali atau wisata kapal pesiar dalam wilayah Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan khususnya Tanah Lot, juga direncanakan sebagai salah satu daya tarik wisata yang akan dilalui oleh aktivitas wisata kapal pesiar dalam Provinsi Bali. Untuk mendukung perencanaan tersebut, direncanakan rute wisata kapal pesiar tersebut adalah Kuta–Jimbaran–Canggu–Tanah Lot–Kuta.

### 4.3.3 Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu tanda yang dapat dijadikan acuan untuk menilai pengembangan sebuah Destinasi Pariwisata. Namun, dalam kaitan dengan penelitian kajian budaya (*cultural studies*), tanda yang berupa jumlah kunjungan wisatawan tidaklah cukup menggambarkan pengembangan daya tarik wisata tersebut. Oleh karena di dalamnya terdapat keterpaduan yang berupa interaksi antara *stakeholders* (masyarakat-pemerintah-pengusaha pariwisata), keterlibatan budaya setempat, kearifan lokal, dan produk pariwisata. Dengan keterpaduan tersebut, pariwisata tidak saja bermanfaat dari sisi ekonomi, tetapi juga diharapkan memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sosial dan budaya setempat.

Penelitian yang mengkaji pariwisata dari berbagai dimensi telah melahirkan empat pendekatan, yaitu (1) pendekatan *advocacy*, (2) pendekatan *cautionary*, (3) pendekatan *adaptancy*, dan (4) pendekatan *developmental*. Pendekatan *advocacy* lebih melihat pada keuntungan ekonomi yang akan diperoleh dari pariwisata. Potensi pariwisata bisa dipakai untuk mendukung bermacam-macam kegiatan ekonomis, menciptakan lapangan kerja, memperoleh devisa yang dibutuhkan bagi pembangunan, serta keuntungan ekonomis lainnya. Pendekatan *cautionary* menekankan bahwa pariwisata dapat mengakibatkan banyak kerugian (*disbenefits*) dalam berbagai aspek sosio-ekonomis, seperti menimbulkan lapangan kerja musiman dan bersifat rendah, mengakibatkan kebocoran devisa, menyebabkan komodifikasi budaya, serta menimbulkan berbagai konflik. Pendekatan *adaptancy* menyebutkan

bahwa pengaruh negatif pariwisata dapat dikontrol dengan mencari bentuk lain produk pariwisata yang selama ini secara umum sudah dikenal. Cara pandang ini berdasarkan pemikiran bahwa alam dan budaya dapat digabungkan dalam satu konteks sehingga muncullah strategi pembangunan pada skala kecil, pariwisata yang terkontrol, pariwisata yang melibatkan masyarakat setempat, pariwisata berkelanjutan, pariwisata yang menekankan pada kehidupan masyarakat setempat, pariwisata alam, pariwisata lingkungan, serta berbagai jenis pariwisata lainnya yang sifatnya terkendali. Dalam hal ini pendekatan *developmental* menganggap bahwa pariwisata dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menjadi tuan rumah dan peka terhadap selera masyarakat tuan rumah tersebut. Keadaan ini akan mengurangi jurang pemisah antara hak dan tanggung jawab dari tamu, tuan rumah, dan perantaranya.

Dari keempat pendekatan di atas, penelitian ini lebih pada mengkritisi pelaksanaan pendekatan *adaptancy* yang dilakukan oleh kepariwisataan. Selanjutnya, dengan kajian budaya (*cultural studies*) dikaji keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Terkait dengan penelitian ini, khususnya dari sisi kepariwisataan Kabupaten Tabanan, penyajian jumlah kunjungan wisatawan bukan hanya bermaksud untuk ”memompa” agar wisatawan semakin banyak berkunjung ke daya tarik wisata yang ada di destinasi tersebut, tetapi untuk menjadikan latar guna mengkaji keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di suatu Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, akan dapat diperoleh gambaran tentang keterlibatan masyarakat

dalam pengembangan pariwisata, seperti yang digagas oleh pendekatan *adaptancy* dalam kepariwisataan. Tabel 4.12 berikut ini menyajikan jumlah wisatawan ke Kabupaten Tabanan tahun 1998–2007.

Tabel 4.12

## Jumlah Wisatawan ke Kabupaten Tabanan Tahun 1998–2007

No	Tahun	Jumlah Wisnus		Jumlah Wisman		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	1998	601.391		454.719		1.056.110	
2.	1999	685.947	+14,06	652.681	+43,53	1.338.628	+26,75
3.	2000	1.291.201	+88,24	613.523	-6,00	1.904.724	+42,29
4.	2001	1.297.310	+0,47	379.934	-38,07	1.677.244	-11,94
5.	2002	1.413.412	+8,95	315.603	-16,93	1.729.015	+3,09
6.	2003	1.202.347	-14,93	424.672	+34,56	1.627.019	-5,89
7.	2004	2.239.083	+86,23	825.141	+94,30	3.064.224	+88,33
8.	2005	1.354.338	-39,51	471.785	-42,82	1.826.123	-40,40
9.	2006	1.879.637	+38,79	523.736	+11,01	2.403.373	+31,61
10.	2007	1.447.663	-22,98	750.312	+43,26	2.197.975	-8,55
	Jumlah	13.412.329		5.412.106		18.824.435	

Sumber: Diolah dari Disbudpar Kabupaten Tabanan Tahun 2008

Keterangan: Wisnus singkatan dari wisatawan nusantara dan Wisman singkatan dari wisatawan mancanegara.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 jumlah wisatawan nusantara terus mengalami peningkatan. Namun mulai tahun 2003 hingga tahun 2007 jumlahnya setiap tahun berfluktuatif. Dalam hal ini untuk wisatawan mancanegara, sejak tahun 2000 hingga tahun 2002 jumlahnya setiap tahun mengalami penurunan, tetapi sejak tahun 2003 hingga tahun 2007 mengalami peningkatan dan hanya pada tahun 2005 mengalami penurunan. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berwisata ke Kabupaten Tabanan selama tahun 2000 sampai tahun 2007 berfluktuatif.

Selama sepuluh tahun sejak tahun 1998, jumlah wisatawan nusantara yang berwisata ke Kabupaten Tabanan mencapai 13.412.329 orang atau 71,25% dari total wisatawan yang mencapai 18.824.435 orang. Dengan demikian, jumlah wisatawan mancanegara yang berwisata ke Kabupaten Tabanan pada periode yang sama mencapai jumlah 5.412.106 orang atau 28,75%.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan selama lima tahun terakhir (2003—2007), yakni memperlihatkan bahwa Daya Tarik Wisata Tanah Lot selama lima tahun tersebut selalu meraih jumlah kunjungan terbanyak, baik jumlah wisatawan nusantara maupun jumlah wisatawan mancanegara, meskipun jumlah wisatawan mancanegara yang berwisata ke Tanah Lot tidak sebanyak wisatawan nusantara selama lima tahun tersebut (2003—2007). Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan dengan jumlah yang paling sedikit untuk setiap tahunnya selama tahun 2003—2007, yakni dibedakan menjadi dua: (1) wisatawan nusantara dan (2) wisatawan mancanegara. *Pertama*, selama tahun 2003—2007 daya tarik wisata yang paling sedikit dikunjungi wisatawan nusantara adalah Taman Kupu-Kupu Lestari, Yeh Panes Penatahan dan Puri Anyar Kerambitan. *Kedua*, selama tahun 2003—2007 daya tarik wisata yang paling sedikit dikunjungi wisatawan mancanegara adalah Puri Gede Kerambitan, Taman Pujaan Bangsa Margarana, dan Bedugul. Adapun penyebaran wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berwisata ke Kabupaten Tabanan berdasarkan daya tarik wisata yang dikunjungi disajikan pada Tabel 4.13 berikut ini.

**Tabel 4.13**  
**Jumlah Wisatawan ke Kabupaten Tabanan**  
**menurut Daya Tarik Wisata yang Dikunjungi Tahun 2003—2007**

No.	Objek Wisata	Jumlah Wisatawan									
		2003		2004		2005		2006		2007	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
1.	A	119.519	72.811	126.852	93.845	43.724	43.156	78.203	72.018	117.997	118.531
2.	B	180.108	45.375	217.075	108.059	80.007	9	171.958	3.533	163.903	3.483
3.	C	166.969	5.780	246.102	20.563	312.279	7.368	409.244	12.051	388.654	17.303
4.	D	16.440	802	17.038	2.999	17.601	807	7.148	677	9.289	918
5.	E	149.233	79.115	134.176	103.176	89.795	79.691	67.392	52.975	62.978	73.140
6.	F	562.017	211.579	1.490.019	490.762	801.858	333.541	1.089.333	363.187	694.510	515.804
7.	G	4.681	593	6.313	1.110	5.757	812	53.164	812	5.276	1.124
8.	H	2.489	2.026	0	0	2.012	312	138	0	1.949	622
9.	I	0	0	0	0	0	0	0	0	30	136
10.	J	0	50	0	0	0	95	0	0	330	130
11.	K	0	2.993	0	0	0	0	1.084	15.040	130	15.423
12.	L	891	3.548	1.508	6.135	1.305	5.974	1.973	3.073	2.617	3.698

Sumber: Disbudpar Kabupaten Tabanan Tahun 2008

Keterangan:

Wisnus singkatan dari wisatawan nusantara dan wisman singkatan dari wisatawan mancanegara.

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| A: Ulun Danu Beratan     | B: Bedugul                        |
| C: Kebun Raya Eka Karya  | D: Taman Pujaaan Bangsa Margarana |
| E: Alas Kedaton          | F: Tanah Lot                      |
| G: Museum Subak          | H: Air Panes Penatahan            |
| I: Puri Anyar Kerambitan | J : Puri Gede Kerambitan          |
| K: Jatiluwih             | L: Taman Kupu-Kupu Lestari        |



## **BAB V**

### **PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA JATILUWIH**

#### **5.1 Desa Jatiluwih Dalam Pengembangan Pariwisata**

##### **5.1.1 Sebelum Pengembangan Desa Wisata**

Desa Jatiluwih sebelum mengalami pengembangan menjadi desa wisata, hanyalah merupakan salah satu desa pertanian di Kecamatan Penebel sehingga secara dominan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Di samping itu, ada juga penduduk Desa Jatiluwih yang memiliki mata pencaharian seperti pada bidang peternakan, perkebunan, perdagangan, pengangkutan/transportasi, pemerintahan, serta industri rumah tangga.

Sebagai daerah pertanian, Desa Jatiluwih terkenal dengan tanahnya yang subur serta hasil pertaniannya berupa padi yang merupakan padi asli Bali. Dengan potensi itulah Belanda tertarik untuk menguasai desa ini. Pada masa kekuasaan Belanda di Bali (1910–1942), setelah desa ini berhasil terjajah, di sebelah barat Desa Jatiluwih didirikan markas besar keamanan Belanda yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama *Tangsi* Belanda.

Upacara keagamaan yang terkait dengan mata pencaharian utama penduduk setempat sebagai petani, juga tumbuh subur dan terjaga dalam suasana religius yang baik. Upacara tersebut pada intinya memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar panennya berhasil dengan baik dan tanaman tidak terserang hama.

Upacara memohon keselamatan tidak terlepas dari manifestasi aspek *Trihita Karana* dalam kaitannya dengan budaya pertanian.

*Trihita Karana* yang merupakan filosofi agama Hindu yang meliputi *parhyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan manusia dengan sesamanya), dan *palemahan* (hubungan manusia dengan alam lingkungan) juga terpelihara dan terimplementasi dengan baik. Dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), tercermin dari keberadaan pura-pura di sekitar Desa Jatiluwih yang jumlahnya mencapai 22 pura. Pura-pura tersebut tersebar pada wilayah Desa Jatiluwih dan selalu dilaksanakan upacara pada setiap hari-hari tertentu dan *piodalan* pada masing-masing pura. Selanjutnya, pada konteks hubungan manusia dengan sesamanya (*pawongan*), penduduk Desa Jatiluwih dikenal sebagai masyarakat yang santun dan giat bekerja. Akibatnya, tidak pernah terdengar adanya pertentangan atau bahkan perselisihan antarpenduduk desa. Sementara itu, pada konteks hubungan antara manusia dengan lingkungannya (*palemahan*), masyarakat Desa Jatiluwih sangat menyatu dengan alam dan tidak melakukan perkosaan terhadap alam sekitarnya. Sebagai akibatnya, air selalu tersedia dalam jumlah yang berlebih sehingga kehidupan pertaniannya dapat berjalan seperti harapan masyarakat setempat.

Potensi budaya, terutama terkait dengan pura-pura yang ada di Desa Jatiluwih, ada satu keunikan, yaitu dalam kawasan desa terdapat rangkaian pura yang membentuk jalur lurus dan hampir tegak lurus dengan hutan yang ada di utara desa. Secara berurutan dari lokasi terendah sampai tertinggi, pura-pura tersebut adalah Pura Puseh Desa, Pura Luhur Petali, Pura Bujangga, Pura Rsi, dan Pura Taksu Agung.

Dalam penelitian ini banyak dikaitkan dengan keberadaan Pura Luhur Petali, terutama pada kasus "Vila Petali" yang terkait pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Untuk memberikan latar awal, berikut ini diuraikan tentang Pura Luhur Petali di Desa Jatiluwih.

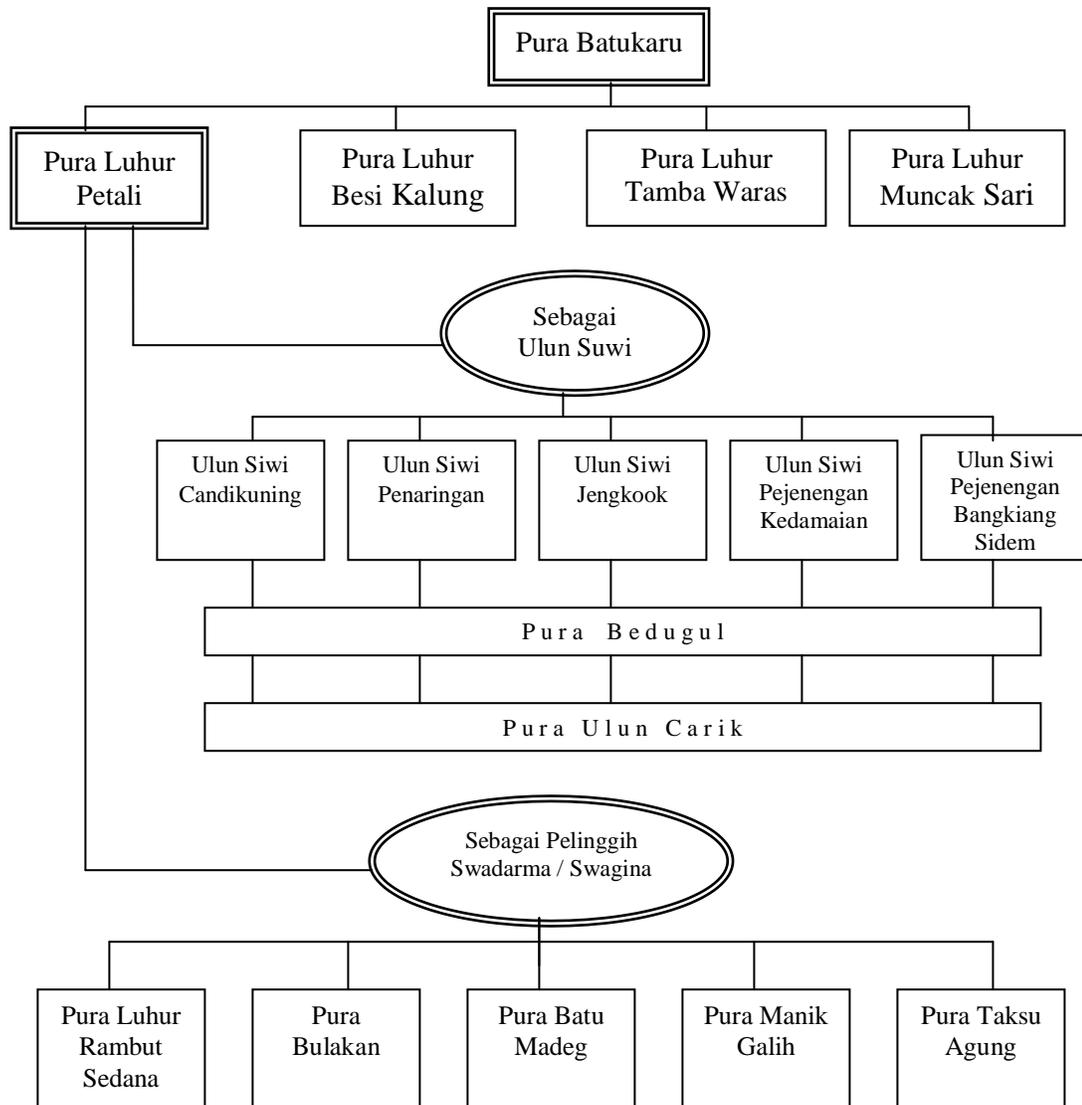
"Petali" sebenarnya berasal dari *bhutali*, yang tersusun dari kata *bhu* yang artinya *jagat* atau 'alam semesta' dan kata *tali* yang artinya 'pengikat'. Dengan demikian, *bhutali* berarti 'pengikat jagat'. Dalam hal ini berarti Pura Petali adalah pura pengikat *jagat* atau alam semesta agar tercapai keseimbangan dalam kehidupan.

Pura Luhur Petali tergolong penyangga Pura Batukaru, dan kedudukan Pura Batukaru adalah sebagai pura *Sadkahyangan*. Sebagai penyangga pura *Sadkahyangan* Batukaru, kedudukan Pura Luhur Petali sejajar atau sama dengan tiga pura lainnya yang ada di Desa Jatiluwih. Ketiga pura itu adalah Pura Luhur Besi Kalung, Pura Luhur Tamba Waras, dan Pura Luhur Muncak Sari.

Pura Luhur Petali merupakan Pura *Ulun Suwi* yang berfungsi tidak saja terkait dengan bidang pertanian, tetapi juga berfungsi sebagai *Pelinggih Swadarma* atau *Swagina*. Dalam fungsinya sebagai Pura *Ulun Suwi*, Pura Luhur Petali didukung oleh lima Pura *Ulun Siwi*, yaitu Pura *Ulun Siwi* Candikuning, Pura *Ulun Siwi* Penaringan, Pura *Ulun Siwi* Jengkook, Pura *Ulun Siwi* Pejenengan Kedamaian, dan Pura *Ulun Siwi* Pejenengan Bangkiang Sidem. Di bawah Pura *Ulun Siwi* ada beberapa Pura *Bedugul*, dan di bawah Pura *Bedugul* ada Pura *Ulun Carik*.

Dalam hal sebagai *pelinggih Swadarma* atau *Swagina*, Pura Luhur Petali didukung oleh lima pura, yaitu Pura Luhur Rambut Sedana, Pura Bulakan, Pura Batu

Madeg, Pura Manik Galih, dan Pura Taksu Agung. Dari uraian tentang kedudukan Pura Petali sebagai Pura Penyangga hingga sebagai Pura *Ulun Suwi* dan Pura *Swadarma* atau *Swagina*, disajikan pada Gambar 5.1 di bawah ini.



Gambar 5.1

Kedudukan Pura Luhur Petali terhadap Pura-Pura Lainnya  
di Desa Jatiluwih

Dengan mengacu pada konsep *Trimandala*, pada *Utama Mandala* Pura Luhur Petali terdapat (1) Pelinggih Luhur Petali, (2) Gedong Simpen, (3) Gedong Kerikinan, (4) Pesimpangan Tamblingan, (5) Piasan Taksu, (6) Piasan Rambut Sedana, (7) Bale Penggeraos, (8) Bale Linggih, (9) Bale Plapah atau Bale Pebaktian, (10) Beji Sunia dan (11) Pelinggih Banbang. Selanjutnya, pada *Madya Mandala* terdapat (1) Pelinggih Utama Ratu Nyoman, (2) Gedong Simpen, (3) Gedong Madu, (4) Bale Piasan, (5) Bale Kembar dan (6) Pengapit Lawang. Pada *Nista Mandala* terdapat (1) Pelinggih Bale Agung, (2) Pelinggih Bale Panjang, (3) Bale Pegat, (4) Bale Gong, (5) Bale Kulkul, (6) Jineng, dan (7) Pengapit Lawang.

Pura Luhur Petali disungsung (*di-empon*) oleh satu *adat pekandelan* atau *adat penengen* dan 24 *adat pengempon*. Upacaranya berlangsung pada *wuku* Buda Keliwon Ugu, dan pada saat pelaksanaan upacara *Ida Betara* akan *nyejer* selama tiga hari. Selama berlangsungnya upacara, tidak saja dihadiri oleh *pemedek* dari desa setempat, tetapi juga dihadiri oleh *pemedek* dari Kabupaten Tabanan dan bahkan dari luar Kabupaten Tabanan.

Seperti layaknya pura-pura lain di Bali, Pura Luhur Petali juga memiliki *apit lawang* pada *Nista Mandala*. *Apit lawang* ini juga bisa menjadi ciri khas dari sebuah pura, di samping bagian-bagian yang ada di pura tersebut, baik pada *Madya Mandala* maupun *Utama Mandala*. *Apit lawang* Pura Luhur Petali berada pada posisi lurus dengan sebuah pohon besar yang ada di *Utama Mandala* pura tersebut. Pura Luhur Petali dengan *apit lawang*-nya di Desa Jatiluwih disajikan seperti Gambar 5.2 berikut ini.



Gambar 5.2

Pura Luhur Petali di Desa Jatiluwih

Dokumen: Prasiasa Tahun 2008

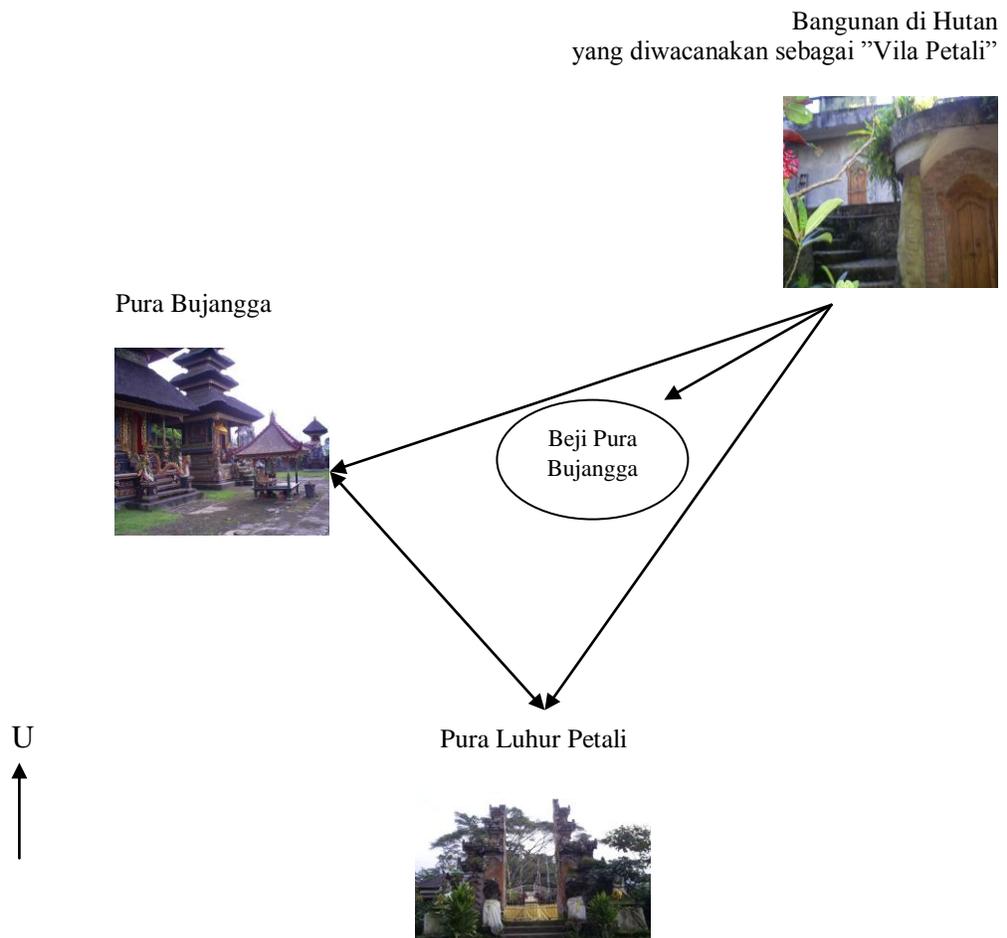
Untuk menelusuri keberadaan sebuah pura, dalam kearifan lokal Bali dikenal adanya *Caturdresta*, yang terdiri atas (1) *purwa dresta*, (2) *loka dresta*, (3) *sastra dresta* dan (4) *desa dresta*. *Purwa dresta* diartikan bahwa masyarakat tertentu tidak mengetahui asal usul sebuah pura, tetapi mereka yakin bahwa *Ida Sang Hyang Widhi* berstana di pura tersebut. *Loka dresta* diartikan sebagai adanya cerita dari orang tua terdahulu (*penglingsir*) tentang asal usul sebuah pura, dan hingga kini cerita tersebut diyakini oleh masyarakat. *Sastra dresta* merupakan sumber tertulis dalam agama Hindu, yakni untuk menelusuri keberadaan sebuah pura jika tidak ada *loka dresta*. Selanjutnya, *desa dresta* atau *desa mawacara*, merupakan *prarem-prarem* adat setempat yang berlandaskan pada norma-norma agama.

Pura Luhur Petali dibangun oleh Bhagawan Rsi Cangu bersama Arya Wangbang pada zaman pemerintahan Adhipati Samprangan Sri Kresna Kepakisan sekitar saka warsa 1272 atau 1350 Masehi. Dalam salah satu sumber, yakni *Tattwa Maharsi Markandya* diuraikan pembangunan pura ini berhubungan dengan kisah Ida Bagus Angker yang merupakan putra Rsi Wesnama Mustika. Setelah Rsi Mustika wafat di Besakih, karena bertapa cukup lama memohon kestabilan negara, Ida Bagus Angker pindah dari Sengguhan Klungkung ke Giri Kusuma. Beliau melakukan *yoga semadhi* mempersatukan pikiran sucinya. Tempat beliau beryoga akhirnya dinamakan Gunung Sari, sementara tempat tinggal Ida Bagus Angker dinamakan Jatiluwih (Tim Redaksi Bali Post, 2008:156).

Terkait dengan rencana pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata, meskipun desa ini belum mengalami pengembangan sebagai desa wisata, sebenarnya telah terjadi komodifikasi. Komodifikasi tersebut berupa penjualan tanah hutan di sekitar pura yang sudah terjadi pada tahun 1990-an, tepatnya di sebelah utara dan di sebelah barat Pura Luhur Petali. Bagi masyarakat Bali, tanah memiliki arti sosio-religius, kultural, dan ekonomis. Secara sosio-religius, keberadaan sejengkal tanah di Bali tidak bisa dilepaskan dari aktivitas religius berupa upacara keagamaan dalam rangka menjaga keseimbangan hubungan yang terjadi di antara komponen-komponen *Trihita Karana*. Selanjutnya, secara kultural, tanah di Bali tidak bisa dilepaskan dari budaya yang dijiwai oleh agama Hindu sehingga budaya tersebut harus tetap berjalan.

Salah satu pembeli tanah dari [luar] Bali, tanahnya berlokasi di sebelah utara Pura Luhur Petali atau di atas *Beji* Pura Bujangga, oleh pemiliknya dibuat vila.

Bangunan vila tersebut berada di tengah hutan sebelah utara Desa Jatiluwih, tepatnya di sebelah utara Pura Luhur Petali dan berdekatan dengan Pura Bujangga, bahkan di bawah bangunan vila tersebut terdapat *Beji* Pura Bujangga. Adapun posisi bangunan vila terhadap pura disekitarnya ditunjukkan pada Gambar 5.3 berikut ini.



Gambar 5.3

Skematis Letak "Vila Petali" Terhadap Pura Bujangga dan Pura Luhur Petali  
Dokumen: Prasiasa Tahun 2008

Keberhasilan pembangunan di tengah hutan dan berada pada radius kesucian pura, yakni merupakan suatu bentuk komodifikasi awal dari komodifikasi lainnya

yang akan terjadi pasca pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata. Selain itu, keberhasilan pembangunan tersebut juga menunjukkan adanya kemenangan kekuasaan (*power*) dari penguasa, yang lebih berpihak kepada kapitalis, sehingga *local genius* yang berupa *Bhisama* kesucian pura dan *Trihita Karana* terabaikan dan dikorbankan hanya untuk memenuhi *libido* kapitalis.

Penjualan tanah di sekitar Pura Luhur Petali dapat terjadi karena adanya keterlibatan masyarakat setempat yang berperan sebagai *calo* tanah atau *makelar* tanah. Dengan dukungan aparat desa setempat, penjualan tanah di sekitar Pura Luhur Petali tersebut berhasil dilaksanakan. Dalam hal ini kepada para petani pemilik tanah, *calo* atau *makelar* tanah membujuk dan mengatakan, "Jika tanah tersebut dikelola tidak akan mendapatkan hasil yang seberapa." atau "Dengan dijual dan berpaling pada usaha lain kemungkinan bisa berhasil.", atau "Tanah di lokasi ini sudah tidak bisa diharapkan lagi kesuburannya dan berada pada posisi yang jelek." dan berbagai macam bujukan lainnya.

Sehubungan dengan keterbatasan informasi yang ada di kantor kepala desa tentang masyarakat Desa Jatiluwih yang menjual tanah di kawasan suci sekitar Pura Luhur Petali, oleh Pan Sunasih alias Wayan Mustika (53 tahun) yang juga penjual tanah pada wawancara tanggal 26 Juni 2008 menyebutkan sebagai berikut: (1) masyarakat yang menjual tanah di sebelah utara Pura Luhur Petali adalah I Wayan Mustika, Pan Dasi, I Nengah Sudira, dan Ketut Darmadi; (2) masyarakat yang menjual tanah di sebelah barat Pura Luhur Petali adalah Pan Nyempeng, Nang

Genjer, Nyoman Darna, Nengah Ceteng serta Nyoman Mitra, Pan Juar, Pan Kajin, Pan Sunasih, dan Nang Mujung.

Masyarakat tersebut menjual tanah, di samping karena desakan ekonomi juga karena tekanan penguasa lewat *calo* tanah. Mereka sama sekali tidak mampu membayangkan dampak yang akan ditimbulkan dari penjualan tanah pada radius kesucian pura. Mereka sama sekali tidak tahu tentang keberadaan *Bhisama* yang mengatur tentang Kawasan Suci di sekitar pura. Dengan demikian, penjualan tanah terjadi karena adanya tekanan penguasa melalui relasi kekuasaan (*power*).

Dalam konteks yang lebih luas, penjualan tanah di radius kesucian Pura Luhur Petali untuk dijadikan akomodasi, jelas bertentangan dengan konsep kearifan lokal (*local genius*) di Bali, yaitu *Trihita Karana*. Dari sisi *parhyangan*, dapat menimbulkan kotor (*leteh*) bagi pura, dari sisi *pawongan* dapat menimbulkan konflik antara pembeli tanah dengan masyarakat setempat yang membela dan mempertahankan radius kesucian pura, dan dari sisi *palemahan* akan terjadi hubungan yang tidak harmonis antara manusia dengan lingkungan karena lingkungan di sekitar pura dipenuhi oleh bangunan. Konsep kearifan lokal (*local genius*) yang berupa *Trihita Karana* tersebut diperkuat dengan *Bhisama* tentang Kesucian Pura berupa Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/KEP./I/PHDIP/1994 tertanggal 25 Januari 1994. Dalam *Bhisama* tersebut diatur tentang radius kesucian pura yang disebut daerah *Kekeraan* dengan ukuran *Apeneleng*, *Apenimpug*, dan *Apenyengker*. Untuk Pura *Sadkahyangan* dipakai ukuran *Apeneleng Agung* (minimal lima kilo meter dari Pura), untuk Pura *Dang Kahyangan* dipakai

ukuran *Apeneleng Alit* (minimal dua kilo meter dari Pura), dan untuk *Kahyangan Tiga* dan lain-lain dipakai ukuran *Apenimpug* dan *Apenyengker*.

*Bhisama* tentang Kesucian Pura tersebut diserahkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia kepada Gubernur Bali bertempat di Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar pada tanggal 1 Februari 1994. Penyerahan *Bhisama* tersebut dihadiri oleh I Ketut Wiana (Wakil Sekjen PHDI Pusat), I.B.G. Agastia (Ketua I PHDI Pusat), Ida Pedanda Gede Raka (Paruman Sulinggih PHDI Pusat), I Made Bandem (Ketua III PHDI Pusat), Rai Wedana (Tata Usaha), I.B. Wijaya Kusuma (Sekretaris PHDI Bali), Nyoman Pegug (Bendahara PHDI Pusat), I Gusti Ngurah Oka (PHDI Bali), dan I Made Merta (PHDI Bali).

*Bhisama* Kesucian Pura Nomor 11/Kep./PHDIP/1994 tertanggal 25 Januari 1994 tersebut merupakan sebuah fatwa keagamaan untuk menjaga kesucian pura. Dengan demikian, *Bhisama* tersebut berlaku untuk seluruh pura yang ada di Bali dan dalam pembangunan apa pun di Bali yang terkait dengan wilayah kesucian pura.

Jika dikaitkan antara *Bhisama* Kesucian Pura, kedudukan Pura Luhur Petali adalah sebagai Pura *Dang Kahyangan*, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih, pada Pasal 14, Ayat (5) huruf a disebutkan bahwa batas perlindungan di sebelah timur dan sebelah barat Pura Luhur Petali adalah minimal dua kilo meter. Dari ketentuan dalam peraturan tersebut dan jika dikaitkan dengan *Bhisama* Kesucian Pura Nomor 11/Kep./PHDIP/1994 tertanggal 25

Januari 1994, maka radius kesucian Pura Luhur Petali minimal dua kilo meter dari pura tersebut.

Selain pura *Dang Kahyangan*, di Bali juga dikenal pura *Sadkahyangan*. Pengertian *Sadkahyangan* tidaklah sama persis dengan *Dang Kahyangan*. *Sadkahyangan* sering dikatakan sebagai tempat suci untuk memuja *Sang Hyang Widhi*, dan *Dang Kahyangan* selain untuk memuja *Sang Hyang Widhi* juga merupakan tempat untuk memuja roh suci para Maha Rsi sebagai *Dang Guru* yang telah memberikan jasa dalam pengembangan agama Hindu. Secara hierarki, status pura yang termasuk dalam kelompok *Dang Kahyangan* lebih rendah kedudukannya dari pura yang berstatus sebagai *Sadkahyangan*. Pura Luhur Petali dalam kedudukan sebagai *Pura Dang Kahyangan* secara khusus akan mengikat seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Jatiluwih.

Sebelum dilakukannya pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata, sebagian besar masyarakat Desa Jatiluwih lebih menfokuskan pada aktivitas pertanian dalam arti luas. Sebagian besar masyarakatnya, baik laki-laki maupun perempuan lebih menggantungkan diri pada aktivitas pertanian. Selain terfokus pada pertanian, masyarakat setempat juga aktif dalam kegiatan pada *sekaa-sekaa*. *Sekaa-sekaa* yang ada, seperti *sekaa numbeg*, *sekaa manyi*, dan *sekaa meboros* keberadaannya terpelihara serta berkembang secara alamiah mengikuti kehidupan desa setempat. Selain *sekaa-sekaa* yang sudah disebutkan, dari sisi kesenian (dalam arti sempit) berkembang *sekaa-sekaa* seperti *sekaa joged bumbung*, *sekaa megeguritan*, *sekaa gong (lanang dan istri)*, *sekaa ngigel* (menari). *Sekaa-sekaa* kesenian ini juga terus

berkembang mengikuti denyut nadi kehidupan desa yang berada dalam lingkungan pertanian. Keberadaan *sekaa-sekaa* ini di samping merupakan dukungan terhadap kehidupan masyarakat yang sebagian besar sebagai petani, juga merupakan hiburan bagi masyarakat Desa Jatiluwih.

Kebertahanan masyarakat untuk meneruskan budaya agraris dengan sistem pertanian tradisional, menurut Sairin (2002:172) merupakan pertentangan dari kondisi masyarakat Indonesia yang berada pada masa transisional. Dalam hal ini masyarakat transisional cenderung berpindah dari kehidupan agraris tradisional yang penuh nuansa spiritualistik dan magis menuju masyarakat industri yang cenderung materialistik dan rasional. Sairin (2002) melihat kebertahanan masyarakat terhadap sistem pertanian tradisional bisa dilihat dari konteks perlindungan terhadap pekerja wanita di pedesaan. Oleh karena jika industrialisasi dibiarkan berkembang pada pertanian akan dapat mengakibatkan menyusutnya lapangan pekerjaan, khususnya bagi wanita yang ada di pedesaan.

Dari sisi sarana pariwisata (sarana pokok, sarana pelengkap dan sarana penunjang), sebelum pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata, pengembangan sarana pariwisata yang diperlukan untuk menerima kehadiran wisatawan sudah ada. Sarana tersebut berupa akomodasi Galang Kangin *Inn*, yang dibangun oleh masyarakat desa setempat. Akomodasi tersebut dibangun tahun 1990-an atau dua tahun menjelang pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata. Kapitalis dari luar desa belum ada yang menaruh perhatian terhadap Desa Jatiluwih, khususnya pada investasi pengembangan sarana pariwisata.

Wisatawan dibiarkan menikmati keindahan alam dan panorama terasering sawah di Desa Jatiluwih, tanpa terbebani untuk membayar karcis masuk (*entrance fee*) serta biaya-biaya lainnya. Penawaran produk pariwisata dari penduduk setempat akan berbagai produk pariwisata lokal juga tidak ada sehingga dampak pariwisata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Desa Jatiluwih secara keseluruhan pada periode ini boleh dikatakan nihil.

Kondisi yang menguntungkan terjadi pada perusahaan-perusahaan, perorangan yang berasal dari luar Desa Jatiluwih, dan perorangan dari Desa Jatiluwih yang kebetulan memiliki usaha sarana pariwisata. Perusahaan-perusahaan dalam bentuk *travel agent* tersebut mengemas Desa Jatiluwih dalam bentuk paket wisata (*package tours*). Paket wisata tersebut dijual kepada wisatawan, baik kepada wisatawan nusantara maupun kepada wisatawan mancanegara. Dengan demikian, secara otomatis hasil dari penjualan paket wisata tersebut dinikmati oleh mereka yang berasal dari luar Desa Jatiluwih. Hal ini berarti kepariwisataan di Desa Jatiluwih sampai dengan sebelum tahun 1992 dari sisi ekonomi khususnya dan dilihat dari pendapatan masyarakat Desa Jatiluwih, secara keseluruhan masyarakat setempat belum menikmati manfaat ekonomi dari pariwisata. Kondisi ini jika terus berlanjut akan merupakan dampak negatif pengembangan pariwisata terhadap masyarakat desa setempat. Masyarakat desa setempat yang seharusnya paling awal menikmati manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata di desanya, justru terjadi sebaliknya, orang luar desa setempat yang lebih awal menikmati keuntungan dari pariwisata di Desa Jatiluwih. Masyarakat setempat yang menikmati keuntungan, hanya segelintir saja.

### 5.1.2 Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata terjadi pada tahun 1992. Pengembangan desa wisata tersebut merupakan proyek dengan pendanaan dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (Depparpostel). Depparpostel bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada menyusun Tata Ruang dan Rencana Detail Teknis-nya. Selanjutnya implementasi proyek tersebut di lapangan ditangani oleh Kantor Wilayah X Depparpostel Bali.

Berdasarkan potensi yang dimiliki, secara nonfisik pengembangan Desa Wisata Jatiluwih diarahkan pada: (1) penyajian serangkaian potensi yang tersedia sepanjang tahun, yaitu alam pegunungan, terasering sawah, dan arsitektur tradisional desa setempat; (2) penyajian panorama terasering sawah yang disertai dengan aktivitas tradisional, seperti: membajak, menyiapkan bibit, dan menanam yang dapat disaksikan pada Oktober sampai Januari. Kemudian, untuk aktivitas menuai dan memasukkan padi ke lumbung terjadi pada Mei sampai Juni. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas tersebut tidak dapat disajikan sepanjang tahun karena hanya berlangsung pada bulan-bulan tertentu; (3) khusus untuk yang menyukai aktivitas alam terbuka (*outdoor activity*) untuk mengapresiasi alam pegunungan, terasering persawahan, dan aktivitas penjelajahan, diadakan kegiatan *trecking*. Aktivitas ini diharapkan sebanyak mungkin dapat dinikmati oleh wisatawan, baik menikmati sawah, sungai, desa, jalan setapak, hutan, tanjakan, turunan, mata air, perkebunan, dan berbagai *angel* pemandangan untuk keperluan fotografi; (4) penyajian upacara terkait dengan penanaman padi di sawah, termasuk proses persiapan di balik upacara

tersebut, baik yang dilakukan oleh petani secara mandiri maupun oleh lembaga *subak*; dan (5) penyajian kesenian yang dikaitkan dengan aktivitas seperti makan siang atau makan malam.

Pengembangan secara fisik diarahkan pada tersedianya akomodasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang tertarik menyaksikan kehidupan masyarakat desa secara langsung. Untuk memenuhi kebutuhan akan akomodasi tersebut, bangunan yang diarahkan untuk dimodifikasi adalah *bale meten*, *bale daja*, *bale dangin*, *bale munduk*, dan *bale gedé*.

Dengan memperhatikan kedua arah pengembangan di atas, maka untuk pengembangan secara nonfisik sudah dapat berjalan meskipun belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Namun, untuk pengembangan secara fisik, dengan proyek pertamanya berupa modifikasi *bale daja* sebagai "rumah contoh" serta pembangunan "Vila Petali" sampai saat ini menyisakan persoalan di masyarakat, yakni berupa komodifikasi dan konflik kepentingan.

Berkaitan dengan persoalan yang terjadi pada pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata, seperti adanya komodifikasi serta konflik kepentingan yang terjadi, menurut Wayan Sumiata (47 tahun), yaitu pada wawancara 15 Agustus 2008 adalah sebagai berikut.

"Masyarakat desa kami mau menerima kehadiran pariwisata karena sudah lelah bertahan, terus saja ditonjolkan manfaat ekonominya daripada dampak negatifnya, dan kami pasrah menerimanya."

Apa yang dikemukakan oleh salah satu warga Desa Jatiluwih tersebut, yakni menunjukkan bahwa pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata tidak

sepenuhnya mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat. Hal ini karena masyarakat setempat lebih berpikir untuk melindungi sumber daya yang ada daripada mementingkan keuntungan yang bersifat ekonomi dari pengembangan tersebut. Masyarakat terpaksa menerima pengembangan desanya sebagai desa wisata karena mengalami tekanan dari penguasa dengan mempergunakan diskursus yang seakan-akan membela kepentingan masyarakat setempat. Diskursus yang digunakan adalah pelestarian budaya, adat, dan agama; penyediaan kesempatan kerja; dan peningkatan pendapatan daerah.

Fenomena ini menunjukkan adanya tekanan dari penguasa yang mendukung kapitalisme sehingga masyarakat dibuat tidak berdaya dan menerima apa yang menjadi keinginan penguasa. Menurut Gramsci (1971:57) penguasa sebagai kelompok dominan sudah berhasil menguasai masyarakat sebagai kelompok subordinasi untuk menerima apa yang menjadi keinginan kelompok dominan, yaitu dengan mempergunakan diskursus ekonomi. Sesuai dengan teori sosial kritis dari Agger (2003:8), bahwa dominasi bersifat struktural, yakni kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh institusi yang lebih besar, yaitu masyarakat politik. Selanjutnya, menurut Dahrendorf (1959) dominasi kekuasaan memicu perlawanan sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik.

#### 5.1.2.1 Daya tarik wisata

Dalam perjalanan pengembangannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998 Desa Jatiluwih ditetapkan sebagai daya tarik wisata

dengan beberapa daya tariknya adalah pura-pura yang ada di sekitar Desa Wisata Jatiluwih (Pura Rsi, Pura Bujangga, Pura Taksu Agung, Pura Rambut Sedana, dan Pura Luhur Petali), di samping keindahan alam serta terasering sawah. Di antara pura-pura tersebut yang terkenal adalah Pura Luhur Petali, sehingga muncul publikasi di media massa tentang pembangunan di sebelah utara Pura Luhur Petali yang memakai nama "Vila Petali".

Bangunan Pura Luhur Petali merupakan salah satu monumen hidup (*living monument*) berupa buah karya budaya masa lalu yang masih bertahan dan berfungsi bagi kehidupan masyarakat pada masa kini. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Bab I, Pasal 1, Ayat 5 disebutkan, "Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan". Sebagai hasil karya manusia yang memiliki nilai sejarah, seni dan budaya, Pura Luhur Petali dapat dikategorikan sebagai daya tarik wisata. Hal ini untuk membedakannya dengan daya tarik wisata ciptaan Tuhan, seperti: pantai, gunung, dan danau alamiah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992, Bab II, Pasal 2 tentang Benda Cagar Budaya disebutkan bahwa situs dan benda cagar budaya dilindungi dengan tujuan untuk melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional. Peninggalan arkeologi memiliki nilai keindahan (estetika), simbolis, ekonomi, dan informasi tentang masa lalu sehingga dijadikan daya tarik wisata.

Keberadaan Pura Luhur Petali di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Jatiluwih, khususnya yang membeli paket wisata "Waka Land Cruise" sudah tidak asing lagi. Hal ini dikarenakan untuk menuju restoran Waka Loka akan melalui Pura Luhur Petali. Restoran Waka Loka berada di tengah hutan bambu sebelah barat Pura Luhur Petali.

Selain keberadaan pura-pura, salah satu daya tarik wisata yang tidak kalah pentingnya bagi Desa Wisata Jatiluwih adalah keindahan terasering sawah dengan luasnya mencapai 303 hektar. Terasering sawah menjadi *setting* utama pemandangan desa di samping aktivitas ritual yang terkait dengan bercocok tanam padi. Dalam hal ini dijadikannya terasering sawah di desa setempat sebagai *setting* utama, karena letaknya yang strategis dan mudah dilihat dari berbagai arah, di samping sawah merupakan cerminan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat Desa Jatiluwih. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, tidak berlebihan jika terasering sawah dijadikan daya tarik utama, di samping daya tarik lainnya yang berupa budaya penanaman padi bali yang masih dilakukan oleh masyarakat setempat serta produk budaya yang berupa kesenian.

Wisatawan berkunjung ke Desa Wisata Jatiluwih karena ketertarikan mereka untuk melihat pemandangan alam, utamanya keindahan terasering sawah yang ada di desa setempat. Berbicara tentang terasering sawah yang dikaitkan dengan keindahan, maka terasering merupakan hasil karya penduduk desa setempat yang bernilai estetis. Sebagai hasil karya penduduk desa yang bernilai estetis, terasering sawah dibuat selain untuk memenuhi fungsi utamanya sebagai pengatur irigasi persawahan juga

berfungsi sebagai media penyaluran rasa estetik sekaligus pikiran estetik yang didasarkan pada pengetahuan estetik yang dimiliki oleh masyarakat petani setempat. Terasering sawah yang ada di Desa Wisata Jatiluwih adalah seperti Gambar 5.4 berikut ini.



Gambar 5.4

Pemandangan Terasering Sawah di Desa Wisata Jatiluwih  
sebagai Daya Tarik Utama Pariwisata

Dokumen: Prasiasta Tahun 2008

Terasering sawah juga merupakan cerminan keberlanjutan kebudayaan lokal (*local culture*), khususnya yang terkait dengan keberlanjutan sistem mata pencaharian di bidang pertanian. Demikian juga, sebagai pemahaman petani terhadap *Trihita Karana*, yaitu menjaga hubungan yang serasi dan selaras antara manusia dengan lingkungannya (*pawongan*). Hal ini berarti masyarakat petani dalam membuat

terasering sawah akan tunduk kepada *landscape* alam dan tidak bisa memaksakan bentuk terasering sesuai keinginan masyarakat petani.

Dari uraian tersebut dan memperhatikan kenyataan pada hubungan antara pariwisata dengan lingkungan, selanjutnya menurut Dwyer dan Forsyth (1996), lingkungan mencakup tiga jenis sumber daya, yaitu (1) *natural resources*, seperti gunung, pantai, wilayah yang masih liar, hutan, gurun, laut, danau, flora dan fauna, iklim, sinar matahari, suhu udara, dan sebagainya; (2) *man-made resources*, seperti kota bersejarah dan kota modern, kota dan desa, hiburan, campuran antara rekreasi dan olahraga, monumen, situs, bangunan dan relik, museum, dan sebagainya; (3) *human resources*, yakni mencakup populasi penduduk suatu tempat tujuan, asosiasi, nilai, identitas, aktivitas seni, dan budaya mereka. Berdasarkan pendapat Dwyer dan Forsyth (1996) ini, maka daya tarik wisata berupa Pura Luhur Petali dan terasering sawah di Desa Jatiluwih dapat digolongkan sebagai *man-made resources* (sumber daya buatan). Oleh karena terkait dengan lingkungan berupa alam, maka keduanya juga dapat merupakan *natural resources* (sumber daya alam), sedangkan jika berbagai aktivitas atau praktik budaya dilaksanakan misalnya dengan menggelar kesenian seperti tari-tarian tradisional yang bersifat *profan*, maka Pura Luhur Petali dan terasering sawah dapat digolongkan sebagai *human resources* (sumber daya manusiawi).

Untuk menilai keindahan, khususnya terkait dengan terasering sawah sebagai produk budaya, Santayana (1961:43) mengatakan bahwa keindahan adalah "nilai" yang sifatnya ideal, abstrak, dan tidak dapat disentuh dengan indra. Selanjutnya,

menurut Frondisi (2001:8,20), "nilai" memiliki tiga kualitas, yakni (1) kualitas primer, yaitu kualitas dasar yang tanpa kehadiran objek tidak dapat menjadi ada; (2) kualitas sekunder, kualitas yang dapat ditangkap oleh indra, kualitas yang harus menghadirkan subjek untuk memahaminya, seperti rasa, warna, dan bau; dan (3) kualitas tersier, yaitu "nilai" itu sendiri. Kemudian, Gie (1977:145-146) membedakan delapan macam "nilai" keindahan terkait dengan aspek ke-manusiawi-an, yaitu (1) nilai ekonomis (mengandung aspek harga pasar), (2) nilai jasmani (mengandung aspek kesehatan badan), (3) nilai hiburan (mengandung aspek permainan), (4) nilai sosial (mengandung aspek hubungan antarmanusia), (5) nilai watak (mengandung aspek kepribadian), (6) nilai estetis (mengandung aspek keindahan), (7) nilai intelektual (mengandung aspek ilmu pengetahuan), dan (8) nilai religius (mengandung aspek ilahiah).

Sebagai akibat sentuhan pariwisata, terasering sawah yang ada di Desa Wisata Jatiluwih mengalami perubahan dari sisi nilai estetis. Perubahan yang terjadi apabila dilihat dari nilai menurut Gie (1977:145-146), dengan membedakan terasering sawah menjadi dua kelompok, yaitu sebelum dan sesudah menjadi daya tarik wisata. Pembedaan ini dilakukan, yaitu untuk memberikan gambaran tentang perubahan nilai yang terjadi pada terasering sawah sebagai *setting* utama di Desa Wisata Jatiluwih. Yang dijadikan tonggak dalam pembedaan itu adalah dijadikannya terasering sawah sebagai daya tarik wisata. Adapun perbandingan perubahan yang terjadi adalah seperti Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1  
Perbandingan Nilai Estetis Terasering Sawah Desa Jatiluwih  
Sebelum dan Sesudah sebagai Daya Tarik Wisata

No.	Nilai Menurut Liang Gie	Sebelum Menjadi Daya Tarik Wisata	Setelah Menjadi Daya Tarik Wisata
1.	Nilai Ekonomi (adanya aspek harga pasar)	Tidak Ada	Ada, dikomodifikasi berupa <i>postcard</i> oleh pengusaha [(*)]
2.	Nilai Jasmani (adanya aspek kesehatan badan)	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Nilai Hiburan (adanya aspek permintaan)	Tidak Ada	Ada, dikemas dalam bentuk <i>package tour</i> [(*) dan (**)]
4.	Nilai Sosial (adanya aspek hubungan antar manusia)	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Nilai Watak (adanya aspek kepribadian)	Tidak Ada	Tidak Ada
6.	Nilai Estetis (adanya aspek keindahan)	Tidak Ada	Ada, tergantung pada penilaian wisatawan[(**)]
7.	Nilai Intelektual (adanya aspek ilmu pengetahuan)	Tidak ada	Tidak Ada
8.	Nilai Religius (adanya aspek ilahiah)	Ada, dilakukan oleh petani terkait proses pengolahan sawah [(***)]	Ada, dilakukan oleh petani [(***)], dan upacara yang menyertai menjadi daya tarik wisatawan [(**)]

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2008

Keterangan:

\* Pengusaha Pariwisata      \*\* Wisatawan      \*\*\* Masyarakat Petani

Tabel 5.1 di atas memperlihatkan bahwa konsumsi wisatawan terhadap daya tarik wisata, khususnya terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih tidak saja bersifat fisik, tetapi juga mengonsumsi keindahan yang ada pada terasering sawah tersebut. Sebelum dijadikan daya tarik wisata, terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih hanya memiliki nilai religius (adanya upacara yang dilaksanakan oleh petani di

*pundukan* sawah atau *mantenin tongkok* yang ada di *pundukan* sawah). Nilai religius ini terkait dengan proses pengolahan sawah dan hanya dilakukan serta dinikmati oleh masyarakat petani. Setelah dijadikan daya tarik wisata, timbul nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini dinikmati oleh pengusaha pariwisata yang mengemas terasering sawah sebagai salah satu aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan yang membeli *package tour*, termasuk mengemas upacara terkait pengolahan sawah sebagai *event* pariwisata. Nilai ekonomi ini juga dinikmati oleh pengusaha pariwisata yang melakukan komodifikasi terhadap keindahan alam dan terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih melalui pencetakan *postcard* secara besar-besaran. Selain nilai ekonomi, dijadikannya terasering sawah sebagai daya tarik wisata juga menimbulkan nilai hiburan, nilai estetis, dan nilai religius. Ketiga nilai ini dinikmati oleh wisatawan. Dalam hal ini khusus tentang nilai estetis berupa penilaian seorang wisatawan terhadap terasering sawah sangat dipengaruhi oleh persepsi wisatawan.

Menurut Cravens (1997:131) persepsi adalah proses yang dilalui seseorang dalam memilih, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang berarti tentang dunia. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan persepsi wisatawan terhadap nilai keindahan, menurut Prasiasa (2000:105), daya tarik wisata di Desa Wisata Jatiluwih dapat dilihat dari keterpaduan antara produk budaya yang berupa kesenian dengan terasering sawah. Daya tarik wisata di Desa Wisata Jatiluwih sebanyak 85,7% menyatakan menarik dan 14,3% menyatakan tidak menarik. Dari persepsi wisatawan tersebut terlihat bahwa Desa Wisata Jatiluwih memiliki potensi daya tarik wisata yang berupa keterpaduan antara budaya

dengan alam. Selanjutnya, hasil penelitian Pujaastawa dkk. (2005:111), mengemukakan pendapat wisatawan terhadap potensi kepariwisataan Bali Tengah yaitu 77% tertarik pada alam dan 23% tertarik pada budaya. Dengan demikian, alam dan budaya menjadi daya tarik wisatawan berwisata ke Desa Wisata Jatiluwih.

Berdasarkan keempat nilai yang timbul sesudah terasering sawah Desa Wisata Jatiluwih dijadikan daya tarik wisata, khususnya untuk nilai ekonomi, dalam kaitan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata perlu pengaturan lebih lanjut oleh *stakeholders*. Pengaturan ini diperlukan, selain terkait dengan adanya kenyataan di lapangan bahwa masyarakat setempat yang wilayahnya memiliki keindahan alam yang tergolong *public good* tidak menikmati manfaat ekonomi dari pembayaran yang dilakukan oleh wisatawan, di samping juga terkait dengan interaksi yang terjadi antara wisatawan dengan masyarakat tempat daya tarik wisata itu disuguhkan.

Sehubungan dengan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat, Butler (1975) mengatakan bahwa sikap masyarakat setempat menghadapi kehadiran wisatawan bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh kontak dan keterlibatan mereka dalam kegiatan pariwisata. Jadi, bukan hanya berlangsung secara linear dan gradual. Lebih lanjut, Butler (1975) membedakan sikap dan perilaku masyarakat penerima wisatawan ke dalam dua kelompok, yaitu (1) mereka yang bersikap pasif dan ada yang berperilaku aktif, (2) mereka yang bersikap aktif dan ada yang berperilaku pasif. Kombinasi kedua sikap dan kedua perilaku itu akan menghasilkan empat macam reaksi yang bisa terjadi secara bersamaan atau simultan. Reaksi tersebut menyiratkan

kompleksitas respons yang bisa terjadi sebagai akibat terjadinya hubungan lintas budaya antara masyarakat setempat dengan wisatawan.

Hubungan lintas budaya tersebut dalam waktu tertentu akan menimbulkan perubahan sosial. Perubahan sosial dalam waktu tertentu, menurut Ritzer (1987), yakni perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antarindividu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu dengan memperhatikan tipologi proses sosial. Menurut Lauer (dalam Garna, 1992:9) proses sosial tersebut akan berpengaruh pada pola-pola perilaku dan interaksi sosial karena mencakup berbagai pernyataan tentang struktur, seperti: norma, nilai, dan gejala budaya. Perubahan pola-pola perilaku tersebut akan terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan manusia, mulai dari individu sampai global.

Jika dikaitkan dengan daya tarik wisata berupa terasering sawah, khususnya dari konteks petani, yakni merupakan bagian dari masyarakat Desa Wisata Jatiluwih yang akan dapat berinteraksi dengan wisatawan dalam aktivitas wisatawan menikmati keindahan terasering sawah dengan cara berjalan-jalan di parit sawah pada sebuah area terasering. Interaksi tersebut dapat mendorong terjadinya perubahan dalam diri masyarakat petani, baik perubahan tersebut terjadi secara linear dengan perjalanan hidupnya maupun secara gradual. Perubahan yang akan dialami oleh petani dapat berupa, baik perubahan gaya hidup ataupun perubahan pengetahuan serta perubahan-perubahan lainnya.

Sampai saat ini terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih, meskipun sebagai daya tarik wisata masih tetap berfungsi untuk memperlancar pengairan sawah, dalam

arti terasering tersebut dipergunakan sebagai tempat untuk mengalirkan air dari lokasi sawah yang lebih tinggi ke lokasi-lokasi sawah yang lebih rendah. Dalam hal ini agar tidak mengalami perubahan (*metamorphosis*) dan tidak menjadi produk budaya yang terbengkelai (*neglected*), maka fungsi terasering sebagai tempat untuk mengalirkan air bagi sawah-sawah sekitarnya perlu terus dipertahankan ke-ajeg-annya.

#### 5.1.2.2 Sarana pariwisata

Keberadaan sebuah daya tarik wisata perlu didukung oleh sarana pariwisata. Menurut Yoeti (1993:184) sarana pariwisata (*tourism superstructures*) adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa sarana pariwisata terdiri atas sarana pokok (*main tourism superstructures*), sarana pelengkap (*supplementing tourism superstructures*), dan sarana penunjang (*supporting tourism superstructures*).

Dari sisi sarana pariwisata, di Desa Wisata Jatiluwih sampai dengan tahun 2008 terdapat sarana pokok pariwisata saja. Dari sarana pokok pariwisata yang ada (berupa restoran dan akomodasi), apabila dilihat dari sisi kepemilikan, satu restoran milik Desa Jatiluwih sedang dikontrakkan kepada orang asing, dua restoran milik orang asing, dan satu akomodasi milik masyarakat setempat.

Dikontrakkannya sumber-sumber *income* daerah berupa sarana pokok yang ada di Desa Wisata Jatiluwih merupakan realisasi dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 188.53/DPRD tertanggal 20 Januari 1983,

yang isinya memberikan persetujuan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan untuk mengontrakkan sumber-sumber *income* daerah. Keputusan DPRD Tabanan ini rupanya dipersepsikan lain dan dijadikan "celah" oleh mereka yang berkepentingan, di samping terbaikannya operasionalisasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Sebagai akibatnya, dari empat sarana pokok pariwisata yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, tiga di antaranya dikelola oleh orang asing dan hanya satu yang dikelola oleh masyarakat Desa Wisata Jatiluwih.

Hasil pengontrakan sarana pariwisata yang berupa restoran itu disetor dengan berbagai cara. Dalam hal ini *Café* Jatiluwih yang berlokasi di *Dusun* Jatiluwih Kangin, setiap bulan pengontrak menyetorkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada *Desa Adat* Jatiluwih. Namun, untuk Naga Puspa Restoran besarnya jumlah yang disetor tidak diketahui secara pasti karena pemilik atau pengelola biasanya menyetor ke *Kelian Dusun* Kesambi. Selanjutnya, Restoran Waka Land Cruise menyetorkan uang kontraknya kepada Kepala Desa Jatiluwih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Dari cara penyetoran uang kontrak di atas, tercermin tidak adanya keseragaman. Ketidakseragaman penerima uang kontrak ini merupakan salah satu penyebab timbulnya prasangka di antara individu dalam masyarakat, di samping prasangka *desa adat* terhadap desa dinas. Prasangka inilah yang kemudian berkembang menjadi salah satu sumber konflik kepentingan di Desa Wisata Jatiluwih. Tabel 5.2 berikut ini menyajikan sarana pokok di Desa Wisata Jatiluwih.

Tabel 5.2  
Sarana Pokok Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih  
sampai Tahun 2008

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nama Pemilik	Lokasi Perusahaan
1.	Café Jatiluwih	Restoran	Desa Jatiluwih, dikontrak oleh Mr. Sagon (Berkebangsaan Jepang)	Dusun Jatiluwih Kangin
2.	Waka Land Cruise	Restoran	Wayan Kari (dari luar Desa Jatiluwih, bekerja sama dengan orang Perancis)	Dusun Kesambahan Kaja
3.	Naga Puspa	Restoran	Koin (Berkebangsaan Korea)	Dusun Kesambi
4.	Galang Kangin Inn	Penginapan ( <i>homestay</i> )	I Wayan Miora (alias Pak Kertiya), Penduduk asli Desa Jatiluwih	Dusun Jatiluwih Kangin

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2008

Pengontrakan sarana pariwisata yang berupa restoran diilhami oleh diskursus-diskursus yang digulirkan oleh pemerintahan Orde Baru saat itu, yaitu bahwa pengontrakan tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah, sumber-sumber *income* daerah perlu diberdayakan, dan pengontrakan sumber-sumber *income* daerah adalah kebijakan yang positif dan menguntungkan daerah. Dibalik itu semua, pemerintah lupa bahwa dengan pengontrakan tersebut masyarakat setempat tidak dapat memperoleh keuntungan secara langsung dan tidak dapat sepenuhnya mengelola pariwisata yang dikembangkan di desa mereka.

Dari diskursus-diskursus yang digulirkan tersebut tampak bahwa cara kerja hegemoni, yaitu penguasaan atau kepemimpinan secara halus, canggih dan intelektual lewat proses cuci otak (*brain washing*) dalam memaknai sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap otak-otak masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Gramsci, yakni berlangsung secara luar biasa lewat diskursus pembangunan. Orde Baru pandai membungkus diskursus-diskursus tersebut melalui ungkapan-ungkapan yang halus dengan mempergunakan bahasa.

Menurut Wilhelm van Rumboldt (1767-1835), bahasa suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari segala aspek kehidupan sosial manusia. Sebagai arena pertarungan politik, bahasa merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan kelompok manusia yang tarik-menarik, saling mendominasi, hegemoni atau hegemoni tandingan, menguasai atau melawan yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain (Kompas, Sabtu 21 Agustus 2004).

Gramsci memperkenalkan sebuah penemuan yang cukup mendasar bahwa masyarakat sipil dalam konsepnya tidak berada pada momen struktur, tetapi pada superstruktur. Kemudian, superstruktur itu dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu masyarakat sipil yang disebut *private* (individu) dan masyarakat politik yang disebut *state* (negara). Kedua tingkatan ini bersesuaian, di satu pihak dengan fungsi "hegemoni" yang dilaksanakan oleh kelompok dominan di seluruh masyarakat, di lain pihak dengan "dominasi langsung" yang diekspresikan melalui negara dan pemerintah (Bocock, 1986:33). Namun oleh Gramsci, konsep ini cepat disesuaikan kembali. Dalam hal ini yang semula hanya terdiri atas individu yang berarti

kesadaran *private* (masyarakat sipil) dan kolektif yang diartikan sebagai kesadaran *state* (masyarakat politik), ditambahkan dengan kesadaran ekonomi sehingga membentuk dasar secara tegas, yaitu ekonomi, *private*, dan negara. Penekanan inilah kemudian menjadi karakteristik hegemoni Gramsci yang membedakan dengan pemikiran Marxis (Bocock, 1986).

#### 5.1.2.3 Kunjungan wisatawan

Ketersediaan daya tarik wisata serta sarana [pokok] pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih tidak akan ada artinya jika tidak mendapat kunjungan wisatawan. Sebaliknya, keberadaan wisatawan jika tanpa didukung oleh daya tarik wisata serta sarana [pokok] pariwisata juga tidak akan menarik wisatawan. Hal ini berarti akan ada saling ketergantungan di antara keduanya. Hal ini diakui bahwa pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia di dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau mendapat perjalanan baru (Robinson, 1976; Murphy, 1985), termasuk mencari sesuatu yang masih tergolong asli (*authenticity*).

Komoditas dan keaslian (*authenticity*) selalu merupakan topik yang muncul dalam setiap pembicaraan sebagai dampak hubungan pariwisata dengan budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini MacNaught (1982) mengatakan bahwa pariwisata telah mencabut masyarakat dari bentuk asli ekspresi budayanya karena tuntutan wisatawan. Para wisatawan mancanegara sering mengeluh karena tari-tarian daerah terlalu panjang, lamban, repetitif, atau monoton. Kemudian, sebagai

antisipasinya ”broker-broker ke-budaya-an”, yaitu mereka-mereka yang bergerak dalam industri pariwisata ”memaksa” masyarakat untuk mengubah pertunjukan tersebut agar sesuai dengan keinginan wisatawan (Pitana dan Gayatri, 2005:142).

Seiring dengan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang dimulai tahun 1992, hingga saat ini kehadiran wisatawan lebih banyak tertarik pada keindahan alam, terutama area terasering sawah yang menyatu dengan kehidupan sosial dan budaya setempat serta merupakan cerminan *subak*. Para wisatawan biasanya datang pada siang hari, dengan mempergunakan kendaraan pribadi atau memakai *travel agent*. Namun, ada juga yang datang mempergunakan sepeda (*bicycle*). Kedatangan wisatawan pada siang hari karena mereka (wisatawan) pada pagi hari terlebih dahulu mengikuti *Bedugul Tour*. Menjelang siang hingga sore, wisatawan diarahkan oleh *travel agent* ke Desa Wisata Jatiluwih.

Aktivitas wisatawan selama berada di Desa Wisata Jatiluwih yang utama adalah menikmati keindahan alam dan terasering sawah. Biasanya mereka berjalan sepanjang jalan raya di sekitar sawah atau mereka berjalan di parit-parit sawah (*pundukan*) sambil sekali-kali menikmati keindahan terasering sawah. Aktivitas mereka biasanya diabadikan dengan mempergunakan kamera atau *handycam*. Namun, ada juga wisatawan yang tidak berjalan-jalan di sepanjang jalan raya atau terasering sawah. Mereka makan siang (*lunch*) di *Café* Jatiluwih sambil memandangi indahny panorama sawah dan terasering yang terhampar di depan *café* tersebut. Dalam hal ini bagi wisatawan, aktivitas berjalan-jalan di parit sawah sambil

memandangi tersering sawah dan keindahan panorama sawah dengan latar belakang hutan dan Gunung Batukaru merupakan pengalaman baru bagi mereka.

Salah seorang wisatawan yang diwawancarai, Arnaud Delphine (32 tahun), seorang wisatawan asal Perancis dengan profesi sebagai dokter, pada wawancara tanggal 26 Juni 2008 mengatakan sebagai berikut.

*”The product of tourism business must be given to the local community for his development, and to respect the nature. I interested a rice culture.”*

Dari wawancara tersebut tersirat bahwa mereka berwisata ke Desa Wisata Jatiluwih tertarik karena alamnya, terutama terasering sawah serta tertarik pada budaya pertanian, khususnya terkait dengan penanaman padi. Mereka juga mengatakan bahwa pengembangan produk wisata juga hendaknya diserahkan kepada masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan produk wisata, menurut Pitana (1999:75) sejalan dengan konsep pembangunan berwawasan masyarakat, yang merupakan reaksi atas kegagalan modernisasi yang diterapkan di negara-negara berkembang. Di sisi lain, Pujaastawa dkk. (2005:29-30) melihat keterlibatan masyarakat setempat dalam bentuk partisipasi pada pembangunan pariwisata (yang disebut sebagai pembangunan berwawasan kerakyatan) merupakan reaksi keras terhadap kebijakan pembangunan konglomerasi yang selama ini lebih berpihak kepada pemilik modal yang pada umumnya bukan berasal dari anggota masyarakat setempat.

Dengan adanya ketertarikan wisatawan terhadap budaya pertanian di Desa Wisata Jatiluwih, khususnya terkait dengan penanaman padi, maka keberadaan

budaya *adiluhung* dalam bercocok tanam padi yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai *pula pali metandur* padi bali *ring carik*, perlu dipertahankan keasliannya (*authenticity*). Selain itu, budaya pertanian tersebut perlu dihindarkan dari derasnya teknologi ke dalam tata cara penanaman padi bali, seperti yang selama ini sudah dilaksanakan di Desa Wisata Jatiluwih. Cara-cara tertentu yang mengganggu kelestarian ekologi dalam budaya pertanian desa setempat perlu dihindarkan, terutama terhadap penggunaan cara-cara tertentu dalam mengolah tanah pertanian sebelum ditanami padi. Dalam hal ini masih dijumpai segelintir masyarakat petani yang membakar jerami sebelum mengolah tanah pada rangkaian kegiatan penanaman padi bali. Sehubungan dengan adanya segelintir masyarakat petani yang membakar jerami, Wayan Pudja selaku *Pekaseh* Desa Jatiluwih (58 tahun) pada wawancara tanggal 25 Juni 2008 menyatakan sebagai berikut.

”Kami mengharapkan dengan perkembangan pariwisata, pertanian di Desa Jatiluwih *ajeg*, dalam arti setiap Januari selalu tanam padi bali dan bukan padi lain. Habis menanam padi bali, sebaiknya menanam palawija sehingga jerami tidak perlu dibakar. Jika dibakar akan timbul soda yang dapat merusak tanah, di samping terjadi polusi udara.”

Penuturan *Pekaseh* Desa Jatiluwih di atas mengindikasikan perlunya mempertahankan budaya pertanian yang mendukung pengembangan pariwisata, dengan tetap menjaga ekologi sehingga tercipta pariwisata hijau (*green tourism*) sebagai bentuk simbiosis mutualisme antara pertanian dengan pariwisata. Namun sebaliknya, jika aktivitas membakar jerami ini dibiarkan akan dapat mengancam lingkungan pertanian setempat serta keberlangsungan *Trihita Karana* khususnya

hubungan masyarakat dengan lingkungan (*palemahan*), di samping mengganggu aktivitas pariwisata. Berikut ini disajikan aktivitas segelintir masyarakat petani yang membakar jerami di sawah, seperti tampak pada Gambar 5.5 di bawah ini.



Gambar 5.5

Aktivitas Segelintir Masyarakat Petani yang Membakar Jerami  
sebelum Sawah Diolah untuk Penanaman Padi Bali  
di Desa Wisata Jatiluwih

Dokumen: Prasiasa Tahun 2008

Dalam kaitan ini hasil penelitian yang dilakukan oleh *European Travel Commission* (Boniface, 1999:15) menyatakan bahwa mutu lingkungan menjadi faktor penentu dalam menarik pengunjung. Dalam penelitian tersebut juga dikemukakan bahwa para wisatawan, walaupun barangkali tidak demikian naif dengan mengharapkan melihat *Danube Biru* benar-benar biru, bagaimanapun akan kecewa melihat *Danube* yang coklat sebagai hasil pencemaran. Apa yang dikemukakan oleh

*Pekaseh* Desa Jatiluwih tersebut jika dikaitkan dengan hasil penelitian *European Travel Commission* di atas, yakni merupakan suatu implementasi dari sifat global atau kesemestaan masalah-masalah lingkungan, yang diwujudkan dalam ”berpikir global dan bertindak lokal”. Hal ini sejalan dengan lima aliran utama dalam environmentalisme. Menurut Eckersley (dalam Mowforth dan Maunt, 2000:96) lima aliran utama dalam environmentalisme adalah (1) konservasi/perlindungan sumber daya alam, (2) ekologi kesejahteraan manusia, (3) preservasi/pelestarian alam, (4) kebebasan bagi hewan, dan (5) paham ekosentris.

Terkait dengan produk budaya berupa kesenian, di Desa Wisata Jatiluwih terdapat kesenian *balih-balihan* bersifat *profan* yang belum berjalan dan belum terintegrasi dengan pariwisata. Bahkan produk budaya berupa kesenian di Jatiluwih masih berjalan pada rel (*track*) tersendiri dan masih sesuai dengan penggarisan dari masing-masing kelompoknya (*wali*, *bebali*, dan *balih-balihan*).

Berjalannya kesenian yang ada di Desa Wisata Jatiluwih pada jalurnya, yakni karena di samping masyarakatnya yang masih lebih menfokuskan pada kegiatan pertanian, juga karena belum tersentuhnya aktivitas kesenian mereka oleh broker-broker pertunjukan bidang kepariwisataan. Oleh karena masyarakat setempat lebih terfokus pada aktivitas pertanian, sebagian besar waktunya tercurah untuk pengelolaan sawah sehingga hanya sebagian kecil saja waktu yang diperoleh untuk berkesenian. Dengan demikian, masyarakat desa setempat lebih terikat pada aktivitas pertanian yang menjadi mata pencaharian pokok mereka.

Desa Wisata Jatiluwih yang pengembangannya dilaksanakan pada tahun 1992, pada masa Orde Baru, tidak bisa terlepas dari "jargon" pembangunan yang pada saat itu dilaksanakan berupa kebijakan untuk mengejar "pertumbuhan ekonomi". Salah satu subsektor yang dilirik oleh pemerintah (*state*) saat itu adalah menjadikan pariwisata sebagai tambang uang. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan (*growth*) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke destinasi-destinasi wisata di Indonesia, terutama ke Bali. Berbagai produk wisata ditawarkan, termasuk ditawarkannya Desa Wisata Jatiluwih kepada "pasar". Sebagai akibatnya, Desa Wisata Jatiluwih menerima kunjungan wisatawan, baik berupa wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Desa Wisata Jatiluwih sebagai daya tarik wisata selama tahun 1998 sampai tahun 2007, sudah dikunjungi oleh wisatawan nusantara serta wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Jatiluwih berjumlah 108.163 orang, yang terdiri atas 11.126 orang (10,29%) wisatawan nusantara dan 97.037 orang (89,71%) wisatawan mancanegara. Jika dilihat dari jumlah rata-rata per tahun, selama tahun 1998 sampai tahun 2007, jumlah rata-rata kunjungan wisatawan nusantara adalah 1.113 orang per tahun, sedangkan rata-rata wisatawan mancanegara adalah 9.704 orang per tahun. Sedangkan jika dilihat dari fluktuasi jumlah wisatawan yang berkunjung, dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) untuk wisatawan nusantara, jumlah kunjungan tertinggi terjadi pada tahun 2001, dan terendah terjadi pada tahun 2002; (2) untuk wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan tertinggi terjadi tahun 2000, dan terendah terjadi pada tahun 1998.

Selanjutnya, berikut ini disajikan data jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Jatiluwih selama sepuluh tahun (1998–2007) seperti Tabel 5.3.

Tabel 5.3  
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Desa Wisata Jatiluwih  
selama Sepuluh Tahun (1998–2007)

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)
1.	1998	1.125	6.913
2.	1999	1.360	13.711
3.	2000	2.640	16.382
4.	2001	4.759	15.414
5.	2002	28	11.161
6.	2003	0	2.993
7.	2004	0	0
8.	2005	0	0
9.	2006	1.084	15.040
10.	2007	130	15.423
	<b>J u m l a h</b>	11.126	97.037
	<b>Rata-Rata Per Tahun</b>	1.112,6 $\approx$ 1.113 (hasil pembulatan)	9.703,7 $\approx$ 9.704 (hasil pembulatan)
	<b>T o t a l</b>	108.163	

Sumber: Diolah dari Disbudpar Kabupaten Tabanan Tahun 2008

Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dengan tujuan mengejar pertumbuhan kunjungan wisatawan (untuk memperbesar pertumbuhan ekonomi), yakni kurang tepat untuk dilaksanakan. Hal ini menurut Gert Thoma (1989), yakni pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi akan berdampak kurang sehat dilihat dari konteks totalitas pembangunan itu sendiri.

Dari sisi kajian budaya, pengembangan pariwisata yang berorientasi pada upaya mengejar pertumbuhan (*growth*) dengan mengandalkan modal dari kapitalis, apalagi menempatkan pariwisata dalam konteks kapitalisme, akan banyak berhadapan dengan

*dominasi*, terutama yang berasal dari pemerintah (*state*) melalui kebijakan yang diambil terkait pariwisata dan dari kapitalis melalui modal yang ditanamkan dengan tujuan mengeruk sebanyak-banyaknya sumber daya alam dan sumber daya budaya. Dalam hal ini masyarakat yang merupakan representasi *civil society* akan didesak oleh dua kekuatan politik, yaitu negara (*state*) dengan kebijakan-kebijakannya dan kepentingan pasar (*market*) yang dibawa oleh kapitalis.

Dalam konteks *postmodern*, Bauman (dalam Ritzer, 2005:277) menyatakan bahwa secara eksistensial kekuasaan pada negara-bangsa terkikis. Akhirnya, yang terjadi bukannya pemusatan kekuasaan negara, kekuasaan malah menyebar pada agen-agen lokal dan parsial yang menangani serangkaian kebijakan lokal dan parsial. Pada operasionalnya di lapangan, memang operasionalisasi pariwisata sudah diserahkan oleh negara (*state*) kepada agen-agennya. Namun, agen-agen tersebut bertindak sebagai kapitalis sehingga apa yang diharapkan oleh *postmodern* dalam pariwisata tidak tercapai. Agen yang bertindak sebagai kapitalis masih diatur oleh kebijakan negara. Jika ada perlawanan dari masyarakat sebagai akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh *state* dianggap merugikan masyarakat, selanjutnya negara akan melakukan politik kepastian (*politics of certainty*).

Sehubungan dengan hal itu Ritzer (2005:278) menyatakan bahwa politik kepastian selalu mencari penegasan fakta bahwa negara telah membuat pilihan-pilihan yang tepat. Oleh karena itu, negara tidak mau dilawan begitu saja dari kebijakan pariwisata yang digulirkan karena mereka sudah menganggap tepat pilihan terhadap kebijakan tersebut. Dalam kondisi politik kepastian yang dibuat oleh *state*

melalui kebijakan pariwisatanya, masyarakat tidak akan begitu saja menerima pariwisata. Mereka akan melakukan kontestasi dan resistensi. Dengan demikian, *state* harus siap membuat beberapa alternatif kebijakan untuk satu masalah, yakni pariwisata. Alternatif kebijakan-kebijakan tersebut akan dikontestasi oleh pengambil kebijakan dalam suatu masyarakat yang lebih luas, yakni dengan harapan masyarakat mengkaji dengan berbagai pertimbangan sebelum menentukan pilihan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat akan diperkaya dengan pengalaman demokrasi dalam menentukan pilihan terhadap alternatif kebijakan pariwisata. Jika alternatif kebijakan pariwisata tersebut tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan terjadi resistensi.

## **5.2 Wacana Desa Wisata Terpadu Jatiluwih**

Wacana Desa Wisata Terpadu Jatiluwih (DWT Jatiluwih), berawal dari rencana Depparpostel menjadikan tiga desa di Bali sebagai desa wisata terpadu. Ketiga desa yang direncanakan sebagai desa wisata terpadu itu adalah Desa Sebatu (Kabupaten Gianyar), Desa Penglipuran (Kabupaten Bangli), dan Desa Jatiluwih (Kabupaten Tabanan). Perencanaan pengembangan tiga desa di Bali tersebut sebagai desa wisata terpadu, mulai diwacanakan oleh Ida Bagus Oka dalam suatu seminar di Yogyakarta pada tahun 1992.

Selanjutnya, untuk mempersiapkan pengembangan Desa Jatiluwih sebagai Desa Wisata Terpadu, pada tanggal 11 Mei 1992 Desa Jatiluwih menerima kunjungan staf Kanwil Depparpostel Bali, Pimpinan Proyek Desa Wisata Terpadu dari Kanwil

Depparpostel Bali, dan peneliti desa wisata terpadu dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kehadiran tim tersebut melakukan observasi terkait proyek Desa Wisata Terpadu di Desa Jatiluwih. Dari observasi yang dilakukan oleh tim tersebut, pada Juni 1992 dihasilkan dokumen "Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknis Desa Wisata Terpadu di Bali", yang merupakan kerjasama antara Bagian Proyek Studi Kerjasama Teknik Luar Negeri Pariwisata, Direktorat Jenderal Pariwisata, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Sebagai tindak lanjut pengembangan Desa Jatiluwih sebagai Desa Wisata Terpadu, untuk memenuhi kebutuhan akan akomodasi bagi wisatawan, I Nengah Sukra (pada saat itu sebagai Kepala Desa Jatiluwih) pada tanggal 30 Desember 1992 membuat pernyataan. Isi pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan, pada intinya berisi hal-hal sebagai berikut (1) menerima baik program pengembangan desa wisata terpadu; dan (2) merelakan dua buah rumah miliknya dipugar menjadi "rumah contoh" untuk akomodasi bagi wisatawan, pemugaran tembok *sangghah* serta pembuatan *angkul-angkul* dan *candi bentar*. Selanjutnya, dengan surat pernyataan tersebut, kembali tim peneliti desa wisata terpadu dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada mendatangi rumah I Nengah Sukra, untuk melakukan pengecekan tentang kelayakan pemugaran rumah tersebut sebagai "rumah contoh".

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap kelayakan rumah I Nengah Sukra di Desa Jatiluwih yang akan dijadikan "rumah contoh" tersebut, Koordinator Peneliti Desa Wisata Terpadu Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada melalui surat

tertanggal 8 Maret 1993 melaporkan kepada Pimpinan Proyek Pengembangan Desa Wisata Terpadu Direktorat Jenderal Pariwisata. Pemugaran rumah salah seorang warga desa tersebut sebagai "rumah contoh" menimbulkan polemik di masyarakat setempat, sehingga berdampak terhadap pengembangan Desa Jatiluwih sebagai Desa Wisata Terpadu. Dengan demikian, Desa Wisata yang "Terpadu" di Jatiluwih hanyalah tinggal wacana. Hal ini karena ke-terpadu-an dari masyarakat pendukungnya tidak pernah tercapai, karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari pengembangan Desa Wisata yang "Terpadu" tersebut.

### **5.3 Komodifikasi di Desa Wisata Jatiluwih**

Kasus-kasus yang terjadi terkait dengan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan yang bermain dalam lingkungan pihak-pihak yang terkait. Salah satu kasus yang terjadi pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih terkait dengan komodifikasi adalah pembangunan di sebelah utara Pura Luhur Petali yang dikenal dengan nama "Vila Petali". Pemerintah yang didukung oleh beberapa pemuka masyarakat setempat ingin mempertahankan keberadaan bangunan tersebut karena adanya politik balas budi. Namun, beberapa elite desa setempat yang didukung elite luar desa, khususnya yang berada di Kabupaten Tabanan menginginkan bangunan tersebut dibongkar. Lebih-lebih lokasi tempat pembangunan tersebut merupakan suatu wilayah kesucian pura sesuai konsep *Trihita Karana* dan diperkuat oleh *Bhisama* tentang kesucian pura dari Parisada Hindu Dharma Pusat Nomor 11/Kep./I/PHDIP/1994. Dalam hal ini, pemerintah

sudah jelas menunjukkan keberpihakannya kepada pemilik bangunan tersebut. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kepentingan antara sebagian masyarakat setempat yang didukung oleh elite desa serta elite luar desa dengan sebagian masyarakat setempat bersama dengan pemilik bangunan yang didukung oleh pemerintah.

Sebelum pengembangan Desa Jatiluwih sebagai Desa Wisata, Desa Jatiluwih hanya dikenal sebagai sebuah desa yang memiliki terasering sawah yang indah dan didukung panorama alam sekitarnya yang eksotik. Namun, setelah desa ini mengalami pengembangan sebagai desa wisata dan diikuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 470 Tahun 1998 tentang Penetapan Desa Jatiluwih sebagai Daya Tarik Wisata, maka mulailah masyarakat lokal dan global lebih mengenal berbagai potensi keindahan alam serta kehidupan budaya lokal masyarakat setempat.

Keterkenalan Desa Wisata Jatiluwih semakin bertambah manakala *Subak* Jatiluwih diusulkan sebagai Warisan Budaya Dunia, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 590 Tahun 2002 tertanggal 23 September 2002. Hasilnya *Subak* Jatiluwih oleh UNESCO dinominasikan sebagai Warisan Budaya dan Alam Dunia dengan Nomor C 1194 pada tanggal 21 April 2004. Dalam kaitan ini, menurut Pujaastawa dkk. (2005:78-83) dukungan berupa potensi ekologis serta potensi sosial-budaya sangat penting bagi pencapaian usulan sebagai Warisan Budaya Dunia. Selanjutnya, dalam rangka pengembangan Desa Wisata Jatiluwih potensi-potensi tersebut menguntungkan desa setempat sebagai salah satu daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Penebel sekaligus sebagai Warisan Budaya Dunia.

Selain daya tarik berupa terasering sawah dengan panorama keindahan alam yang dilatarbelakangi oleh Gunung Batukaru, Desa Wisata Jatiluwih juga didukung oleh keunikan berupa pura-pura yang lokasinya tegak lurus dengan perbukitan di sebelah utara desa dan letaknya berjajar dari bawah menuju puncak bukit. Hal ini merupakan sumber daya budaya yang mendukung Desa Wisata Jatiluwih. Salah satu pura yang terkenal di antara jajaran pura-pura tersebut adalah Pura Luhur Petali. Menurut Nyoman Utama (49 tahun), sebagai salah satu warga masyarakat desa setempat, pada wawancara 15 September 2008 mengatakan sebagai berikut.

”Saya merasa bangga karena desa ini dianugrahi oleh *Ida Sang Hyang Widhi* letak geografis yang baik, terutama dari letak pura. Oleh karena semakin ke utara letak pura semakin dekat dengan hutan, yang merupakan kawasan yang sangat disucikan, terutama mendekati areal Gunung Batukaru. Bagi kami, masyarakat Desa Jatiluwih, tempat yang tinggi adalah tempat yang suci.”

Apa yang dikemukakan oleh salah seorang warga masyarakat Desa Jatiluwih, yakni menunjukkan bahwa pura sebagai sumber daya budaya oleh masyarakat setempat memiliki tempat yang khusus, yakni ditempatkan pada lokasi yang mulia (lokasi yang tinggi) serta pada areal yang suci. Sumber daya budaya mempunyai karakteristik yang khas sehingga memerlukan model pengelolaan yang berbeda dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Dalam pengelolaan sumber daya budaya diperlukan perencanaan terpadu lintas sektoral sehingga prinsip kelestarian yang menjadi tujuan akhirnya dapat terwujud. Selanjutnya, untuk mengelola sumber daya budaya, Mac Leod (dalam Ardika, 1995:2) mengemukakan sebuah model yang melibatkan tiga komponen penting, yaitu kalangan akademisi, pemerintah, dan

masyarakat. Ketiga komponen ini dipandang mempunyai kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam hal ini para akademisi (budayawan) mempunyai kemampuan menjelaskan makna dan nilai sumber daya tersebut, pemerintah mempunyai kekuasaan dan kewenangan seperti dalam membuat peraturan perundang-undangan, sedangkan masyarakat mempunyai kekuatan ekonomi (pendanaan), di samping sebagai pihak yang memanfaatkan sumber daya budaya (Ardika, 1995:6; Drajat, 1999:5).

Secara rinci yang dimaksud dengan sumber daya budaya adalah hasil aktivitas manusia masa lalu, yaitu dapat berupa artefak (*artefact*), fitur (*features*), dan struktur yang meliputi bangunan, lansekap, dan sebagainya dalam suatu lokasi tertentu. Sumber daya budaya dapat berbentuk, baik material/fisik (*tangible*) maupun nonmaterial (*intangible*). Di samping itu, ada juga sumber daya budaya yang masih berfungsi atau dimanfaatkan, baik sebagai pendukung budaya tersebut (*living monument*) maupun yang tidak difungsikan lagi (*dead monument*). Selain itu, sebagai warisan budaya masa lalu, sumber daya budaya mempunyai keterbatasan, baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam arti terbatas (*finite*) jumlahnya, tak diperbaharui (*non-renewable*), tidak dapat dipindahkan (*non-removeable*) dan mudah rapuh (*vulnerable/fragile*) (Drajat, 1999:12).

Adanya suasana keindahan alam dengan didukung kemagisan Pura Luhur Petali yang menyebabkan investor datang ke kawasan ini sehingga pada akhirnya membuat kawasan di sekitar pura "tidak suci" lagi. Kesewenang-wenangan dalam pembangunan di sekitar Pura Luhur Petali yang mendapat dukungan dari pemerintah

dan sebagian masyarakat setempat yang sudah menerima ”politik balas budi” dari pengusaha pariwisata, membuat kondisi kawasan ini mirip dengan kawasan wisata sekular lainnya di Bali, seperti yang mencuat kasusnya adalah di sekitar Pura Luhur Uluwatu. Begitu juga di Kuta dan Nusa Dua yang semuanya berlokasi di Kabupaten Badung.

Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa potensi keindahan alam serta budaya yang ada di Desa Wisata Jatiluwih merupakan aset kepariwisataan yang menjanjikan, baik bagi desa setempat maupun bagi Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Berbagai hal positif akan dapat dihasilkan oleh potensi tersebut, termasuk popularitas desa yang semakin bersinar. Dengan kata lain, terjadi pendongkrakan nama desa akibat potensi kepariwisataan yang dimiliki oleh Desa Wisata Jatiluwih.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 470 Tahun 1998, daya tarik wisata berjumlah 24 buah. Namun, dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 337 Tahun 2004 dan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 266 Tahun 2007, maka sampai dengan Juli 2008 daya tarik wisata berjumlah 26 buah. Dari 26 daya tarik wisata tersebut, yakni empat berlokasi di Kecamatan Penebel. Keempat daya tarik wisata tersebut, yaitu (1) Areal Batukaru di Desa Wongaya Gede, (2) Jatiluwih di Desa Jatiluwih, (3) Yeh Panes Belulang di Desa Mengesta, dan (4) Yeh Panes Penatahan di Desa Penatahan. Hal ini juga berarti, bahwa di Kecamatan Penebel terdapat tiga daya tarik wisata, selain salah satunya adalah Desa Wisata Jatiluwih dengan segala potensi alam dan budayanya. Keempat Daya Tarik Wisata di Kecamatan Penebel adalah seperti Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4  
 Daya Tarik Wisata di Kecamatan Penebel  
 Menurut Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998,  
 Nomor 33 Tahun 2004, dan Nomor 266 Tahun 2007

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Lokasi (Desa/Kelurahan, Kecamatan)
1.	Areal Batukaru	Wongaya Gede, Penebel
2.	Jatiluwi	Jatiluwi, Penebel
3.	Yeh Panes Belulang	Mengesta, Penebel
4.	Yeh Panes Penatahan	Penatahan, Penebel

Sumber: Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998, Nomor 337 Tahun 2004, dan Nomor 266 Tahun 2007

Selanjutnya, dilihat dari perbandingan jumlah wisatawan yang berwisata ke Desa Wisata Jatiluwi terhadap daya tarik wisata lainnya yang ada di Kabupaten Tabanan, terlihat bahwa daya tarik wisata yang berlokasi di sebelah selatan dan timur ibu kota Kabupaten Tabanan lebih mendominasi, seperti Tanah Lot dan Alas Kedaton. Dalam hal ini, dominasi tersebut terkait dengan perolehan jumlah kunjungan wisatawan.

Dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan (wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara) ke Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwi terhadap daya tarik wisata lainnya di Kabupaten Tabanan selama tahun 1998–2007, berdasarkan urutan/*ranking*, Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwi menunjukkan peningkatan, yakni pada tahun 1998 berada pada urutan/*ranking* delapan, maka pada tahun 2001 dan 2007 sudah berada pada urutan/*ranking* enam. Sementara itu, untuk tahun 2004 dan tahun 2005, urutan/*ranking* jumlah kunjungan wisatawan ke Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwi tidak bisa ditentukan karena tidak adanya data di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan. Berikut disajikan jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan urutan/*ranking* ke Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih, seperti terlihat pada Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5  
Urutan/*Ranking* Jumlah Kunjungan Wisatawan ke  
Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih Tahun 1998–2007

No.	Tahun	Urutan/ <i>Ranking</i> Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih
1.	1998	<i>Ranking</i> (8) setelah (1) Tanah Lot, (2) Alas Kedaton, (3) Kebun Raya Eka Karya, (4) Bedugul, (5) Ulun Danu Beratan, (6) Air Panes Penatahan, (7) Taman Pujaan Bangsa Margarana.
2.	1999	<i>Ranking</i> (8) setelah (1) Tanah Lot, (2) Alas Kedaton, (3) Kebun Raya Eka Karya, (4) Bedugul, (5) Ulun Danu Beratan, (6) Air Panas Penatahan, (7) Taman Pujaan Bangsa Margarana
3.	2000	<i>Ranking</i> (7) setelah (1) Tanah Lot, (2) Alas Kedaton, (3) Kebun Raya Eka Karya, (4) Bedugul, (5) Ulun Danu Beratan, (6) Air Panas Penatahan.
4.	2001	<i>Ranking</i> (6) setelah (1) Tanah Lot, (2) Alas Kedaton, (3) Bedugul, (4) Kebun Raya Eka Karya, (5) Ulun Danu Beratan.
5.	2002	<i>Ranking</i> (7) setelah (1) Tanah Lot, (2) Kebun Raya Eka Karya, (3) Alas Kedaton, (4) Bedugul, (5) Ulun Danu Beratan, (6) Air Panas Penatahan.
6.	2003	<i>Ranking</i> (7) setelah (1) Tanah Lot, (2) Alas Kedaton, (3) Ulun Danu Beratan, (4) Bedugul, (5) Kebun Raya Eka Karya, (6) Taman Kupu-Kupu Lestari.
7.	2004	Data Tidak Ditemukan (DTD)
8.	2005	Data Tidak Ditemukan (DTD)
9.	2006	<i>Ranking</i> (8) setelah (1) Tanah Lot, (2) Kebun Raya Eka Karya, (3) Bedugul, (4) Danau Beratan, (5) Alas Kedaton, (6) Taman Pujaan Bangsa Margarana, (7) Museum Subak
10.	2007	<i>Ranking</i> (6) setelah (1) Tanah Lot, (2) Kebun Raya Eka Karya, (3) Danau Beratan, (4) Bedugul, (5) Alas Kedaton

Sumber: Diolah dari Disbudpar Kabupaten Tabanan Tahun 2008

Berdasarkan Tabel 5.5, Desa Wisata Jatiluwih terus berkembang secara perlahan-lahan. Secara umum jika dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan

(wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara) terjadi peningkatan. Namun, jika dirinci, pada tahun 2001 sampai tahun 2003 terjadi penurunan. Hal ini karena lebih disebabkan oleh kondisi eksternal seperti terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi, semakin memanasnya suhu politik serta gangguan keamanan akibat terorisme global, adanya gangguan masalah kesehatan akibat penyakit (flu burung, *Severe Acute Respiratory Syndrome*, dan penyakit menular lainnya). Kondisi eksternal yang bersifat negatif ini tidak bisa diterima oleh pasar (wisatawan). Hal inilah yang menjadi penyebab turunnya jumlah kunjungan wisatawan.

Dalam pengembangan lebih lanjut, pengelolaan sarana pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih mengalami swastanisasi, yaitu dengan dikontrakkannya tiga buah restoran yang ada di Desa Wisata Jatiluwih. Pengontrakan ini sebagai imbas dari upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk lebih meningkatkan pendayagunaan pengelolaan sumber-sumber *income* daerah, khususnya daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan. Upaya tersebut diawali dengan mengajukan surat permohonan oleh Bupati Tabanan melalui surat Nomor 556/4095/SWD Tanggal 16 September 1982 kepada DPRD Tabanan, untuk mohon persetujuan mengontrakkan sumber-sumber *income* daerah. Berdasarkan Hasil Musyawarah Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan pada Sidang Pleno III, rapat yang keempat tanggal 20 Januari 1993 melalui Surat Keputusan DPRD Tabanan Nomor 188.53/03/DPRD tanggal 20 Januari 1983 memberikan persetujuan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan untuk mengontrakkan sumber-sumber *income* daerah di bidang pariwisata.

Alasan Pemerintah Kabupaten Tabanan mengontrakkan sumber-sumber *income* daerah di bidang pariwisata adalah sebagai berikut: (1) Kabupaten Tabanan memiliki cukup banyak daya tarik wisata, yaitu 24 buah yang letaknya tersebar; (2) sumber daya manusia profesional untuk mengelola daya tarik wisata kurang; (3) sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan daya tarik wisata terbatas; (4) tidak ada koordinasi yang baik antar-instansi yang terkait dengan bidang pariwisata; (5) pemerintah sulit mempromosikan daya tarik wisata, baik di dalam maupun di luar negeri; (6) sebagai alasan utama adalah hasil yang tidak memuaskan dari pengelolaan sendiri oleh pemerintah kabupaten sehingga tidak pernah ada sumbangan yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengelolaan daya tarik wisata. Pihak swasta sendiri mempunyai alasan sebagai berikut: (1) mengelola daya tarik wisata di Bali pada umumnya dan Tabanan pada khususnya merupakan peluang bisnis dengan prospek yang sangat cerah yang terlihat dari semakin meningkatnya jumlah wisatawan asing dan nusantara yang mengunjungi daya tarik wisata di Bali; (2) daya tarik wisata termasuk unik, yakni memiliki daya tarik dan pemandangan alam yang khas; (3) pengelolaan tidak ruwet dari segi teknis dan kemampuan manajerial, modal, dan pengalaman dalam kepariwisataan; dan (4) ada tekad untuk membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lapangan kerja sekaligus untuk membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suantina, 1998:101).

Privatisasi tiga buah sarana pariwisata yang berupa restoran di Desa Wisata Jatiluwih sudah terjadi. Namun, sampai saat ini menyisakan permasalahan, terutama

terkait keberadaan dokumen atau surat-surat kontrak dari ketiga restoran tersebut. Di samping itu, pada saat ini muncul komodifikasi, terutama menimpa orang luar desa setempat yang melakukan pengambilan gambar (*shooting*) dengan latar belakang terasering sawah. Dalam hal ini mereka yang mengambil gambar (baik untuk mempromosikan Desa Wisata Jatiluwih ataupun untuk keperluan pribadi), dengan alasan apa pun masyarakat setempat mengenakan biaya, yakni oleh masyarakat setempat dikenal sebagai "biaya *shooting*". Biaya yang dikenakan terhadap mereka yang mengambil gambar tersebut, pada awalnya pemungutannya dilakukan oleh siapa saja yang kebetulan melihat orang yang mengambil gambar di areal terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih.

Kedua permasalahan yang terjadi, yaitu keberadaan dokumen atau surat-surat kontrak restoran serta komodifikasi berupa pengenaan biaya pengambilan gambar atau "biaya *shooting*", yakni menimbulkan polemik di masyarakat. Oleh karena menimbulkan polemik di masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, maka kedua permasalahan tersebut dibahas dalam rapat dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2008 yang berlangsung di Kantor Kepala Desa Jatiluwih pada Rabu, 25 Juni 2008. Untuk memberikan gambaran tentang suasana rapat yang membahas kedua permasalahan tersebut, berikut disajikan gambar suasana rapat yang membahas fenomena "biaya *shooting*" dan ketiadaan dokumen yang berupa surat-surat kontrak dari usaha sarana pariwisata yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, seperti terlihat pada Gambar 5.6 berikut ini.



Gambar 5.6

Suasana Rapat Membahas RPJM Desa Jatiluwih Tahun 2008

Dokumen: Prasiasa Tahun 2008

Pada rapat RPJM tanggal 25 Juni 2008 kedua permasalahan di atas dibahas dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Untuk menelusuri dan melacak keberadaan dokumen yang berupa surat-surat kontrak *Café* Jatiluwih, Restoran Naga Puspa, dan Restoran Waka Land Cruise, ditugaskan kepada *Bendesa Adat* Desa Jatiluwih (Wayan Yasa) untuk menelusuri sekaligus melacak keberadaan dokumen tersebut, termasuk mengeceknya pada mantan-mantan *Bendesa Adat* Jatiluwih. Sehubungan dengan upaya menelusuri keberadaan dokumen berupa surat kontrak tersebut, salah seorang peserta rapat, Wayan Yasa (42 tahun) menyatakan sebagai berikut.

”Sebelum rapat ini saya sudah berusaha menghubungi pihak-pihak yang menurut saya mengetahui keberadaan dokumen kontrak-mengontrak tersebut, seperti pegawai restoran, *Bendesa Adat* Jatiluwih sebelum saya, serta staf kantor kepala desa. Namun, hasilnya tidak ada yang mengetahui, dan malah saya disuruh diam saja.”

Ungkapan salah satu masyarakat Desa Wisata Jatiluwih tersebut, merupakan sebuah kelemahan terkait kemampuan administratif masyarakat pendukung desa wisata. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemilik kekuasaan untuk melakukan hegemoni terhadap masyarakat, terutama menguasai hasil-hasil pengontrakkan usaha-usaha pariwisata yang ada di Desa Wisata Jatiluwih. Fenomena hilangnya dokumen kontrak dari usaha-usaha pariwisata yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, sesuai pendapat Ryan dan Aicken (2005:102) merupakan permasalahan, yaitu merupakan keterlambatan dari keahlian manajerial (*managerial skills*) penduduk setempat dalam kaitan pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih.

Komodifikasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap mereka yang mengambil gambar atau *shotting* di wilayah Desa Wisata Jatiluwih, diputuskan untuk mengenakan biaya yang besarnya tidak ditentukan. *Bendesa Adat* Jatiluwih bersama-sama dengan *pecalang* dan salah satu pegawai kantor kepala desa akan mendatangi setiap orang yang melakukan pengambilan gambar/*shotting*, yakni untuk meminta ”biaya *shotting*”.

Berkaitan dengan adanya ”biaya *shotting*” yang dipungut oleh masyarakat Desa Wisata Jatiluwih terhadap mereka yang melakukan pengambilan gambar di wilayah desa setempat menimbulkan eksekusi yang kurang baik. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap promosi pariwisata, baik terhadap Kabupaten Tabanan maupun terhadap Provinsi Bali. Hal ini juga diakui oleh Gede Nurjaya (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali) pada wawancara tanggal 24 Juni 2008 bertempat di ruang kerjanya. Beliau mengatakan sebagai berikut.

”Penaan biaya *shooting* terhadap mereka yang melakukan pengambilan gambar di Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih akan mengganggu upaya promosi yang akan kita lakukan, di samping merusak citra pariwisata Jatiluwih pada khususnya, dan citra pariwisata Tabanan serta Provinsi Bali pada umumnya. Kejadian ini sudah menimpa salah satu perusahaan yang mendapat persetujuan pemerintah untuk mengambil gambar di sana (gambar tersebut untuk promosi Desa Wisata Jatiluwih terkait pariwisata dan menyongsong sebagai Warisan Budaya Dunia).”

Ungkapan di atas menyiratkan bahwa mereka yang mengambil gambar pada daya tarik wisata yang ada di Desa Wisata Jatiluwih dijadikan komoditas oleh masyarakat setempat, dengan tujuan akhirnya masyarakat setempat ingin mendapatkan uang. Fenomena ini menunjukkan bahwa komodifikasi sudah terjadi dan masuk ke dalam suatu masyarakat yang sangat awam terhadap pariwisata dalam arti luas. Artinya, masyarakat Desa Wisata Jatiluwih sudah menjadikan mereka yang mengambil gambar keindahan alam yang berwujud terasering sawah dengan latar belakang panorama alam yang indah sebagai komoditas, yakni dengan tujuan untuk menghasilkan uang. Hal ini sejalan dengan pandangan Barker (2004:408) bahwa komodifikasi sebagai proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme, yakni objek, kualitas, dan tanda dijadikan sebagai komoditas. Dalam hal ini komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar, untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan menjadikan terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih sebagai sumber penghasil uang melalui ”biaya *shooting*” yang dipungut oleh masyarakat setempat, berarti secara tidak langsung terasering sawah yang merupakan cerminan produk budaya, khususnya budaya pertanian sebagai simbol dari mata pencaharian, juga

mengalami komodifikasi. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Ardika (2007:97) yang menyatakan bahwa pariwisata dapat menimbulkan proses komodifikasi terhadap budaya masyarakat lokal karena budaya dianggap sebagai daya tarik wisata.

Keinginan masyarakat setempat untuk mengelola daya tarik wisata, termasuk usaha-usaha sarana pariwisata yang ada adalah sesuatu yang dapat diterima. Oleh karena hal itu sesuai dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*), di samping memang masyarakat setempat yang daerah atau wilayahnya dikembangkan pariwisata memiliki hak untuk berperan serta pada pengembangan pariwisata yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknis Desa Wisata Terpadu di Bali (1992:9), yakni sebagai berikut.

Secara substansi, dalam penanganan tata ruang dan rencana detail teknis desa wisata terpadu ini, akan digunakan beberapa konsep dasar pendekatan sebagaimana berikut ini.

1. Desa wisata direncanakan bukan sebagai "atraksi wisata" semata-mata yang menjadikan manusia dan lingkungan desa tersebut sebagai "objek museum" untuk ditonton dan dinikmati, melainkan desa wisata dimaksudkan sebagai suatu bentuk pemanfaatan usaha pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Diharapkan dapat terjadi simbiosis mutualisme antara masyarakat setempat dengan wisatawan sehingga pembangunan dapat terpacu, bukan harus diarahkan pada pariwisata semata, melainkan justru pada masyarakat dan lingkungan. Dari peningkatan kualitas inilah, baru diharapkan diperoleh iklim yang sehat untuk pariwisata.

2. Desa wisata akan dilihat sebagai suatu sel yang hidup. Sebagai suatu sel, desa akan terkait dengan "jaringan" yang lebih besar (berbagai sistem regional) dan mempunyai berbagai elemen (subsistem desa) yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagai suatu sel, desa harus dijaga kemandiriannya, di samping tetap terkait dengan sel-sel dan jaringan yang lain. Sebagai suatu sel, desa memiliki batas-batas pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai suatu sel, desa harus tetap terjaga identitasnya (memiliki kulit sel) dengan karakteristik tertentu (ciri desa).

3. Setiap perkembangan dan program pembangunan yang akan direncanakan terhadap desa akan ditolokkan terhadap berbagai sistem norma, adat, dan budaya setempat. Sistem kelembagaan yang direncanakan menyandang program-program pun akan diusahakan semaksimal mungkin menggunakan berbagai kelembagaan lokal yang sudah ada. Demikian juga, partisipasi masyarakat akan dioptimalkan sehingga dapat diperoleh sistem pembangunan yang berbasis dan berorientasi pada masyarakat setempat (*community-based development*). Dengan demikian, dapat diperoleh pembangunan yang berkesinambungan dan tidak tergantung pada program-program dari atas.

Dari konsep pengembangan Desa Wisata Jatiluwih di atas, terlihat bahwa partisipasi masyarakat setempat mendapat tempat dan porsi yang besar serta hasilnya diharapkan dapat memacu pembangunan desa yang bersangkutan. Program-program yang akan dilaksanakan tidak tergantung dari atas (*top down*), tetapi atas kemandirian serta mendapat dukungan dari berbagai kelembagaan lokal yang sudah ada.

Konsepsi tersebut juga tampaknya selaras dengan paradigma baru pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat, yakni terpeliharanya mutu dan kelanjutan sumberdaya alam dan budaya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dan terwujudnya keseimbangan antara sumberdaya alam dan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta kepuasan wisatawan (Natori 2001, Gee, C.Y and Fayos-Sola, E. 1999 dan Ardika, 2002). Lebih lanjut menurut Pujaastawa dkk. (2005:34), dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat pariwisata yang lebih banyak dinikmati oleh para pemilik modal yang umumnya berasal dari luar masyarakat setempat, diperlukan pendekatan pembangunan pariwisata berdimensi kerakyatan yang merupakan sebuah model pemberdayaan yang memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi secara efektif

dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan pewaris (*beneficiary approach*), dalam hal ini masyarakat hanya menerima keuntungan tanpa diberi wewenang.

Keinginan masyarakat untuk ikut mengelola pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, khususnya pada usaha sarana pariwisata terjadi pada tahun 1992. Pada waktu itu lima orang anggota *sekaa teruna* dari *Desa Adat* Jatiluwih dikirim untuk mengikuti pendidikan di Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata (BPLP) Nusa Dua selama enam bulan. Sekembalinya mereka ke desa, mereka telah mencoba membuka *coffee shop* di sekitar lokasi parkir (sekarang lokasi *Café* Jatiluwih). Usaha tersebut memperoleh modal dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) *Desa Adat* Jatiluwih dan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Namun, karena kurangnya pengalaman berbisnis dari pengelola serta kurang adanya dukungan dari kelembagaan yang ada di desa, *coffee shop* ini tidak dapat berjalan. Selanjutnya, *coffee shop* ini dikontrakkan kepada orang asing. Secara tidak langsung pengontrakan *coffee shop* ini telah mengingkari keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

Sebagai akibat pengontrakan sarana pariwisata tersebut, maka sejak tahun 1995 hingga saat ini, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang dapat diterima bekerja secara langsung pada sarana pariwisata yang ada. Demikian pula yang bekerja secara tidak langsung (sebagai pemasok sayur-sayuran ke restoran) jumlahnya juga terbatas. Hal ini dari sisi masyarakat setempat disebabkan (1) keterbatasan keahlian (*skill*) sehingga kompetensi yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat setempat masih kurang memenuhi syarat; (2) generasi muda dari masyarakat setempat lebih tertarik

bekerja di luar desa mereka; (3) keterbatasan jenis pekerjaan yang ditawarkan; dan (4) lebih tertarik bekerja sebagai petani. Selanjutnya, dari sisi pengusaha, hal ini disebabkan (1) terbatasnya kemampuan mereka untuk menerima karyawan, mengingat pendapatan masih minim; (2) masyarakat setempat kurang memiliki jiwa sebagai pelayan di bidang *hospitality industry*; dan (3) lemahnya kemampuan berbahasa asing. Berikut disajikan jumlah masyarakat yang bekerja secara langsung pada usaha sarana pariwisata yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, yakni dapat dilihat pada Tabel 5.6 di bawah ini.

Tabel 5.6  
Jumlah Masyarakat yang Bekerja Secara Langsung pada Usaha Sarana  
Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Tahun 2008

No.	Nama Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah Karyawan		Lokasi Usaha
		Dari Desa Jatiluwih	Dari Luar Desa Jatiluwih	
1.	Café Jatiluwih	1	2	Dusun Jatiluwih Kangin
2.	Restoran Waka Land Cruise	3	6	Dusun Kesambahan Kaja
3.	Restoran Naga Puspa	1	4	Dusun Kesambi
4.	Galang Kangin Inn	1	1	Dusun Jatiluwih Kangin
	J u m l a h	6	13	

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2008

Gambaran pada Tabel 5.6 mencerminkan bahwa dalam operasionalisasi di lapangan, ternyata keterlibatan masyarakat setempat sangat kecil (dari 19 kesempatan kerja yang ada, yakni hanya enam orang diisi oleh masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, sedangkan sebanyak 13 orang diisi oleh masyarakat dari luar desa setempat). Hal ini berarti pengembangan Desa Wisata Jatiluwih memberikan berdampak yang kecil

pada kesempatan kerja sehingga tidak dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Secara ekonomi, dampak yang ditimbulkan juga sangat terbatas, di samping karena terbatasnya keterlibatan masyarakat secara langsung pada usaha sarana pariwisata yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, juga karena pengembangan Desa Wisata Jatiluwih belum mampu menjadi stimulus bagi daya kreativitas masyarakat dalam rangka berperan pada bisnis kepariwisataan yang ada.

Dari hasil pengamatan di lapangan mengenai keterlibatan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih secara tidak langsung dalam usaha sarana pariwisata, dapat dilihat dari dua hal, yaitu (1) keterlibatan tidak langsung yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara individu, (2) keterlibatan tidak langsung yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara kolektif/bersama-sama melalui lembaga adat, dalam hal ini *desa adat*. Dalam hal keterlibatan secara tidak langsung, yakni (1) individu tidak langsung terlibat pada usaha sarana pariwisata, tetapi aktif menyediakan alat-alat, bahan-bahan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh usaha sarana pariwisata (sebagai pencari); (2) individu-individu tidak terlibat secara langsung dan secara kolektif bersikap pasif (lebih sebagai penerima). Dalam hal ini sebagai penerima dimaksudkan, yakni masyarakat setempat secara kolektif menerima manfaat ekonomi dari pariwisata, yaitu melalui sejumlah uang yang disetorkan oleh pengusaha kepada masyarakat setempat, baik kepada *dusun*, kepada *desa adat*, maupun kepada Desa Wisata Jatiluwih. Mengenai keterlibatan secara tidak langsung dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Terpadu Jatiluwih, Nengah Suastika (35 Tahun) pada wawancara tanggal 14 September 2008 mengatakan sebagai berikut.

”Masyarakat desa setempat tidak terlibat secara langsung karena di samping kurang memahami tentang pariwisata, juga karena *sampun ngekoh tur males* dengan pariwisata, yang lebih banyak menimbulkan interik, saling curigai. Oleh karena itu, saya pribadi terlibat secara tidak langsung, sebagai pemasok sayuran ke restoran yang ada”.

Apa yang dikemukakan oleh salah seorang warga masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, dari sisi keterlibatan masyarakat setempat, yakni dilakukan melalui dua cara, yaitu menurut Arka (1999:108) dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sebagian besar keterlibatan masyarakat tersebut secara tidak langsung. Adapun gambaran keterlibatan tersebut dapat dikemukakan pada Tabel 5.7 berikut ini.

Tabel 5.7

Analisis Keterlibatan Masyarakat pada Usaha Sarana Pariwisata  
di Desa Wisata Jatiluwih

Langsung	Tidak Langsung	
	Individu	Masyarakat (Kolektif)
1. Sangat Aktif	1. Aktif	1. Pasif
2. Bekerja Secara Langsung	2. Bekerja Secara Tidak Langsung	2. Secara Kolektif Tidak Bekerja
3. Sebagai Pencari	3. Sebagai Pencari	3. Sebagai Penerima
4. Merupakan Pekerjaan Utama	4. Pekerjaan Sampingan	4. Memiliki atau Tidak Memiliki Pekerjaan

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2008

Fenomena tentang terbatasnya jumlah masyarakat yang bekerja pada sarana pariwisata tersebut di atas sejalan dengan Subadra (2007), yang menyatakan bahwa Desa Wisata Jatiluwih belum memberikan manfaat ekonomi secara langsung dan adil kepada masyarakat lokal (*host community*) karena hanya sebagian kecil masyarakat

lokal bekerja di sektor pariwisata tersebut, seperti: akomodasi, *café*, dan restoran. Secara tidak langsung masyarakat lokal telah menerima keuntungan, yang diperoleh melalui *desa adat* dan desa dinas tempat mereka berada. Jika kondisi ini dikaitkan dengan pendekatan pewaris (*beneficiary approach*), dengan telah diterimanya keuntungan oleh masyarakat setempat (secara kolektif) yang terlibat secara tidak langsung pada usaha sarana pariwisata, menunjukkan bahwa masyarakat setempat siap menerima untuk tidak diberikan wewenang oleh pengusaha yang mengontrak usaha sarana pariwisata. Jika kondisi ini terjadi, maka akan merupakan ancaman bagi pengembangan desa wisata yang menjadikan masyarakat setempat sebagai inti dalam pengembangannya.

Untuk lebih mengarahkan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, pada tanggal 22 Maret 2003 dibentuk *Steering Committee* (SC) Desa Wisata Jatiluwih. Pada pembentukan SC Desa Wisata Jatiluwih terdapat dua hal yang diatur, yaitu (1) ketentuan tentang SC; (2) tugas dan tanggung jawab SC.

Ketentuan tentang SC sebagai berikut: (1) SC adalah sebuah badan penyangga investasi yang bersifat independen; (2) SC berfungsi sebagai penghubung dan penyalur investasi yang masuk untuk masyarakat Desa Wisata Jatiluwih; (3) SC tidak mewakili perorangan atau kelompok; (4) SC tidak bertanggungjawab kepada desa dinas, bukan juga kepada *desa adat*, melainkan langsung kepada investor sebelum badan usaha desa terbentuk; (5) SC berkewajiban untuk menetapkan standar minimum tentang desa wisata dalam hubungannya dengan kebutuhan investor; (6) SC memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pembagian investasi terhadap

masyarakat desa melalui mekanisme seleksi yang transparan; (7) susunan dan kelengkapan SC dibuat oleh SC sendiri sesuai dengan kebutuhan; (8) kerja sama semua pihak mutlak adanya, terutama dalam hal sosialisasi kepada warga masyarakat serta segala legalitas dan produk hukum yang menjamin keabsahan SC dan operasionalnya; (9) menyiapkan kerangka dalam perencanaan perubahan dan SC menjadi sebuah badan usaha desa yang akan bertanggungjawab atas pelaksanaan investasi selanjutnya dan ikut bertanggung jawab dalam peningkatan perekonomian desa/masyarakat.

Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab SC adalah sebagai berikut: (1) menjadi perantara atau mediator antara investor dengan masyarakat desa; (2) menyusun prosedur investasi, proses, dan mekanisme operasionalnya, termasuk dengan metode pengembaliannya; (3) menyiapkan produk-produk hukum yang dapat menjamin keabsahan SC; (4) bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit investasi yang beredar di desa; (5) berkewajiban melaksanakan sosialisasi di masyarakat terhadap semua produk investasi yang dikururkan di masyarakat; (6) bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan produk yang didanai lewat SC termasuk likuiditas; dan (7) berkewajiban untuk mengadakan pembinaan tentang industri pariwisata, industri kecil menengah, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan.

*Steering Committee (SC)* Desa Wisata Jatiluwih dibentuk untuk mengantisipasi datangnya investasi terkait pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Namun, dalam kenyataannya di lapangan, SC yang dibentuk tersebut tidak dapat menjalankan tugas seperti yang diharapkan. Bahkan ada beberapa investor yang telah diundang oleh

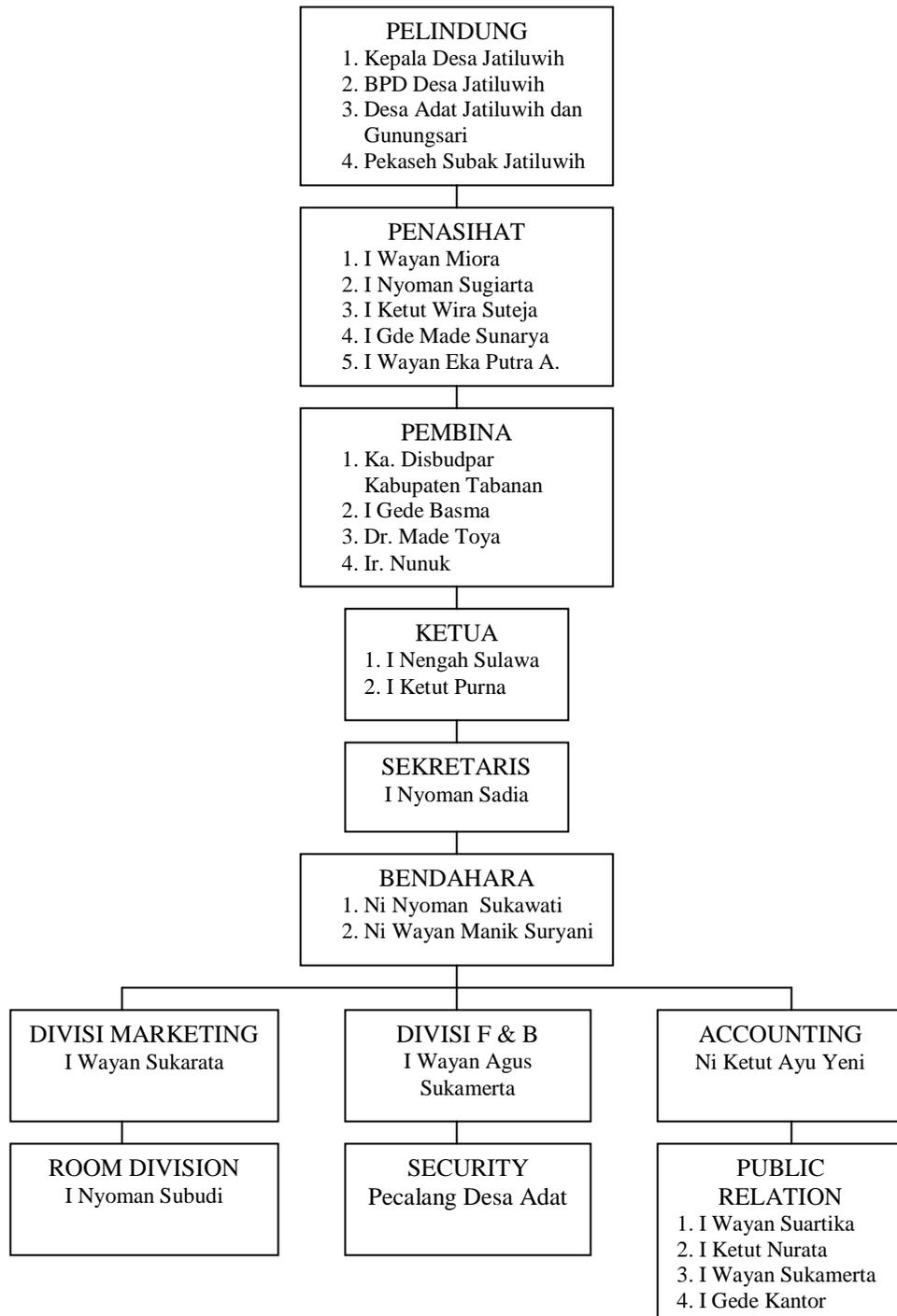
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan untuk membuka usaha di Desa Wisata Jatiluwih tidak dapat melaksanakan rencananya. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat tidak bersedia untuk menyerahkan lahannya untuk dibeli oleh pengusaha. Kondisi ini akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan sehingga membuat investor yang diharapkan menjadi *growth centre* menjadi "kabur" dari Desa Wisata Jatiluwih.

Sebagai daya tarik wisata, Desa Wisata Jatiluwih selain telah memiliki daya tarik, juga telah pula memiliki sarana pariwisata dan kelembagaan. Hal ini tentunya merupakan suatu keunggulan sekaligus peluang. Oleh karena menurut Cooper et al. (1995:81), yang dipersyaratkan adalah memiliki daya tarik (*attractions*), mudah dicapai karena tersedianya transportasi lokal dan adanya terminal (*accessibility*), tersedianya berbagai fasilitas akomodasi, restoran, tempat hiburan, tempat pembelanjaan, dan pelayanan lain (*amenities*) serta organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pelayanan wisatawan (*ancillary*) adalah Destinasi Pariwisata (*tourist destinations*). Hal ini berarti keberadaan *Steering Committee* di Desa Wisata Jatiluwih sudah sesuai dengan persyaratan *tourist destinations*, meskipun saat ini Desa Wisata Jatiluwih baru sebagai daya tarik wisata sesuai Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998.

Struktur SC tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih sudah melibatkan setidaknya dua *stakeholders*, yaitu masyarakat (*desa adat*, badan perwakilan desa, dan individu-individu dari desa setempat) serta pemerintah (dalam hal ini Kepala Desa Jatiluwih dan Kepala Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan). Struktur tersebut terdiri atas (1) pelindung, (2) penasihat, (3) pembina, (4) ketua, (5) sekretaris, dan (6) bendahara. Struktur ini juga dilengkapi dengan enam divisi, masing-masing (1) divisi pemasaran (*marketing*), (2) divisi makanan dan minuman (*food and beverage / F&B*), (3) divisi akuntansi (*accounting*), (4) divisi penataan kamar/tata graha (*room division*), (5) divisi keamanan (*security*), dan (6) divisi hubungan masyarakat (*public relation*).

Dilihat dari struktur organisasi SC Desa Wisata Jatiluwih menunjukkan bahwa struktur tersebut tidak mencerminkan sebuah struktur untuk mengelola desa wisata. Oleh karena dalam struktur tersebut kelembagaan dan pranata yang ada di desa setempat tidak dipergunakan secara utuh di samping juga mempergunakan unsur kekuasaan. Dalam hal ini struktur organisasi desa wisata yang telah ada perlu didekonstruksi untuk meniadakan intervensi langsung unsur kekuasaan □diperankan oleh pemerintah□ sehingga hubungan masyarakat dengan pemerintah lebih bersifat koordinasi atau mitra kerja. Selain itu dalam struktur organisasi tersebut diperlukan keterlibatan kelembagaan atau pranata desa secara utuh. Maksudnya, agar program-program yang ditawarkan oleh desa wisata tetap mengacu pada norma dan budaya lokal serta digunakannya sumber daya budaya yang ada pada masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan pendekatan pengembangan desa wisata, yaitu pengembangan harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul mudah dikontrol oleh masyarakat setempat. Adapun Struktur Organisasi SC di Desa Wisata Jatiluwih seperti Gambar 5.7 berikut ini.



Gambar 5.7

Struktur Organisasi *Steering Committee* Desa Wisata Jatiluwih  
Sumber: Laporan Tim Penyusun Master Plan Subak Jatiluwih Tahun 2003

Menurut Pujaastawa dkk. (2005:140-142), ada enam model pengelolaan pengembangan pariwisata Bali Tengah. Keenam model pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut. (1) Pengelolaan oleh *desa adat*. *Desa adat* sebagai pengelola utama, sedangkan pemerintah, pelaku pariwisata, dan warga *subak* sebagai mitra dalam pengelolaan. Model ini didukung oleh 65% masyarakat. (2) Pengelolaan oleh *subak*. Masyarakat yang terlibat langsung dalam *subak* mengelola usaha, sedangkan pemerintah, pelaku pariwisata, dan *desa adat* sebagai mitra kerja. Model ini didukung oleh 58% masyarakat. (3) Pengelolaan oleh pelaku pariwisata. Pelaku pariwisata sebagai pengelola, sedangkan pemerintah, *subak*, dan *desa adat* sebagai mitra kerja. Model ini didukung oleh 35% masyarakat. (4) Pengelolaan oleh Pemerintah. Pemerintah sebagai pengelola (dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara). Model pengelolaan seperti ini mendapat dukungan 38% masyarakat. (5) Pengelolaan oleh *subak* dan *adat*. Pengelolaan dilakukan oleh *subak* dan *desa adat* secara bersama-sama, sedangkan pemerintah dan pelaku pariwisata sebagai mitra kerja. Model ini didukung oleh 73% masyarakat. (6) Pengelolaan oleh badan pengelola. Model pengelolaan ini menampilkan konsep keterpaduan antara unsur-unsur yang terlibat dalam objek pariwisata, seperti: *desa adat*, *subak*, pemerintah, dan pelaku pariwisata. Model ini didukung oleh 75% masyarakat. Jika dikaitkan dengan karakteristik Desa Wisata Jatiluwih, model pengelolaan yang berupa SC tersebut sama dengan model pengelolaan oleh badan pengelola. Untuk jangka panjang, dalam kaitan implementasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, keterlibatan unsur pemerintah dan pelaku pariwisata harus ditiadakan.

Sebagai daya tarik wisata yang bersifat terbuka, dalam arti Desa Wisata Jatiluwih berada pada perlintasan umum sehingga keberadaan pos untuk memungut retribusi masuk (*entrance fee*) sangat penting artinya. Oleh karena itu, Desa Wisata Jatiluwih juga membangun dua pos pemungutan retribusi yang masing-masing berlokasi di ujung timur desa (*Dusun* Gunungsari Desa) dan di ujung barat desa (*Dusun* Kesambi).

Besarnya *entrance fee* untuk wisatawan nusantara adalah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk sekali masuk dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk wisatawan mancanegara. Hasil pemasukan dari *entrance fee* ini selanjutnya dibagi menurut ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Tabanan. Sesuai Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2001, seluruh hasil pemungutan *entrance fee* dan parkir dibagi dengan presentase, yakni 20% untuk petugas, 30% untuk Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan 50% untuk Kepala Desa Jatiluwih. Dalam hal ini dari 50% sebagai bagian Kepala Desa Jatiluwih, selanjutnya dibagi tiga masing-masing untuk Desa Jatiluwih sebesar 17,5%; *Desa Adat* Jatiluwih sebesar 19,5%; dan *Desa Adat* Gunungsari sebesar 13,0%.

Dalam hal ini pembagian untuk *Desa Adat* Jatiluwih lebih besar dari *Desa Adat* Gunungsari karena hampir semua aktivitas pariwisata berada di *Dusun* Jatiluwih Kawan dan *Dusun* Jatiluwih Kangin, termasuk juga di *Dusun* Kesambi. Ketiga *dusun* tersebut berada di bawah koordinasi *Desa Adat* Jatiluwih. Namun, untuk di *Dusun* Gunungsari, aktivitas pariwisata hanya ada di *Dusun* Gunungsari Desa sebagai pos timur pemungutan retribusi. Oleh karena itulah distribusi pembagian untuk *Desa Adat*

Gunungsari lebih kecil daripada pembagian untuk *Desa Adat* Jatiluwih. Adapun distribusi pembagian *entrance fee* dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut ini.

Tabel 5.8  
Distribusi Pembagian *Entrance Fee* Desa Wisata Jatiluwih

No.	Komponen	Dasar	
		S.K. Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2001	S.K. Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005
1.	Petugas Pemungut	20%	20%
2.	Pemerintah Kabupaten Tabanan	30%	
3.	Kepala Desa Jatiluwih		
	a. Desa Jatiluwih	17,5%	
	b. Desa Adat Jatiluwih	19,5%	
	c. Desa Adat Gunungsari	13,0%	

Sumber: SK Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2001 dan SK Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005

Keterangan:

Uraian lebih lanjut tentang pembagian *entrance fee* untuk Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Kepala Desa Jatiluwih berdasarkan SK Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005 tidak ada.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005 tertanggal 1 Maret 2005 yang merupakan pembaharuan dari Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2001, yakni masih ada kekurangjelasan, terutama pembagian untuk Pemerintah Kabupaten Tabanan dan untuk Kepala Desa Jatiluwih yang selanjutnya akan didistribusikan kepada Desa Jatiluwih, *Desa Adat* Jatiluwih, dan *Desa Adat* Gunungsari. Kekurangjelasan besaran jumlah yang akan didistribusikan untuk masing-masing komponen yang terlibat berpotensi menimbulkan prasangka dan saling curiga, di samping juga berpotensi menjadi sumber konflik.

Aksesibilitas yang berupa ketersediaan jalan dan terminal yang memadai bagi keberlangsungan perjalanan wisatawan merupakan tantangan tersendiri bagi Desa Wisata Jatiluwih. Hal ini karena jalan yang menghubungkan antara *Dusun* Jatiluwih Kawan (tepatnya mulai di depan Kantor Kepala Desa Jatiluwih) sampai dengan pos *entrance fee* di bagian barat yang berlokasi di *Dusun* Kesambi kondisi jalannya rusak parah. Kerusakan jalan yang parah ini sudah sering dikomplain oleh wisatawan kepada sopir (*driver*) yang mengantar wisatawan tersebut. Selanjutnya, pihak sopir menyampaikan komplain wisatawan kepada petugas jaga di pos *entrance fee*. Komplain terhadap kondisi jalan tersebut hingga saat ini belum ada penanganan dari yang berwenang. Lebih lanjut, Desa Wisata Jatiluwih memiliki jalan beraspal sepanjang 16 kilo meter, dan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda dua atau roda empat hanya tiga kilo meter. Namun, jalan tanah yang ada di desa ini serta dapat dilalui kendaraan roda dua atau roda empat sepanjang 15 kilo meter. Dalam hal ini jalan tersebut diperkeras dengan beton atau batu kali.

Berkaitan dengan ketersediaan terminal, sampai saat ini di Desa Wisata Jatiluwih belum ada. Kendaraan umum akan berhenti di Pasar Senganan, Kecamatan Penebel. Untuk melanjutkan perjalanan dari Pasar Senganan ke Desa Wisata Jatiluwih tidak dapat dilakukan setiap saat karena keterbatasan kendaraan umum yang menuju Desa Wisata Jatiluwih. Dengan demikian, untuk wisatawan yang akan berwisata ke Desa Wisata Jatiluwih dengan mengandalkan kendaraan umum akan mengalami kesulitan.

Potensi Desa Wisata Jatiluwih didukung oleh nilai lebih (*value added*) yang dimiliki sehingga menjadikan daya tarik wisata ini memiliki nilai tawar yang menjanjikan, terutama dari sisi daya tarik wisata (*attractions*). Dengan modal berupa keindahan alam, terasering sawah yang tiada duanya, adat istiadat, dan budaya yang masih terjaga, rata-rata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara per tahun sebanyak 9.704 orang dan 1.113 orang. Dengan potensi tersebut Desa Wisata Jatiluwih sudah dimasukkan dalam paket wisata "Bedugul Tour". Dengan demikian, berarti Desa Wisata Jatiluwih sudah dijual oleh kapitalis, yakni dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada, baik alam, sosial, maupun budaya setempat untuk kepentingan ekonomi semata.

Masuknya kapitalisme dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang mendapat dukungan dari pemerintah Orde Baru, menyebabkan desa ini terkomodifikasi, baik disadari maupun tidak oleh masyarakat desa setempat. Desa Wisata Jatiluwih dengan segala potensinya akhirnya menjadi produk yang terpenting bagi kapitalisme. Komodifikasi dengan mempergunakan nama Pura Luhur Petali dalam kasus pembangunan di tengah hutan di utara Pura Luhur Petali (memakai nama "Vila Petali") jelas merupakan komodifikasi yang disengaja. Oleh karena canggihnya hegemoni pemerintah dalam bekerja sama dengan pengusaha serta di dukung oleh sekelompok tokoh masyarakat desa setempat dengan berbagai kepentingannya, masyarakat dibuat tidak sadar dan tidak berdaya berhadapan dengan penguasa yang keras serta hegemonik.

Dalam hal ini dibantu kekuasaan hegemonik pemerintah dan dukungan dari segelintir tokoh masyarakat desa setempat, penguasaan kapitalis di lingkup Pura Luhur Petali tidak terlalu dirasakan oleh unsur-unsur yang dikuasainya. Bahkan realitas itu disetujui dengan adanya dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kekuasaan tersebut. Wujudnya adalah adanya bantuan, baik rutin maupun insidental kepada pelaksanaan upacara di pura tersebut, termasuk adanya bantuan dari kapitalis pada kegiatan yang diadakan oleh desa dan tokoh-tokoh penting dalam jajaran kekuasaan di desa setempat.

Dikontrakkannya *Café* Jatiluwih, lokasi Restoran Waka Land Cruise, dan lokasi Restoran Naga Puspa (meskipun mendapat uang kontrak dan ada sebagian kecil masyarakat Desa Jatiluwih yang dipekerjakan) dan keikutsertaan pemerintah sebagai SC dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, yang menunjukkan lemahnya daya tawar masyarakat di hadapan pemerintah dan merupakan pengingkaran terhadap pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. Pengontrakan sumber-sumber *income* yang ada di Kabupaten Tabanan, termasuk pengontrakan sarana pariwisata yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, yakni menunjukkan adanya upaya untuk mem-perdaya-kan masyarakat setempat dengan wacana hegemonik meningkatkan pendapatan daerah.

#### **5.4 Konflik Kepentingan pada Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih**

Bali yang merupakan "Pulau Seribu Pura" akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian terkait dengan menjamurnya pembangunan fasilitas kepariwisataan di

kawasan suci atau berada pada radius kesucian pura. Pembangunan fasilitas kepariwisataan berupa akomodasi di kawasan suci menimbulkan konflik *sacred site* (situs sakral atau tempat suci). Dalam edisi Juni 1995, *Inside Indonesia* pernah menurunkan artikel berjudul *Letter from a Sacred Site*. Begitu juga laporan Warren (1993) yang berjudul *Whose Tourism? Balinese Fight back*, menyatakan bahwa situs sakral dan tempat suci merupakan sumber paling mutakhir dari konflik.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pembangunan akomodasi yang berupa "Vila Petali" yang merupakan bagian dari pengembangan Desa Wisata Jatiluwih menimbulkan konflik tentang kawasan suci. Konflik ini terjadi karena pembangunan vila tersebut berada pada kawasan Pura *Dang Kahyangan*. Konflik tersebut berkembang menjadi konflik kepentingan, hegemoni, serta menimbulkan perlawanan masyarakat. Perlawanan masyarakat tersebut dilatarbelakangi oleh upaya untuk mengamankan radius kesucian pura serta penegakan pelaksanaan *Trihita Karana* sebagai akibat pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Pembangunan "Vila Petali" tidak bisa dilepaskan dari pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata. Untuk memberikan gambaran keterkaitan antara pembangunan "Vila Petali" dengan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, berikut ini diuraikan rencana pengembangannya.

Pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata pada tahun 1992 berawal dari keinginan pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan (*leading sector*) serta menjadi alternatif wisata sesuai tren pasar pada Pelita V (1989–1994). Dalam hal ini orientasi pilihan wisatawan pada hotel besar dan modern

sesuai dengan standar dan norma internasional telah banyak bergeser. Keinginan pemerintah tersebut didukung oleh pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, yaitu pada tahun 1990 mencapai 490.720 orang dengan rata-rata lama tinggal (*length of stay*) 9,1 hari.

Pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata direncanakan menghasilkan produk berupa keseluruhan suasana pedesaan yang asli, baik alam dan panoramanya maupun kehidupan sosial-budaya masyarakatnya. Komponen produknya adalah (1) akomodasi, yaitu rumah penduduk yang dijadikan fasilitas sejenis *homestay* dengan peningkatan fasilitas, sanitasi, dan higiene; (2) makanan dan minuman (dilayani oleh penduduk sendiri, baik secara unit keluarga maupun secara kolektif dengan aksentuasi makanan setempat); (3) atraksi berupa perjalanan melihat suasana keseharian, pengolahan sawah/ladang/pekerjaan, dan kesenian rakyat di desa setempat; (4) cendera mata berupa kerajinan penduduk setempat yang unik dengan mempergunakan bahan-bahan setempat (Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknis Desa Wisata Terpadu di Bali, 1992:1-2).

Secara substansial, penanganan tata ruang dari rencana detail teknis desa wisata ini mempergunakan beberapa konsep sebagai berikut: (1) desa wisata direncanakan bukan sebagai atraksi wisata (semata-mata menjadikan manusia dan lingkungan desa sebagai objek museum untuk ditonton dan dinikmati), melainkan sebagai bentuk pemanfaatan usaha pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) desa wisata dilihat sebagai sebuah sel hidup yang terkait dengan jaringan yang lebih besar dan mempunyai berbagai elemen yang tidak boleh ditinggalkan; sebagai sebuah

sel, desa harus dijaga kemandiriannya dan memiliki batas-batas pertumbuhan dan perkembangan; dan (3) setiap perkembangan dan program pembangunan yang akan direncanakan terhadap desa akan ditolokkan terhadap berbagai sistem norma, adat, dan budaya setempat (Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknis Desa Wisata Terpadu di Bali, 1992:9).

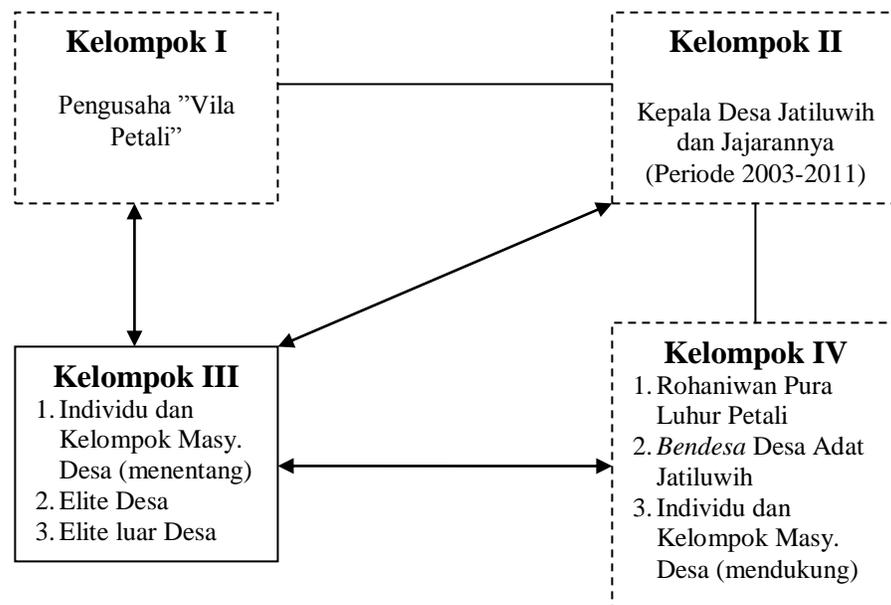
Berdasarkan rencana pengembangan Desa Wisata Jatiluwih tersebut serta adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang 15 Kawasan Wisata di Bali dan ditambah dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nomor 528 Tahun 1993 yang menetapkan 21 Kawasan Wisata di Bali, yakni merupakan embrio masuknya pemodal besar ke Bali. Penetapan kawasan wisata di atas merupakan fenomena pengembangan pariwisata yang bersifat menyebar (*dispersed development*).

Melalui rencana pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata serta adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang 15 Kawasan Wisata di Bali dan ditambah dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nomor 528 Tahun 1993 yang menetapkan 21 Kawasan Wisata di Bali, juga berdampak pada iklim investasi di Desa Wisata Jatiluwih. Dalam hal ini, Surya dkk. (2005:30) menyebutkan bahwa dengan direncanakannya Desa Jatiluwih sebagai desa wisata, pada proses selanjutnya pemerintah Kabupaten Tabanan mengundang investor untuk membuka

usaha di Jatiluwih, yang berarti pula pembebasan tanah dan penggusuran terhadap beberapa rumah penduduk.

Dengan adanya kedua Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali di atas, rencana pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata serta undangan pemerintah Kabupaten Tabanan kepada investor untuk membuka usaha di Desa Jatiluwih merupakan iklim yang dimanfaatkan oleh pengusaha Wawan Setiawan untuk membangun vila di sebelah utara Pura Luhur Petali. Pembangunan fisik vila yang dimulai tahun 2001, berawal dari dibelinya sebidang tanah di tengah hutan milik Wayan Mustika (60 tahun) yang tinggal di *Dusun* Jatiluwih Kawan. Proses jual beli tanah antara Wayan Mustika dengan pengusaha Wawan Setiawan terjadi sekitar tahun 1990-an dan bersamaan dengan rencana pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata.

Dalam pembangunan fisik "Vila Petali" selanjutnya, pembangunan tersebut banyak ditentang oleh masyarakat Desa Jatiluwih, termasuk oleh I Made Sumerjaya selaku Kepala Desa Jatiluwih periode 1999–2003. Namun, upaya yang dilakukan oleh masyarakat serta I Made Sumerjaya tidak dilanjutkan oleh Kepala Desa berikutnya, yaitu I Nengah Wirata, S.T. yang menjabat selama dua periode, yaitu tahun 2003–2007 dan tahun 2007–2011. Bahkan yang bersangkutan mendukung pengusaha Wawan Setiawan. Dengan tidak adanya kesamaan pandangan terhadap rencana pengembangan Desa Wisata Jatiluwih antara perencana, masyarakat dan pengusaha, maka pembangunan vila tersebut menimbulkan konflik, seperti Gambar 5.8 berikut ini.



Gambar 5.8

Pihak-Pihak yang Berkonflik Terkait Pembangunan "Vila Petali"

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2008

Keterangan:  $\longleftrightarrow$  Ada Konflik      — Tidak ada Konflik

$\boxed{\phantom{ }}$  Dalam satu Kelompok

Berdasarkan Gambar 5.8, konflik kepentingan yang terjadi terkait pembangunan "Vila Petali" melibatkan empat kelompok, masing-masing sebagai berikut. (1) Kelompok I adalah pengusaha "Vila Petali". (2) Kelompok II adalah Kepala Desa Jatiluwih dengan jajarannya. (3) Kelompok III terdiri atas individu dan kelompok masyarakat di Desa Jatiluwih (menentang), elite masyarakat Desa Jatiluwih, elite luar desa yang ada di Kabupaten Tabanan. (4) Kelompok IV terdiri atas rohaniwan di Pura

Luhur Petali, *Bendesa* Desa Adat Jatiluwih, individu, dan kelompok masyarakat desa setempat (mendukung).

Dari empat kelompok yang berkonflik, jika disederhanakan hanya terdiri atas dua group saja, yaitu Group I terdiri atas (1) pengusaha "Vila Petali", (2) Kepala Desa Jatiluwih dengan jajarannya pada periode tahun 2003–2011, (3) rohaniwan di Pura Luhur Petali, (4) *Bendesa* Desa Adat Jatiluwih (Wayan Yasa, Periode Jabatan 2007–2011), dan (5) individu dan kelompok masyarakat desa setempat (yang mendukung "Vila Petali"). Selanjutnya, Group II terdiri atas (1) individu dan kelompok masyarakat di Desa Jatiluwih (yang menentang "Vila Petali"), (2) elite masyarakat Desa Jatiluwih, dan (3) elite luar desa dari Kabupaten Tabanan. Terkait dengan konflik yang terjadi, Wayan Sumiata (47 tahun) pada wawancara tanggal 17 September 2008 mengatakan sebagai berikut.

"Saya sebagai anggota masyarakat, yang merupakan *wedan/wit* (asal) dari desa ini tidak terima kalau desa saya dirusak dengan kehadiran pariwisata. Sudah jelas-jelas sebuah bangunan berada dan melanggar kesucian pura, toh masih diteruskan pembangunannya. Saya betul-betul tidak mengerti dengan sikap pemerintah, yang lebih berpihak kepada pengusaha daripada masyarakatnya sendiri, termasuk pencemaran budaya (membuat *leteh* pura kami). Jika masalah ini tidak segera diatasi, ketidakcocokan antarmasyarakat termasuk dengan aparat desa terus akan berlanjut."

Apa yang dikemukakan oleh anggota masyarakat tersebut di atas, yakni menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap pembangunan pariwisata di desa setempat, yang menimbulkan penodaan terhadap kesucian pura serta pelanggaran-pelanggaran lainnya, di samping berpotensi menimbulkan ketidakcocokan antarmasyarakat. Ketidakcocokan ini merupakan salah satu sumber konflik, baik

antarmasyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah, yang selama ini telah menghegemoni masyarakat desa setempat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelawanan masyarakat murni membela radius kesucian pura dan tidak diikuti oleh nuansa ekonomi sehingga meneguhkan tesis Warren (1993) yang menyatakan bahwa situs sakral (*sacred area*) merupakan sumber paling mutakhir dari konflik. Selain itu, keberpihakan pemerintah kepada pengusaha sejalan dengan pandangan Hoogendijk (1996) yang menyatakan bahwa negara tergantung pada ekonomi pasar untuk memperoleh pendapatan dan oleh karena itu negara lebih menjadi pelayan bagi pemodal daripada bekerja untuk masyarakat dan kepentingan umum.

Dalam kaitan ini karena hegemoni terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, maka fokus kajian selanjutnya adalah masyarakat dan pemerintah. Sesuai dengan Gambar 5.8, maka "masyarakat" melingkupi mereka yang menentang "Vila Petali", sedangkan "pemerintah" melingkupi Kepala Desa Jatiluwih periode tahun 2003—2011 bersama-sama dengan jajarannya serta masyarakat yang mendukung keberadaan "Vila Petali". Pemilik vila dimasukkan ke dalam "pemerintah" karena kepentingan pemilik sebagai pengusaha dilindungi oleh "pemerintah". Dalam kaitan ini Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Provinsi Bali, serta pemerintah di atasnya juga dimasukkan dalam "pemerintah". Oleh karena itu, untuk selanjutnya, pemakaian kata "masyarakat" dan "pemerintah" berarti sudah melingkupi batasan di atas.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa hegemoni pemerintah dan perlawanan masyarakat dalam pembangunan "Vila Petali" terjadi karena adanya

konflik kepentingan antara masyarakat Desa Wisata Jatiluwih di satu pihak dengan pemerintah yang membela pengusaha di pihak lain. Pengembangan Desa Wisata di Desa Jatiluwih juga menimbulkan dampak, antara lain dilirikinya tanah-tanah untuk membangun fasilitas pendukung desa wisata. Dalam hal ini tidak dapat disangkal, ternyata tempat yang tinggi dan merupakan hutan serta berada pada radius kesucian pura juga dilirik oleh pengusaha. Dengan dibantu oleh aparat desa serta masyarakat setempat yang berubah profesi sebagai *makelar* atau *calo* tanah dadakan sehingga tanah yang seharusnya dilindungi oleh petani ternyata berhasil dikuasai oleh pengusaha. Setelah dikuasai, dibangunlah vila pada tanah tersebut. Keberhasilan pembangunan "Vila Petali" di tengah hutan yang berada pada radius kawasan suci menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan yang saling berbeda di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Dilihat dari kepentingan yang ada dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, kepentingan masyarakat didukung oleh elite desa dan elite luar desa dari Kabupaten Tabanan murni untuk mempertahankan wilayahnya agar terhindar dari dampak negatif akibat pariwisata. Namun kepentingan pemerintah menyatu dengan kepentingan pengusaha pariwisata, yang lebih banyak bersifat ekonomi kapitalistik. Sehubungan dengan hal ini, menurut Sirtha (2001:4), bentuk-bentuk perlawanan masyarakat lokal terhadap pembangunan industri pariwisata yang tidak memperhatikan lingkungan dan nilai budaya masyarakat, yakni (1) pembatalan pembangunan proyek wisata yang mengganggu kelestarian lingkungan; (2) pengalihan pengelolaan kawasan wisata dari suatu lembaga formal kepada *desa adat*;

dan (3) kesepakatan *desa adat* dengan industri pariwisata yang saling menguntungkan dalam mengelola aset potensi kepariwisataan. Konflik kepentingan dan perlawanan masyarakat dalam pembangunan "Vila Petali" disajikan pada Tabel 5.9 berikut ini.

Tabel 5.9  
Konflik Kepentingan yang Menyebabkan Terjadinya Hegemoni Pemerintah  
dan Perlawanan Masyarakat dalam Pembangunan "Vila Petali"

	Pihak yang Konflik	
	Masyarakat Desa Wisata Jatiluwih	Pemerintah
Sumber/Alasan Konflik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan kesucian pura sesuai <i>Bhisama</i>.</li> <li>2. Melanggar <i>Trihita Karana</i>.</li> <li>3. Bertentangan dengan <i>Trimandala</i>.</li> <li>4. Melindungi sumber daya alam dan lingkungan yang perlu dilestarikan.</li> </ol>	Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih perlu diikuti dengan pembangunan fasilitas pendukungnya, di samping untuk kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
Pendapat mengenai Alasan Lawan Konflik	Pembangunan fasilitas pendukung desa wisata diperlukan, tetapi tetap harus menghormati <i>Trihita Karana</i> serta hal-hal lain terkait agar pura tidak <i>leteh</i> .	Pembelian tanah sudah sah, dan pada waktu proses jual beli aparat desa sudah mengetahui.
Bentuk Tindakan terhadap Lawan Konflik	Perlawanan terhadap pemerintah dan pengusaha "Vila Petali".	Hegemoni terhadap masyarakat.
Pendukung atau yang Didukung	Elite luar desa, terutama yang tinggal di Kabupaten Tabanan.	Pengusaha "Vila Petali" dan pemerintah.

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2008

Pada Tabel 5.9 di atas terlihat adanya perbedaan kepentingan dari ketiga *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, yaitu masyarakat (dimensi budaya), pengusaha (dimensi ekonomi), dan pemerintah

(dimensi politik). Dalam penelitian ini yang ditekankan adalah konflik kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat (*pawongan*). Konflik kepentingan sebenarnya terjadi antara masyarakat dengan pengusaha, tetapi karena apa yang menjadi keinginan pengusaha "Vila Petali" difasilitasi oleh pemerintah akibat kekuasaan politik yang dimilikinya, maka pemerintah ikut terlibat dalam konflik kepentingan. Seharusnya pemerintah membela kepentingan masyarakat, tetapi terjadi sebaliknya sehingga perlawanan yang timbul adalah perlawanan masyarakat terhadap pemerintah-pengusaha "Vila Petali".

Fenomena di atas sejalan dengan pendapat Bagus (2004:262) yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata yang bersifat [desa wisata] memerlukan tanah. Lebih lanjut, menurut Bagus, tanah di Bali memiliki posisi sentral terkait dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, seperti: adat, agama, dan kekerabatan. Hubungan yang rumit tersebut dalam kenyataannya tidak sedikit menimbulkan gangguan berupa konflik, ketegangan antarkeluarga, keluarga dengan desa, keluarga dengan pemerintah, dan sudah tentu melibatkan pengusaha. Untuk yang terakhir ini mendapatkan dukungan dari pemerintah sehingga konflik tersebut tidak mudah dipecahkan, dan bahkan menimbulkan ketegangan serta konfrontasi, di samping pengorbanan berupa tenaga, dana, dan waktu.

Mengingat lokasi tempat dibangunnya "Vila Petali" berada pada area radius kesucian Pura Luhur Petali, maka permasalahan yang timbul juga terkait dengan adat dan agama. Di samping itu, karena pembangunan "Vila Petali" berada di tengah hutan, dalam hal ini hutan sebagai tempat penyerapan air tanah, maka pembangunan

tersebut mempengaruhi ketersediaan air tanah. Jika ketersediaan air tanah terganggu, maka dapat mengancam sawah-sawah, ternak-ternak, serta semua kehidupan yang mengandalkan sumber air dari hutan di Desa Wisata Jatiluwih.

Meskipun pemerintah pusat dengan cirinya yang sentralistik dan *top down* mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan fasilitas-fasilitas kepariwisataan dalam rangka pengembangan pariwisata, selayaknya kebijakan tersebut diwaspadai. Apalagi Provinsi Bali sudah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya dan Perda Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, yang kemudian diganti dengan Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Pembangunan vila yang berada di tengah-tengah hutan jelas-jelas bertentangan dengan kedua Perda tersebut.

Dari sisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, pembangunan "Vila Petali" yang berada di tengah hutan sebelah utara Pura Luhur Petali, yakni merupakan bagian dari kawasan hutan yang mendapatkan perlindungan. Sebagai kawasan hutan berfungsi memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya ataupun dibawahnya, di samping sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Selanjutnya, dari sisi Perda tentang Pariwisata Budaya, penyelenggaraan pariwisata budaya dilaksanakan berdasarkan asas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, percaya pada diri sendiri dan perikehidupan keseimbangan, keserasian, serta keselarasan yang berpedoman pada falsafah *Trihita Karana*. Pelanggaran berupa pembangunan vila di

tengah hutan dari sisi *Trihita Karana* dapat mengganggu keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungannya (*palemahan*) sehingga akhirnya akan merugikan manusia, mengingat alam/lingkungan tidak bisa dikuasai.

Pada kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2005, masyarakat terus melakukan perlawanan, meskipun terkadang terdengar nyaring dan terkadang sayup-sayup. Namun, bara api tetap menyala, menginginkan "Vila Petali" dibongkar [meskipun sampai sekarang belum dibongkar]. Perlawanan yang dilakukan karena (1) tempat dibangunnya vila berada di tengah hutan sehingga dapat mengganggu kelestarian hutan sebagai sumber air; (2) tempat dibangunnya vila tersebut berada pada kawasan suci, apalagi di bawah bangunan vila terdapat *Beji Pura Bujangga*, di samping dekat dengan Pura Luhur Petali; (3) pembangunan vila tersebut tidak memiliki izin. Atas dasar itulah masyarakat setempat melakukan perlawanan, dengan dorongan utama melindungi pura-pura di desa setempat agar tidak *leteh*. Apalagi masyarakat setempat meyakini bahwa hutan merupakan suatu tempat yang suci sehingga apa pun akan mereka lakukan untuk mempertahankan kesucian wilayah pura, termasuk kesucian hutan.

Terkait dengan adanya keinginan untuk membongkar vila tersebut, sebagian besar masyarakat yang menginginkan kawasan sekitar pura *Dang Kahyangan* tidak *leteh* mendukung pembongkaran vila tersebut. Dalam hal ini, salah satu masyarakat yang mendukung pembongkaran tersebut, Nyoman Utama (49 tahun) sebagai salah satu pemuka masyarakat dan mantan Pengurus Badan Pertimbangan Desa (BPD) Desa Jatiluwih yang diwawancarai tanggal 24 Juni 2008 menyatakan sebagai berikut.

*”Masyarakat deriki sampun keweh pisan minabdabin sane nuenang vilane sane megenah ring utare Pura Luhur Petali. Sane pinih ageng dados unteng pikayunan masyarakat iriki tuah asiki, mangda vilane punika kebongkar, sawireh ngerauhang leteh tur nenten wenang wenten jadma sekadi lanang istri sane sampun merabian megenah ring tengahing wana sane kesuciang, tur ngungkulin beji pura iriki.”*

Ungkapan di atas merupakan cerminan kuatnya pemahaman masyarakat setempat terhadap ideologi *Trihita Karana*, sehingga pura-pura yang ada di sekitar desa setempat, terlebih-lebih Pura Luhur Petali sebagai Pura *Dang Kahyangan*, betul-betul dijaga kesuciannya. Adapun vila yang berlokasi di tengah hutan dan dikenal sebagai ”Vila Petali”, serta banyak menuai protes dari masyarakat terkait kesucian Pura Luhur Petali ditunjukkan oleh Gambar 5.9 berikut ini.



Gambar 5.9

Hutan Lokasi ”Vila Petali” di Desa Wisata Jatiluwih

Dokumen: Prasiasa Tahun 2008

Keterangan: Gambar diambil dari sebelah timur Pura Rsi Bujangga.  
Tanda panah menunjukkan lokasi ”Vila Petali”.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberatan masyarakat terhadap pembangunan di tengah hutan [seperti pembangunan "Vila Petali"] dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek religius, dalam hal ini terkait dengan matra *parhyangan*; dan aspek duniawi terkait dengan matra *palemahan*. Dari sisi matra *palemahan*, jika dikaitkan dengan konsep politik lingkungan (*political ecology*), Bryant et al. (1993) menyatakan bahwa pengaruh perubahan lingkungan jarang yang netral sehingga banyak masyarakat menderita akibat ketidaksamaan sosio-ekonomik.

Untuk memberikan kilas balik tentang konflik dalam pembangunan "Vila Petali", peneliti melakukan penelusuran melalui dua cara. (1) Secara internal, yang meliputi (a) penelusuran dari atas, dimaksudkan sebagai upaya peneliti untuk menemukan informasi terkait dengan keberadaan bangunan "Vila Petali" dengan cara mencari informasi langsung kepada aparat pemerintahan, aparat *Desa Adat* Jatiluwih, serta dari agamawan desa setempat; (b) penelusuran dari bawah, yaitu dengan cara mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat –termasuk elite masyarakat desa– guna mencari informasi terkait pembangunan vila tersebut. (2) Secara eksternal, yang meliputi penelusuran terhadap berita-berita di media massa, dalam hal ini penelusuran untuk mencari berita di koran lokal *Bali Post*.

Hasilnya, secara internal, khususnya pada penelusuran dari atas, hampir dapat dikatakan peneliti tidak mendapatkan informasi apa-apa, dan walaupun ada hanyalah informasi lisan yang kurang jelas. Dalam hal ini terkesan ada upaya menutup-nutupi permasalahan yang timbul terkait pembangunan "Vila Petali". Namun, pada saat melakukan penelusuran dari bawah, peneliti banyak mendapatkan informasi dari

masyarakat, utamanya dari elite desa setempat yang memang menentang keberadaan "Vila Petali". Informasi yang diperoleh, baik secara lisan maupun didukung oleh dokumen berupa surat-surat yang terkait pembangunan vila tersebut, kasus "rumah contoh" serta surat-surat terkait kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah. Dalam kaitan ini, secara eksternal, peneliti mendapatkan guntingan berita dari koran lokal *Bali Post*.

Adapun pokok-pokok terpenting isi masing-masing dokumen yang terkait dengan pembangunan "Vila Petali" sebagai berikut.

(1) Pada tanggal 14 Januari 2002 I Made Sumerjaya selaku Kepala Desa Jatiluwih mengeluarkan surat Nomor 660.1/13/DJ perihal pemberitahuan kepada Wawan Setiawan (selaku pengusaha "Vila Petali") agar mengurus surat izin bangunan sesuai peruntukan dan menghentikan pembangunan sebelum surat izin selesai.

(2) Karena Camat Penebel menerima tembusan surat sesuai point (1), maka Camat Penebel I Nyoman Gede Gunawan, S.Sos. mengirim surat kepada Bupati Tabanan dengan Nomor 300/068/Trantib tanggal 22 Januari 2002 perihal pemberitahuan kepada Bupati Tabanan bahwa bangunan "Vila Petali" itu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di samping berpengaruh kepada kesucian pura serta kemungkinan besar dapat merusak hutan penyangga yang mengakibatkan kerugian bagi orang banyak.

(3) Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama, B.A. mengirim surat kepada Wawan Setiawan (pengusaha "Vila Petali"). Surat Bupati Tabanan Nomor 593.3/440/T.Pem tanggal 8 Februari 2002, yang isinya "Vila Petali" merupakan suatu pelanggaran,

karena belum dilandasi dengan Rekomendasi Prinsip Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan serta lokasi bangunan berdekatan dengan Pura Luhur Petali dan Pura Rsi Bujangga.

(4) Tanggal 2 Desember 2002 keluar surat dari Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama, S.Sos. kepada Wawan Setiawan (pengusaha "Vila Petali"), Nomor 300/1088/KBL. Trantib berupa PERINGATAN I (Pertama). Intinya agar pemilik vila dengan kesadaran sendiri untuk membongkar bangunan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan.

(5) Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Nomor 172/1773/DPRD perihal Rekomendasi yang isinya agar Bupati Tabanan menindak tegas pemilik vila.

(6) Tanggal 19 Desember 2002 keluar surat dari Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama, S.Sos. kepada Wawan Setiawan (pengusaha "Vila Petali"), Nomor 300/1309/KBL. Trantib berupa PERINGATAN II (Kedua). Intinya diperintahkan kepada pemilik vila agar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung dari sejak surat diterima, bangunan tersebut sudah dibongkar, dan apabila pemilik tidak mengindahkan maka pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.

(7) Tanggal 31 Desember 2002 keluar surat dari Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama, S.Sos. kepada Wawan Setiawan (pengusaha "Vila Petali"), Nomor 300/1376/KBL. Trantib berupa PERINGATAN III (Ketiga). Intinya sekali lagi diperingatkan agar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat diterima agar membongkar

bangunan tersebut dan apabila tetap tidak mengindahkan, maka pembongkaran akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Meskipun perlawanan masyarakat dari tahun 2001 hingga keluarnya Surat Peringatan III dari Bupati Tabanan Nomor 300/1376/KBL.Trantib belum berhasil, tetapi masyarakat tidak pernah menyerah. Di sela-sela sunyi senyapnya perlawanan masyarakat untuk menentang dan menuntut agar "Vila Petali" dibongkar, keluarlah surat dari *Bendesa Desa Adat Jatiluwih I Wayan Sukabuana* dengan Nomor 134/DAJ/XI/04 tanggal 26 November 2004. I Wayan Sukabuana merupakan *Bendesa Desa Adat Jatiluwih* periode tahun 2003–2007.

Surat I Wayan Sukabuana selaku *Bendesa Desa Adat Jatiluwih* ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Tabanan. Latar belakang surat itu dibuat karena ada kecurigaan dari yang bersangkutan terhadap Dinas Kehutanan Tabanan, kalau-kalau Wawan Setiawan (Pengusaha "Vila Petali") mendapat rekomendasi dalam membangun vila di tengah hutan, yang banyak dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Wisata Jatiluwih. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tabanan Ir. IKS. Harisudana, M.P. melalui suratnya Nomor 522/509/DISHUT tanggal 23 Desember 2005 (sebagai jawaban atas surat *Bendesa Desa Adat Jatiluwih* Nomor 134/DAJ/XI/04 tanggal 26 November 2004) menyatakan penjelasan bahwa belum pernah memberikan rekomendasi apa pun terhadap pemanfaatan di sekitar situs/kawasan suci Pura Luhur Petali, kecuali menyangkut pembangunan di bidang kehutanan.

Dengan terus munculnya pihak-pihak yang berjuang untuk melawan pembangunan "Vila Petali" di kawasan suci Pura Luhur Petali, khususnya yang dimotori oleh elite desa, yakni menunjukkan bahwa hegemoni yang terjadi tidak mencapai seluruh lapisan masyarakat. Hal ini karena ada upaya untuk mempertentangkan terus substansi dari konflik kepentingan yang timbul pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Fenomena ini menunjukkan keterpecahan masyarakat dalam melakukan kontra-hegemoni.

Dalam posisi negara sebagai penghegemoni, sebenarnya negara menurut Hegel (Budiman, 1996:5) menjadi agen sejarah untuk membantu manusia yang sekarang berproses menjadi manusia yang sempurna di kemudian hari. Keinginan negara adalah keinginan umum untuk kebaikan semua orang. Namun, apa yang dikemukakan Hegel tersebut selalu dipertentangkan —dalam kaitan pariwisata dapat menyejahterakan masyarakat serta mempertahankan budaya dan adat— sehingga ada sekelompok masyarakat yang terhegemoni dan ada juga sekelompok masyarakat yang tidak terhegemoni. Hal ini sesuai dengan kebaruan pemikiran Gramsci (Jackson, 1992) bahwa hegemoni tidak pernah secara utuh dicapai dalam masyarakat dan hegemoni terus dipertentangkan.

Walaupun mendapatkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali dari Bupati Tabanan (Surat Bupati Tabanan Nomor 300/1088/KBL.Trantib, Nomor 300/1309/KBL.Trantib, dan Nomor 300/1376/KBL/Trantib), rupanya pengusaha "Vila Petali" Wawan Setiawan dengan dukungan aparat Desa Jatiluwih dan intelektual tradisional (rohaniwan Pura Luhur Petali dan *Bendesa Desa Adat*

Jatiluwi I Nyoman Murtika dan Wayan Yasa) terus melanjutkan pembangunannya. Berlanjutnya pembangunan vila tersebut, di samping sebagai cermin *life service* pemerintah terhadap tindakan berupa pengeluaran peringatan-peringatan, juga sebagai cermin kuatnya hegemoni pemerintah sekaligus merupakan pengingkaran janji Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama yang menyatakan akan membongkar vila tersebut pada Juni 2002 (Bali Post, 17 Mei 2002). Padahal eksekusi vila tersebut sudah mendapatkan dukungan dari rohaniwan (intelektual tradisional) di sekitar Pura Luhur Petali, seperti: dari *Pengemong* Pura Manik Selaka, *Pengemong* Pura Rsi, dan dari *Paruman Saba Desa Pakraman* se-Kecamatan Penebel. Namun demikian, vila tersebut masih berdiri dengan kokohnya. Adapun vila tersebut seperti Gambar 5.10 berikut ini.



Gambar 5.10

”Vila Petali” (Tampak Samping)

Dokumen: Prasiasa Tahun 2008

Vila Petali setiap harinya dihuni oleh dua orang, merupakan suami istri, dan bertugas menjaga, merawat, serta mengoperasikan vila bila ada yang menginap. Terkait dengan keberadaan vila tersebut, menurut salah seorang pegawainya mengatakan sebagai berikut "saya senang tinggal di vila karena dapat hidup tenang, dan bisa menikmati keindahan Kabupaten Tabanan dari atas vila".

Dalam pembangunan "Vila Petali", konflik kepentingan dan hegemoni adalah masalah kepemimpinan yang tidak memihak kepada masyarakat, yang dampaknya tercermin pada hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Sesuai dengan penelitian ini, kepemimpinan di Provinsi Bali yang perlu digarisbawahi adalah masa pemerintahan sejak Orde Baru, selama masa kepemimpinan Gubernur Bali Ida Bagus Oka (1988–1998), dan Dewa Made Beratha (1998–2008). Dalam hal ini Ida Bagus Oka terkait dengan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat desa setempat dan Dewa Made Beratha terkait tidak terselesaikannya kasus "Vila Petali" ini yang sekarang menjadi konflik.

Perlawanan masyarakat terhadap keberadaan "Vila Petali" terus dilakukan oleh elite desa dan didukung oleh elite luar desa dari Kabupaten Tabanan. Perlawanan yang dilakukan berorientasi kepada terciptanya produk yang berupa peraturan untuk mengatur pembangunan berbagai fasilitas yang kemungkinan akan berkembang dengan keberadaan Desa Wisata Jatiluwih sebagai sasaran antara. Dalam hal ini sasaran akhirnya adalah "Vila Petali" ditertibkan karena tidak sesuai dengan Perda tentang Pariwisata Budaya dan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali serta melanggar *Bhisama* Kesucian Pura.

Sebagai sasaran antara, perjuangan elite desa beserta elit luar desa boleh dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dengan keluarnya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih, ditetapkan oleh Pejabat Bupati Tabanan Dewa Komang Adhi pada tanggal 16 Mei 2005. Dalam hal ini RDTR tersebut berlaku selama sepuluh tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2014 (Bab III, Pasal 8 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005).

Terkait dengan RDTR tersebut di atas, maka satu kejanggalan terjadi. Bali Membangun 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, RDTR Kawasan Pelestarian Budaya Jatiluwih di Kabupaten Tabanan disusun pada tahun 2002 dan berlaku mulai tahun 2003 hingga tahun 2013. Kondisi ini merupakan cermin adanya usaha untuk mempermainkan berlakunya sebuah peraturan, yakni hanya untuk melindungi berbagai kepentingan yang hadir dari sebuah kekuasaan. Di samping itu, kondisi ini juga merupakan cerminan betapa tidak sinkronnya hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam era otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 1999.

Munculnya RDTR Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005 merupakan usaha pemerintah untuk mengambil hati masyarakat setempat beserta elite desa serta elite luar desa yang seakan-akan membela kepentingan masyarakat desa setempat. Namun sejatinya, keluarnya RDTR tersebut tidak lebih dari adanya usaha untuk mengulur-ulur waktu terhadap keberadaan "Vila Petali". Oleh karena hingga kini (tiga tahun sejak

pemberlakuan RDTR tersebut) belum ada implementasi yang jelas dari RDTR tersebut, khususnya terkait dengan bangunan di sekitar kawasan suci serta bangunan lainnya yang melanggar Perda tentang RDTR.

Mungutip Baudrillard yang mengacu pada pandangan Bourdieu (dalam Dwipayana, 2004:53-82) menyatakan bahwa sesungguhnya *desa adat* berada di tengah-tengah kekuasaan (*the field of power*). Medan kekuasaan tersebut tercipta dalam serangkaian pertarungan kekuasaan (*power game*), yang melibatkan berbagai macam aktor dan struktur, yakni dari tingkat lokal hingga global. Pertarungan kekuasaan itu mengambil berbagai bentuk, yakni dari yang terbuka (vulgar) sampai bentuk yang tersembunyi (laten). Dalam bentuknya yang terbuka, pertarungan kekuasaan itu berupa konflik yang terjadi pada teritorial *desa adat*, dengan melibatkan tidak saja aktor-aktor domestik, tetapi juga entitas politik lokal. Pertarungan kekuasaan yang tersembunyi dapat dibaca dari adanya pertarungan diskursif dalam berbagai tema, mulai dari soal umat beragama selain Hindu sampai pada tema-tema pembangunan yang bersifat global.

Dalam hal ini Dwipayana (2000:105-132) berpandangan bahwa *desa adat* adalah *kalangan* bagi konflik kuasa dari dua ranah. *Pertama*, konflik di lingkup *desa adat*, yang meliputi konflik antara individu versus *desa adat*, seperti ditunjukkan oleh kasus *kesepekan*, pertarungan antar *dadia*. *Kedua*, konflik di *desa adat* yang melibatkan kekuatan eksternal, seperti pemerintah, investor, termasuk konflik akibat persaingan antarpartai politik atau yang paling mutakhir adalah kompetisi dalam pemilihan wakil rakyat dan presiden.

Sejalan dengan Dwipayana, Desa Jatiluwih dan *Desa Adat* Jatiluwih sendiri menjadi kancah dan tempat kekuasaan sehingga menjadi tempat pertarungan kuasa, aktor, dan struktur. Pertarungan kekuasaan tersebut mengambil bentuk konflik kepentingan (terbuka) dan hegemoni (tersembunyi). Dalam konflik yang terjadi tidak saja melibatkan antara individu dengan *desa adat*, tetapi juga melibatkan pihak eksternal, seperti negara atau dalam hal ini dengan pemerintah (Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan Aparat Desa Jatiluwih), pengusaha (Wawan Setiawan), dan elite luar desa dari Kabupaten Tabanan yang menentang keberadaan "Vila Petali". Elite luar desa inilah yang memfasilitasi perjuangan elite desa dan kelompok masyarakat yang menentang keberadaan "Vila Petali". Elite luar desa dari Kabupaten Tabanan ini menjadi tempat menyampaikan keluhan karena masyarakat sudah mengalami kebuntuan apabila berurusan dengan lembaga formal dan nonformal yang ada di desa. Dengan adanya bantuan elite luar desa, terutama yang berasal dari Kabupaten Tabanan, membuat perjuangan masyarakat untuk menegakkan kesucian wilayah pura menjadi semakin berkembang dan semakin 'nyaring' menyuarakan keinginan masyarakat setempat yang tidak rela kesucian puranya terganggu.

**BAB VI**  
**KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN**  
**PARIWISATA DI DESA WISATA JATILUWIH**

Pengembangan pariwisata dengan menjadikan Desa Jatiluwih sebagai Desa Wisata, diarahkan pada terciptanya interaksi setengah langsung (interaksi antara wisatawan dengan penduduk setempat dengan kegiatan berbentuk *one day trip*). Bentuk kegiatan *one day trip* berupa makan dan aktivitas bersama antara penduduk setempat dengan wisatawan, kemudian wisatawan kembali ke akomodasinya. Pada awal perencanaan pengembangannya, pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih diarahkan pada suatu tipe terbuka (*spontaneous*) sehingga tumbuh menyatunya antara wilayah desa dengan struktur kehidupan masyarakat setempat.

Dalam kerangka pembangunan pariwisata yang mengimplementasikan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*), dalam hal ini Pitana (1999:75) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat setempat pada setiap tahap pengembangan kepariwisataan di suatu Destinasi Pariwisata merupakan syarat utama. Dengan demikian, kunci utama pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah keseimbangan dan keharmonisan antara lingkungan hidup, sumber daya, dan kepuasan wisatawan yang diciptakan oleh kemampuan masyarakat itu sendiri sehingga ketiga faktor tersebut akan menjadi prioritas untuk keberlanjutan sistem sosial, budaya, dan ekonomi.

Keterlibatan masyarakat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, menurut Gede Sweden (57 tahun), yaitu pada wawancara tanggal 25 Juni 2008 adalah sebagai berikut.

”Pada awalnya kami sebagai warga masyarakat diundang untuk menghadiri pertemuan di Kantor Kepala Desa (lokasinya di tempat *Café* Jatiluwih sekarang). Pada pertemuan tersebut kami semacam diharuskan untuk menerima pengembangan pariwisata di desa kami. Dengan segala alasan, pokoknya pariwisata itu baik, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa di sini, dan lain-lain lagi.”

Apa yang dituturkan oleh Gede Sweden (57 tahun) diperkuat oleh I Wayan Sukabuana (46 tahun) mantan *Bendesa Adat* Jatiluwih. Menurut I Wayan Sukabuana, keterlibatan masyarakat pada tahap awal perencanaan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, khususnya pada rapat-rapat yang diadakan lebih kepada mendengarkan ceramah daripada menyuarakan apa yang menjadi keinginan masyarakat setempat. Dengan demikian, prinsip *bottom-up* yang menjadi ciri pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tidak dapat diwujudkan. Fenomena ini menunjukkan suatu bentuk praktik kekuasaan yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan terhadap masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, dengan mempergunakan pengetahuan sebagai alat untuk mencapai kepentingan. Untuk mencapai kepentingannya, pemilik kekuasaan mempergunakan diskursus yang seakan-akan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, senyatanya diskursus tersebut berisi kepentingan dari pemilik kekuasaan.

Menurut Sanapiah (dalam Slamet, 1993:34) bila program-program pembangunan dikonstruksikan dari atas akibatnya akan menyuburkan inersia.

Artinya, masyarakat pasif, menunggu perintah, mengharapkan belas kasihan, tidak mobil, dan tidak dinamik. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (yang merupakan kebalikan dari pembangunan konvensional yang bersifat sentralistik dan *top-down*), menurut Korten (dalam Pujaastawa dkk., 2005:30) pembangunan dengan paradigma yang dibalik ini menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai tahap pembangunan sehingga pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya paling dipengaruhi oleh pembangunan tersebut.

Menurut Korten (1987), konsep pembangunan dengan paradigma lama hampir secara total mengalami kegagalan, yaitu karena (1) struktur sosial desa terstrata diabaikan perencanaan program, (2) program dan sasaran diformulasikan secara sentral, (3) implementasi dilaksanakan melalui struktur birokrasi yang konvensional dan sedikit sekali memperhatikan kemampuan masyarakat, (4) sedikit sekali usaha yang dilakukan untuk memandirikan masyarakat, (5) kurang memperhatikan sumber daya, dan (6) amat kecil perhatian yang diberikan pada saat pengendalian dan peningkatan taraf hidup orang miskin.

Berangkat dari kegagalan-kegagalan di atas, dan dampak negatif terhadap masyarakat itu sendiri, maka perencanaan dari atas ke bawah sudah ditinggalkan dan digantikan dengan pembangunan paradigma baru yang dinamakan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*). Dalam model perencanaan dari bawah ke atas, partisipasi rakyat bukan saja penting, tetapi amat penting (Korten, 1990; Slamet, 1993; FT UGM, 1992).

Terkait dengan paradigma baru yang lebih memberikan peran kepada masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berdaulat, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (1992:18-19) mengajukan konsep pendekatan partisipasi dalam pengembangan desa wisata. *Pertama*, masyarakat adalah orang-orang bijak, yakni dengan pengalaman yang diwarisi ratusan tahun, mengetahui dengan baik sumber daya yang ada di wilayahnya. Mereka mengetahui dengan baik sifat-sifat alam di daerahnya, perilaku mereka umumnya terbentuk sebagai adaptasi dari lingkungan alamnya sehingga mereka adalah *host* (tuan rumah) yang aktif dan bukan objek.

*Kedua*, pendekatan fisik dan ekonomis semata-mata tidak menjamin keberhasilan serta program pembangunan. Nilai-nilai sosial budaya merupakan hal mutlak yang harus diperhitungkan dalam setiap pembangunan. Masyarakat setempat adalah orang yang paling tahu tentang nilai sosial budaya masyarakatnya. *Ketiga*, melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal lebih menjamin bahwa program/proyek yang direncanakan benar-benar merupakan respons atas *felt-need* masyarakat setempat, kapasitas yang ada, dan lebih menjamin pula adanya komitmen masyarakat karena adanya rasa memiliki yang kuat. *Keempat*, program-program yang melibatkan masyarakat sejak dini pada berbagai tahap pembangunan (perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan) umumnya akan mampu menghasilkan program-program yang memang *compatible* dengan apa yang ada sebelumnya dan apa yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Proyek atau pun program yang *compatible* dengan situasi yang ada dalam masyarakat, biasanya mempunyai tingkat kesinambungan yang lebih

tinggi. Berdasarkan argumentasi di atas, setiap langkah keputusan perencanaan di dalam pengembangan desa wisata harus mencerminkan masyarakat adat secara aktif, yang ikut dalam proses pengambilan keputusan. Terkait dengan penelitian ini, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih juga dilakukan dalam bentuk partisipasi.

Selanjutnya, untuk memahami lebih jauh tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu diacu pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan definisi partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan (a) di dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan, (b) pelaksanaan program secara sukarela, (c) pemanfaatan hasil-hasil suatu program atau proyek, dan (d) adanya kemungkinan penolakan program atau proyek oleh masyarakat.

### **6.1 Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih**

Pengembangan pariwisata berupa desa wisata harus berpedoman pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Dalam hal ini terdapat tujuh prinsip, yakni (1) berbasis masyarakat, (2) perlindungan atas hak intelektual dan budaya lokal, (3) daya dukung, (4) promosi, (5) akuntabilitas, (6) pendidikan dan pelatihan, dan (7) pemantauan dan evaluasi (Studi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan, 2003:18-23). Ketujuh prinsip tersebut minimal diupayakan terkait dengan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Dalam kerangka mewujudkan pembangunan pariwisata

berkelanjutan (*sustainable tourism development*), Wayan Mustika (60 tahun), yang juga merupakan *Jro Mangku* Pura Dalem Desa Jatiluwih pada wawancara tanggal 26 Juni 2008 menyatakan sebagai berikut.

”Agar pengembangan pariwisata di Desa Jatiluwih ini berjalan baik, serasi dan selaras dengan kebudayaan kita di Bali, serta anak cucu kita bisa menyaksikan dan memperoleh manfaat dari pariwisata, pakai saja *Trihita Karana* sebagai pedoman.”

Ungkapan di atas menyiratkan keinginan masyarakat setempat agar pengembangan pariwisata dapat dinikmati oleh seluruh generasi, baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, dengan mempergunakan kearifan lokal *Trihita Karana* sebagai pedoman dalam pengembangan pariwisata. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konsep *Trihita Karana* memiliki banyak kesamaan dengan prinsip-prinsip dan teori Pembangunan Berkelanjutan yang terdapat pada *World Commission Environment Development* (1998). Oleh karena itu, berbagai pihak yang memiliki kepentingan pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih perlu secara konsisten menerapkan *Trihita Karana*. Dalam hal ini, matra *palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungannya) yang merupakan komponen dari *Trihita Karana* memiliki fungsi serta nilai-nilai yang mengikat berbagai pihak yang berinteraksi pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Pengembangan dengan keterlibatan (*involvement*) masyarakat atau penduduk lokal berarti turut memperhatikan kepuasan penduduk lokal. Kepuasan penduduk lokal dalam pengembangan pariwisata pada masa kini dan masa mendatang tergantung pada terjadinya transformasi lembaga-lembaga, teknologi, nilai-nilai, dan

perilaku sehingga kontekstual dengan realitas lingkungan budaya dan sosial. Menurut Korten (2002:6-8), demi kepuasan penduduk lokal, pariwisata harus ikut berperan menangani tiga kebutuhan pokok, yaitu (1) keadilan, yakni semua orang mendapat kesempatan untuk hidup layak sebagai manusia; (2) keberlanjutan, yakni harus dapat menjamin keberlanjutan manfaat alam dan ekosistem agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang; (3) ketercakupan, setiap orang perlu ditransformasikan agar menjamin bahwa setiap orang mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dan meningkatkan kualitas hidup dari aktivitas yang dilakukan.

Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih tidak bisa terlepas dari keterlibatan masyarakat, yakni dalam penelitian ini berwujud partisipasi masyarakat secara langsung atas kegiatan yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya pengembangan. Aspek partisipasi masyarakat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, yakni meliputi (1) tahap persiapan, (2) tahap perencanaan, (3) tahap operasional, (4) tahap pengembangan, dan (5) tahap pengawasan.

Menurut tipologi Pretty (1995) (dalam Mowforth dan Maunt, 2000:146), partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat dibedakan menjadi tujuh dengan karakter setiap tipe adalah sebagai berikut.

1. Partisipasi manipulatif, yakni partisipasi orang-orang yang mewakili organisasi resmi, tetapi mereka tidak terpilih dan tidak memiliki kekuasaan.
2. Partisipasi pasif, yakni partisipasi terhadap apa yang telah diputuskan oleh orang lain atau terhadap apa yang telah terjadi dan diberitahukan secara sepihak oleh

manajemen proyek tanpa mendengarkan tanggapan orang lain. Dalam hal ini informasi yang ada hanya milik ahli eksternal.

3. Partisipasi dengan konsultasi, yakni partisipasi yang diawali dengan konsultasi kepada ahli eksternal.
4. Partisipasi untuk bahan insentif, yakni partisipasi dengan menyediakan sumber-sumber, seperti sebagai tenaga kerja atau menyediakan sebidang lahan.
5. Partisipasi fungsional, yakni partisipasi dengan melibatkan ahli eksternal sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek setelah keputusan mayor dihasilkan. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat membantu ahli eksternal.
6. Partisipasi interaktif, yakni partisipasi sebagai hak, bukan hanya untuk mencapai tujuan proyek, tetapi prosesnya meliputi metodologi interdisiplin yang mencari perspektif beragam dan mempergunakan proses belajar sistematis dan terstruktur sebagai kelompok pengambil kontrol keputusan lokal dan menentukan penggunaan sumber-sumber yang tersedia.
7. Mobilisasi sendiri, yakni partisipasi dengan mengambil inisiatif sendiri.

Berdasarkan tingkatannya, keterlibatan masyarakat Desa Jatiluwih yang berbentuk partisipasi dalam pengembangan pariwisata yang berupa Desa Wisata akan diuraikan seperti berikut ini.

### **6.1.1 Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan, partisipasi masyarakat setempat dalam menyongsong kehadiran pengembangan desa wisata dilakukan dengan cara mengikuti sosialisasi.

Istilah sosialisasi lebih dikenal sebagai "ceramah" atau "pertemuan". Dalam keseharian masyarakat setempat, ceramah, atau pertemuan dipahami sebagai kegiatan berkumpul di suatu tempat, mendengarkan, dan mendapatkan minum atau makan serta jika beruntung mendapatkan uang. Pengertian itulah yang selama ini tertanam pada pikiran sebagian besar masyarakat setempat.

Berdasarkan catatan pada Buku Tamu Kantor Kepala Desa Jatiluwih, setidaknya terjadi dua puluh empat kali sosialisasi pada bidang kepariwisataan sejak Januari 1992 hingga Juli 2006 atau sejak persiapan pengembangan hingga berjalannya pengembangan desa wisata tersebut. Sosialisasi yang dilakukan pada periode tersebut berupa penyuluhan, pemantauan, pembinaan, inventarisasi, ceramah, kunjungan, penjajagan, dan tindak lanjut. Sosialisasi dilakukan dengan mengerahkan tokoh-tokoh formal dan informal untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, serta perbaikan perekonomian masyarakat Desa Jatiluwih. Dengan demikian, secara tidak langsung, masyarakat desa tersebut "harus menyetujui" pengembangan desanya sebagai sebuah desa wisata.

Pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata, berawal dari kunjungan petugas Kantor Wilayah Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Provinsi Bali (Kanwil Parpostel Bali). Kunjungan tersebut terjadi pada tanggal 11 Mei 1992, dan yang menjadi Kepala Desa Jatiluwih pada saat itu adalah I Nengah Sukra. Rombongan petugas diterima oleh Kepala Desa Jatiluwih beserta jajarannya dan masyarakat desa setempat. Pada kunjungan yang disertai dengan pengarahan itu, muncul "janji-janji"

yang akan diperoleh masyarakat desa setempat pada pengembangan desa wisata, yakni berupa (1) pelestarian adat, budaya, dan agama; (2) penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat; serta (3) peningkatan pendapatan daerah. Untuk mendukung tercapainya ”janji-janji” tersebut, masyarakat setempat diharapkan kesadarannya terlibat secara langsung dalam bentuk ”partisipasi” pada pengembangan desa wisata. Adapun sosialisasi yang pernah dilakukan di Desa Jatiluwih adalah seperti Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1  
Sosialisasi di Desa Jatiluwih

No.	Waktu Pelaksanaan	Materi Sosialisasi	Petugas
1.	11 Mei 1992	Pariwisata	Tjok Alit Dalem (Kanwil X Depparpostel Bali)
2.	24 Juni 1992	Peninjauan Wilayah Pariwisata Desa Jatiluwih	I Gusti Made Tjeteg (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan)
3.	25 September 1992	<i>Investigate Village Tourism Potential</i>	Mr. Ludwig G. Rieder
4.	12 Oktober 1992	Mencari Informasi tentang Rencana Pemugaran Rumah Penduduk dalam Rangka Desa Wisata	Kasubah Tata Usaha Diparda Kabupaten Tabanan
5.	4 Nopember 1992	Pembinaan dalam Rangka Pengembangan Daya Tarik Wisata	Tripika Kecamatan Penebel
6.	27 Januari 1993	Peninjauan Desa Wisata Jatiluwih	Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Bali (Drs. I Putu Kusuma Negara)
7.	1 September 1993	Pengecekan Lokasi Berdagang	Bagian Ekonomi Diparda Kabupaten Tabanan (I Wayan Suantika, Made Ardana)
8.	9 Agustus 1994	Pemantauan Wisata Agro	Kanwil X Depparpostel Bali
9.	10 Januari 1995	Penjajagan Potensi Pengrajin dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Jatiluwih	Kakandep Perindustrian Kabupaten Tabanan (Made Arthanegara, SH)

10.	25 Agustus 1995	Inventarisasi Data Wisata dan Potensi Alam	Tim Survey Hutan Lindung (Ir. Wayan Darmawan dkk.)
11.	6 Agustus 1997	Pemantauan Agro Wisata	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan
12.	10 Februari 1998	Rencana Paket Tour	Diparda Kabupaten Tabanan
13.	22 Agustus 1998	Pembinaan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih	Camat Penebel
14.	26 Agustus 1998	Pembinaan Daya Tarik Wisata	Diparda Kabupaten Tabanan
15.	2 Oktober 1999	Ceramah Sadar Wisata	Diparda Provinsi Bali dan Diparda Kabupaten Tabanan (Tjok. Gede Raka, SH)
16.	1 April 2000	Pemantauan Daya Tarik Wisata Jatiluwih	Tim Pemantauan Provinsi Bali dan Diparda Kabupaten Tabanan (Dra. Wirawati Bagiasih, I Made Ardana)
17.	13 Februari 2001	Kunjungan Pencarian Data untuk Dasar Usulan Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ( Drs. Ida Bagus Pangdjaya, dkk)
18.	20 April 2001	Bakti Sosial Mahasiswa Diploma IV Pariwisata, Universitas Udayana	Prof.Dr. I Wayan Ardika,M.A.
19.	21 Juli 2002	Penjajagan Desa Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia	Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan (Drs. Wayan Diasa, dkk)
20.	21 Nopember 2002	Pendataan dan Sosialisasi Zona Warisan Budaya Dunia	Tim WBD Kabupaten Tabanan
21.	3 Desember 2002	Warisan Budaya Dunia dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan (Drs. Wayan Diasa)
22.	3 September 2003	Peninjauan dan Penertiban Usaha Pariwisata	Kasubdin Pengendalian Pariwisata (Drs. I Gusti Ketut Marutha)
23.	12 Mei 2005	Tindak Lanjut Warisan Budaya Dunia	Kasi Kerjasama Bantuan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (A.A. Rai Sukarja Budianta)
24.	19 Juli 2006	Pemantauan dan Evaluasi Daya Tarik Wisata	Tim Pemantauan dan Evaluasi Bappeda Provinsi Bali

Sumber: Kantor Kepala Desa Jatiluwih Tahun 2008

Sosialisasi yang dilakukan terkait pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dengan berbagai bentuknya dilakukan dengan mempergunakan janji-janji hegemonik, yang merupakan suatu bentuk hegemoni dengan mempergunakan wacana sebagai medianya. Janji-janji hegemonik tersebut menunjukkan adanya perampasan terhadap kebebasan berkreasi dan berinovasi dalam menentukan sumber penghidupan, di samping juga merupakan kontestasi dan perebutan makna atas ruang pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Pengembangan tersebut, karena diinterpretasikan lain oleh pihak-pihak yang berkepentingan, menjadi "sarat kebutuhan tanah" untuk membangun sarana kepariwisataan. Kontestasi dan perebutan makna atas ruang ini lebih banyak dialami oleh petani pemilik tanah. Dengan berbagai macam dalih, seperti "tanah yang tidak produktif", "tanah yang kurang subur", petani dipaksa oleh pemilik kekuasaan □ melalui aparatnya di desa dan segelintir masyarakat yang berprofesi sebagai *calo* penjualan tanah □ untuk menjual tanah mereka. Penjualan tanah di Desa Jatiluwih sudah terjadi sejak tahun 1980-an. Padahal dari sisi petani, tanah dimaknai sebagai basis kekuatan budaya dan ekonomi karena merupakan warisan dari leluhur dan sebagai ladang-ladang yang produktif yang sudah mereka tanami secara turun temurun. Di samping itu, masyarakat Desa Jatiluwih pemeluk agama Hindu, memberi makna religius kepada tanah. Oleh karena tanah-tanah itu berada di sekitar Pura Luhur Petali, Pura Bujangga, Pura Rsi, dan Pura Taksu Agung. Sementara itu, pihak investor/pengusaha memandang bahwa tanah memiliki makna ekonomi sehingga pembangunan di atas tanah tersebut tidak bertentangan dan bukan merupakan

pelanggaran dan bukan merupakan pelecehan simbol-simbol kesucian agama Hindu. Cara pandang investor/pengusaha pariwisata ini justru diperkuat oleh pemerintah dengan terbitnya Surat Keputusan tentang Daya Tarik Wisata di Kabupaten Tabanan. Pemerintah juga membantu investor/pengusaha pariwisata dalam hal tidak membongkar bangunan yang ada di tengah hutan pada desa setempat, dengan segala kepentingannya. Semua hal itu merupakan suatu bentuk hegemoni pemerintah terhadap masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Menurut Kepala Desa Jatiluwih, I Nengah Sukra, pada tahap persiapan pengembangan desa tersebut sebagai Desa Wisata, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Dalam sosialisasi tersebut masyarakat diminta kesadarannya untuk berpartisipasi karena pengembangan Desa Wisata Jatiluwih adalah untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat.

Pada masa Orde Baru, cara-cara atau gaya-gaya sosialisasi seperti itu memang sudah terbiasa dilakukan untuk membujuk semua masyarakat agar mendukung dan menyetujui pembangunan yang akan dilakukan, meskipun masyarakat harus menelan "pil pahit" sebagai pihak yang dirugikan. Bagi pihak-pihak yang menolak pembangunan yang dilakukan, mereka akan dianggap sebagai "musuh" yang harus disingkirkan. Orde Baru mengharapkan adanya kesatuan pandang antara penguasa (atau yang menghegemoni) dan yang dikuasai, dalam hal ini antara pemerintah (mulai dari provinsi hingga desa atau dari gubernur hingga kepala desa) dengan masyarakat. Agar terjadi kesamaan pandangan, pengetahuan dan kekuasaan

dipergunakan untuk menghegemoni masyarakat karena semua itu merupakan proses mempengaruhi yang dilakukan secara terus menerus.

Adanya rencana pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, dalam hal ini rencana tersebut diinformasikan pada saat sosialisasi, mendorong pengusaha pariwisata membangun sarana pariwisata berupa akomodasi. Pada sisi lain, masyarakat setempat menyadari bahwa perlu adanya keharmonisan antara tanah dengan kesucian pura. Terkait dengan keharmonisan tanah dengan kesucian pura yang ada di Desa Jatiluwih, I Wayan Mendri (50 tahun) pada wawancara tanggal 24 Juni 2008 menuturkan sebagai berikut.

”Saya berharap sawah-sawah dan ladang-ladang yang ada di sekitar tempat-tempat suci (*kahyangan tiga*, *pura dang kahyangan*, dan *pura kahyangan jagat*) yang ada di desa kami bisa tetap terjaga meskipun desa kami dikembangkan menjadi desa pariwisata. *Ening* dan bersih rasanya jika areal sekitar pura hijau, menambah khusuk sembahyang. Untuk itu areal hijau di Desa Jatiluwih perlu dipertahankan.”

Harapan dan keinginan salah seorang masyarakat Desa Jatiluwih tersebut menyiratkan upaya untuk tetap mempertahankan areal hijau, tidak saja pada lokasi sekitar pura yang ada di desa setempat, juga pada seluruh areal yang berstatus jalur hijau. Hal ini, di samping untuk menjaga keharmonisan hubungan antara tempat suci dengan areal di sekitarnya (khususnya terkait kesucian pura) juga untuk mempertahankan keseimbangan ekologi, terutama terkait dengan daya dukung (*carrying capacity*), terlebih-lebih dengan adanya pembangunan sarana pariwisata berupa akomodasi. Oleh karena itu, persoalan pembangunan sarana pariwisata berupa akomodasi oleh masyarakat desa setempat lebih dimaknai sebagai persoalan

kesucian sehingga mereka terus menerus berjuang agar lokasi pembangunan sarana pariwisata yang berupa akomodasi tidak mengganggu kesucian pura. Masyarakat yang mayoritas beragama Hindu juga selalu memohon agar secara *niskala* Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan) membalas secara setimpal apa yang sudah dilakukan oleh pengusaha karena dalam membangun sarana pariwisata berupa akomodasi sudah tidak memperhatikan *Bhisama* dan melanggar kesucian pura.

Dengan mengacu pada tipologi Pretty (dalam Mowforth dan Maunt, 2000:146), partisipasi masyarakat pada tahap persiapan ini tergolong partisipasi manipulatif. Dalam hal ini digolongkan demikian karena pada tahap ini masyarakat setempat memang dilibatkan dalam sosialisasi pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Akan tetapi, masyarakat setempat tidak memiliki kekuasaan untuk menolak rencana pengembangan yang telah dipersiapkan secara *top-down* (bahkan terkesan dipaksa untuk menyetujui rencana tersebut). Fenomena ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi substansi dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat □ dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat □ belum dapat tercapai.

### **6.1.2 Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan, pengembangan Desa Wisata Jatiluwih diawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan. Tujuan dilakukannya identifikasi kebutuhan adalah untuk melihat seberapa kuat kebutuhan akan pengembangan sebuah produk, yakni dalam penelitian ini adalah Desa Wisata Jatiluwih. Setelah identifikasi kebutuhan dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kemampuan,

khususnya terhadap berbagai sumber daya yang potensial untuk diubah menjadi sumber daya yang aktual yang akan dinikmati oleh masyarakat setempat dan wisatawan.

Identifikasi kebutuhan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dilakukan oleh tenaga ahli yang berasal dari luar masyarakat setempat sehingga mereka kurang mengetahui latar belakang yang pasti tentang pengembangan pariwisata di desanya. Dengan mempergunakan tipologi Pretty (1995) partisipasi masyarakat setempat pada identifikasi kebutuhan bersifat fungsional, artinya masyarakat setempat berpartisipasi terhadap apa yang telah ditetapkan oleh tenaga ahli dari luar desa setempat yang diberi kepercayaan dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Selanjutnya, pada analisis kemampuan, masyarakat setempat hanya sebagai penerima hasil analisis yang dilakukan oleh ahli dari luar desa mereka. Hasil analisis ini digunakan untuk mendukung implementasi sebuah gagasan. Kemudian pada analisis kemampuan masyarakat setempat juga berpartisipasi secara fungsional.

Salah satu tokoh masyarakat, juga mantan Kepala Desa Jatiluwih yang tinggal di *Dusun* Gunungsari Desa, Made Sumerjaya (63 tahun), pada wawancara tanggal 31 Agustus 2008 menyatakan sebagai berikut.

”Saya kebetulan diundang rapat pada awal-awal pengembangan desa ini sebagai desa wisata. Namun, saya bersama-sama dengan masyarakat yang lain hanya *bengong-bengong* saja karena semua hal yang terkait dengan desa wisata sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan dan Kanwil X Depparpostel. Jadi, kita masyarakat di desa ini menerima saja apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah.”

Apa yang dikemukakan di atas merupakan gambaran betapa minimnya keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Fenomena ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya apa yang menjadi karakteristik pariwisata berbasis masyarakat. Menurut Nasikun (2000:26), pembangunan pariwisata berbasis masyarakat lebih memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, yakni dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, ataupun penerimaan manfaat dan keuntungan.

Tahap perencanaan merupakan kelanjutan dari gagasan yang telah mengalami identifikasi kebutuhan dan analisis kemampuan. Pada tahap perencanaan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, wujud partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat berupa (1) kesediaan mereka untuk menerima kehadiran wisatawan, (2) ketersediaan sebagian masyarakat untuk mengubah tradisi lama menuju sebuah budaya pariwisata (*touristic culture*), serta (3) adanya penyerahan lahan untuk kepentingan pembangunan sarana pariwisata. Lahan yang diserahkan tersebut berubah dari sifat pendukung potensial (*potential support*) menjadi pendukung aktual (*actual support*) terhadap pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Dalam pengembangan pariwisata yang memposisikan masyarakat sebagai subjek, seharusnya mempergunakan pendekatan *bottom up* sehingga identifikasi kebutuhan, analisis kemampuan, serta tahap perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat setempat secara dominan pada berbagai aspek aktivitas yang terkait dengan perencanaan. Hal ini karena pengembangan pariwisata tujuannya adalah revitalisasi budaya yang ada di lokasi pengembangan pariwisata.

Perencanaan pengembangan pariwisata yang melibatkan partisipasi masyarakat akan mendorong keterbukaan dalam mengambil keputusan serta memusatkan perhatian pada kepentingan-kepentingan masyarakat. Menurut Getz (1991) pendekatan seperti ini dapat mengabaikan masalah-masalah besar tentang kekuasaan sehingga menyebabkan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tidak mampu berperan aktif dalam pengambilan keputusan dari sebuah perencanaan.

Dalam hal ini perencanaan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat memposisikan pendekatan pluralistik dalam pengembangan pariwisata sehingga kekuasaan terbagi secara merata dalam masyarakat. Menurut Korten (2002), kekuasaan yang terbagi secara merata di masyarakat dalam pengembangan pariwisata merupakan cerminan "keadilan" yang dibutuhkan oleh masyarakat yang wilayah/daerahnya mengalami pengembangan sebagai daya tarik wisata.

### **6.1.3 Tahap Operasional**

Partisipasi masyarakat pada tahap operasional dari pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dapat dilihat dari dua bagian, yaitu partisipasi berbentuk fisik (*physical participation*) dan partisipasi berbentuk nonfisik (*non-physical participation*). Partisipasi berbentuk fisik dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, khususnya pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, yakni dengan menyediakan sumber daya yang wujud fisiknya dapat dilihat. Selanjutnya, partisipasi nonfisik dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat

dengan menyediakan sumber daya yang tidak berwujud, tetapi hasil dari partisipasi tersebut diperlukan dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

#### 6.1.3.1 Partisipasi berbentuk fisik

Pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, partisipasi berbentuk fisik adalah sebagai berikut.

a) Partisipasi dengan mobilisasi sendiri, artinya masyarakat dengan penuh kesadaran membangun fasilitas fisik untuk menunjang pengembangan desa wisata. Partisipasi berbentuk fisik dengan mobilitas sendiri adalah sebagai berikut.

1) Tahun 1996 masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, membangun pos retribusi di ujung barat Desa Wisata Jatiluwih yaitu di *Dusun* Kesambi dan pos retribusi di ujung timur, yaitu di *Dusun* Gunungsari Desa.

Setelah pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dilaksanakan, untuk sesegera mungkin mendapatkan pendapatan dari pariwisata, maka dibangunlah sebuah pos untuk pemungutan retribusi masuk daya tarik wisata. Pos retribusi masuk daya tarik wisata pertama yang dibangun berada di sebelah barat Desa Wisata Jatiluwih tepatnya di *Dusun* Kesambi. Pembangunan pos ini dananya berasal dari swadaya murni masyarakat desa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Enam bulan kemudian, kembali dibangun pos retribusi masuk daya tarik wisata kedua di sebelah timur Desa Jatiluwih tepatnya di *Dusun* Gunungsari. Pembangunan pos retribusi di *Dusun* Gunungsari ini mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan

sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Meskipun mendapat bantuan, masyarakat setempat juga mengeluarkan dana dalam bentuk swadaya.

Pada awal pengoperasiannya, kedua pos ini memungut retribusi masuk daya tarik wisata sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), dan untuk mobil Rp 3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah). Berdasarkan perkembangan perekonomian, mulai Desember 2005 besarnya retribusi masuk daya tarik wisata ditingkatkan. Dalam hal ini untuk mobil sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) berdasarkan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2006, dan untuk wisatawan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 31 Tahun 2005 tanggal 1 November 2006. Guna menciptakan ketenangan selama berwisata, setiap wisatawan yang membayar retribusi dimasukkan pertanggung jawaban asuransi. Pertanggung jawaban asuransi retribusi masuk daya tarik wisata bagi wisatawan bekerja sama dengan Proteksindo Bali Ins. Const. & Service dengan Nomor 001/PBA-DPS/PT/V/2000 tanggal 22 Mei 2001.

Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan retribusi masuk daya tarik wisata dikumpulkan oleh salah satu staf di Kantor Kepala Desa Jatiluwih. Pada akhir bulan, petugas tersebut menyeter kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah yang ada di Kabupaten Tabanan. Selanjutnya dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tabanan, uang hasil pemungutan retribusi tersebut dibagi, yakni untuk Kabupaten Tabanan, Desa Dinas Jatiluwih, *Desa Adat* Jatiluwih, *Desa Adat* Gunungsari, dan untuk petugas pemungut retribusi masuk daya tarik wisata.

Sumbangan retribusi masuk daya tarik wisata terhadap pendapatan daerah seperti Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2  
Besarnya Sumbangan Retribusi Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih  
terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2003–2007

No.	Tahun	Retribusi Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih (Rp)
1.	2003	15.490.600,00
2.	2004	20.468.400,00
3.	2005	26.160.600,00
4.	2006	63.660.560,00
5.	2007	73.438.000,00
	J u m l a h	199.218.160,00

Sumber: Kantor Kepala Desa Jatiluwih Tahun 2008

Dari Tabel 6.2 di atas terlihat bahwa sumbangan retribusi Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tabanan selama lima tahun (2003–2007) terus mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2006. Selama lima tahun tersebut, retribusi masuk Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih telah menyumbang sebesar Rp 199.218.160,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tabanan.

Dalam hal ini, terkait dengan hasil pembagian retribusi masuk Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih, bendahara *Desa Adat* Jatiluwih mengatakan bahwa ada ketidaktransparanan dalam pengelolaan penerimaan keuangan dari hasil retribusi masuk daya tarik wisata. Berdasarkan pengalaman, sering sekali *Desa Adat* Jatiluwih terlambat menerima pembagian pendapatan dari retribusi tersebut. Keterlambatan

yang dialami terkadang bisa terjadi sampai beberapa bulan. Selain itu, bendahara *Desa Adat* Jatiluwih juga tidak mengetahui jumlah yang pasti dari pemasukan retribusi masuk Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih. Adapun penuturan Bendahara *Desa Adat* Jatiluwih adalah sebagai berikut.

”Saya selaku Bendahara *Desa Adat* Jatiluwih tidak mengetahui secara pasti berapa pemasukan yang sesungguhnya (pemasukan keseluruhan setiap bulan untuk Pos Gunungsari dan Pos Kesambi). Saya hanya menerima sudah dalam bentuk bulat, itu pun uangnya tidak langsung seluruhnya diterima, ada saja yang ditunggakkan setiap bulannya oleh petugas pengumpul retribusi.”

Selain Pajak Pembangunan I (PB I), khususnya dari retribusi masuk Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih, desa ini juga memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tahun 2003, jumlah wajib pajak mencapai 739 orang dengan realisasi penerimaan PBB sebesar Rp 22.170.000,00 (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya, pada tahun 2005, jumlah wajib pajak mencapai 788 orang dengan realisasi penerimaan PBB sebesar Rp 23.640.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Secara makro ekonomi, jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tabanan berdasarkan harga konstan tahun 2003—2005, sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2005 mencapai Rp 384.807.740.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau urutan kedua setelah sektor pertanian. Selanjutnya, untuk Provinsi Bali PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran

berdasarkan harga konstan tahun 2001—2005 mencapai Rp 6.497.875.590.000,00 (enam triliyun empat ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pemberlakuan Otonomi Daerah pasca-Orde Baru yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membuat kewenangan kabupaten/kota semakin besar dalam mengatur rumah tangganya, termasuk mengatur pendapatan daerahnya. Hal ini semakin memperkuat harapan kabupaten/kota untuk memperbesar pendapatan daerahnya, khususnya melalui pendapatan dari Desa Wisata Jatiluwih. Hal ini berarti hegemoni terhadap masyarakat desa setempat semakin mendapat legitimasi dengan mengatasnamakan ”meningkatkan pendapatan daerah”.

2) Tahun 1995 masyarakat Desa Wisata Jatiluwih membangun sebuah *café* (kini dikenal dengan *Café* Jatiluwih) yang modal awalnya berasal dari PKK Desa Jatiluwih.

Pembangunan *Café* Jatiluwih pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, yakni merupakan usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penampungan masyarakat sebagai tenaga kerja pada sarana pariwisata yang dibangun. Di samping itu, pembangunan usaha sarana pariwisata berupa *cafe* tersebut juga merupakan upaya untuk memberikan pekerjaan secara tidak langsung kepada masyarakat setempat, yakni dengan cara membeli hasil pertanian, perkebunan, serta peternakan masyarakat

setempat, terutama hasil-hasil yang diperlukan untuk operasional *cafe*, seperti beras, sayur-sayuran, telur, daging ayam, serta buah-buahan.

Dalam rangka mempersiapkan masyarakat setempat terlibat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, pada tahun 1995 sebanyak lima orang anggota *sekaa teruna* mendapatkan pendidikan dasar perhotelan di Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata Nusa Dua selama enam bulan. Setelah menyelesaikan studinya, kelima orang anggota *sekaa teruna* tersebut kembali ke desa untuk bekerja pada *Cafe* Jatiluwih dan usaha sarana pariwisata lainnya yang ada di desa setempat. Seiring berjalannya waktu, yang bekerja pada sarana pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih (pada usaha restoran/rumah makan dan penginapan) sebagian besar adalah masyarakat dari luar desa tersebut. Namun, masyarakat yang memperoleh pendidikan dasar perhotelan sebagian besar justru tidak bekerja pada usaha sarana pariwisata yang ada di desa setempat. Dalam hal ini, mereka bahkan bekerja ke luar desa seperti ke Denpasar atau ke kecamatan lain di luar Kecamatan Penebel. Menurut anggota *sekaa teruna* yang memperoleh pendidikan dasar perhotelan, hal tersebut disebabkan oleh (1) manajemen pengelolaan usaha sarana pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih saat itu belum memadai, (2) mencari pengalaman baru, dan (3) penghargaan yang rendah terhadap pekerja dari desa setempat.

Salah seorang anggota *Sekaa Teruna* yang mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan di Balai Pendidikan Parhotelan dan Pariwisata Bali (BPLP Bali) Nusa Dua, I Nengah Suastika (35 tahun), yang saat ini berprofesi sebagai

pegawai di Kantor Kepala Desa Jatiluwih pada wawancara tanggal 23 Juli 2008 mengatakan sebagai berikut.

”Saya memang tertarik bekerja di bidang pariwisata (sebagai pelayan restoran), tetapi karena apa yang dijanjikan oleh pemilik restoran, yakni berupa gaji, tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya lebih baik berhenti bekerja sebagai pelayan restoran. Di samping itu, saya merasa tidak nyaman karena ada masyarakat yang protes dengan bekerjanya saya di restoran tersebut, akibat anaknya tidak diterima bekerja di sini. Daripada buat masalah, lebih baik berhenti bekerja.”

Ungkapan di atas menyiratkan terjadi konflik di antara masyarakat desa setempat karena semuanya ingin dapat diterima bekerja di usaha sarana pariwisata yang ada. Dalam kaitan ini, isu ketenagakerjaan memang dipergunakan pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, yakni sebagai salah satu senjata utama untuk menjaring masyarakat setempat masuk dalam perangkap industri pariwisata yang sarat dengan kepentingan kapitalis. Dari wacana ketenagakerjaan yang digulirkan, seakan-akan bukan sarana pariwisata yang ada di desa wisata membutuhkan tenaga kerja, tetapi masyarakat desa setempatlah yang butuh pekerjaan untuk hidup. Itulah sebabnya, salah satu tokoh masyarakat melalui kata hati serta idealismenya sebenarnya tidak setuju dengan keberadaan sarana pariwisata yang ada (meskipun *café* dibangun terkait pengembangan Desa Wisata Jatiluwih) karena telah menimbulkan dampak negatif, seperti pemuda desa setempat mulai mabuk-mabukan, di samping adanya praktik-praktik prostitusi di sekitar *café* yang jaraknya sangat dekat dengan Pura Dalem Desa Jatiluwih. Namun, daripada menuruti kata hati serta terdesak akan kebutuhan pekerjaan, maka anak gadisnya diberikan izin untuk bekerja.

Seorang tokoh intelektual tradisional yang semula menentang pengembangan Desa Wisata Jatiluwih melalui pembangunan sarana pariwisata, menuturkan bahwa kehadiran usaha sarana pariwisata saat ini justru sangat menguntungkan desa setempat. Hal ini karena (1) adanya sumbangan dari para pemilik usaha sarana pariwisata kepada desa setempat, (2) terserapnya penduduk lokal untuk bekerja pada usaha sarana pariwisata yang ada, dan (3) masyarakat, meskipun baru sebagian kecil, dapat menyalurkan hasil pertanian dan hasil kebunnya kepada usaha sarana pariwisata yang ada sehingga memperoleh penghasilan tambahan selain dari pertanian.

Sumbangan tersebut sebagai wujud "politik etis" atau "politik balas budi". Politik balas budi adalah politik yang dikembangkan pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia dan sempat diterapkan dalam menjajah Indonesia. Dengan memberikan sumbangan, para pemilik usaha sarana pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih sudah meminimalisasi kesalahan yang dilakukan terhadap desa setempat. Sebagai gambaran, salah satu usaha sarana pariwisata yang ada di Desa Wisata Jatiluwih adalah Restoran Waka Land Cruise, setiap bulan memberikan sumbangan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada desa setempat. Selanjutnya, sumbangan tersebut dibagi tiga, yaitu *Subak Abian Munduk Kelesih* mendapat bagian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), *Desa Adat Jatiluwih* mendapat bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan *Desa Dinas Jatiluwih* mendapat bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, *Desa Adat Gunungsari* sebagai bagian dari *Desa Dinas Jatiluwih* tidak menerima bagian

sumbangan yang diperoleh dari pemilik usaha sarana pariwisata. Hal ini oleh masyarakat *Desa Adat* Gunungsari lebih dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan.

Pemberian sumbangan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut merupakan suatu bentuk hegemoni sehingga masyarakat diharapkan dapat mengikuti apa yang menjadi keinginan pengusaha tersebut. Bahkan pasca Orde Baru atau pada era Reformasi sekarang ini hegemoni seperti itu masih terus berlangsung. Secara samar-samar, negara yang direpresentasikan sebagai pemerintah, lewat praktik-praktiknya masih mendukung pengusaha. Sebagai hegemoni, masyarakat melakukan dukungan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah meskipun tidak dapat dipungkiri masih banyak yang melakukan perlawanan dalam bentuk diam, pasrah menerima keadaan, dan akhirnya mengarah kepada masa bodoh (*apatis*). Masyarakat sebenarnya merasakan hegemoni melalui ketidakadilan yang mereka terima, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi hegemoni pemerintah.

3) I Wayan Miora alias Pan Kertiya, salah seorang warga masyarakat Desa Jatiluwih yang tinggal di *Dusun* Gunungsari Desa mendirikan usaha akomodasi yang berupa *Inn*. Letak usaha akomodasi tersebut berhadapan dengan terasering sawah yang menjadi daya tarik utama Desa Wisata Jatiluwih. Usaha akomodasi tersebut diberi nama Galang Kangin *Inn*. Pada saat penelitian ini dilakukan, Galang Kangin *Inn* memiliki sembilan kamar. Masing-masing kamar dilengkapi dengan sebuah kamar tempat tidur, almari pakaian, serta meja dan kursi. Setiap kamar dilengkapi dengan sebuah kamar mandi. Dalam hal ini, untuk tenaga kerja, dari dua orang tenaga kerja yang dipekerjakan, hanya satu orang yang berasal dari desa setempat.

b) Partisipasi untuk bahan insentif, yakni suatu bentuk partisipasi dari masyarakat setempat dengan menyediakan sumber-sumber, seperti bangunan *saka roras* yang selanjutnya dipugar menjadi "rumah contoh".

Partisipasi untuk bahan insentif yang berupa penyerahan bangunan *saka roras* untuk dipugar sebagai "rumah contoh" bukan sepenuhnya terjadi karena kesadaran untuk berpartisipasi pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Hal tersebut terjadi karena pemilik bangunan I Nengah Sukra pada saat itu sebagai Kepala Desa memiliki kepentingan. Dengan kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang dimilikinya, pada awalnya masyarakat mampu dihegemoni. Namun, seiring dengan pemikiran kritis yang dimiliki oleh masyarakat setempat, atas dasar keadilan (Korten, 2002) maka keberadaan "rumah contoh" tersebut menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat yang mengarah pada ketegangan dan konflik.

Adapun pengembangan desa wisata, dilandasi oleh dasar-dasar (1) manfaat untuk masyarakat setempat, (2) partisipasi masyarakat dengan perencanaan *bottom-up*, (3) asas percaya diri, dan (4) pemerataan kesempatan. Berdasarkan landasan dasar perencanaan tersebut, diharapkan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang mengimplementasikan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat mencapai tujuan sebagai berikut: (1) memberikan model pembangunan pariwisata yang berdampingan dan bahkan mengembangkan serta melestarikan budaya setempat, mendukung konsep pembangunan yang berkesinambungan; (2) mengakomodasi tuntutan-tuntutan situasi pariwisata berdasarkan tren terbaru, di samping memberikan alternatif lain bentuk akomodasi untuk penyegaran pada pasar hotel tradisional; (3)

memberikan kesempatan pemerataan dan kesempatan berusaha serta meningkatkan daya dukung desa dengan pranata sosial kepariwisataan dan peningkatan kualitas pengelolaan; dan (4) meningkatkan kemungkinan peningkatan produksi dari potensi yang ada dan meluaskan kemungkinan pembangunan dari potensi-potensi setempat (Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknis Desa Wisata Terpadu di Bali, 1992:3 dan 22).

Pembangunan "rumah contoh" yang merupakan proyek awal dan sebagai bagian dari pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, yaitu berawal dari kunjungan petugas dari Kanwil Parpostel Bali pada tanggal 11 Mei 1992 ke desa setempat yang diterima oleh Kepala Desa Jatiluwih I Nengah Sukra. Dalam kunjungan tersebut dibicarakan rencana pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata, termasuk perlunya akomodasi bagi wisatawan yang akan berkunjung ke desa tersebut. Sebagai tindaklanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 1992 Kasubag Tata Usaha Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, bersama-sama dengan Pimpinan Proyek Pengembangan Desa Wisata Terpadu Jatiluwih, serta petugas *survey* dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada mendatangi I Nengah Sukra untuk mencari informasi tentang rencana pemugaran rumah penduduk dalam rangka mendukung pengembangan desa wisata.

Berdasarkan pertimbangan ekonomis dan adanya kepentingan tertentu, pemilik rumah *saka roras* langsung memberikan persetujuan untuk memugar rumah miliknya (satu-satunya rumah di Desa Jatiluwih yang memiliki *saka roras*) sebagai salah satu akomodasi yang mengedepankan kekinian. Persetujuan yang diberikan tersebut tanpa melalui proses musyawarah dengan masyarakat sehingga menimbulkan polemik

berkepanjangan di masyarakat desa setempat. Polemik yang berkembang tersebut terjadi sebagai latar belakang ditunjuknya rumah I Nengah Sukra untuk dipugar, yang kemudian dijadikan "rumah contoh". Menurut masyarakat setempat, "rumah contoh" tersebut selayaknya ditempatkan pada tanah *laba* desa sehingga kedudukan rumah tersebut lebih netral dan desa bisa memanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat umum. Lokasi yang diharapkan oleh masyarakat sebagai tempat "rumah contoh" adalah pada tanah *laba* desa yang berlokasi di *Café* Jatiluwih. Selanjutnya, terkait dengan "rumah contoh", *Bendesa Adat* Jatiluwih Wayan Yasa (42 tahun) pada wawancara tanggal 24 Juni 2008 menuturkan sebagai berikut.

"Saya selaku warga masyarakat, pada saat kasus rumah contoh itu ramai dibicarakan warga desa ini, saya juga ikut bertanya-tanya, mengapa rumah bantuan itu tiba-tiba dibangun di tanah milik I Nengah Sukra. Akan lebih baik dibangun di tanah yang netral (milik desa ini) sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan desa."

Penuturan Wayan Yasa (42 tahun) tersebut diperkuat oleh penuturan Wayan Sumiata (47 tahun) dan Nyoman Utama (49 tahun), yang menyatakan bahwa adanya kepentingan-kepentingan tersembunyi I Nengah Sukra selaku pemilik bangunan *saka roras* dan tanahnya (yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Jatiluwih). Menurut I Nengah Sukra, tindakan untuk menyetujui pemugaran rumah miliknya dilakukan mengacu pada surat dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tanggal 8 Maret 1995 melalui Koordinator Peneliti Desa Wisata Terpadu Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch. Alasan pemugaran rumah I Nengah Sukra sebagai "rumah contoh" karena (1) I Nengah Sukra telah berpengalaman menerima tamu asing, (2) rumah I

Nengah Sukra tidak terpakai seluruhnya (ketersediaan lahan), (3) pola rumah I Nengah Sukra masih cukup tradisional sehingga merupakan suatu potensi tersendiri, (4) I Nengah Sukra memiliki jabatan bendesa dinas, yang dianggap suatu jabatan yang netral di tengah masyarakat dan mampu mendukung pengelolaan "rumah contoh" sebagai aset desa secara adil.

Fenomena ini sesuai dengan teori Kekuasaan/Pengetahuan Foucault (1980) yang menyebutkan bahwa kekuasaan adalah relasi-relasi yang bekerja dalam ruang dan waktu tertentu. Kekuasaan memproduksi kebenaran, dalam hal ini kebenaran berada di dalam jaringan relasi-relasi sirkuler dengan sistem kekuasaan yang memproduksi kebenaran serta menjaga kebenaran tersebut. Oleh karena itu, kebenaran tidak ada dengan sendirinya, kebenaran tidak berada di luar kekuasaan, tetapi berada dalam kekuasaan. Dengan demikian, menurut Foucault, kekuasaan adalah kebenaran.

Pemugaran yang dilakukan terhadap satu-satunya rumah yang memiliki tiang duabelas (*saka roras*) di Desa Wisata Jatiluwih tersebut meliputi penggantian atap genteng menjadi atap ilalang, meluruskan tembok, serta menambah kamar mandi yang dilengkapi WC duduk dan *bath tub*. Oleh karena dalam proses pemugaran hingga selesainya pemugaran terus menerus terjadi protes tanpa kekerasan dari masyarakat, maka oleh Kanwil Parpostel Provinsi Bali, "rumah contoh" tersebut setelah selesai dipugar diserahkan kepada Pemda Kabupaten Tabanan sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 11 Maret 1993 Nomor: -/PPP-Bali/III/1993. Selanjutnya, rumah tersebut ditetapkan menjadi milik Pemda Tingkat II Kabupaten Tabanan.

Dalam perkembangan selanjutnya, "rumah contoh" hasil pemugaran proyek pengembangan Desa Wisata Jatiluwih tersebut dipugar lagi oleh I Nengah Sukra. Pemugaran yang dilakukan oleh I Nengah Sukra berupa penggantian atap (dari atap *ilalang* menjadi atap genteng) dengan beberapa tambahan serta pengurangan pada hiasan tembok rumah. *Angkul-angkul* pada tembok *penyenger* rumah yang merupakan satu kesatuan dengan "rumah contoh" dibongkar. Pemugaran oleh I Nengah Sukra selesai tanggal 6 Februari 2007. Pemugaran oleh yang bersangkutan dilakukan karena rumah tersebut sudah diserahkan oleh Pemda Kabupaten Tabanan kepada I Nengah Sukra. Penyerahan "rumah contoh" dari Pemda Kabupaten Tabanan kepada I Nengah Sukra, hingga kini masyarakat setempat secara pasti belum mengetahuinya.

Penyerahan "rumah contoh" kepada I Nengah Sukra tersebut merupakan suatu dinamika dari kasus "rumah contoh". Oleh karena berdasarkan surat Bupati Tabanan I Ketut Sundria Nomor 556/1701/Diparda.T. tanggal 3 Juli 1993 disebutkan bahwa bangunan "rumah contoh" tersebut tetap menjadi milik Pemda Tingkat II Tabanan yang akan dipergunakan oleh Pemda sebagai tempat penginapan tamu-tamu resmi pemerintah Pemda Tingkat I Bali atau Pemda Tingkat II Tabanan tanpa dikenakan biaya penginapan. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata rencana untuk menjadikan "rumah contoh" tersebut sebagai tempat penginapan tamu-tamu Pemda Tingkat II Tabanan tidak terwujud, karena sudah diserahkan kepada I Nengah Sukra. Sehubungan dengan penyerahan "rumah contoh" dari Pemerintah Kabupaten

Tabanan kepada I Nengah Sukra (60 tahun), pada wawancara tanggal 25 Juni 2008 yang bersangkutan menyatakan sebagai berikut.

”Penyerahan rumah contoh ini kepada saya oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, menurut saya, sudah tepat karena tanah dan bangunan ini milik saya. Saya sudah menerima surat serah terima dari Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan maaf saya tidak bisa menunjukkan surat tersebut. Oleh karena rumah ini sudah diserahkan kepada saya, maka saya pugar. Pemugaran ini dilaksanakan agar bayang-bayang masa lalu, yaitu ribut-ribut masyarakat desa ini memperlmasalahkan pemugaran rumah saya sebagai rumah contoh tidak membekas, makanya saya pugar.”

Pemugaran bangunan *saka roras* dalam kaitan pemenuhan akan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dan mencerminkan akomodasi kekinian, di samping mencerminkan ketidakkonsistenan wacana-wacana yang dikembangkan pada awal pengembangan Desa Wisata Jatiluwih □khususnya pelestarian adat, budaya, dan agama□, juga mencerminkan telah terjadinya komodifikasi terhadap fisik bangunan yang bernilai budaya. Komodifikasi terhadap bangunan tradisional *saka roras* ini dimaksudkan sebagai diproduksi model bangunan yang benar-benar baru dan sesuai dengan kekinian (sebagai hasil perubahan bentuk bangunan tradisional *saka roras*). Selanjutnya, bangunan hasil perubahan bentuk dari bangunan tradisional tersebut dipasarkan, dan dapat dikonsumsi oleh wisatawan yang membutuhkan akomodasi saat berwisata ke Desa Wisata Jatiluwih.

Akibat perubahan fisik pada strukturnya, bangunan tersebut tidak lagi mencerminkan bangunan *saka roras*, tetapi sudah mengarah kepada rumah tinggal yang siap dikomersialkan. Hal ini berarti wacana-wacana pemerintah akan melestarikan adat, budaya, dan agama dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih

tidak terbukti, dan bahkan merupakan ”penodaan” terhadap budaya masyarakat setempat yang sebagian besar beragama Hindu. Selanjutnya, kondisi terakhir ”rumah contoh” seperti Gambar 6.1 berikut ini.



Gambar 6.1

Kondisi Terakhir Bangunan ”rumah contoh” *Saka Roras*  
yang Sudah Dipugar

Dokumen: Prasiasa Tahun 2008

Pemugaran dalam bentuk pembongkaran terhadap bangunan tradisional *saka roras* menjadi bangunan yang bernilai komersial untuk memenuhi keinginan (habitus) serta selera wisatawan juga merupakan bentuk-bentuk penghinaan terhadap simbol-simbol agama Hindu. Selanjutnya, pemugaran bangunan tradisional *saka roras* juga merupakan hegemoni terhadap masyarakat sebagai pendukung kebudayaan.

Sehubungan dengan pembongkaran bangunan *saka roras* miliknya, I Nengah Sukra (60 tahun) pada wawancara tanggal 20 Juli 2008 mengatakan sebagai berikut.

”Karena pembongkaran bangunan saya (bangunan *saka roras*) dijadikan sebagai ”rumah contoh” di desa ini untuk menunjang pariwisata, saya setuju saja. Juga karena bangunan ini nantinya menjadi milik saya (sesuai apa yang disampaikan Pimpinan Proyek dari Depparpostel Denpasar), maka saya menyetujui.”

Apa yang disampaikan oleh I Nengah Sukra (60 tahun) sebagai pemilik bangunan yang dipugar, lebih menekankan pada manfaat ekonomi pariwisata daripada mempertahankan bangunan yang bernilai budaya. Dalam hal ini, terkait dengan pemugaran tersebut, dalam penelitian ini terlihat bahwa pemugaran sebuah bangunan yang bernilai budaya seperti bangunan *saka roras* juga terjadi karena adanya peran perantara, yaitu intelektual organik dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Peran tersebut berupa pemberian rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap bangunan yang bernilai budaya untuk dijadikan akomodasi pariwisata. Dengan demikian, pemerintah telah mempergunakan intelektual organik sebagai perantara dalam melakukan hegemoni.

Gramsci (1979:9) dalam tulisannya yang berjudul *The Southern Question* menyatakan bahwa untuk melihat intelektual bukan dilihat dari hakikat intrinsik kegiatan intelektual itu sendiri. Intelektual dilihat dari posisi kegiatan itu dalam suatu sistem hubungan, yakni kegiatan-kegiatan ini mengambil tempatnya dalam sebuah hubungan sosial yang kompleks. Lebih lanjut menurut Gramsci, hubungan antara aspek material, yaitu perekonomian dengan budaya dan ideologi-ideologinya sebagai

suatu hubungan kompleks yang berbalasan (*reciprocal*) yang di dalamnya manusia menjadi perantara (lihat Bocoock, t.t.:103).

#### 6.1.3.2 Partisipasi berbentuk nonfisik

Keterlibatan masyarakat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih pada tahap operasional yang berbentuk nonfisik yaitu berupa dua hal. (1) Partisipasi dengan mobilitas sendiri, seperti belajar bahasa asing, belajar menari, belajar mengoperasikan gamelan (*gong*). Untuk aktivitas belajar menari dan belajar mengoperasikan gamelan, dilakukan di desa setempat dengan mempergunakan pelatih dari masyarakat setempat, di samping gamelan (*gong*) milik masyarakat setempat. Selanjutnya, untuk belajar bahasa asing (khususnya bahasa Inggris), beberapa anggota masyarakat, khususnya para pemudanya belajar bahasa Inggris di antara mereka. Namun demikian, ada juga yang belajar bahasa asing dengan cara mempraktikkan langsung kepada wisatawan yang kebetulan ada di sekitar terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih. (2) Partisipasi interaktif, seperti pengiriman lima orang pemuda asal Desa Jatiluwih untuk mengikuti pelatihan pariwisata. Pengiriman pemuda asal desa setempat untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan nilai tambah (*value added*) dan kompetensi sumber daya manusia masyarakat setempat rupanya belum menimbulkan kesadaran dan dorongan (*induced*) bagi masyarakat lain untuk meningkatkan kompetensinya (terdiri atas *skill*, *knowledge*, dan *attitude*) dalam rangka menunjang partisipasi masyarakat setempat memberikan pelayanan kepada wisatawan di Desa Wisata Jatiluwih. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh

masyarakat setempat yang terdiri atas keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan sikap/perilaku (*attitude*), masyarakat setempat tidak saja memiliki nilai perbedaan dari sisi kompetensi (komparatif), tetapi juga memiliki nilai daya saing (kompetitif).

#### **6.1.4 Tahap Pengembangan**

Setelah partisipasi pada tahap operasional yang terdiri atas partisipasi berbentuk fisik (*physical participation*) dan partisipasi berbentuk nonfisik (*non-physical participation*), maka tahap berikutnya adalah partisipasi masyarakat pada tahap pengembangan. Partisipasi pada tahap pengembangan ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk partisipasi masyarakat untuk lebih mengembangkan produk-produk wisata yang dimiliki Desa Wisata Jatiluwih, dalam hal ini tidak saja mampu beroperasi, tetapi produk-produk tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk sejenis, yakni dengan harapan mampu bersaing pada berbagai strata (lokal, regional, nasional, dan bahkan global).

Pada tahap pengembangan, partisipasi masyarakat dilakukan secara spontan. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat berupa pengelolaan usaha penginapan, usaha warung makan dan minum, usaha kerajinan perak, usaha cuci pakaian (*laundry*), dan toko-toko penjual kebutuhan sehari-hari.

Meskipun partisipasi dilakukan secara spontan, tetapi masyarakat setempat juga melakukan usaha-usaha untuk tetap mempertahankan dan melestarikan budaya lokal yang telah dimiliki sejak dahulu, yaitu budaya untuk menanam padi bali sekali dalam setahun dan pengolahan sawah dengan mempergunakan teknologi tradisional

mengimbangi mesinisasi yang sudah merajalela pada aktivitas pertanian. Upacara yang bersifat tradisional sebagai rangkaian dalam pengolahan sawah tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat untuk dilaksanakan, seperti rangkaian upacara menanam padi bali, yakni oleh masyarakat setempat dikenal dengan *pula pali metandur* padi bali *ring carik*. Upacara yang terkait dengan penanaman padi yang masih ada adalah (1) upacara *magpag toya*, yaitu upacara menjemput air ke mata air yang dilakukan oleh seluruh anggota *subak*, dilakukan pada *sasih kapat* sekitar Oktober; (2) upacara *ngusaba*, yang datangnya setiap 210 hari sekali; (3) upacara *ngerasakin*, yaitu upacara setelah sawah selesai dibajak; (4) upacara *nuasen*, yaitu upacara saat hendak menanam padi; (5) upacara *ngekabuhin*, yaitu upacara saat padi berumur 38 hari; dan (6) upacara *nganyarin*, yaitu upacara saat mulai panen.

Keberadaan salah satu kesenian tradisional yang disakralkan berupa tarian *baris memedi* yang ditarikan minimal oleh enam orang dan maksimal oleh dua belas orang, dalam hal ini sekelompok masyarakat menginginkan tarian *baris memedi* tersebut dikomersialkan. Sebagai *seni tari wali*, tarian ini hanya ditarikan pada saat ada upacara *ngaben* tingkatan *madya* dan *utama* dan para penarinya membawa *takilan* (sejenis tempat makanan yang dibuat dari tapis pohon inang/*punyan buah*), menghias dirinya di kuburan (*setra*) dengan mempergunakan alat-alat penghias berupa arang (*adeng*), kapur (*pamor*), dan bajunya dari daun pisang kering (*keraras*). Namun, jika dikomersialkan sebagai *seni tari bebali*, hiasan penarinya sama seperti *seni tari wali*, lokasi berhiasnya bukan lagi di *setra*, melainkan di sawah ladang (*tegalan*), dan penarinya tidak membawa *takilan*. Adanya keinginan untuk

mengomersialkan tarian *baris memedi* oleh sekelompok masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, diakui oleh I Nyoman Suwirka (45 tahun) yang sekaligus juga sebagai pengurus tari *baris memedi*. Pada wawancara tanggal 25 Juni 2008 yang bersangkutan menuturkan sebagai berikut.

”Memang ada beberapa orang penari *baris memedi* ingin mendapat sedikit hasil sampingan dari sebagai penari *baris memedi*, sehingga teman-teman saya itu berkeinginan menarikannya tidak saja pada saat ada *ngaben* di desa ini, tetapi ingin menari setiap saat sepanjang mendapat bayaran.”

Dari ungkapan di atas terlihat bahwa sebagian dari masyarakat Desa Wisata Jatiluwih yang berprofesi sebagai penari *baris memedi* mempunyai keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kesenian *sakral* tersebut. Fenomena yang terjadi pada kesenian *sakral* yang ada di Desa Wisata Jatiluwih ini merupakan pertanda kerusakan nilai-nilai tradisional. Kerusakan nilai-nilai tradisional erat kaitannya dengan komersialisasi dalam hubungan antarmanusia yang merupakan salah satu konsekuensi yang umum dari dampak pariwisata. Nilai-nilai moral yang umumnya mendasari hubungan sosial berubah menjadi nilai ekonomi (Pitana dan Gayatri, 2005:143).

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan ritual dalam kehidupan masyarakat setempat, tampaknya tidak mengalami penurunan, bahkan meningkat, baik dari sisi frekuensi maupun kemegahannya. Berbagai jenis upacara (dari yang kecil hingga yang besar) terus dilaksanakan dengan lebih semarak dan khidmat, bahkan pada saat upacara besar masyarakat setempat mengalihkan perhatian sepenuhnya dari bisnis ke upacara. Kondisi ini oleh Hobsbawn (1983) disebut sebagai *reinvented tradition*.

Oleh karena itu, secara umum pada tahap komersialisasi tumbuh kesadaran dari masyarakat setempat untuk tetap melestarikan budaya lokal yang sudah diwarisi sejak dahulu.

Dengan adanya keterbatasan yang ada pada masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, seperti: (1) keterbatasan pengetahuan tentang pariwisata; (2) keterbatasan kemampuan berkomunikasi; (3) keterbatasan usaha sarana pariwisata; dan (4) keterbatasan jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini membuat masyarakat desa setempat tidak seluruhnya dapat berpartisipasi pada usaha sarana pariwisata yang ada pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Kehadiran pekerja pendatang dari luar Desa Wisata Jatiluwih bekerja pada usaha sarana pariwisata di desa setempat dengan pengalaman dan keahlian (*skill*) yang lebih, yakni merupakan ancaman tersendiri bagi masyarakat desa setempat sehingga terjadi persaingan yang ketat dalam bisnis usaha pariwisata. Persaingan menjadi semakin tidak seimbang karena masyarakat Desa Wisata Jatiluwih yang memiliki keahlian dan pengalaman pada bidang-bidang pariwisata lebih memilih bekerja ke Denpasar atau Kabupaten Badung. Oleh karena alasan lapangan pekerjaan yang lebih variatif, pendapatan yang lebih tinggi, mencari pengalaman yang lebih luas, karier yang lebih menjanjikan dan menantang, serta menghindari kehidupan yang bersifat monoton yang diperankan oleh sebagian besar masyarakat Desa Jatiluwih. Untuk menciptakan persaingan yang seimbang serta memberi arti bagi pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, sudah selayaknya masyarakat setempat yang

memiliki keahlian dalam bidang pariwisata, atas dasar kesadaran bersedia kembali ke desa untuk mensukseskan program pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

### **6.1.5 Tahap Pengawasan**

Aspek terakhir partisipasi masyarakat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih adalah pada tahap pengawasan. Pengawasan oleh masyarakat Desa Wisata Jatiluwih sebagai penerima pariwisata, pendukung, dan sekaligus pelaku budaya bertujuan untuk mengupayakan kelestarian wilayah serta kelestarian kehidupan alam dan budaya setempat. Oleh karena itu, mutlak diperlukan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan pengembangan pariwisata, terlebih-lebih pengembangan desa wisata yang identik dengan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*).

Keterlibatan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan terhadap pengembangan Desa Wisata Jatiluwih mengalami kendala, yang disebabkan oleh (1) perencanaan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang dilakukan pada masa Orde Baru dilakukan secara *top down* sehingga masyarakat tidak mengetahui apa yang direncanakan dan apa yang perlu diawasi; (2) masyarakat setempat tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan; dan (3) pengawasan lebih dimaknai sebagai tindakan "memata-matai" sehingga berujung pada terjadinya konflik.

Partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan lebih bersifat praktis dan preventif, yakni untuk mencegah agar desanya sebagai salah satu desa wisata tidak tercemar dari tindakan-tindakan negatif. Selanjutnya, pengawasan yang bersifat lebih

kompleks, seperti pelanggaran tata ruang, pelanggaran kawasan suci, sebagian besar masyarakatnya bersikap ”*koh ngomong*” dan cenderung ”masa bodoh”, padahal secara substansi seharusnya masyarakat setempat secara keseluruhan ikut mengawasi. Selama ini pengawasan yang bersifat kompleks hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat yang kritis, termasuk elite masyarakat desa setempat.

Menurut McIntosh dan Goeldner (1986), menggarisbawahi perlunya kontrol masyarakat dalam pengembangan pariwisata, yakni tujuannya adalah (1) mempersiapkan kerangka perencanaan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat melalui keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pariwisata; (2) mengadakan program pembangunan yang sesuai dengan filosofi budaya, sosial, dan ekonomi dari masyarakat setempat; (3) mengoptimalkan kepuasan pengunjung; (4) memastikan bahwa tipe-tipe pembangunan yang dilakukan dalam lingkungan pusat-pusat kunjungan sesuai dengan tujuan dari daerah tersebut; dan (5) membangun infrastruktur dan menyediakan sarana rekreasi bagi para penduduk dan wisatawan. Lebih lanjut Amstein (1969) mengatakan bahwa dengan keterlibatan masyarakat setempat atau khalayak umum dalam perencanaan pariwisata, yakni menunjukkan bahwa masyarakat setempat akan mengadakan pengawasan yang ketat dalam proses perencanaan dan dalam proses pembuatan keputusan.

Mengutip apa yang dikatakan oleh McIntosh dan Goeldner (1986) serta Amstein (1969), terkait dengan penelitian ini, terlihat bahwa pengawasan masyarakat terhadap pengembangan Desa Wisata Jatiluwih tidak terlaksana karena tidak sepenuhnya program Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih berjalan. Hal ini terkait

dengan masalah kekuasaan (*power*) serta timbulnya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan-kepentingan terhadap pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Bahkan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan itu terlibat dalam pembuatan keputusan terkait dengan pengembangan yang dilakukan. Selanjutnya, jika berdasarkan tipologi Pretty (1995), partisipasi masyarakat desa setempat dalam tahap pengawasan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih merupakan suatu bentuk partisipasi manipulatif (*manipulative participation*). Oleh karena meskipun pengembangan desa wisata ini merupakan implementasi prinsip pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (yang seharusnya menjadi penguat revitalisasi desa), tetapi masyarakat tidak memiliki kekuasaan (*power*) untuk mengatur dan mengawasi sendiri pengembangan desanya sebagai desa wisata.

Melalui relasi kuasa/pengetahuan (*power/knowledge*), pemerintah Orde Baru secara sengaja mempergunakan berbagai macam "jargon" pembangunan yang mengarah kepada upaya untuk "menjebak" masyarakat untuk mau mengikuti apa yang menjadi keinginan pemerintah. Dengan "jargon" pembangunan tersebut seakan-akan masyarakat memerlukan pembangunan itu, padahal dalam kondisi seperti ini, masyarakat lebih diposisikan sebagai objek dari suatu pembangunan yang cenderung mengalami penderitaan dan kerugian dari pembangunan yang dilakukan. Bahkan dapat mengakibatkan termarjinalkannya masyarakat di tengah pembangunan yang dilaksanakan di desa mereka sendiri, seperti termarjinalkannya masyarakat Desa Jatiluwih dalam pengembangan desa wisata di desa mereka.

## **6.2 Hegemoni Pemerintah terhadap Keterlibatan Masyarakat pada Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih**

Desa Wisata Jatiluwih dengan berbagai pembangunan sarana pariwisatanya, telah menimbulkan permasalahan, seperti terjadinya konflik kepentingan di antara warga masyarakat sehingga menimbulkan disharmonisasi di masyarakat desa setempat. Disharmonisasi di masyarakat terjadi, baik pada aras vertikal (masyarakat dengan aparat desa setempat serta aparat desa setempat dengan aparat di atasnya) maupun pada aras horizontal, yaitu antarmasyarakat. Dalam jangka pendek, dengan pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata dan sebagai daya tarik wisata memang wisatawan mendapatkan kepuasan. Kepuasan utama yang diperoleh wisatawan bersumber dari terasering sawah yang sangat indah dengan latar belakang pemandangan alamnya. Terasering yang ada, di samping menjalankan fungsinya sebagai pengatur pengairan sawah, juga menjadi tempat bagi wisatawan (berjalan-jalan di atas terasering) untuk menikmati keindahan panorama sawah. Secara tidak sengaja, petani setempat menjaga serta merawat terasering sawahnya supaya tampil indah. Keindahan yang ditampilkan oleh terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk bewisata ke desa yang terkenal dengan "beras merah"-nya.

Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih berhasil dilaksanakan oleh pemerintah karena mempergunakan diskursus hegemonik, seperti: pelestarian adat, budaya, dan agama; penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah. Dengan diskursus-diskursus itu masyarakat seakan-akan

memperoleh banyak keuntungan dari pengembangan desa wisata. Berdasarkan kenyataan di lapangan, ternyata diskursus yang dipergunakan pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih merupakan bentuk hegemoni pemerintah yang lebih banyak berpihak kepada masyarakat pemilik modal, termasuk masyarakat kecil di desa yang memiliki modal.

Untuk menandingi diskursus hegemonik dari pemerintah, masyarakat setempat mengembangkan diskursus pariwisata kerakyatan berkelanjutan yang merupakan kontra-hegemoni masyarakat. Diskursus yang dikembangkan oleh masyarakat tersebut lebih bertumpu pada peningkatan ekonomi kerakyatan, termasuk pelibatan masyarakat kecil yang tidak memiliki modal dalam pengembangan desa wisata. Diskursus pariwisata kerakyatan berkelanjutan itu juga didukung oleh kearifan lokal, seperti *Trihita Karana* dan *Bhisama Kesucian Pura*.

Menurut Erawan (2005:12) pariwisata kerakyatan berkelanjutan merupakan integrasi dari (1) proses perencanaan pariwisata kerakyatan (*community tourism*); (2) pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang merupakan paradigma bagi pembangunan ekologi secara global; dan (3) pembangunan ekonomi kerakyatan, yang dirancang untuk membantu pengembangan kapasitas pembangunan, kontrol dan kepercayaan diri di kalangan masyarakat setempat. Selanjutnya, Ardika (2002) mengemukakan bahwa "pariwisata kerakyatan berkelanjutan" memiliki pilar berupa kualitas, kontinuitas, dan keseimbangan, yang menyelaraskan kebutuhan masyarakat lokal, kelestarian sumber daya (fisik dan budaya), dan kepuasan wisatawan.

Berangkat dari pilar pariwisata kerakyatan berkelanjutan yang dikemukakan Ardika (2002), jika dikaji dari daya tarik wisata serta dari masyarakat desa setempat (*host*), yakni dapat diuraikan sebagai berikut. (a) Kualitas, keindahan alam dan terasering sawah Desa Wisata Jatiluwih tidak perlu diragukan lagi, sedangkan dari sisi masyarakat setempat masih perlu dilakukan peningkatan pengetahuan tentang kepariwisataan. (b) Kontinuitas, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek keindahan dan aspek pengelolaan. (1) Aspek keindahan, pada terasering sawah mulai tumbuh bangunan-bangunan seperti kandang-kandang ayam di tengah sawah, khususnya terjadi di *Dusun* Gunung Sari Desa. Hal ini merupakan salah satu gambaran dan sebagai ancaman bagi kontinuitas sawah di desa setempat. Selain itu, kontinuitas sawah juga mengalami ancaman dengan keberadaan bangunan-bangunan di tengah-tengah hutan yang merupakan sumber mata air. Oleh karena itu, keberadaan air menjadi ancaman tersendiri bagi keberadaan sawah-sawah yang indah di Desa Wisata Jatiluwih. (2) Aspek pengelolaan, sesuai dengan perencanaan awal Desa Wisata Jatiluwih direncanakan dikelola oleh *desa adat*, tetapi kenyataannya pengelolaan dilakukan oleh desa dinas. Bahkan menurut Surya dkk. (2005:30) desa dinas jauh lebih mendominasi sehingga *desa adat* hampir tidak berperan. Dominasi yang dilakukan oleh Desa Dinas tersebut berkembang menjadi hegemoni terhadap keterlibatan masyarakat pada pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih. Hegemoni terhadap keterlibatan masyarakat ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kepala Desa Jatiluwih sebagai

Pengelola dan Petugas Pungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Parkir pada Daya Tarik Wisata Jatiluwih. Oleh karena itu, hegemoni yang telah dilakukan oleh pemilik kekuasaan (yang bekerja sama dengan pengusaha) terhadap keterlibatan masyarakat dilakukan kontra-hegemoni, yaitu hegemoni pemerintah yang mempergunakan diskursus pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dikontra-hegemoni oleh masyarakat dengan diskursus pengembangan pariwisata kerakyatan berkelanjutan. Kontra-hegemoni ini dimaksudkan agar keterlibatan masyarakat setempat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih benar-benar menyeluruh, baik meliputi masyarakat yang memiliki modal maupun masyarakat yang tidak memiliki modal. (c) Keseimbangan, perlu dijaga keseimbangan hubungan antara masyarakat setempat, sumber daya (alam dan budaya), dan kebutuhan wisatawan. Masyarakat setempat sebagai pelaku pariwisata harus tetap berorientasi pada *Trihita Karana* dalam mengimplementasikan pilar pariwisata kerakyatan berlanjut.

Hegemoni pemerintah pada keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih telah terjadi mulai dari tahap persiapan, perencanaan, operasional, pengembangan, dan pengawasan. Pada kelima tahap tersebut seharusnya masyarakat setempat dilibatkan secara penuh sehingga hasilnya pun dinikmati secara penuh oleh masyarakat. Sehubungan dengan keterlibatan masyarakat, Britton (dalam Pitana, 1999:76) menyatakan, "Pariwisata skala kecil, khususnya ketika didesentralisasikan mempunyai dampak besar terhadap perbaikan standar kehidupan pedesaan, mengurangi migrasi ke kota, bangkitnya masyarakat pedesaan, dan mengurangi ketidakseimbangan distribusi pendapatan".

Apa yang dikemukakan oleh Britton tersebut rupanya bertolak belakang dengan yang terjadi di Desa Wisata Jatiluwih. Dengan mengusung jargon pembangunan pariwisata global, yaitu pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), yang seharusnya dikembangkan dengan *bottom-up* diubah menjadi *top-down* sehingga yang seharusnya sarat dengan partisipasi masyarakat menjadi sarat dengan pem-”perdaya”-an (diperdaya, dibodohi). Standar kehidupan masyarakat sebagian besar perbaikannya masih mengandalkan dari hasil pertanian dan perkebunan, di samping ada juga yang mengandalkan dari peternakan. Selain itu, pemuda desa setempat lebih banyak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Dari sisi distribusi pendapatan, khususnya bagi yang berpartisipasi secara aktif dalam pariwisata, terjadi ketimpangan karena hasil pariwisata di desa ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat setempat. Namun, secara pasif, *Desa Adat* Jatiluwih sebagai lokasi pengembangan desa wisata telah mendapatkan hasil dari pemungutan retribusi masuk daya tarik wisata. Hasil dari pemungutan retribusi masuk daya tarik wisata itu seluruhnya dipergunakan untuk keperluan mendukung penyelenggaraan upacara di desa setempat. Meskipun demikian, masyarakat setempat tetap mengeluarkan biaya untuk upacara di pura-pura yang ada di Desa Wisata Jatiluwih.

Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2001 diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005 dengan substansi yang semakin kabur, terutama menyangkut persentase pembagian hasil retribusi tempat rekreasi. Pengaburan ini merupakan suatu bentuk pembodohan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penghegemoni terhadap masyarakat sebagai terhegemoni. Kedua

Surat Keputusan Bupati Tabanan tersebut selain merupakan suatu bentuk hegemoni pemerintah bagi keterlibatan masyarakat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, juga menjadi tempat berlindung bagi pemerintah dengan diskursus-diskursus hegemonik yang telah dikeluarkan.

Menurut Nasikun (2000:26), pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat memiliki karakteristik (1) berskala kecil (*small scale*) sehingga lebih mudah diorganisasikan, bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman, dan tidak menimbulkan banyak dampak negatif; (2) lebih berpeluang untuk dikembangkan dan diterima oleh masyarakat setempat/lokal; (3) lebih memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, ataupun penerimaan manfaat dan keuntungan; (4) selain menekankan partisipasi masyarakat, pembangunan berwawasan kerakyatan juga sangat mementingkan keberlanjutan kultural (*cultural sustainability*), dan secara keseluruhan berupaya untuk membangkitkan "rasa hormat" dan "penghargaan" wisatawan terhadap kebudayaan setempat/lokal.

Hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, khususnya dari sisi pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, Wayan Mendri (50 tahun) pada wawancara tanggal 25 Juni 2008 menuturkan sebagai berikut.

"*Tiang* pernah mendengar bahwa desa ini dikembangkan pariwisata, di mana masyarakat desa ini yang diserahi untuk mengelola. Tetapi mengapa sampai saat ini yang ditugaskan memungut karcis masuk adalah Kepala Desa Jatiluwih?."

Ungkapan salah satu masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih ini, yakni merupakan representasi perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan penguasa, yaitu dengan pengetahuan yang dimilikinya menjadikan masyarakat objek hegemoni. Jika dilihat dari karakteristik pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat, seharusnya lebih memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, yakni dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, ataupun penerimaan manfaat dan keuntungan. Partisipasi tersebut juga dapat terjadi pada tahap persiapan. Pada tahap persiapan yang berupa sosialisasi perencanaan, seharusnya masyarakat setempat sudah dilibatkan, yakni dari membahas ide-ide pengembangan desa wisata hingga aktivitas nyata yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat pada pelaksanaan pengembangan desa wisata tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan penghargaan dari pengembangan desanya sebagai desa wisata, apalagi pengembangan tersebut lebih memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat setempat.

### **6.3 Kontra-hegemoni Masyarakat terhadap Hegemoni Pemerintah**

#### **6.3.1 Ideologi dan Objektif Gerakan Perlawanan Masyarakat**

Pembahasan tentang kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah pada keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih perlu digarisbawahi. Oleh karena kontra-hegemoni tersebut tidak saja dilakukan dengan mempergunakan diskursus berupa kontra-diskursus (hegemoni pemerintah dengan diskursus pariwisata berbasis masyarakat di kontra-hegemoni oleh masyarakat dengan diskursus pariwisata kerakyatan berlanjut) tetapi juga dilakukan

dengan perlawanan oleh masyarakat. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hegemoni pemerintah berupa kontra-diskursus, menurut Gramsci (dalam Barker, 2005:81) menggambarkan terjadinya perang posisi pemerintah melawan perang manuver masyarakat.

Perlawanan yang dilakukan merupakan suatu bentuk ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu bentuk produk wisata yang seakan-akan memberdayakan masyarakat. Akan tetapi, faktanya di lapangan justru pengembangan produk wisata tersebut sebagian besar membawa dampak negatif berupa terjadinya konflik serta berkembangnya berbagai kepentingan. Memang benar masyarakat setempat membutuhkan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan sehingga layak bagi kehidupannya, tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat setempat adalah korban hegemoni pemerintah.

Hegemoni pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih tidak menimbulkan kekerasan, dalam hal ini Gramsci (1971) menyatakan bahwa hegemoni dilengkapi dengan represi dan/atau kekerasan, tetapi kontra-hegemoni dilakukan dengan menampilkan berita di media cetak lokal *Bali Post*. Perlawanan tersebut selain dilakukan oleh masyarakat setempat dan elite desa setempat, juga dibantu oleh elite dari luar desa yang ada di Kabupaten Tabanan. Perlawanan tersebut selain pada keterlibatan masyarakat juga terkait dengan pengembangan sarana pariwisata yang berupa "Vila Petali", dan keberadaan "rumah contoh" yang sarat dengan muatan kepentingan Orde Baru serta perjuangan masyarakat untuk menerima manfaat dari pengembangan pariwisata di desanya. Oleh karena itu, ideologi dan objektif gerakan

perlawanan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih berkisar pada identitas ke-bali-an berupa masalah kesucian pura, *Trihita Karana*, solidaritas bebas dari segala bentuk hegemoni pemerintah, tekanan berupa kepentingan dari pengusaha/dunia usaha pariwisata, keterlibatan masyarakat, dan masalah keadilan.

Perlawanan bermula dari adanya fakta, yakni dilecehkannya keberadaan tempat-tempat yang oleh masyarakat setempat dinilai mempunyai makna kesucian, seperti kawasan sekitar pura yang bebas dari kekotoran (tidak *leteh*). Melalui fakta tersebut masyarakat yang benar-benar memahami makna religiusitas dari sebuah kawasan, seperti kawasan sekitar pura yang harus suci atau tidak *leteh*, ikut terdorong untuk melakukan perlawanan. Dalam lingkup yang lebih spesifik, perlawanan juga terjadi pada pengembangan sarana pokok pariwisata yang berupa "Vila Petali" serta pemugaran salah satu rumah penduduk setempat yang dijadikan "rumah contoh".

Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, di samping dibantu oleh elite yang ada di desa setempat juga dibantu oleh elite yang berasal dari luar desa di Kabupaten Tabanan. Masyarakat setempat merasa bersyukur dibantu oleh elite desa serta elite dari luar desa dalam melakukan perlawanan terhadap pengembangan Desa Wisata Jatiluwih beserta seluruh sarana pokok yang diperlukan.

Dalam hal ini pengertian elite dapat mengacu pada elite pemerintah dan elite masyarakat. Sesuai dengan pemahaman Mannheim (1946:215) dalam bukunya *Man and Society in an Age of Reconstruction* yang membedakan elite integratif yang terdiri atas para pemimpin politik dan organisasi serta elite sublimatif yang terdiri atas pemimpin moral keagamaan, seni, dan intelektual. Menurut Keller (1984:16-17),

fungsi pokok elite integratif adalah mengintegrasikan sejumlah besar kehendak-kehendak perorangan, sedangkan elite sublimatif adalah mengadakan sublimasi tenaga kejiwaan manusia. Menurut Mannheim (1946:260), orang tidak seharusnya mempergunakan seluruh tenaga kejiwaannya dalam memperjuangkan material, tetapi harus menyalurkan ke dalam perenungan dan pemikiran sehingga menemukan jalan meringankan perjuangan. Dengan demikian, ketahanan moral serta ketahanan fisik dalam jangka panjang akan berpasangan.

Menurut Keller (1984:17), elite integratif bekerja melalui organisasi-organisasi politik, sedangkan elite sublimatif bekerja melalui saluran-saluran yang lebih informal, seperti: melalui golongan-golongan, klik-klik, dan kelompok-kelompok kecil. Tujuannya adalah untuk mengembangkan jalan keluar yang produktif secara sosial untuk harapan-harapan, ketakutan-ketakutan, dan keinginan-keinginan yang terhambat dari para individu, yaitu dengan membentuk selera mereka, dengan menggairahkan pembicaraan-pembicaraan penting yang mendalam mengenai persoalan sesuai dengan waktu, dan dengan merangsang pengembangan pandangan dan perhatian yang asli.

Dalam penelitian ini yang dimaksud elite adalah elite integratif dalam pandangan Mannheim (1946:215), yaitu pada umumnya bukan dari elite desa setempat, tetapi elite dari luar desa setempat, terutama yang berasal dari Kabupaten Tabanan. Kalaupun ada elite dari desa setempat, jumlahnya sangat terbatas dan mereka umumnya mantan pejabat desa (seperti mantan pengurus lembaga ketahanan masyarakat desa, mantan pengurus badan pertimbangan desa serta mantan *bendes*

*adat*). Elite integratif ini berjuang, ada yang secara langsung turun menemui masyarakat atau ada pula yang berjuang dengan mempergunakan media massa koran dengan pernyataan-pernyataannya. Selain itu, ada juga yang berjuang benar-benar untuk membela masyarakat, tetapi ada pula yang berjuang karena mengharapkan sesuatu dari perjuangannya (*vested interest*). Namun, dibalik itu semua perjuangan mereka memiliki *platform* yang jelas, yaitu memperjuangkan kawasan suci sekitar pura, implementasi *Trihita Karana*, rasa keadilan, serta perlawanan terhadap hegemoni pemerintah pada keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Elite tersebut adalah bagian dari elite lokal, dalam hal ini "lokal" disini mengacu pada tingkat kabupaten sehingga elite di sini bisa berarti elite pemimpin di tingkat kabupaten dan di bawahnya. Elite lokal bisa terdiri atas elite negara atau pemerintah dan elite masyarakat. Elite pemerintah adalah elite-elite, seperti: gubernur, bupati, dan pejabat di bawahnya, sedangkan yang termasuk elite masyarakat adalah intelektual, organisasi keagamaan, di samping kelompok pemuda dan media massa.

Elite-elite tersebut masing-masing memiliki sikap yang jelas terhadap pengembangan berbagai sarana pokok yang ada terkait pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Sikap elite tersebut ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, dengan berbagai alasannya. Adapun sikap elite (elite pemerintah dan elite masyarakat) terhadap pengembangan berbagai sarana pokok di Desa Wisata Jatiluwih adalah seperti Tabel 6.3 berikut ini.

Tabel 6.3  
Sikap Elite terhadap Pengembangan Sarana Pokok  
di Desa Wisata Jatiluwih

Sikap terhadap Pengembangan Sarana Pokok di Desa Wisata Jatiluwih	Elite Lokal	
	Elite Pemerintah	Elite Masyarakat
Setuju	Gubernur Bupati Camat Kepala Desa	Intelektual Tradisional (sebagian kecil rohaniwan) <i>Bendesa Adat</i> Sebagian kecil masyarakat desa setempat.
Tidak Setuju (menolak)	Legislatif	Elite Intelektual (bukan mahasiswa) Intelektual Tradisional (sebagian besar rohaniwan) Sebagian besar masyarakat desa setempat.

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2008

Dari Tabel 6.3 di atas terlihat bahwa pemerintah dalam arti luas (legislatif) meskipun jumlahnya sedikit terus melakukan penolakan. Legislatif mendapat dukungan dari elite intelektual, sebagian besar intelektual tradisional dan sebagian besar masyarakat desa setempat. Penolakan yang berupa ketidaksetujuan terhadap pembangunan sarana pokok (berupa akomodasi) di Desa Wisata Jatiluwih ada yang didorong untuk "memperoleh nama" dan "simpati" daripada benar-benar memperjuangkan keinginan masyarakat untuk menjaga kesucian kawasan sekitar pura.

Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat setempat berupa *kramak-krimik ring margane*. Perlawanan seperti ini adalah suatu bentuk perlawanan yang bersifat pasif dilakukan oleh sebagian masyarakat, yakni dengan berdiam diri jika diminta berbicara pada pertemuan-pertemuan formal. Mereka biasanya akan berbicara setelah

pertemuan tersebut selesai, kemudian membicarakannya pada tempat-tempat tertentu seperti di warung sambil berbelanja atau bahkan berkumpul di pinggir jalan sambil membicarakan masalah yang dibahas pada suatu pertemuan.

Kehadiran elite lokal yang berasal dari desa setempat telah menjadi wadah bagi penyaluran kebiasaan *kramak-krimik ring margane* yang dilakukan oleh masyarakat setempat jika berhadapan dengan suatu kasus. Dengan kehadiran tokoh elite lokal dari desa setempat dan dengan dukungan anggota legislatif dari Kabupaten Tabanan, perlawanan masyarakat terhadap pengembangan Desa Wisata Jatiluwih menjadi suatu perlawanan yang bersifat terbuka. Oleh karena ketidaksetujuan masyarakat tersebut dipublikasikan di media cetak, khususnya koran *Bali Post*.

Berawal dari keluarnya Surat Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama, B.A. Nomor 593.3/440/T.Pem tanggal 8 Februari 2002 yang menyatakan bahwa pembangunan "Vila Petali" merupakan suatu pelanggaran karena belum dilandasi oleh rekomendasi prinsip lokasi, Izin Lokasi, dan Izin Mendirikan Bangunan. Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama, B.A. rupanya tidak digubris oleh pemilik vila Wawan Setiawan. Oleh karena merasa dilecehkan, pada tanggal 17 Mei 2002 di koran *Bali Post* terbit artikel dengan judul "Tak Ditoleransi, Vila di Petali segera Dibongkar". Pada artikel tersebut Bupati Tabanan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan tidak menoleransi keberadaan vila tersebut karena lokasinya yang berdekatan dengan Pura Luhur Petali sebagai alasan. Bahkan Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama, B.A. mengatakan akan membongkar vila tersebut sekitar Juni 2002.

Meskipun sudah mendapat dukungan dari legislatif (I Wayan Supartha, S.H. sebagai Wakil Ketua DPRD Tabanan) untuk membongkar "Vila Petali", rupanya dukungan tersebut tidak mendapat sambutan yang berarti dari Pemerintah Kabupaten Tabanan bahkan terlihat cenderung membiarkan. Dari kondisi ini terlihat bahwa Bupati Tabanan sebagai penguasa daerah kabupaten terlihat memiliki dua sisi, *sisi pertama*, jika berada di sekitar masyarakat akan bersuara nyaring dengan menyatakan bahwa bangunan itu melanggar dan harus dibongkar. Namun, *sisi kedua*, jika berada pada sisi pengusaha, akan cenderung membiarkan saja. Kondisi ini lebih diakibatkan adanya kepentingan pemerintah terhadap pengusaha.

Untuk mengelabui kepentingan pemerintah dibalik tetap berlanjutnya pembangunan "Vila Petali" di tengah hutan sebelah utara Pura Luhur Petali, Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama, S.Sos. selanjutnya mengeluarkan Peringatan I kepada pemilik bangunan vila Wawan Setiawan sesuai surat Nomor 300/1088/KBL.Trantib tanggal 2 Desember 2002. Dalam Peringatan I ini disebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Wawan Setiawan meliputi pelanggaran terhadap kawasan suci, pelanggaran terhadap *Bhisama* Parisadha Hindu Dharma Indonesia tentang Kesucian Pura, serta pelanggaran terhadap retribusi izin mendirikan bangunan. Berkaitan dengan pelanggaran tersebut, pemilik vila diberikan waktu tujuh hari untuk melakukan pembongkaran vila. Dari batas waktu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, pemilik vila kembali tidak memberikan tanggapan dan terkesan melakukan pembangkangan dengan tidak melakukan pembongkaran vila miliknya.

Dengan adanya pembangkangan yang dilakukan oleh pemilik vila khususnya terhadap Peringatan I dari Bupati Tabanan, media massa koran *Bali Post* pada tanggal 9 Desember 2002 kembali menerbitkan artikel dengan judul "Vila Petali Langgar Jalur Hijau, DPRD Rekomendasikan Pembongkaran". Munculnya berita di media massa ini sebagai gerakan dari elite luar desa, khususnya dari Wakil DPRD Tabanan Wayan Supartha, S.H. Gerakan yang dilakukan oleh wakil rakyat ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Tabanan kepada Bupati Tabanan Nomor 172/1773/DPRD yang isinya agar bupati menindak tegas pemilik vila. Dalam berita di media *Bali Post* tanggal 9 Desember 2002 termuat berita dengan *headline* mempergunakan isu pelanggaran jalur hijau sebagai alat untuk menjerat keberadaan vila yang berada di tengah hutan di Desa Wisata Jatiluwih. Penggunaan isu jalur hijau karena memang keberadaan vila tersebut di tengah hutan dan seharusnya tidak bisa dibangun. Oleh karena di samping membahayakan ekologi lingkungan juga akan mengurangi sumber resapan air. Adapun sebagian isi beritanya adalah sebagai berikut.

"Menurut dia, sudah saatnya Pemkab Tabanan, khususnya bupati berani memerintahkan aparatnya yang berwenang untuk melakukan pembongkaran sesuai dengan surat keputusan yang pernah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu menyangkut larangan keberadaan vila tersebut. Seharusnya tidak ada toleransi bagi pemilik vila untuk melanjutkan pembangunan jika Pemkab ingin mempunyai wibawa di mata masyarakat."

Munculnya isi berita seperti di atas merupakan representasi kekecewaan legislatif yang merupakan manifestasi masyarakat. Kekecewaan tersebut semakin didorong oleh adanya pengaduan dari masyarakat kepada DPRD Kabupaten Tabanan.

Pengaduan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih dimotori oleh elit desa setempat seperti oleh I Wayan Sumiata, I Wayan Sukabuana, dan Nyoman Utama. Elite desa inilah yang banyak berhubungan dengan elite dari luar desa, seperti elite dari Kabupaten Tabanan untuk terus memperjuangkan dan melakukan perlawanan terhadap pembangunan sarana pokok berupa akomodasi yang melanggar ketentuan serta tidak mengacu pada *Bhisama* dan *Trihita Karana*.

Tanggal 19 Desember 2002 kembali keluar Peringatan II dari Bupati Tabanan sesuai surat Nomor 300/1309/KBL.Trantib terhadap "Vila Petali". Peringatan II ini isinya, kembali memperingatkan agar selambat-lambatnya tujuh hari sejak diterimanya surat peringatan agar pemilik vila sudah membongkar bangunannya, dan jika tidak, pembongkaran akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Ternyata apa yang menjadi substansi dari Peringatan II juga tidak digubris sama sekali oleh pemilik vila. "Vila Petali" terus dibangun, seakan-akan tidak terjadi masalah apa-apa.

Kemunculan Peringatan III yang merupakan kelanjutan dari Peringatan I dan Peringatan II merupakan sebuah penegasan dan sekaligus juga merupakan ancaman kepada pemilik vila. Hal ini ditandai dengan digunakannya kata "sekali lagi" dalam peringatan tersebut. Adapun substansi dari Peringatan III sesuai surat Bupati Tabanan Nomor 300/1376/KBL.Trantib tanggal 31 Desember 2002 adalah sebagai berikut.

"Untuk itu sekali lagi kami peringatkan agar Saudara (pemilik vila) segera selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari, terhitung sejak surat diterima, Saudara harus sudah membongkar bangunan tersebut dan apabila Saudara tetap tidak mengindahkannya, maka pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan."

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Peringatan III ini sebenarnya sudah mendapat dukungan dari masyarakat, seperti dukungan yang datangnya dari *Paruman Saba Desa Pekraman* se-Kecamatan Penebel, *Pengemong Pura Rsi* (diwakili oleh Ida Bagus Gede Artana), dan *Pengemong Pura Manik Selaka* (diwakili oleh Nyoman Sudarmana, S.Pd.). Namun, pemerintah daerah setempat tidak mempunyai keberanian untuk melakukan pembongkaran. Ironisnya di *Bali Post* tanggal 7 Maret 2003 muncul artikel dengan *headline* berbunyi ”Soal Bongkar Vila Petali Pemkab Tabanan Mengaku tak Takut”. Munculnya artikel seperti ini merupakan suatu bentuk perang wacana antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Tabanan akan ketidakberdayaannya untuk mewujudkan isi peringatan-peringatan yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

Pada pandangan umum fraksi terhadap Raperda Tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Raperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Bali dan Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Bali mempermasalahkan Kawasan Suci. Fraksi PDIP melalui juru bicaranya I Made Arjaya, S.E., M.Si., menyatakan, ”Perda tentang tata ruang yang mengatur kawasan suci, kondisi riil yang terjadi di lapangan kawasan suci dimaksud dilanggar oleh kabupaten/kota”. Selanjutnya, juru bicara F-PG Gede Agra Kumara, S.H. menyatakan sebagai berikut.

”Pada kesempatan ini kami mengimbau Saudara Gubernur untuk dapat kiranya melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi agar dapat dijalankan secara konsisten dan tidak tumpang tindih dengan kabupaten/kota mengingat kasus-kasus yang terjadi belakangan ini tentang pemanfaatan

hutan, danau, kawasan suci, dan lain-lain menjadi polemik belakangan ini. Menurut pandangan kami, hal ini sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang kewenangan urusan pemerintah sehingga investasi yang seharusnya melalui pemerintah provinsi, tetapi diambil alih oleh kabupaten/kota”.

Imbauan di atas secara selintas kelihatannya membela kepentingan masyarakat, tetapi di balik itu semua terdapat berbagai kepentingan terkait dengan pembelaan yang dilakukan. Kepentingan tersebut antara lain ”perebutan investasi” antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Kepentingan ini menjadi semakin bertambah ketat persaingannya setelah diberlakukannya otonomi daerah dengan memberi kekuasaan yang lebih besar kepada kabupaten/kota. Adanya kekuasaan (*power*) yang besar di tingkat kabupaten/kota, yakni merupakan suatu fenomena menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang implementasi hegemoni pasca-otonomi daerah. Dalam hal ini, seperti Williams (dikutip dari Eagleton, 1991:115) bahwa hegemoni harus ”diperbaharui, diciptakan kembali, dipertahankan, dan dimodifikasi”.

Dalam hubungan antara pariwisata dengan otonomi daerah, selain peluang juga terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut antara lain berupa egoisme sektoral serta arogansi kabupaten/kota dalam mengelola berbagai potensi sumber daya untuk kepentingannya sendiri. Arogansi sektoral dapat berupa pemberian prioritas kepada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis tanpa mempedulikan sektor-sektor lainnya. Selanjutnya, arogansi kabupaten/kota dapat berupa pengelolaan sumber daya secara sepihak oleh suatu kabupaten/kota dengan tanpa mempedulikan kabupaten/kota lain meskipun sumber daya yang dikelola sama.

Dengan adanya penekanan otonomi di tingkat kabupaten/kota, dapat mendorong pengembangan pariwisata yang lebih memacu mengejar pertumbuhan ekonomi (*growth oriented development*) untuk mengejar pendapatan asli daerah. Jika hal ini terjadi, maka dari lima pendekatan pariwisata (Spillane, 1994:28-30) yaitu *advocacy*, *cautionary*, *adaptancy*, *developmental*, dan *knowledge-based*, maka roh pendekatan *advocacy* akan dapat tumbuh kembali. Pendekatan *advocacy* memiliki tujuan utama menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sosial budaya atau daya tarik wisata dengan mengabaikan hak-hak tuan rumah. Pendekatan *advocacy* juga cenderung memposisikan budaya sebagai komoditas ekonomi semata.

Perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah yang membela kepentingan pengusaha pariwisata pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, selain dilihat dari sisi ideologi dan objektif juga dilihat dari sisi "hasil perlawanan" yang sudah dilakukan. Dari perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pembangunan "Vila Petali", ternyata vila yang berlokasi di tengah hutan sebelah utara Pura Luhur Petali hingga saat ini masih berdiri dan merupakan sebuah cerminan kemenangan hegemoni pemerintah.

Menurut Bagus (2004:279), hasil perlawanan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu (1) perlawanan yang gagal di pihak masyarakat, (2) perlawanan yang menggagalkan investor atau kemenangan di pihak masyarakat, dan (3) perlawanan yang berakhir dengan kompromistis, artinya sama-sama memberikan penyelesaian keuntungan, baik bagi pihak pemerintah maupun masyarakat. Dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih,

khususnya terkait kasus pembangunan "Vila Petali" menunjukkan adanya kemenangan di pihak pemerintah atau perlawanan yang gagal di pihak masyarakat. Kemenangan di pihak pemerintah semakin melegitimasi proses perencanaan pembangunan yang bersifat *top down* □ sebagai hasil dekonstruksi terhadap perencanaan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang bersifat *bottom up* □ sehingga implementasi pariwisata berbasis masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang berupa keterlibatan masyarakat setempat dalam berbagai bidang kegiatan belum tercapai sebagai akibat kuatnya hegemoni yang dilakukan pemilik kekuasaan.

Selanjutnya, pada kasus "rumah contoh", perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat secara keseluruhan dilakukan terhadap pemerintah yang mempergunakan aparat desa sebagai "eksekutor" di lapangan. Aparat pemerintah pada saat itu adalah I Nengah Sukra selaku Kepala Desa Jatiluwih. Bentuk dan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat berupa pertanyaan yang terkait dengan keberadaan "rumah contoh" pada saat rapat (*sangkep*) *Desa Adat* Jatiluwih serta adanya pembicaraan masyarakat di luar acara-acara resmi dan lebih bersifat informal antaranggota masyarakat. Objektif perlawanan masyarakat terhadap kasus ini adalah "rasa keadilan", artinya masyarakat mempertanyakan keberadaan "rumah contoh" dibuat di atas tanah pribadi milik I Nengah Sukra, padahal jika merupakan proyek pemerintah seharusnya dibangun di atas tanah milik desa (*tanah laba desa*). Meskipun adanya perlawanan masyarakat, dengan berbagai kepentingannya, Pimpinan Proyek (Pimpro) dari Depparpostel Bali terus melakukan pembangunan

”rumah contoh” tersebut. Oleh karena sudah merasa terdesak, dan untuk menarik simpati masyarakat setempat, akhirnya salah satu pura, yaitu *Pura Dalem Trikahyangan Desa Adat Jatiluwih* yang berada di sebelah selatan *Café Jatiluwih* diperbaiki, dengan alasan untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Pada awalnya, perbaikan *Pura Dalem Trikahyangan Desa Adat Jatiluwih* memang mampu meredakan protes dan berbagai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama karena masyarakat terus melakukan perlawanan dengan melakukan protes terhadap pengurus *Desa Adat Jatiluwih*. Oleh karena kuatnya hegemoni pemerintah, dalam hal ini proyek ”rumah contoh” adalah bagian dari rencana pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, maka perlawanan tersebut tidak ada artinya. Seiring dengan perjalanan waktu dan masyarakat setempat sudah diliputi oleh budaya *koh ngomong*, maka secara sembunyi-sembunyi ”rumah contoh” tersebut (menurut pengakuan I Nengah Sukra) sudah diserahkan kembali kepada yang bersangkutan. Dalam kasus ini pun pemerintah mengalami kemenangan dari perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, kedua kasus di atas menimbulkan preseden yang buruk di masyarakat, khususnya terkait dengan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Preseden yang buruk tersebut disebabkan oleh dilakukannya pemugaran dan komodifikasi terhadap rumah penduduk yang sudah ada dengan harapan terpenuhinya syarat minimal akomodasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Pemugaran dan komodifikasi yang dilakukan terhadap salah satu rumah penduduk yang berujung pada terjadinya konflik dan perlawanan masyarakat, yakni menimbulkan trauma yang

mendalam pada masyarakat setempat. Trauma ini merupakan suatu bentuk penghambat bagi pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kuantitas keterlibatan masyarakat.

Dikeluarkannya surat dari Camat Penebel Drs. I Ketut Astika Jayeng Wiguna Nomor X.700/1497/POL.PP tanggal 10 November 1993 tentang Larangan bagi Tamu Asing Menginap pada Rumah-rumah Penduduk juga merupakan hambatan bagi keterlibatan masyarakat. Surat tersebut bersifat kontra-produktif terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Masyarakat kecil yang tidak memiliki modal untuk mendirikan akomodasi seperti *inn* dan vila (hanya memiliki rumah yang bisa ditingkatkan kebersihannya sehingga siap menerima wisatawan) tidak akan memperoleh manfaat dari pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Padahal pengembangan Desa Wisata Jatiluwih diharapkan menganut prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

### **6.3.2 Hasil Kontra-hegemoni Masyarakat terhadap Hegemoni Pemerintah**

Perlawanan yang merupakan kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah terdiri atas tiga bagian, yaitu bentuk kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah, teknik/cara kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah, dan hasil kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah. *Pertama*, bentuk kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah terdiri atas beberapa hal. (1) Perlawanan yang dilakukan oleh individu

dan kelompok masyarakat karena terlecehkannya kesucian wilayah sekitar Pura Luhur Petali dengan pembangunan "Vila Petali" [14 Januari 2002 hingga 26 November 2004]. (2) Perlawanan yang dilakukan elite desa bersama-sama elite luar desa dari Kabupaten Tabanan terhadap pembangunan "Vila Petali" [14 Januari 2002 hingga 7 Mei 2008]. (3) Dimuatnya berita dari masyarakat desa setempat pada koran *Bali Post* tentang pelanggaran terhadap ekologi, jalur hijau, kawasan suci, serta dukungan *pengempon* pura sekitar Pura Luhur Patali untuk membongkar "Vila Petali" [17 Mei 2002 hingga 7 Maret 2003]. (4) Perlawanan legislatif DPRD Bali (Fraksi PDI-P dan Fraksi PG) pada Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali dan Raperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah [7 Mei 2008]. (5) Perlawanan *Bendesa Adat Jatiluwih* (I Wayan Sukabuana) dengan menulis surat ke Dinas Kehutanan Kabupaten Tabanan menolak pembangunan di sekitar kawasan situs/kawasan suci serta kawasan lain seperti sawah untuk pelestarian alam [26 November 2004]. (6) Perlawanan masyarakat terhadap pembangunan "rumah contoh" di atas tanah I Nengah Sukra dengan mempermasalahkannya pada setiap rapat (*sangkep*) *Desa Adat Jatiluwih* [11 Mei 1992 hingga 6 Februari 2007]. (7) Perlawanan masyarakat terhadap pembangunan "rumah contoh" melalui pembicaraan antarmasyarakat setempat secara informal yang lebih bersifat *pekrimik* [sejak kasus tersebut mencuat secara terbuka di desa setempat sekitar Mei 1992 hingga sekarang]. *Kedua*, teknik/cara kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah terdiri atas: (1) perlawanan lunak/dengan diam (*koh ngomong*);

(2) perlawanan kompromis dengan menerima apa adanya; dan (3) perlawanan dengan tuntutan dan berhadapan secara langsung. *Ketiga*, hasil kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah terdiri atas: (1) kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah melanggengkan hegemoni pemerintah (masyarakat tidak mendapat manfaat apa-apa); (2) kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah mengurangi hegemoni pemerintah (masyarakat berada di antara mendapatkan dan tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari kontra-hegemoni yang dilakukan terhadap pemerintah); (3) kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah mampu meniadakan hegemoni pemerintah (masyarakat mendapatkan manfaat dari kontra-hegemoni yang dilakukan terhadap pemerintah).

Penggambaran bentuk kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah, teknik/cara kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah dan hasil kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah dengan mempergunakan tabel memiliki beberapa kelemahan, yaitu (1) penggambaran lebih bersifat linear (tunggal), padahal antara bentuk, teknik/cara, serta hasil tidak selalu berlaku linear, tetapi bisa lebih kompleks; (2) antara satu bentuk perlawanan dengan bentuk lain bisa saja saling terkait dan tidak terpisah secara tegas; (3) antara satu hasil dengan hasil lainnya tidak selalu berdiri sendiri, bisa terjadi hasil yang satu merupakan hasil ikutan dari hasil yang lainnya.

Meskipun penggambaran dengan mempergunakan tabel memiliki berbagai kelemahan seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi penggambaran dengan tabel dari hasil yang ditimbulkan oleh kontra-hegemoni yang dilakukan masyarakat

terhadap hegemoni pemerintah paling tidak mewakili yang sebenarnya terjadi di masyarakat desa setempat. Bentuk-bentuk kontra-hegemoni yang dilakukan berangkat dari adanya kasus-kasus yang sangat terkait dengan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Dalam hal ini dengan mengangkat kasus-kasus yang menimbulkan kontra-hegemoni tersebut, merupakan salah satu sumbangan kajian budaya dalam membela yang terpinggirkan. Kemudian terkait dengan penelitian ini, yang terpinggirkan adalah masyarakat desa setempat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Hal ini berarti masyarakat dijadikan *outsider* atau pemain luar yang setiap saat bisa saja tidak dipakai atau terpinggirkan sehingga masyarakat melakukan kontra-hegemoni.

Menurut Scott (2000:305), perlawanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan harian dan perlawanan sesungguhnya. *Satu*, perlawanan harian, antara lain bersifat (a) tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual; (b) bersifat untung-untungan dan berpamrih (nafsu akan kemudahan); (c) tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner; dan (d) dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominan yang ada. *Dua*, perlawanan sesungguhnya, antara lain bersifat (a) lebih terorganisasi, sistematis, dan kooperatif; (b) berprinsip atau tanpa pamrih; (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner; dan (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi. Dengan demikian perlawanan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih tergolong perlawanan sesungguhnya. Adapun bentuk, teknik/cara dan hasil kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah, diuraikan pada Tabel 6.4 berikut ini.

Tabel 6.4  
Bentuk, Teknik/Cara, dan Hasil Kontra-hegemoni Masyarakat  
terhadap Hegemoni Pemerintah

Kode	Bentuk Kontra-hegemoni Masyarakat	Teknik/Cara Kontra-hegemoni Masyarakat *)	Hasil Kontra-hegemoni Masyarakat terhadap Hegemoni Pemerintah **)
A	Perlawanan yang dilakukan oleh individu dan kelompok masyarakat karena terlecehkannya kesucian wilayah sekitar Pura Luhur Petali dengan pembangunan "Vila Petali".	(3)	(1)
B	Perlawanan yang dilakukan oleh elite desa bersama-sama elite luar desa dari Kabupaten Tabanan terhadap pembangunan "Vila Petali".	(2)	(1)
C	Dimuatnya berita dari masyarakat desa setempat pada koran <i>Bali Post</i> tentang pelanggaran terhadap ekologi, jalur hijau, dan kawasan suci serta dukungan <i>pengempon</i> pura sekitar Pura Luhur Patali untuk membongkar "Vila Petali".	(3)	(1)
D	Perlawanan Legislatif DPRD Bali (Fraksi PDI-P dan Fraksi PG) pada Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.	(2)	(1)
E	Perlawanan <i>Bendesa Adat</i> Jatiluwih (I Wayan Sukabuana) dengan menulis surat ke Dinas Kehutanan Kabupaten Tabanan menolak pembangunan sekitar kawasan situs/kawasan suci serta kawasan lain, seperti sawah untuk pelestarian alam.	(3)	(1)
F	Perlawanan masyarakat terhadap pembangunan "rumah contoh" di atas tanah I Nengah Sukra dengan mempermasalahkannya pada setiap rapat ( <i>sangkep</i> ) <i>Desa Adat</i> Jatiluwih.	(3)	(1)
G	Perlawanan masyarakat terhadap pembangunan "rumah contoh" melalui pembicaraan antarmasyarakat setempat secara informal yang lebih bersifat <i>pekrimik</i>	(1)	(1)

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2008

Keterangan:

\*) Tiga teknik/cara kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah.

- (1) Perlawanan lunak/dengan diam (*koh ngomong*).
- (2) Perlawanan kompromis dengan menerima apa adanya.
- (3) Perlawanan dengan tuntutan dan berhadapan secara langsung.

\*\*\*) Tiga hasil kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah.

- (1) Kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah melanggengkan hegemoni pemerintah (masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa).
- (2) Kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah mengurangi hegemoni pemerintah (masyarakat berada diantara mendapatkan dan tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari kontra-hegemoni yang dilakukan terhadap pemerintah).
- (3) Kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah mampu meniadakan hegemoni pemerintah (masyarakat mendapatkan manfaat dari kontra-hegemoni yang dilakukan terhadap pemerintah).

Berdasarkan teknik/cara kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah menimbulkan hasil yang berbeda-beda [(1), (2), dan (3)] dari kontra-hegemoni yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan Tabel 6.4 dapat dikemukakan sebagai berikut.

- Perlawanan yang dilakukan oleh individu dan kelompok masyarakat karena terlecehkannya kesucian wilayah sekitar Pura Luhur Petali dengan pembangunan "Vila Petali" (A) mempergunakan teknik/cara perlawanan dengan tuntutan dan berhadapan secara langsung (3) dengan hasil melanggengkan hegemoni (1).
- Perlawanan yang dilakukan oleh elite desa bersama-sama elite luar desa dari Kabupaten Tabanan terhadap pembangunan "Vila Petali" (B) mempergunakan teknik/cara perlawanan kompromis dan menerima apa adanya (2) dengan hasil melanggengkan hegemoni (1).

- Perlawanan masyarakat setempat dengan memuat artikel di koran *Bali Post* berupa pelanggaran terhadap ekologi, jalur hijau, dan kawasan suci serta dukungan *pengempon* pura sekitar Pura Luhur Petali untuk membongkar ”Vila Petali” (C) mempergunakan teknik/cara perlawanan dengan tuntutan dan berhadapan langsung (3) dengan hasil melanggengkan hegemoni (1).
- Perlawanan Legislatif DPRD Bali (Fraksi PDI-P dan Fraksi PG) pada Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (D) mempergunakan teknik/cara perlawanan kompromis dengan menerima apa adanya (2) dengan hasil melanggengkan hegemoni (1).
- Perlawanan *Bendesa Adat Jatiluwih* (I Wayan Sukabuana) dengan menulis surat ke Dinas Kehutanan Kabupaten Tabanan menolak pembangunan sekitar kawasan situs/kawasan suci serta kawasan lain, seperti sawah untuk pelestarian alam (E) dilakukan dengan teknik/cara perlawanan dengan tuntutan dan berhadapan langsung (3) dengan hasil melanggengkan hegemoni (1).
- Perlawanan masyarakat terhadap pembangunan ”rumah contoh” di atas tanah I Nengah Sukra dengan mempermasalahkannya pada setiap rapat (*sangkep*) *Desa Adat Jatiluwih* (F) dilakukan dengan teknik/cara perlawanan dengan tuntutan dan berhadapan langsung (3) dengan hasil melanggengkan hegemoni (1).
- Perlawanan masyarakat terhadap pembangunan ”rumah contoh” melalui pembicaraan antar masyarakat setempat secara informal yang lebih bersifat

*pekrimik* (G) dilakukan dengan teknik/cara perlawanan lunak/dengan diam (*koh ngomong*) (1) dengan hasil melanggengkan hegemoni (1).

Dari tujuh bentuk kontra-hegemoni yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hegemoni pemerintah pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih secara umum sebagian besar tidak menunjukkan hasil yang sepadan, dan bahkan kontra-hegemoni yang dilakukan semakin melanggengkan hegemoni pemerintah. Dalam hal ini, satu-satunya kontra-hegemoni yang memperoleh hasil sepadan adalah yang terjadi pada perlawanan masyarakat terhadap pembangunan "rumah contoh" melalui terjadinya pembicaraan antar masyarakat setempat secara informal yang lebih bersifat *pekrimik*.

Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dengan pembangunan berupa akomodasi di radius kesucian pura meskipun menuai perlawanan dari masyarakat, tetapi tetap dilaksanakan. Dalam hal ini, walaupun pernah ada peringatan dari Bupati Tabanan terhadap pemilik bangunan "Vila Petali" pada saat pembangunan, peringatan tersebut hanya merupakan sebuah *life service* agar masyarakat tidak menuntut tanggung jawab pemerintah. Berlanjutnya pembangunan akomodasi karena pengusaha bersatu dengan pemerintah dalam suatu ideologi "pembangunanisme" untuk lebih mengutamakan kepentingan bersama (pengusaha dengan pemerintah) yang lebih bersifat ekonomistik, tanpa memperhatikan keberlanjutan budaya, adat, agama, ekologi, *Bhisama* tentang Kesucian Pura dan *Trihita Karana*.

Kekalahan masyarakat desa setempat dari kasus-kasus yang muncul terkait dengan keterlibatan masyarakat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih (antara lain kasus "Vila Petali" dan "rumah contoh") merupakan kegagalan masyarakat

dalam menghadapi ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak luar serta kegagalan dari implementasi pariwisata berbasis masyarakat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Dikatakan demikian karena dengan dibangunnya vila dan akomodasi lainnya yang mempergunakan modal dari luar desa setempat, hasil yang diperoleh akan lari ke pengusaha pariwisata yang berasal dari luar desa setempat dan bahkan ke luar dari Bali. Selanjutnya, keberhasilan pembangunan "rumah contoh" merupakan suatu bentuk hegemoni terhadap keterlibatan masyarakat dalam operasionalisasi pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Masyarakat menjadi korban dari hubungan yang bersifat hegemonik dengan pemerintah. Pemerintah cenderung membela pengusaha sehingga terjadi perlawanan dari masyarakat yang merupakan kontra-hegemoni masyarakat terhadap hegemoni pemerintah, meskipun masyarakat sering mengalami kekalahan. Pengusaha yang dibela merupakan cerminan dari industri pariwisata sehingga pariwisata terkadang menguntungkan dari segi pendapatan dan ketenagakerjaan, tetapi terkadang juga merugikan karena dapat menimbulkan konflik. Konflik yang timbul dapat terkait dengan pembangunan fasilitas pariwisata yang memerlukan pembebasan tanah, radius kesucian pura, atau terhegemoninya keterlibatan masyarakat melalui dikeluarkannya surat keputusan dan peraturan daerah dan sejenisnya pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, kekuasaan pemerintah (lokal) begitu kuatnya sehingga masyarakat setempat yang seharusnya di-"berdaya"-kan menjadi di-"perdaya"-kan. Negara, lewat kekuasaan strukturalnya dengan

mempergunakan pejabat-pejabat eksekutifnya, telah menempatkan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih sebagai masyarakat di bawah kekuasaan hegemonik. Dengan demikian, dalam pengembangan pariwisata di desa ini telah juga terjadi kekerasan struktural dan tidak represif terhadap keterlibatan masyarakat.

Santoso (2002) dalam buku *Teori-teori Kekerasan*, ada tiga kelompok besar yang menyangkut kekerasan, yaitu (1) kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor; (2) kekerasan sebagai produk struktur, seperti oleh aparaturnegara; dan (3) kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur. Selanjutnya, menurut Galtung (dalam Windhu, 1992:68-72) ada enam dimensi kekerasan, yaitu (1) kekerasan fisik dan psikologis, (2) pengaruh positif dan negatif, (3) adanya objek atau tidak, (4) adanya subjek atau tidak, (5) disengaja atau tidak, dan (6) yang tampak dan tersembunyi. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, kekerasan yang terjadi pada keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, termasuk kasus-kasus yang menyertainya merupakan kekerasan terstruktur oleh aparaturnegara. Kekerasan tersebut merupakan sebuah kekerasan psikologis dan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat yang dilakukan secara sengaja dan terang-terangan. Dalam pembangunan "rumah contoh", secara psikologis masyarakat pada awalnya diharapkan mencontoh rumah tersebut jika ingin menjadikan sebagian rumahnya sebagai akomodasi bagi wisatawan. Akibat adanya konflik terhadap penempatan "rumah contoh" yang tidak pada lokasi netral, masyarakat desa setempat menarik keinginannya untuk bergerak dalam bidang pariwisata berupa penyediaan akomodasi dengan memanfaatkan sebagian rumah

tinggalnya. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat lain yang sudah menggebu-gebu ingin meniru "rumah contoh" tersebut. Masyarakat membatalkan keinginannya untuk ikut mengubah rumah miliknya menjadi akomodasi seperti "rumah contoh". Dalam kasus ini, jelas masyarakat menjadi korban, di samping sudah kehilangan satu-satunya rumah yang memiliki tiang dua belas (*saka roras*) juga membuat trauma kepada masyarakat lain yang ingin berpartisipasi menyediakan akomodasi pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

Secara pemerintahan, dalam hal ini negara, tidak berhasil menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk memenuhi ambisi serta kepentingannya sebagai cerminan ke-*government*-nannya, negara menjalankan kekerasannya melalui pengembangan pariwisata tanpa mepedulikan hati nurani masyarakat. Dalam hal ini, *governance* tidak sama dengan *government*. *Government* menyangkut pemerintah dan politisi, sedangkan *governance* terdapat peleburan perbedaan antara yang diperintah dengan yang memerintah. Menurut Sumarto (2003:17), *governance* adalah mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antarkomponen *governance*, yaitu pemerintah, *civil society*, dan sektor swasta. Di samping itu, *governance* yang baik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, *predictability*, dan transparansi.

Pemerintah yang direpresentasikan oleh pemimpinnya (Gubernur Bali pada masa Orde Baru yang mengembangkan proyek Desa Wisata Jatiluwih) telah mengorbankan

masyarakat hanya untuk kepentingan pembangunan pariwisata, apalagi berdalih pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Pada pembangunan pariwisata seharusnya posisi pemerintah melindungi rakyat (masyarakat). Namun, yang terjadi adalah mem-”perdaya” (membohongi, membodohi) masyarakat. Jelas hal ini merupakan suatu tindakan yang keliru dan ironis.

Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam lokal genius Bali mengenal konsep *Caturguru Bhakti* atau yang biasa dikenal sebagai *Caturguru*. *Caturguru* terdiri atas (1) *bhakti* kepada *guru swadyaya*, yaitu Sang Hyang Widhi Wasa; (2) *bhakti* kepada *guru pengajian*, yaitu guru yang mengajar di sekolah; (3) *bhakti* kepada *guru wisesa*, yaitu negara/pemerintah; dan (4) *bhakti* kepada *guru rupaka*, yaitu orang tua. Dalam hal ini, sehubungan perlawanan masyarakat terhadap hegemoni pemerintah, yang terkait adalah *guru wisesa* karena konsep ini menyangkut hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara.

Wacana-wacana pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang dilontarkan oleh pemerintah merupakan wacana hegemonik dan menuntut kepatuhan dari masyarakat untuk melaksanakannya. Dalam ajaran *guru wisesa* memang disebutkan masyarakat harus mematuhi segala perintah pemerintah dan tidak boleh melawan (*metungkas*). Hal ini akan terjadi jika dengan asumsi ”pemerintah berpikir, bersikap, dan berbuat yang benar dalam pikiran masyarakat”. Namun, jika asumsi tersebut bertolak belakang ”pemerintah berpikir, bersikap, dan berbuat tidak benar dalam pikiran masyarakat”, akan menimbulkan perlawanan dari masyarakat.

Kenyataan di lapangan, terkait dengan pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, memang keagungan ajaran *guru wisesa* dihormati. Namun, karena masyarakat merasakan adanya ketidakadilan serta adanya pelanggaran-pelanggaran, maka kepatuhan yang semula ingin diciptakan menjadi suatu bumerang yang menyerang pemerintah meskipun masyarakat mengalami kekalahan. Pemerintah yang berkuasa pada saat pengembangan Desa Wisata Jatiluwih hingga saat ini rupanya tidak memiliki kearifan dalam diri mereka, apalagi pengabdian untuk membela kepentingan masyarakat. Dengan berbagai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pembangunan sarana pariwisata yang berujung pada terjadinya konflik, maka sudah seharusnya proyek pengembangan Desa Wisata Jatiluwih tersebut dikaji kembali keberlanjutannya, kalau tidak boleh dikatakan gagal.



**BAB VII**  
**DAMPAK DAN MAKNA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN**  
**KETERLIBATAN MASYARAKAT DI DESA WISATA JATILUWIH**

**7.1 Dampak Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat**

Selain dipandang sebagai sebuah gejala ekonomi, pariwisata juga dapat dipandang sebagai gejala sosial-budaya. Oleh karena pariwisata merupakan fenomena interaksi lintas budaya, yakni hubungan timbal balik antara individu atau kelompok orang yang memiliki perbedaan-perbedaan identitas budaya, lingkungan sosial, sikap mental, dan susunan psikologis (Wahab, 1989:65). Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka melihat dampak pengembangan pariwisata terhadap masyarakat setempat menyiratkan bahwa pariwisata adalah faktor luar yang menghantam masyarakat, yakni oleh Wood (dalam Pitana, 2006:257) disebut sebagai model "bola bilyard". Pada model ini masyarakat dihantam langsung oleh kehadiran pariwisata atau dihantam oleh broker-broker pariwisata sehingga membawa dampak bagi masyarakat tersebut.

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih seharusnya memposisikan masyarakat setempat sebagai pemain kunci (*key players*) dari pengembangan pariwisata yang dilakukan. Dengan berbagai keterbatasan serta kendala yang ada, harapan tersebut belum dapat seluruhnya terpenuhi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata

Jatiluwiw berdampak terhadap hal-hal sebagai berikut.

### **7.1.1 Pengelolaan Desa Wisata**

Sesuai dengan pengembangan desa wisata yang berkarakteristik pariwisata berbasis masyarakat, menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai tahap pembangunan. Tujuannya adalah agar pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan tersebut. Korten (1986) (dalam Pujaastawa, 2005:30) menyebutkan sebagai *community-based resource management* atau *community management*. Terdapat tiga alasan yang mendasari *community-based resource management* atau *community management*, yakni variasi lokal, sumber daya lokal, dan tanggung jawab lokal.

Sesuai dengan konsep dasar pengembangan desa wisata bahwa setiap program pembangunan yang akan direncanakan terhadap desa akan ditolokkan pada berbagai sistem norma, adat, dan budaya setempat. Sistem kelembagaan yang direncanakan menyandang program-program yang akan diusahakan semaksimalnya untuk menggunakan kelembagaan lokal yang sudah ada (Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknis Desa Wisata Terpadu Di Bali, 1992:9). Berangkat dari konsep dasar pengembangan tersebut, pengembangan Desa Wisata Jatiluwiw dilihat dari kelembagaan yang ada, khususnya dari struktur organisasi pengelola yang berbentuk *steering committee* (Gambar 5.7) masih mencerminkan struktur pengelolaan yang tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat. Dalam struktur organisasi

tersebut masih dijumpai unsur-unsur pemerintah sebagai cerminan kekuasaan, baik sebagai pelindung maupun sebagai pembina.

Masuknya unsur pemerintah yang merupakan representasi dari kekuasaan dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, dapat memperkuat kekuasaan yang dimilikinya dan dengan diskursus pengetahuan dapat menyebabkan terhegemoninya keterlibatan masyarakat pada pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih. Diskursus yang dipergunakan untuk menghegemoni adalah yang melemahkan masyarakat, seperti masyarakat tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan desa wisata, dan masyarakat tidak memiliki keahlian sebagai pengelola. Hal ini menurut Foucault (dalam Storey, 2003:132) merupakan suatu bentuk praktik-praktik kekuasaan yang terkait dengan posisi-posisi yang strategis. Posisi strategis itu adalah sebagai pengelola Desa Wisata Jatiluwih.

Masuknya unsur pemerintahan dalam struktur organisasi pengelola Desa Wisata Jatiluwih, yakni merupakan suatu cara atau teknik yang dikembangkan oleh pemerintah untuk tetap ikut dalam pengelolaan pembangunan pariwisata. Padahal, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratcharak (2007:159) di Phuket Thailand, pemerintah setempat sudah tidak ikut mengatur dalam pembangunan pariwisata. Pengaturan diserahkan kepada masyarakat setempat □ dapat bekerja sama dengan *partner* □ baik pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, implementasi, maupun pengawasan. Masuknya unsur pemerintahan dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, menurut Foucault (dalam Lubis, 2004:165) merupakan "strategi" pemilik kekuasaan untuk berlandung di balik regulasi. Dalam hal ini, pemilik kekuasaan menjadikan regulasi sebagai pembenar masuk dalam

struktur organisasi pengelola desa wisata, yaitu sebagai pelindung. Masuknya pemilik kekuasaan (pemerintah) sebagai pengelola tidak lain bertujuan untuk menghegemoni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih.

Sesuai dengan roh konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, seharusnya masyarakat (*desa adat* dan *subak*) diberikan kekuasaan penuh atas seluruh pengelolaan yang ada di Desa Wisata Jatiluwih. Pemerintah dan pelaku pariwisata hanya bertindak sebagai mitra kerja. Untuk itu, ke depan, struktur organisasi tersebut perlu didekonstruksi. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat benar-benar seluruhnya terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, sehingga Desa Wisata Jatiluwih pengelolaannya benar-benar berpusat pada masyarakat setempat. Hal ini diperkuat oleh Pujaastawa (2005:142) bahwa apabila kondisi *subak* dan *desa adat* sudah mapan maka, peran pemerintah dan pelaku pariwisata dapat dikurangi dan bahkan mungkin tidak dilibatkan lagi.

Selain dilihat dari sisi pengelolaan desa wisata, masuknya unsur pemerintah pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, juga berdampak terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih. Hal ini dimaksudkan sebagai masuknya unsur pemerintah (dalam hal ini yang ditunjuk adalah Kepala Desa Jatiluwih) sebagai pengelola retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih. Masuknya kepala desa sebagai pengelola retribusi masuk, di samping sebagai cerminan ketidakpercayaan pemerintah terhadap masyarakat setempat, juga sebagai bentuk hegemoni pemerintah terhadap keterlibatan masyarakat setempat pada pengelolaan retribusi masuk desa wisata. Hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah

terhadap masyarakat setempat ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kepala Desa Jatiluwih sebagai Pengelola Retribusi Masuk Desa Wisata Jatiluwih.

Keluarnya dua Surat Keputusan Bupati di atas, menurut Barker (2005:81) merupakan penggambaran terjadinya perang posisi pemerintah melawan perang manuver masyarakat. Masyarakat melakukan manuver berupa keinginan mengelola retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih, sedangkan pemerintah berkemauan juga untuk mengelola retribusi masuk tersebut karena sudah berjasa dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Dengan adanya keinginan yang sama dari kedua belah pihak, menyebabkan terjadinya perang posisi. Pemerintah dengan pengetahuan/kekuasaan yang dimiliki dapat memenangkan perang posisi tersebut. Oleh karena menurut Foucault (dalam Lubis, 2004:163) kekuasaan itu dipraktikkan dalam bidang tertentu melalui aturan-aturan dan normalisasi. Dengan demikian, kedua Surat Keputusan Bupati Tabanan yang dikeluarkan itu merupakan suatu bentuk praktik kekuasaan sekaligus merupakan suatu bentuk hegemoni pemerintah terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih.

Dengan keluarnya kedua Surat Keputusan Bupati Tabanan tersebut, yakni membuat inisiatif dan kreativitas masyarakat terpasung dalam mengelola retribusi masuk. Dengan demikian, secara tidak langsung aspirasi masyarakat juga terhambat. Kondisi ini mengembalikan model pengelolaan dari berbasis masyarakat (*bottom-up*) ke model pengelolaan dengan budaya lama (*top-down*) sehingga masyarakat selalu

tergantung kepada pemerintah dalam bidang pariwisata. Hal ini berarti kekuasaan berupaya menghasilkan sesuatu yang baru dalam rangka melanggengkan ketergantungan setiap orang padanya. Berkaitan dengan hal ini, Foucault (dalam Piliang, 2005:111-114) menegaskan bahwa pelanggengan terhadap kekuasaan yang paling efektif adalah dengan cara memberi ruang hidup atau ruang gerak seluas-luasnya bagi pelepasan berbagai bentuk hasrat di dalam kekuasaan itu sendiri. Dalam hal ini, hasrat kekuasaan itu berupa keinginan untuk berkuasa pada pengelolaan retribusi masuk Desa Wisata Jatiluwih.

Dalam rangka pengembangan ke depan, batasan keterlibatan masyarakat perlu mendapat ketegasan dari semua *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan retribusi masuk, yakni dengan tujuan agar masyarakat setempat benar-benar terlibat sepenuhnya dalam pengelolaan retribusi masuk tersebut. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam masyarakat, khususnya pada pengelolaan retribusi masuk dapat dipenuhi dengan memberikan bimbingan serta pelatihan.

Posisi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan retribusi masuk dapat bersifat koordinasi, artinya dengan model seperti ini akan meniadakan pemikiran tentang dominasi dari kedua belah pihak. Dengan posisi seperti ini, dapat menimbulkan interaksi yang bersifat terbuka antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan retribusi masuk, di samping berpeluang timbulnya berbagai inovasi dalam menjawab tantangan pengelolaan pengembangan pariwisata, khususnya terkait dengan retribusi masuk desa wisata. Terkait dengan tantangan pengembangan pariwisata, khususnya dalam pengelolaan retribusi masuk ke daya

tarik wisata, penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bali (2008:86) merekomendasikan penerapan sistem pungutan retribusi satu pintu masuk Bali, melalui pembentukan perusahaan daerah, penyusunan peraturan daerah, dan merancang sistem dan prosedur pungutan retribusi satu pintu.

Hasil penelitian Bappeda Provinsi Bali di atas jika dikaitkan dengan sistem pemungutan retribusi yang telah dilakukan di Desa Wisata Jatiluwih, memiliki beberapa kesamaan dalam hal dampak yang akan ditimbulkan. Dampak tersebut sebagai berikut. *Pertama*, timbul rasa ketidakadilan. Hal ini akan timbul manakala hasil dari pemungutan retribusi masuk satu pintu ke Bali tersebut tidak secara merata terdistribusi kepada kabupaten/kota yang ada di Bali. Sedangkan untuk Desa Wisata Jatiluwih, rasa ketidakadilan tersebut muncul sebagai akibat tidak meratanya pembagian hasil retribusi masuk daya tarik wisata antara *Desa Adat* Jatiluwih dengan *Desa Adat* Gunungsari.

*Kedua*, timbul pungutan liar pada daya tarik wisata yang bersifat *public good*. Kondisi ini terjadi karena masyarakat sekitar tempat daya tarik wisata yang bersifat *public good* (seperti pemandangan alam) tersebut ingin mendapatkan hasil dari daya tarik wisata yang ada di sekitar mereka. Untuk mencapai keinginan tersebut, dilakukan pungutan liar terhadap wisatawan yang kebetulan menikmati daya tarik wisata *public good* tersebut. Terkait dengan Desa Wisata Jatiluwih, pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat setempat berupa ”biaya *shooting*” atau biaya pengambilan gambar, selain disebabkan oleh keinginan mendapatkan hasil dari pemandangan yang disajikan oleh terasering sawah, juga sebagai akibat dangkalnya

pemahaman masyarakat setempat terhadap implementasi pariwisata berbasis masyarakat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

### **7.1.2 Pengambilan Gambar oleh Wisatawan**

Pada beberapa daerah ada kecenderungan bahwa pengembangan pariwisata selalu dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Sebagai dampaknya timbul usaha-usaha untuk mengkomodifikasikan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dikomodifikasi, seperti keramah-tamahan dan keindahan alam dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari pengembangan pariwisata yang dilakukan.

Pada musim-musim kehadiran wisatawan ke suatu daya tarik wisata, sering kali hubungan antara wisatawan dengan penduduk yang menerima kehadiran mereka merupakan hubungan yang bersifat komodifikasi. Akibatnya, ada hal-hal yang termasuk unik (*curiosity*) dan daya tarik sosial (*social interest*) dibuat sedemikian rupa sehingga setiap wisatawan yang hendak menyaksikan sesuatu harus dengan imbalan yang setimpal. Kejadian seperti ini sering terjadi di beberapa destinasi pariwisata dan daya tarik wisata. Untuk di Bali, yang pernah terjadi adalah kalau wisatawan membidikkan kamera pada seseorang, maka secara spontan orang tersebut menengadahkan tangannya dengan mengatakan, "One dollar, sir!". Hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang pariwisatanya sudah berkembang.

Sementara itu, untuk daerah-daerah yang pariwisatanya belum berkembang, kalau ada wisatawan yang membawa kamera ke daerah-daerah terpencil dan bertemu penduduk setempat, maka secara otomatis penduduk setempat akan membuat barisan

dan mereka meminta untuk di foto. Setelah di foto mereka tidak akan meminta bayaran, tetapi mengucapkan terima kasih.

Fenomena tentang ”*One dollar, sir!*” di atas juga terjadi di Desa Wisata Jatiluwih, tetapi dengan objek yang berbeda. Jika ada wisatawan yang memotret terasering sawah dengan latar belakang keindahan alamnya, maka wisatawan tersebut akan didatangi oleh warga yang melihat aktivitas mereka untuk dimintai uang, yang mereka sebut sebagai ”biaya *shooting*”. Hal ini berarti masyarakat desa setempat sudah melakukan komodifikasi terhadap keindahan alam. Sehubungan dengan hal ini Barker (2004:408) mengemukakan bahwa komodifikasi sebagai sebuah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme sehingga objek, kualitas, dan tanda dijadikan sebagai komoditas. Dalam hal ini komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar.

Jika dikaitkan dengan proses yang dilalui oleh komodifikasi, dari proses produksi, konsumsi, dan distribusi, maka pada saat pengambilan gambar terasering sawah dengan latar belakang keindahan alam, sebenarnya sudah terjadi proses produksi sekaligus konsumsi. Pemandangan dan keindahan alam sebagai komoditas pada saat itu hanya dinikmati oleh wisatawan tersebut. Tetapi jika komoditas tersebut diproduksi secara massal, misalnya sebagai *postcard*, maka pada proses inilah terjadi keterlibatan kapitalisme, yang menurut Turner (1992:115-138) tujuannya adalah ekonomi uang yang didasarkan atas semangat menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pada kondisi seperti ini kapitalis akan memproduksi *postcard* dalam bentuk massal (*mass product*).

Adanya kejadian seperti ini sempat meresahkan para pelaku pariwisata yang secara kebetulan mengemas Desa Wisata Jatiluwih dalam paket wisata mereka. Hal ini berdampak pada citra (*image*) kepariwisataan Desa Wisata Jatiluwih pada khususnya dan Bali pada umumnya.

Dari sisi masyarakat setempat, komodifikasi terjadi karena adanya interpretasi yang salah terhadap pariwisata berbasis masyarakat pada pengembangan desa wisata di desa setempat. Masyarakat terlalu kebablasan dalam mengartikan pengembangan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Menurut masyarakat setempat, apa pun boleh dilakukan sepanjang untuk masyarakat setempat. Hal ini tentulah suatu interpretasi yang kurang tepat. Untuk mengatasinya, perlu konsensus di antara *stakeholders* yang terlibat, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, serta penataran terhadap masyarakat terkait dengan tingkah laku dan kesenangan wisatawan selama berada di daya tarik wisata. Hasil pendidikan, pelatihan dan penataran tersebut dapat dijadikan kebijakan pengembangan pariwisata yang sedang dan akan dilaksanakan di Desa Wisata Jatiluwih.

### **7.1.3 Penyerapan Pekerja dari Masyarakat Setempat**

Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih pada aras praktis berdampak terhadap terserapnya masyarakat setempat sebagai pekerja pada usaha pariwisata. Masyarakat desa setempat yang terserap bekerja pada usaha pariwisata, bekerja secara langsung pada usaha restoran dan penginapan. Secara tidak langsung masyarakat setempat bekerja sebagai pemasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha pariwisata tersebut.

Jumlah masyarakat setempat yang bekerja secara langsung pada usaha pariwisata sangat kecil. Sebagian besar kesempatan kerja langsung yang ada diisi oleh pekerja pendatang, baik dari luar Desa Wisata Jatiluwih maupun dari luar Bali.

Penggunaan pekerja pendatang merupakan sebuah konsekuensi dari pengembangan pariwisata, yang seakan-akan secara langsung dan tidak langsung pariwisata mengundang pekerja-pekerja dari luar. Hal ini menurut Pitana (2003:131) berasosiasi dengan proses indigenisasi masyarakat Bali dan meningkatkan in-migrasi dari luar pulau. Selanjutnya, jika dilihat dari konsep "kemerekaan" dan "kekitaan" atau *keliyanan*, Bali dengan destinasi-destinasi pariwisatanya dituntut untuk tidak saja menjadi "kota plural", tetapi terutama sebagai "kota multikultural", tempat bertemu dan silang-menyilangnya manusia dari berbagai suku, ras, agama, bangsa, profesi, seks, serta objek, yang menunjukkan hubungan interteks lintas budaya, antar-budaya, multikultural, dan subkultural yang kompleks (Piliang, 2004:474-475).

Penyerapan pekerja yang sangat kecil dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, selain disebabkan oleh kecilnya kesempatan yang diberikan oleh pemilik atau pengontrak usaha pariwisata, juga disebabkan oleh pengaruh internal masyarakat setempat. Generasi muda dari Desa Wisata Jatiluwih lebih tertarik bekerja di luar desa mereka. Hal ini karena besarnya faktor penarik yang berasal dari luar desa mereka, khususnya dari daya tarik wisata yang sudah maju dan terkenal yang ada di Bali, seperti: Tanah Lot, Kuta, Nusa Dua, Sanur, Candidasa, dan Lovina serta daya tarik bekerja ke kapal pesiar. Dengan kuatnya daya tarik yang berasal dari destinasi pariwisata yang sudah maju dan berkembang itu, membuat para pekerja yang

memiliki keahlian dan kemampuan, yakni lebih banyak terserap bekerja ke luar desa setempat atau ke daya tarik wisata yang sudah maju dan terkenal di atas.

Larinya generasi muda desa setempat untuk bekerja ke daya tarik wisata yang sudah maju dan terkenal di perkotaan, menurut Giddens (dalam Abdullah, 2006:38) merupakan *emancipatory politics* dan *life politics*. Sebagai *emancipatory politics*, konsumsi perkotaan membebaskan manusia dari hambatan-hambatan posisi sosial tradisional. Selanjutnya, sebagai *life politics*, konsumsi perkotaan yang dilakukan oleh generasi muda Desa Wisata Jatiluwih merupakan politik aktualisasi diri dalam lingkungan yang terorganisasi secara reflektif, dalam hal ini reflektivitas menghubungkan diri dan tumbuh ke dalam sistem global.

Masyarakat yang terserap bekerja pada usaha pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, meskipun jumlahnya masih sangat kecil, telah merasakan adanya peningkatan pendapatan dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya yang mereka tekuni. Peningkatan pendapat ini juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka, baik dilihat dari sisi *artha*, *dharma*, dan *kama*.

Dalam kerangka meningkatkan kualitas pengembangan pariwisata, lebih tertariknya pemuda setempat bekerja di luar desa mereka merupakan bentuk pengingkaran terhadap pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), di samping juga merupakan penarik datangnya pekerja pendatang dari luar Desa Wisata Jatiluwih. Untuk itu, perlu ditanamkan sedini mungkin kepada para calon tenaga kerja dari desa setempat tentang kearifan lokal *jele melah gelahang*. Artinya, hasil apa pun yang terjadi pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih,

sepatutnya masyarakat setempat tetap menjadi pemain inti di antara pekerja yang bekerja pada usaha pariwisata yang ada di desa tersebut.

Dalam konteks pergeseran tempat, berpindahnya sebagian generasi muda Desa Wisata Jatiluwih bekerja ke kota, menurut Appadurai (dalam Abdullah, 2006:38) telah menghilangkan batas-batas kebudayaan karena kota memiliki *landscape* dan *ethnoscape* yang berbeda dengan desa. Dalam kondisi seperti ini, menurut Anderson dan Friedman (dalam Abdullah, 2006:38) yang patut dipertanyakan kepada generasi muda tersebut adalah masalah identitas ke-lokal-an mereka. Identitas ke-lokal-an yang dipertanyakan, tidak saja menyangkut gaya hidup mereka setelah bergaul dan mengonsumsi modernitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana generasi muda tersebut melakukan reproduksi lokalitas, terutama yang terkait dengan pengembangan pariwisata di desa asalnya. Reproduksi lokalitas ini menjadi penting karena dapat dijadikan pendorong bagi pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, meskipun generasi muda tersebut tidak bekerja secara langsung pada usaha pariwisata di desa setempat.

#### **7.1.4 Pelecehan *Trihita Karana* (*Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan*)**

Sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan masyarakat serta kehadiran masyarakat dari luar Bali yang kurang memahami kebudayaan Bali pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, yakni berdampak pada terjadinya pelecehan terhadap *Trihita Karana*, yaitu pada *parhyangan*. Pelecehan terhadap *parhyangan* ini berupa pelecehan radius kesucian pura *dang kahyangan* di desa setempat. Salah

seorang masyarakat desa setempat, Wayan Mustika (60 tahun) terkait dengan pelecehan *parhyangan* di Desa Wisata Jatiluwih, pada wawancara tanggal 17 September 2008 menyatakan sebagai berikut.

*”Titiang selaku masyarakat tur selaku rohaniwan, nenten habis pikir, pemerintah nenten mekarya becik, sakewanten ngerusak kedamaian masyarakat iriki, tur puran titiang iriki (Pura Luhur Petali) dados leteh.”*

Kasus pembangunan ”Vila Petali” yang berada di kawasan suci pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, yakni menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara pihak-pihak terkait. Pemerintah melalui kerja samanya dengan pengusaha ”Vila Petali” ingin mengembangkan pariwisata dengan membangun sarana pokok pariwisata berupa akomodasi, sedangkan masyarakat setempat (penentang keberadaan ”Vila Petali”) bersama-sama dengan elite desa ingin mempertahankan keberadaan hutan yang berada pada kawasan suci dan disucikan oleh masyarakat sesuai ajaran *wana kerthi*. Hal ini juga diperkuat dengan *Bhisama* tentang kesucian pura dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI Pusat) sesuai keputusannya Nomor 11/Kep./I/PHDIP/1994.

Masuknya kapitalisme ke pedesaan adalah sebagai akumulasi primitif (*primitive accumulation*) yang merupakan suatu kekuatan pengubah Orde [tatanan] Lama pra-kapitalis menuju pada terbentuknya Orde [tatanan] Baru yang kapitalis. Dalam masyarakat desa akumulasi primitif ini setidaknya dapat dilihat pada dua hal. *Pertama*, adanya negaraisasi tanah dan kekayaan alam kepunyaan rakyat melalui hukum atau kekerasan, kemudian untuk lembaga-lembaga negara (birokrasi pemerintah, pengadilan, dan lain-lain) yang memberikan hak-hak baru kepada pihak

pengusaha/proyek lain. *Kedua*, konsentrasi tanah dan kekayaan alam melalui proses sosial-ekonomi, baik berbentuk transaksi ekonomi jual beli maupun berbentuk ekstra ekonomi seperti gadai atau sejenisnya. Kedua bentuk akumulasi primitif ini jelas terlepas dari akses dan kontrol petani.

Secara prinsip, menurut Seda (1996:272) ada lima prinsip kapitalisme. *Pertama*, kapitalisme adalah pengakuan penuh pada hak milik perorangan atau individu tanpa batas-batas tertentu. Hak milik pribadi adalah jaminan bagi individu yang bersangkutan untuk menegakkan kebebasan dan kemerdekaan. *Kedua*, kapitalisme merupakan pengakuan akan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. *Ketiga*, kapitalisme adalah pengakuan akan adanya dorongan atau motivasi ekonomi dalam bentuk semangat untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. *Keempat*, kapitalisme adalah pengakuan adanya kebebasan melakukan kompetisi dengan individu lain. *Kelima*, kapitalisme mengakui berlakunya hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar.

Kehadiran kapitalisme ke Desa Wisata Jatiluwih telah mengorbankan matra *parhyangan* karena dibangunnya "Vila Petali" yang mencaplok wilayah kesucian Pura Luhur Petali yang merupakan pura *dang kahyangan*. Pembangunan "Vila Petali" pada radius kesucian Pura Luhur Petali merupakan pelecehan sekaligus telah diabaikannya kekuatan spiritual yang hidup dalam masyarakat.

Sesuai *Bhisama* tentang Kesucian Pura, telah diatur ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, dan *apenyenger*. Untuk pura *sadkahyangan* dipakai ukuran *apeneleng agung* (minimal lima kilo meter dari pura) dan untuk pura *dang kahyangan* dipakai

ukuran *apeneleng alit* (minimal dua kilo meter dari pura). Selanjutnya, untuk pura *kahyangan tiga* dan lain-lain dipakai ukuran *apenimpug* dan *apenyengker*. Dalam kasus "Vila Petali" yang berada di sebelah utara Pura Luhur Petali sebagai pura *dang kahyangan*, vila ini sudah melanggar *Bhisama* kesucian pura dan juga telah mengganggu pura tersebut karena berada pada jarak kurang dari dua kilo meter. Hal ini juga berarti tidak sesuai dengan aturan *apeneleng alit* (minimal dua kilo meter dari pura) sesuai yang dipersyaratkan oleh *Bhisama* tentang Kesucian Pura.

Untuk mengatur keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan, dalam kearifan lokal Bali dikenal adanya konsep *Trihita Karana* yang meliputi tingkat kehidupan mikro (keluarga), meso (*desa adat*), dan makro (daerah). Secara mikro (keluarga), *Trihita Karana* terwujud dalam (1) individu-individu anggota keluarga sebagai *pawongan*, (2) rumah dan pekarangan sebagai *pelemahan*, dan (3) *merajan* atau *sanggah* sebagai *parhyangan*. Secara meso (*desa adat*, desa, dan seterusnya) dan secara makro (daerah), *Trihita Karana* terwujud dalam (1) masyarakat sebagai *pawongan*, (2) lingkungan teritorial atau wilayah sebagai *palemahan*, dan (3) pura yang ada di wilayah tersebut sebagai *parhyangan*.

Selain *Trihita Karana*, di Bali juga dikenal kearifan lokal (*local genius*) seperti konsep *sukla* dan *leteh* atau antara suci dan tidak suci. Selanjutnya, dalam tata letak bangunan, di Bali dikenal adanya *Trimandala*, dengan peruntukkan sebagai berikut: (1) tempat suci berada pada *utama mandala*, (2) perumahan atau pemukiman berada pada *madya mandala*, dan (3) tempat-tempat yang kotor, seperti: kamar mandi,

kandang hewan berada pada *nista mandala*. Dalam hal ini, jika keberadaan Pura Luhur Petali dikaitkan dengan ketiga *lokal genius* di atas, maka Pura Luhur Petali merupakan *parhyangan* (dari sisi *Trihita Karana*), Pura Luhur Petali merupakan kawasan *sukla* (dari sisi *sukla* dan *leteh*) dan Pura Luhur Petali berada pada *utama mandala* (dari sisi *Trimandala*).

Sebagai pura *dang kahyangan*, Pura Luhur Petali memiliki radius kesucian *apeneleng alit* atau dua kilo meter yang titik pusatnya adalah Pura Luhur Petali. Oleh karena di sebelah selatan pura tersebut sudah ada banyak bangunan yang merupakan pemukiman penduduk desa setempat (ada yang dibangun setelah tahun 1994 atau setelah *Bhisama* kesucian pura dikeluarkan), maka terhadap bangunan di sebelah selatan pura ini diberikan kebijakan berupa pengurangan batas minimal dari dua kilo meter menjadi 500 meter dengan Pura Luhur Petali sebagai pusatnya.

Dalam RDTR tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005, khususnya pada Pasal 14, Ayat (5) butir b) menyebutkan kebijakan pengelolaan sebagai berikut.

Bangunan yang telah ada dan ternyata melanggar radius kawasan suci/tempat suci diberlakukan tiga ketegori yaitu sebagai berikut:

1. bila pelanggaran yang terjadi meresahkan masyarakat dan berdampak luas/lintas kabupaten dan kota dikenakan pembongkaran;
2. bila pelanggaran meresahkan masyarakat dan berdampak lokal, dikenakan pembatasan umur bangunan maksimum lima tahun dan setelah itu dibongkar; dan
3. apabila pelanggaran berdampak kecil dikenakan pemberian status quo (bangunan boleh dimanfaatkan sampai kondisi bangunan rusak, dengan tanpa melakukan perbaikan).

Dari tiga butir kebijakan pengelolaan di atas jika dikaitkan dengan bangunan yang melanggar kesucian pura terlihat adanya unsur subjektivitas, terutama terhadap cara pandang pada dampak [akibat] yang ditimbulkan bangunan yang melanggar radius kesucian pura. Padahal seharusnya tindakan untuk melindungi kesucian pura segera diambil tanpa menunggu dampak [akibat] yang akan timbul, dalam hal ini bila perlu meskipun tanpa dampak [akibat] penegakan kesucian pura terus dilakukan. Selain itu, penggunaan kata-kata "berdampak lokal" dan "berdampak kecil" juga memiliki arti yang sangat abstrak dan subjektif. Berdampak lokal bisa diartikan sebagai lokal desa setempat, lokal Kabupaten Tabanan, atau lokal Provinsi Bali. Kemudian, berdampak kecil juga sangat abstrak untuk diartikan. Penggunaan kata-kata seperti ini, Foucault (dalam Lubis, 2006:151) menganggap manusia lebih ditentukan oleh struktur/sistem (sosial, politik, ekonomi, dan bahasa) yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, pikiran manusia diciptakan atau dikonstruksi oleh bahasa/budaya. Lebih lanjut menurut Foucault, hal ini merupakan kematian manusia (*the death of man*).

Penggunaan kata-kata yang bersifat subjektif dan abstrak –sebagai media untuk mengaburkan tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah–, dalam hal ini pemerintah juga melindungi kapitalisme yang menguntungkan bagi terlaksananya program-program pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Hal ini tercermin pada wawancara yang dilakukan terhadap I Wayan Diasa (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan) pada tanggal 27 Juli 2008, terkait implementasi *Bhisama* Kesucian Pura di Desa Wisata Jatiluwih mengatakan sebagai berikut.

”*Bhisama* yang mengatur kesucian pura harus dilaksanakan terkait bangunan-bangunan yang melanggar batas kesucian pura. Sedangkan terhadap RDTR Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih, itu sudah harga mati yang harus diikuti dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Jatiluwih. Dan yang paling penting, harus ada toleransi dalam pelaksanaan butir-butir dari RDTR tersebut.”

Dari pernyataan tersebut terlihat adanya tarik-menarik kepentingan antara dilaksanakannya *Bhisama* Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dengan memberikan batas *apeneleng alit* (minimal dua kilo meter ke utara dari Pura Luhur Petali) sebagai batas wilayah kesucian pura. Dengan kata lain, melaksanakan RDTR dengan setengah hati karena investor masih akan diberikan ”toleransi” terhadap pelaksanaan butir-butir yang ada pada RDTR tersebut, khususnya yang terkait dengan permasalahan kesucian pura. Padahal masalah kesucian pura seharusnya harga mati.

Adanya toleransi yang disampaikan oleh salah satu aparat pemerintah Kabupaten Tabanan seperti ini, yakni semakin memperjelas posisi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kasus ”Vila Petali”. Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui surat-surat yang dikeluarkan (seperti yang telah diuraikan sebelumnya) hanyalah bertujuan menarik simpati masyarakat desa setempat, yang seakan-akan berada di posisi masyarakat untuk membela ketertindasan dari ancaman kapitalisme. Namun senyatanya, apa yang sudah dilakukan itu hanyalah *life service* semata. Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kasus ”Vila Petali” mengambil posisi sebagai penghegemoni masyarakat dengan mempergunakan isu-isu pembangunanisme yang sudah dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih.

Pihak-pihak yang mendukung keberadaan "Vila Petali" mengklaim bahwa kegiatan di vila tersebut tidak akan menimbulkan *leteh* bagi pura sekitarnya. Menurut mereka, orang-orang yang singgah ke vila tersebut adalah mereka yang sedang melaksanakan kegiatan wisata berjalan menyusuri hutan (*trecking*), dan biasanya adalah wisatawan yang berpendidikan, mengerti alam, dan sangat menghormati budaya dan adat istiadat setempat.

Perbedaan sudut pandang antara pihak yang menolak dan mendukung keberadaan "Vila Petali" memberikan gambaran bahwa "pemaknaan agama" didekonstruksi oleh logika komodifikasi. Masyarakat desa setempat yang berpegang pada ideologi *Trihita Karana* pantang untuk mengkomodifikasi wilayah kesucian pura, sedangkan masyarakat yang berlogika komodifikasi menganggap wilayah kesucian pura sebagai komoditas untuk dijual ke pasar. Menurut Habermas (dalam Atmadja dkk., 2008:247-248) pendukung logika komodifikasi terjebak dalam rasionalitas instrumental yang berimplikasi pada pemaknaan zona suci pura, yakni bukan sebagai zona protektif kesakralan, melainkan sebagai instrumen untuk mendapatkan uang. Lebih lanjut, menurut Atmadja, logika komodifikasi menguasai para aktor yang terlibat dalam desakralisasi zona suci pura, dan bisa pula menjangkiti *pengempon* pura.

Dari pemaknaan agama yang syarat dengan kepentingan ekonomi kapitalistik itu, yakni merupakan suatu usaha untuk melemahkan citra Bali yang mendapat dukungan penuh dari Agama Hindu. Dalam hal ini Provinsi Bali dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 yang mencapai 3.702.814 orang, sebanyak 3.298.643

orang (89,08%) memeluk agama Hindu, sebanyak 21.590 orang (0,58%) memeluk agama Budha, sebanyak 319.149 orang (8,62%) memeluk agama Islam, sebanyak 30.322 orang (0,82%) memeluk agama Protestan, dan sebanyak 33.110 orang (0,90%) memeluk agama Katholik.

Dilecehkannya Pura Luhur Petali melalui pembangunan "Vila Petali" pada radius kesucian pura merupakan pelecehan terhadap budaya serta religiusitas masyarakat Bali. Sayangnya, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai kekuatan yang mewakili umat Hindu tidak berdaya menghadapi pelecehan tersebut. Menurut I Gusti Ngurah Sudiana (42 tahun) Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Bali pada wawancara tanggal 21 Agustus 2008 menyatakan sebagai berikut.

"PHDI Bali sudah secara terus menerus melakukan sosialisasi tentang isi dari *Bhisama* Kesucian Pura. Dalam implementasinya, PHDI tidak memiliki landasan untuk memaksakan kepada pihak-pihak tertentu agar menaati isi dari *Bhisama* tersebut. Namun, secara moral pihak-pihak terkait diimbau untuk menaati isi *Bhisama* Kesucian Pura."

Dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia [Bali] tidak memiliki keberanian untuk menegakkan *Bhisama* yang sudah dibuat. Mereka mencari "kambing hitam" dengan menyatakan ketiadaan dari landasan yang menjadi payung bagi tindakan [penegakan] yang dilakukan. Malahan mengharapkan kapitalisme agar secara moral menaati isi *Bhisama* tersebut. Parisada Hindu Dharma Indonesia [Bali] yang merupakan harapan terakhir masyarakat Bali, telah terhegemoni oleh pemerintah. Fenomena ini tidak sejalan dengan pemikiran Gramsci (1983:120) yang menyatakan bahwa intelektual tradisional sebagai sebuah *esprit de corps*, yang melihat dirinya sebagai kelompok sosial yang berkuasa, yang otonom,

dan yang independen, ternyata terhegemoni. Begitu kuatnya hegemoni negara mendukung libido kapitalisme global dengan mengabaikan seruan moral intelektual tradisional terhadap pelecehan budaya sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kekeroposan budaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan representasi masyarakat (termasuk masyarakat desa) juga dibuat tidak berdaya menghadapi hegemoni pemerintah terkait dengan kawasan suci. Dalam hal ini DPRD Kabupaten Tabanan melalui surat Nomor 172/1773/DPRD telah merekomendasikan kepada Bupati Tabanan untuk menindak tegas pemilik "Vila Petali". Namun, rekomendasi DPRD Tabanan tersebut hanya menghasilkan keluarnya surat Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama, S.Sos. kepada Wawan Setiawan (pengusaha "Vila Petali"), yakni berupa PERINGATAN II.

Dengan terjadinya kekisruhan pada penegakan tata ruang sebagai akibat dilanggarnya kawasan suci oleh pembangunan vila-vila, membuat wakil rakyat yang merupakan representasi masyarakat ikut memberikan pendapatnya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkat provinsi, DPRD Bali melalui Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) pada Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Raperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, telah membahas masalah kawasan suci, baik berorientasi pada kondisi riil yang terjadi di lapangan maupun berdasarkan peraturan daerah (perda) yang berlaku. Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dalam pandangan umumnya melalui juru bicaranya

I Made Arjaya, S.E.,M.Si. menyampaikan sebagai berikut.

”... Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan peraturan daerah yang sudah barang tentu mengatur dan mengikat seluruh kabupaten/kota yang ada di Bali. Karena bersifat mengikat, maka pemerintah kabupaten/kota wajib taat dan patuh terhadap perda dimaksud. Selanjutnya, dalam menetapkan perda di tingkat kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan perda yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Misalnya, perda tentang tata ruang yang mengatur kawasan suci, kondisi riil yang terjadi di lapangan kawasan suci dimaksud dilanggar oleh kabupaten/kota.”

(Majalah DPRD Bali, Triwulan II, Tahun 2008, hal. 2)

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar (F-PG) juga ikut menyuarakan tentang kawasan suci. Fraksi ini melalui juru bicaranya Gede Agra Kumara, S.H. dalam pandangan umumnya menyampaikan sebagai berikut.

”... tentang kewenangan pemerintah provinsi agar dapat dijalankan secara konsisten dan tidak tumpang tindih dengan kabupaten/kota mengingat kasus-kasus yang terjadi belakangan ini tentang pemanfaatan lahan, seperti: hutan, danau, kawasan suci, dan lain-lain yang menjadi polemik belakangan ini, menurut pandangan kami adalah sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang kewenangan urusan pemerintahan sehingga investasi yang seharusnya melalui pemerintah provinsi, diambil alih oleh kabupaten/kota.”

(Majalah DPRD Bali, Triwulan II, Tahun 2008, hal. 10)

Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat [Daerah] yang merupakan representasi masyarakat sudah mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar benar-benar memperhatikan implementasi dari perda tentang tata ruang serta *Bhisama* kesucian pura, tetapi tuntutan tersebut tidak berarti apa-apa bagi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan betapa mekanisme demokrasi sudah berjalan, tetapi kekuatan hegemoni pemerintah jauh lebih dahsyat sehingga mengalahkan segala hal yang sudah diperjuangkan oleh masyarakat. Begitu kuatnya hegemoni merasuki masyarakat yang

mendukung keberadaan "Vila Petali" sehingga mereka rela mengorbankan religiusitas yang sudah jauh tertanam di hati mereka serta di hati para *leluhur*-nya. Pengorbanan religiusitas ini merupakan suatu keterpaksaan yang dilakukan oleh masyarakat karena sudah sangat tidak berdaya menghadapi hegemoni pemerintah.

Pelanggaran terhadap isi *Bhisama* kesucian pura oleh kapitalisme sebagai akibat penafsiran yang dilakukan, perlu dilakukan dekonstruksi sehingga menurut Lubis (2004:103) akan diperoleh makna baru sesuai dengan apa yang diharapkan oleh *Bhisama* tentang Kesucian Pura. Menurut Atmadja dkk. (2008:249) dekonstruksi terhadap makna kawasan (zona) suci pura sudah terjadi, yakni zona suci sebagai ruang yang mematikan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal serta zona suci sebagai simbol ketidakadilan. Pemaknaan terhadap zona suci sebagai simbol ketidakadilan terjadi karena masalah yang sama dijumpai pada pura lain, tetapi berada pada posisi pembiaran.

Munculnya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Surat Keputusan tentang Kawasan Wisata serta Penetapan Daya Tarik Wisata Bali menyiratkan telah dibukanya ruang-ruang (*space*) yang ada di Bali bagi kepentingan pariwisata. Dalam hal ini tampak bahwa semua keputusan dan perencanaan terkait dengan implementasi program-program pembangunan pada masa Orde Baru datang dari atas (*top down*), dan masyarakat di tingkat akar rumput tidak pernah diajak berbicara tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat dibuat terkejut karena secara tiba-tiba mereka harus melaksanakan program-program pembangunan, yang sebenarnya mereka sendiri

tidak mengetahui pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan mengorbankan perasaan, martabat, serta harga diri, mereka terpaksa menerima pembangunan tersebut.

Dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, sampai saat ini masyarakat [sebagian kecil] petani kehilangan tanah karena mereka dipaksa untuk menjual tanahnya. Harga diri, martabat, serta perasaan religius mereka juga ternoda dengan dekatnya jarak "Vila Petali" terhadap Pura Luhur Petali yang menjadi simbol religiusitas masyarakat setempat. Salah seorang warga masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, Pan Sunasih (71 tahun) yang merupakan salah seorang penjual tanah di sebelah utara Pura Luhur Petali pada wawancara tanggal 18 September 2008 menyatakan sebagai berikut.

"Saya terpaksa menjual tanah saya karena adanya tekanan dari *calo* tanah dari desa ini. Mereka mengatakan tanah saya tempatnya jelek, lebih baik cari usaha lain saja. Karena terpaksa, saya turuti, dan usaha baru saya gagal sehingga saya hanya menggantungkan ekonomi dari sisa sedikit sawah yang ada, itupun anak-anak saya banyak. Saya menyesal menjual tanah karena ternyata mereka (pembeli) membuat bangunan sehingga saya berdosa membuat hutan rusak, dan pura kami di desa ini juga *leteh*."

Apa yang dikemukakan oleh Pan Sunasih (71 tahun), yakni merupakan suatu realitas di lapangan. Oleh karena di samping hilangnya pekerjaan para penjual tanah tersebut, pada aras *pawongan* berakibat, yakni hubungan yang renggang di antara masyarakat. Kerenggangan hubungan tersebut terjadi antara penjual tanah dan *makelar* atau *calo* tanah dari desa setempat yang sudah diracuni oleh logika komodifikasi.

Dengan semakin dikenalnya Desa Wisata Jatiluwih, mengakibatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung menarik pemilik modal besar (investor) menanamkan modalnya dalam bentuk pengembangan sarana kepariwisataan di lokasi-lokasi yang strategis di desa tersebut. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005 tentang RDTR Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih, luas wilayah perencanaan mencapai 2.233 hektar. Dari luas wilayah perencanaan tersebut, khusus untuk kawasan budi daya pariwisata diarahkan pada pembangunan fasilitas daya tarik wisata berupa pondok wisata (*homestay*) maksimum tiga kamar per unit bangunan dengan fasilitas makan dan minum, tempat-tempat peninjauan/pengamatan panorama, serta fasilitas atraksi wisata seperti *trecking* dan agrowisata. Pengembangan fasilitas daya tarik wisata pada kawasan pemukiman dilakukan secara berbaur, terutama pada pengembangan pondok-pondok wisata serta fasilitas makan dan minum.

Dalam hal ini terkait dengan pengembangan Desa Jatiluwih sebagai Desa Wisata, telah menarik pengusaha Wawan Setiawan untuk mendirikan vila di tengah hutan yang ada di sebelah utara desa dan berdekatan dengan Pura Luhur Petali. Dengan dibangunnya vila di atas tanah di tengah hutan tersebut, berarti ada perbedaan kepentingan dalam penggunaan tanah. Berkaitan dengan hal ini, Aditjondro (1995) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan dalam penggunaan tanah potensial menimbulkan konflik tanah. Konflik tanah mencakup konflik-konflik internal yang terdiri atas konflik kelas, konflik adat, dan konflik gender. Selanjutnya, konflik eksternal, yakni terdiri atas konflik antara negara dengan warga negara,

konflik antarsistem ekonomi, konflik antarekosistem, konflik mayoritas dan minoritas, dan konflik ekologi politik khas Asia Tenggara (lihat Metera, 1996). Dalam kasus "Vila Petali", karena tanah yang dibangun tersebut berada pada radius kesucian pura, maka fenomena konflik yang muncul adalah antara warga negara (masyarakat) dengan negara (pemerintah), di samping juga konflik ekologi terkait dengan ketersediaan air bagi kesinambungan kegiatan pertanian.

Jika konflik tersebut dikaitkan dengan ideologi *Trihita Karana* yang menekankan pada keharmonisan hubungan pada aras *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, maka konflik tersebut menurut Atmadja dkk. (2008:256) karena adanya perbedaan anutan ideologi, kelompok pro-vila mendukung neoliberalisme, sedangkan kelompok pro-*Bhisama* mendukung ideologi *Trihita Karana*. Lebih lanjut Atmadja dkk. (2008:245) menyatakan bahwa roh neoliberalisme adalah keserakahan.

"Vila Petali" yang berada di tengah hutan dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi yang mempergunakan air panas dan air dingin untuk mandi. Air panas diperoleh dengan mempergunakan pemanas air dari listrik. Dalam hal ini, air yang dipergunakan oleh vila tersebut untuk kebutuhan sehari-hari bersumber dari air tanah. Meskipun vila tersebut tidak setiap hari dihuni oleh pemiliknya dan/atau wisatawan, tetapi keberadaannya dilengkapi dengan penjaga vila. Penjaga vila tersebut setiap hari (mulai sore hingga malam hari) tinggal di vila, sedangkan pagi hingga sore mereka membuka warung berjualan makanan di sebelah timur Pura Desa Jatiluwih.

Kehadiran "Vila Petali" dan juga penjaga vila lengkap dengan aktivitas kesehariannya, berpengaruh terhadap lingkungan (*palemahan*), terutama terhadap

ketersediaan air. Ketersediaan air di desa ini dapat terancam karena aktivitas kehidupan sehari-hari di vila tersebut (seperti membersihkan vila, mandi, memasak, mencuci, termasuk menyiram tanaman hias yang ditanam di sekitar vila) mempergunakan air tanah yang ada di tengah hutan. Keterancaman terhadap air tidak saja terhadap kehidupan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, tetapi juga terhadap aktivitas pertanian. Masyarakat tidak banyak yang mempermasalahkan tentang air pada pembangunan vila tersebut. Mereka sebenarnya memahami akan pentingnya air, baik untuk kehidupan mereka maupun untuk kepentingan sawah-sawah pertanian. Mereka lebih banyak memperbincangkan tentang kawasan suci pura, dengan harapan apabila masalah vila tersebut terselesaikan, maka secara otomatis permasalahan air juga akan terselesaikan.

Air banyak memiliki padanan, air disebut *banyu* (bahasa Jawa-*Ngako*), *toya* (bahasa Jawa-*Krama*) dan *tirta*, *warih*, *her* (dalam bahasa Jawa-*Kawi*). Dalam budaya Jawa banyak pengertian air yang dianggap mempunyai *daya linuwih*, seperti *Tirta Kamandanu*, *Tirta Pawitrosari*, dan *Banyu-Sewindu*. *Tirta Kamandanu* (*banyu penguripan*) merupakan air kama yang merupakan benih kehidupan manusia di bumi; *Tirta Pawitrosari*, air untuk kehidupan manusia atau makhluk di bumi, atau air bersih sebagai sumber kehidupan; *Banyu-Sewindu*, air yang diendapkan delapan tahun lamanya, maksudnya sebagai perlambang air yang sangat jernih dan bening. Jika dikaitkan dengan perasaan ketakutan atau emosi yang meledak, bila tersiram air ini hal tersebut akan reda (Gitosardjono, 2005:83).

Menurut Arthanegara (2005) sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau pun di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau pun di bawah permukaan tanah. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau pun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungan. Namun, menurut Susilo (2003:58-61), manusia membutuhkan air dalam bentuk (1) air untuk tubuh, (2) air untuk industri, (3) air untuk tanaman pangan, dan (4) air untuk sanitasi. Berdasarkan tipologi Susilo, air yang dipergunakan oleh "Vila Petali" dengan segala aktivitasnya adalah "air untuk industri", yakni dengan menggunakan air tanah.

Pembangunan di tengah hutan, di samping merusak flora, fauna, serta sumber daya lainnya yang ada di hutan juga akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan hutan untuk menyimpan air hujan sebagai air tanah. Dalam hal ini ditambah lagi dengan pengambilan air tanah di tengah hutan, maka semakin mengurangi ketersediaan air tanah di hutan. Sebagaimana tampak di sini, orientasi pembangunan di tengah hutan (Vila Petali) lebih banyak bermotif ekonomi daripada mempertimbangkan aspek ekologi atau aspek *palemahan*. Menurut Susilo (2003:2) pembangunan yang berorientasi ekonomi kerap akan menciptakan dekomposisi ekologi. Dekomposisi ekologi adalah suatu keadaan tidak adanya komposisi yang

ideal dalam suatu sistem ekologi tertentu akibat intervensi manusia yang berlebihan untuk tujuan yang dimilikinya terhadap sistem ekologi tersebut.

Dalam pembangunan "Vila Petali", dekomposisi ekologi berupa berkurangnya ketersediaan air bagi masyarakat, khususnya terkait dengan kebutuhan air oleh petani dalam pengerjaan sawah. Akibatnya, setelah panen padi, petani desa setempat saling "adu cepat" untuk memulai mengolah tanah sawah karena berebut air. Hal ini menyebabkan [sebagian] petani yang seharusnya tidak membakar jerami sebelum mengolah tanah sawah, kemudian menjadi membakar jerami karena takut kehabisan air. Oleh karena air dan sawah di Bali selalu berhubungan dengan organisasi tradisional *subak*, maka *subak* pun mendapat ancaman.

Menurut Arthanegara (2005) *subak* adalah sistem pengelolaan air yang dilakukan oleh petani di Bali berdasarkan filosofi *Trihita Karana*. Ekosistem *subak* adalah semua elemen yang terdapat dalam pengelolaan *subak* dan setiap elemen merupakan mata rantai jaring kehidupan dari *subak* serta setiap elemen saling memberikan pengaruh pada kehidupannya. Elemen-elemen yang terdapat dalam ekosistem *subak* meliputi petani, lahan sawah, sumber air, jaringan irigasi, peralatan untuk pengolahan tanah, ternak, unsur *parhyangan*, semua unsur *palemahan*, dan unsur *pawongan*, termasuk *awig-awig*.

Kenyataan yang terjadi sekarang, memang *subak* masih eksis. Namun, dari beberapa anggota masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani mengaku ketersediaan air untuk mengairi sawah sudah semakin berkurang, terutama setelah selesai panen padi bali. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perebutan air di antara

petani yang berpotensi menimbulkan konflik di antara petani. Di samping itu, oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijadikan alasan untuk melanggengkan hegemoni pengalihan sawah menjadi tempat untuk membangun sarana yang diperlukan oleh pengembangan pariwisata.

Masalah ekologi sebagai implementasi dari matra *pawongan* dan matra *palemahan* tidak saja muncul pada pemerintahan Orde Baru, tetapi juga muncul kembali di Orde Reformasi, yakni dengan kondisi yang lebih parah sebagai akibat pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sebagai akibat keinginan untuk memperbesar pendapatan asli daerah (PAD). Fenomena ini menurut Bagus (2004:285) merupakan tantangan berat dalam pemerintahan Orde Reformasi yang melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengusung desentralisasi lewat otonomi daerahnya. Otonomi daerah sesungguhnya mengandung suatu itikad baik, yakni keinginan untuk mewujudkan kemandirian yang bertanggung jawab dan kemerdekaan pembangunan yang benar-benar "dari bawah", tetapi dalam pelaksanaannya, yakni karena kewenangan pemerintah terletak di aras kabupaten/kota dan bukan di provinsi, tidak terhindarkan kemunculan sejumlah dampak negatifnya.

Dalam penelitian ini dampak negatif yang ditimbulkan terhadap ekologi/lingkungan sebagai akibat otonomi daerah adalah dengan dibangunnya "Vila Petali" di tengah hutan lindung di sebelah utara Pura Luhur Petali. Dewan Perwakilan Rakyat [Daerah] yang merupakan representasi masyarakat [desa], di samping memasukkan pembangunan vila tersebut sebagai pertentangan terhadap perda juga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh kabupaten/kota sebagai pihak

yang memiliki otonomi. Selanjutnya, dalam kearifan lokal Bali pembangunan "Vila Petali" merupakan *mertha matemahan wisia*.

Pembangunan "Vila Petali" lebih mementingkan libido kapitalis untuk memiliki vila di kawasan suci sekaligus untuk mempertontonkan identitas sosial atau kelas sebagai orang kaya baru (OKB). Dengan pembangunan vila tersebut, masyarakat Desa Wisata Jatiluwih akan terjebak pada satu ironi. Di satu sisi mereka tetap ingin berpegang pada ideologi *Trihita Karana*, sedangkan di sisi lain (Atmadja dkk., 2008:261) mereka terlibat pada sekularisasi spiritual dan libidinalisasi spiritualitas, disebut sebagai *hibrid-spiritualitas*.

Menurut Piliang (2007:175), wacana *hibrid-spiritualitas* adalah sebuah wacana yang di dalamnya spiritualitas melakukan proses kawin silang (*hibridity*) dengan wacana keduniaan di dalam ruang kontradiksi. *Hibrid-spiritualitas* adalah kawin silang dua kekuatan bertentangan atau lebih menjadi satu kekuatan kontradiktif, yaitu ketuhanan/konsumerisme, transenden/imanen, dan kesucian/kedangkalan. *Hibrid-spiritualitas* adalah ruang hasrat yang di dalamnya mesin-mesin kecepatan (*domology*) melakukan simbiosis dengan mesin kekhususan.

## **7.2 Makna Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat**

Pengertian "makna" pertama kali dikemukakan oleh C.K. Ogden dan I.A. Richards tahun 1923 dalam bukunya yang berjudul *The Meaning of Meaning*. Dengan mengintroduksi pendapat Hirsch, Juhl (1980:27) membedakan pengertian "arti" dan "makna". Dalam hal ini "arti" direpresentasikan oleh teks, sedangkan

”makna” merupakan hubungan antara arti, person, konsep, situasi, dan segala sesuatu yang diimajinasikan, di samping makna berbeda-beda sesuai dengan situasi pembaca.

Lebih lanjut, menurut Leech (1983:9-23), untuk memperjelas perbedaan antara ”arti” dan ”makna”, dikemukakan tujuh tipe makna, yakni sebagai berikut: (a) makna konseptual, makna denotatif atau kognitif, sebagai makna utama bahasa; (b) makna konotatif, apa yang diacu melebihi maknanya secara konseptual, sebagai ciri-ciri umum bahasa sastra; (c) makna stilistik, apa yang dikomunikasikan secara sosial; (d) makna efektif, apa yang dikomunikasikan dari sikap penulis; (e) makna reflektif, apa yang diasosiasikan dari ekspresi yang sama; (f) makna kolokatif, asosiasi yang diperoleh melalui kata-kata yang muncul dalam lingkungannya; (g) makna tematik, makna menurut cara penulis dalam menata pesannya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, makna yang dikaji tidak terkait dengan makna-makna di atas, tetapi lebih kepada persoalan-persoalan kajian budaya. Selain itu, menurut Huda (2005:195), kepada pembaca ditekankan untuk menemukan makna-makna dan pemikiran yang tertuang dalam sebuah tekstual serta konteksnya dalam kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Artinya, budaya atau kehidupan sosial ditempatkan sebagai sebuah teks yang dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan. Dengan demikian, menurut Palmer (2005:14-36) ada tiga makna dasar tentang interpretasi yang diungkap, yaitu (1) mengedepan atau mengungkapkan kata-kata, (2) menjelaskan atau mempertegas, dan (3) menerjemahkan, seperti dalam sebuah transliterasi bahasa. Pengungkapan makna terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih mengandung berbagai makna tergantung sudut

pandang pembacanya, artinya tidak ada makna tunggal. Menurut Derrida (dalam Lajar, 2005:172-173) ada kebebasan untuk mengeksplorasi realitas sehingga membawa keberagaman makna yang sangat menekankan keanekaragaman cara berpikir, terhadap realitas yang ada. Hal ini jelas dapat dipergunakan untuk melihat makna keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Adapun makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih adalah sebagai berikut.

### **7.2.1 Makna Kesejahteraan**

Kata "kesejahteraan" dan "kebahagiaan" memiliki pengertian yang sama. Kedua kata tersebut memiliki arti yang amat mirip antara satu dengan yang lainnya. Seseorang merasa bahagia kalau orang itu sejahtera, sebaliknya seseorang merasa sejahtera kalau orang itu bahagia. Dalam menilai kesejahteraan dengan ukuran di atas hanya dipergunakan sebagai pembanding terhadap konsep kesejahteraan yang ada di masyarakat.

Masyarakat Bali yang sebagian besar beragama Hindu mengajarkan kepada setiap umatnya untuk mencapai *jagaddhita* dan *moksartham*. *Jagaddhita* adalah tujuan agama Hindu untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan kelestarian alam sekitarnya. Kebahagiaan duniawi dimaksudkan adalah meliputi *dharma*, *artha*, dan *kama*. *Dharma* adalah kebahagiaan yang bersifat spiritual-keagamaan, yaitu penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran, nilai-nilai, norma-norma agama, serta tertib hukum dalam kehidupan. *Artha* adalah kebahagiaan manusia yang menyangkut

kebutuhan yang berkaitan dengan material, yaitu makanan, pakaian, perumahan, dan keperluan ekonomi lainnya. *Kama* merupakan kebahagiaan manusia nonmaterial, seperti kasih sayang, kesetiaan, kebersamaan, hubungan seks, dan sebagainya. Menurut Gorda (1996:27) seluruh aspek *jagaddhita* dapat diwujudkan, dinikmati dan dirasakan oleh manusia pada saat hidup di dunia ini.

Berdasarkan pengamatan dan diskusi yang dilakukan dengan beberapa masyarakat, secara umum masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih merasa sejahtera kalau mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mampu melaksanakan upacara ritual secara teratur dan berkesinambungan, yaitu *Pancayadnya* (*Dewa Yadnya*, *Rsi Yadnya*, *Bhuta Yadnya*, *Manusa Yadnya*, dan *Pitra Yadnya*). Dengan demikian, tujuan masyarakat di sana hampir boleh dikatakan sama dengan tujuan seluruh umat Hindu, yaitu mencapai keseimbangan dan kebahagiaan hidup di dunia ini, yaitu sesuai *Caturpurusa Artha*.

Pelaksanaan upacara ritual menjadi simbol harmoni lahir batin. Oleh karena setiap manusia yang ber-*yadnya* dapat memenuhi kesejahteraan secara seimbang, baik fisik maupun spiritualnya. Secara lahir berarti sandang, pangan, dan papan sudah terpenuhi. Jika kebutuhan fisik ini sudah terpenuhi, maka dalam melaksanakan upacara ritual keagamaan mereka akan merasa tenang sehingga mampu menciptakan konsentrasi yang terfokus pada pelaksanaan pemujaan kepada Tuhan (Sutrisno, 2005:190-199). Dengan demikian, seseorang atau masyarakat yang memiliki kedua unsur ini akan tercermin pada kehidupan yang *moksartham jagaddhita* memperoleh

kebahagiaan lahir batin secara seimbang dan berkesinambungan ada dalam pengalaman spiritual, sosial, dan ekonomi (Pendit, 1993:112-113).

Pelaksanaan upacara yang terkait dengan ritual pengolahan sawah serta upacara *Pancayadnya* membutuhkan sarana yang cukup banyak untuk menyukseskan pelaksanaannya. Sebagai akibatnya, maka terjadi proses jual-beli sarana upacara, seperti: beras, ketan, janur, bunga, buah-buahan, umbi-umbian, dedaunan, telur, hingga binatang yang dijadikan korban (Suardika, 2006:9-11). Kebutuhan tersebut tidak saja untuk upacara, tetapi juga untuk keperluan sehari-hari, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam kondisi seperti ini proses jual beli akan terjadi sehingga hukum pasar akan terjadi, yaitu ada yang menjual dan ada yang membeli. Kebutuhan akan sarana upacara tersebut tidak saja dipenuhi oleh warga masyarakat Hindu Bali, tetapi sebagian besar sudah dilakukan oleh masyarakat non-Hindu dari luar Bali (Suardika, 2006:10-11 dan Kerepun, 2007:121-127).

Dalam hal ini hasil penelitian seorang antropolog dari University of Auckland, Greame MacRae mengemukakan bahwa hampir keseluruhan waktu, tenaga, dan biaya terkait uang warga masyarakat Hindu Bali digunakan untuk kepentingan/kegiatan upacara agama, kegiatan adat, kegiatan seni, dan kegiatan budaya serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kegiatan ini melahirkan produk wisata yang mempunyai nilai jual tinggi dalam bisnis kepariwisataan (Kerepun, 2007:92-93). Masyarakat Bali mampu memproduksi berbagai bentuk upacara keagamaan yang tujuan utamanya ber-*yadnya*, seperti upacara pada proses

penanaman padi yang dikenal sebagai *pula pali metandur padi bali ring carik* di Desa Wisata Jatiluwih.

Dalam kenyataannya *event* yang berupa upacara keagamaan secara tidak langsung memang akan dinikmati oleh wisatawan. Wisatawan tertarik menikmati karena warga masyarakat Hindu di Bali ingin berbuat yang terbaik dan terindah dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan (Geertz, 1992:129-146). Selanjutnya, untuk kepentingan dan keperluan pemujaan atau merealisasikan kehidupan beragama yang secara vertikal ditujukan kepada sang Pencipta, mereka berusaha membuat serta menghaturkan yang terbaik dan benar (Sutrisno, 2005:190-199) berdasarkan ajaran susila dan filosofi agama. Dalam hal ini, Bali ini unik karena ekspresi budaya yang terpancar berlandaskan ajaran agama Hindu. Menyatunya antara agama Hindu, budaya, dan adat secara harmonis dengan mengambil bentuk ritual keagamaan. Pelaksanaan upacara ritual keagamaan seperti pada penanaman padi bali di Desa Wisata Jatiluwih akan dapat menumbuhkan kehidupan beragama (Setia, 1993:58).

Dalam hal ini bagi wisatawan, kehadiran mereka di Desa Wisata Jatiluwih untuk menyaksikan peristiwa budaya dan seni sebagai satu kasatuan sebagai Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih merupakan suatu aktivitas yang penuh makna kehidupan masyarakat (Soedarsono, 1999:119-121). Oleh karena pelaksanaan upacara-upacara keagamaan merupakan peristiwa budaya yang penuh dengan simbol-simbol sehingga wisatawan tertarik untuk menyaksikannya.

Simbol-simbol diangkat dari dunia material atau benda yang konkret yang pada dasarnya berfungsi untuk menjembatani dunia *niskala* dengan *skala*. Simbol mengandung kekuatan sakral, keramat, membangkitkan kesadaran spiritual, rasa hormat, takut, dan menarik serta mengasikan. Simbol tersebut tidak saja berupa *image* untuk membangkitkan kesadaran pemeluk agama dengan mendekati manusia pada realitas yang disimbolkan, tetapi juga mengomunikasikan realitas supernatural yang spiritual kepada manusia (Hendropuspito, 1983:100-101). Dalam hal ini benda-benda simbol tidak saja berfungsi untuk memperjelas dan mengartikulasikan yang ritual religius sebagai suatu yang sakral, tetapi menghadirkan serta memberi "nyawa" (Khan, 2002:239) dalam setiap pelaksanaan upacara keagamaan.

Kebahagiaan hidup di dunia ini selalu harus dicapai melalui keseimbangan antara kebutuhan fisik dan rohani. Dalam hal ini Nyoman Utama dan Wayan Sumiata (informan) mengatakan bahwa pengendalian pencapaian kebutuhan fisik melalui ajaran *dharma*. Hal ini berarti masyarakat desa setempat sudah mempersiapkan kebahagiaan nanti di alam sana (setelah meninggalkan dunia ini). Dengan demikian, masyarakat Desa Wisata Jatiluwih juga memiliki konsep kesejahteraan yang tidak saja berlanjut untuk di dunia ini, tetapi sampai di alam sana sesuai *phala karma* seseorang. Selanjutnya, sebagian besar masyarakat Desa Wisata Jatiluwih memandang pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat sebagai dialektika sejahtera yang belum sejahtera, dan hanya sebagian kecil saja yang memandang sebagai sejahtera yang sudah sejahtera.

Adanya peningkatan pendapatan tidak saja diwujudkan untuk memenuhi kebahagiaan *artha*, berupa keperluan makanan, pakaian, dan perumahan, tetapi dimanfaatkan untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan ajaran agama Hindu di desa tersebut. Menurut Wayan Yasa (wawancara 25 Juni 2008) peningkatan pelaksanaan dan pengamalan ajaran agama Hindu dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang semakin semarak dan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan peralatan upacara yang semakin berkualitas. Masyarakat yang *ngaturang dana punya* juga semakin meningkat dari sisi jumlah disertai dengan peningkatan dari sisi perolehan. Pejabat pemerintah semakin banyak yang datang pada saat *piodalan* di pura-pura yang berlokasi di Desa Wisata Jatiluwih, dalam hal ini tidak saja pejabat lokal Kabupaten Tabanan, tetapi pejabat dari tingkat provinsi juga kerap kali hadir setiap *piodalan*, khususnya di Pura Luhur Petali dan Pura Luhur Rambut Sedana. Dilihat dari pakaian yang dipergunakan oleh masyarakat pada saat sembahyang di pura-pura setempat juga menunjukkan peningkatan, dalam hal ini *krama adat* sudah banyak yang berpakaian mahal.

Pelaksanaan upacara *Manusa Yadnya*, *Pitra Yadnya*, dan *Bhuta Yadnya* juga mengalami peningkatan sebagai akibat meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan demikian, perolehan *artha* yang dibingkai oleh *dharma*, maka *artha* tersebut akan berkualitas dan berkesinambungan. Tata cara memperoleh *artha* juga dibingkai oleh *dharma* karena dilihat dari aspek kultural hal tersebut sebagai salah satu wujud *etika*. Hal ini telah ditunjukkan bahwa hasil ekonomi bukan hanya untuk memenuhi

kebutuhan lahiriah semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan batiniah dengan cara melaksanakan *yadnya* yang berkualitas.

Makna kesejahteraan dari aspek budaya kiranya belum lengkap apabila tidak dibarengi dengan aspek keberlanjutan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Aspek keberlanjutan lingkungan terdiri atas ekologi pertanian (*subak*) dengan terasering sawah serta budaya pertaniannya. Menurut Adrian Philips, Direktur Komisi Pedesaan untuk Inggris dan Wales (dalam Boniface, 1999:34), menyatakan bahwa suatu unsur warisan budaya biasanya berada dalam satu konteks sehingga untuk pemeliharaan konteks tersebut harus bersifat dukungan, dalam hal ini kepariwisataan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keadaan ini. Dengan demikian, pengusulan *Subak* Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia merupakan dukungan bagi pengembangan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat tidak saja dapat diciptakan melalui pelibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata secara langsung, tetapi dapat juga diciptakan melalui pelibatan masyarakat secara tidak langsung, antara lain melalui usaha peternakan. Jenis ternak yang terdapat di Desa Wisata Jatiluwih, yakni (1) ayam kampung, pada tahun 1991 sebanyak 2.150 ekor, kemudian tahun 2006 menjadi 2.766 ekor; (2) ayam ras, pada tahun 1991 sebanyak 21.800 ekor, kemudian pada tahun 2006 menjadi 350.000 ekor; (3) itik, pada tahun 1991 sebanyak 20 ekor, kemudian pada tahun 2006 menjadi 1000 ekor; (4) sapi, pada tahun 1991 sebanyak 274 ekor, kemudian pada tahun 2006 menjadi 1.366 ekor; (5) kuda, pada tahun 1991 sebanyak 1 ekor, kemudian pada tahun 2006 tidak ada; dan (6) babi, pada tahun 1991

sebanyak 1.307 ekor, kemudian pada tahun 2006 menjadi 1.622. Jika pada tahun 1991 tidak ada kerbau, maka tahun 2006 terdapat 25 kerbau di desa setempat (Hasil Survei FT UGM Tahun 1991 dan Kecamatan Penebel dalam Angka 2006/2007).

Kesejahteraan dapat juga dilihat dari segi mental. Sesuai indikator PBB, kesejahteraan dari segi mental ini diukur dari tingkat pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh masyarakat Desa Wisata Jatiluwih dapat diuraikan sebagai berikut (1) tamat SLTP atau sederajat, tahun 1991 sebanyak 42 orang, kemudian pada tahun 2003 menjadi 223 orang; (2) tamat SLTA atau sederajat, tahun 1991 sebanyak 52 orang, kemudian pada tahun 2003 menjadi 250 orang; (3) tamat perguruan tinggi (diploma sampai sarjana), tahun 1991 sebanyak 7 orang, kemudian pada tahun 2003 menjadi 257 orang (Hasil Survei FT UGM Tahun 1991 dan Monografi Desa Jatiluwih Tahun 2003).

Dalam hal ini dilihat dari penggunaan air bersih, dari 803 keluarga yang ada, pada tahun 2006 seluruhnya sudah mempergunakan air bersih dari PAM yang merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Selanjutnya, dilihat dari penggunaan bahan bakar untuk memasak, tahun 2006 sebanyak 757 KK mempergunakan kayu api dan hanya 46 KK yang mempergunakan gas. Kemudian, apabila dilihat dari penggunaan aliran listrik, tahun 2006 sebanyak 798 KK mempergunakan listrik berdaya 251-450 watt dan 5 KK mempergunakan listrik berdaya 451-900 watt.

Dilihat dari mata pencaharian utama penduduk (Tabel 4.4) dapat diuraikan sebagai berikut: (1) pertanian, tahun 1991 sebanyak 1.398 orang, kemudian tahun

2006 menjadi 1.685 orang; (2) peternakan, tahun 1991 sebanyak 130 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 130 orang; (3) perkebunan, tahun 1991 sebanyak 17 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 112 orang; (4) perdagangan, tahun 1991 sebanyak 12 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 80 orang, (5) industri, tahun 1991 sebanyak 11 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 3 orang; (6) pengangkutan, tahun 1991 sebanyak 54 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 8 orang, dan (7) pemerintahan/jasa, tahun 1991 sebanyak 71 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 152 orang (Hasil Survei FT UGM Tahun 1991 dan Kecamatan Penebel dalam Angka 2006/2007).

Dari segi kepemilikan kendaraan bermotor, pada tahun 2006 di Desa Wisata Jatiluwih, masyarakat yang memiliki sepeda motor sebanyak 765 orang, kendaraan roda empat berupa sedan sebanyak 4 orang, mini bus sebanyak 5 orang, truk sebanyak 4, orang dan pic-up sebanyak 3 orang. Selain itu, kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya rumah masyarakat desa setempat yang sudah direnovasi mengikuti model rumah modern. Semua itu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena peningkatan kesejahteraan dibingkai dengan *dharma* yang ber-*etika*, maka kemungkinan besar kesejahteraan akan dapat berlanjut sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan budaya.

### **7.2.2 Makna Pelestarian**

Lingkungan yang lestari merupakan cerminan keberhasilan pengelolaan ekologi, yaitu terkait dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya.

Hubungan manusia dengan lingkungannya (*palemahan*), termasuk juga *parhyangan* dan *pawongan*, yang menjadikan budaya sebagai pedoman sekaligus acuan dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat, budaya, dan lingkungan merupakan hubungan yang saling bersinergi dalam rangka pelestarian.

Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih pada masa Orde Baru menimbulkan masalah ekologi dan budaya yang serius. Hal ini karena adanya konflik kepentingan yang menyangkut perebutan sumber daya, dalam hal ini adalah sumber daya alam (*natural resources*) yang terbatas, terutama secara fisik menyangkut tanah untuk membangun fasilitas kepariwisataan. Konflik kepentingan terhadap tanah merupakan konflik yang menyangkut ruang, yakni termasuk tanah di dalamnya. Perebutan ruang tersebut semakin meluas, paling tidak meliputi Bali karena tanah-tanah yang ada mengalami alih fungsi dan dipergunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Salah satu yang terjadi di Desa Wisata Jatiluwih adalah alih fungsi tanah hutan karena pembangunan "Vila Petali". Lokasi pembangunannya tidak saja berdimensi ruang, tetapi juga terkait dengan budaya karena keberadaan pura-pura di sekitarnya, seperti Pura Luhur Petali. Dalam hal ini sebagai *pengempon* pura ini adalah *Desa Adat* Jatiluwih, dan sebagai *pengenceng* adalah Puri Tabanan.

Pura sebagai tempat suci agama Hindu melambangkan alam semesta yang terungkap dari *Trimandala* secara horizontal dan vertikal, yakni *jeroan* sebagai *swah loka*, *jaba tengah* gambaran *bwah loka*, dan *jaba sisi* sebagai *bhur loka*. Pada masyarakat Hindu Bali, pura sebagai tempat kediaman para Dewa sehingga dianggap

suci (Geldern, 1982:6-8). Pura juga menjadi penghubung alam manusia (*marcapada*) dengan alam Dewata (*mayapada*).

Selanjutnya, puri lebih dikenal sebagai istana, sebagai tempat tinggal raja yang sering dihormati, seperti halnya pura. Puri juga merupakan tempat terjadinya kontak-kontak makhluk supernatural dengan para dewa (Geldern, 1982:4-27 dan Agung, 2006:10-11). Pada kenyataannya kedua tempat itu sangat berbeda. Pura sebagai sebuah tatanan Dewata yang kedudukannya lebih tinggi daripada tempat tinggal raja. Puri merupakan puncak dari hierarki politik kekuasaan yang terfragmentasi, sementara pura adalah tempat yang memberikan bentuk terhadap tatanan ritual yang lebih luas (Nordholt, 2006:207). Lebih lanjut, masyarakat Hindu pada umumnya percaya bahwa seorang raja pada zamannya dianggap sebagai *inkarnasi* atau titisan Dewa atau turunan Dewa terutama Dewa Siwa sebagai Dewa Gunung yang memulai pembangunan dinasti (keturunan raja-raja yang memerintah) (Geldern, 1982:11-17 dan Nordholt, 2006:442-450).

Raja memiliki kekuasaan secara total, politis, dan sekaligus tatanan keagamaan (Soedarsono, 2003:18-27). Hal ini hingga sekarang terpelihara di Bali dalam bangunan jiwa zaman yang berbeda melalui proses "peralihan batiniyah". Perubahan ini sejalan dengan terbukanya Bali menerima kontak langsung dan tidak langsung dengan dunia luar (Geertz, 1992:136-139), seperti pada pengaruh pariwisata dengan budaya globalnya.

Seiring dengan berjalannya sang waktu, tanggung jawab terhadap pura, termasuk ritual keagamaannya tidak lagi sepenuhnya berada pada keluarga puri,

tetapi semakin meluas dan diletakkan pada kekuatan desa. Hal ini berarti pemujaan tidak saja menjadi urusan keluarga raja dengan dinasti-dinastinya, tetapi sudah melibatkan para pengiring, penyangga pura, dan penyangga istana. Dengan demikian, pelaksanaan ritual keagamaan di pura-pura dikenal sebagai peristiwa budaya yang memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengenali kekuatan "raja-dewa"-nya yang memberikan tuntunan kehidupan hingga ke pelosok desa.

Desa di Bali merupakan satu kesatuan hidup masyarakat yang didasarkan atas kesatuan tempat tinggal dengan batas-batas wilayah yang jelas, yang disebut *payar* (Parimatha, 2004:27). Sebuah desa juga ditandai dengan batas wilayah pemujaan dalam satu kesatuan pura yang disebut *kahyangan tiga*, yaitu *pura desa*, *puseh* dan *dalem* (Surpha, 1995:4-22 dan Astika, 1994:112).

Dalam hal ini antara pura, puri, dan desa terdapat relasi kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Kekuasaan yang dimiliki digunakan sebagai kekuatan politik kekuasaan yang berorientasi pengabdian kepada kemanusiaan (Siswanta, 2006:136). Walaupun kini puri-puri di Bali tidak memiliki kekuasaan seperti zaman kerajaan dahulu (Nordholt, 2006:136), tetapi puri masih tetap memiliki wibawa historis serta keberadaannya masih diakui oleh masyarakat setempat sebagai *pengenceng* pura, seperti pada Pura Luhur Petali (Tim Redaksi Bali Post, 2008:157).

Tata ruang wilayah Provinsi Bali dijiwai oleh agama Hindu yang utuh, serasi, serta seimbang sebagai wadah kehidupan dan kegiatan manusia serta makhluk lainnya sehingga tercapai kebahagiaan penduduk Bali dan ke-*ajeg*-an sumber daya manusia lokal, sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya lainnya

(Windia, 2005). Kekurangtepatan dalam pengelolaan, secara budaya dan secara lingkungan (ekologi), menimbulkan risiko yang dinikmati oleh masyarakat setempat. Risiko yang ditimbulkan dan dinikmati oleh masyarakat, menurut Giddens (dalam Herwanto, 2005:188) memunculkan *risk society*, yang merupakan kebangkitan masalah-masalah ekologi. Kebangkitan masalah-masalah ekologi membawa kesadaran bahwa kita hidup pada masa yang dicirikan dengan situasi yang tidak dapat diperkirakan dan diwarnai bahaya.

Munculnya perilaku yang tidak bersahabat dengan lingkungan yang diperankan oleh masyarakat desa setempat dan masyarakat dari luar pulau agak bertentangan dengan citra yang disandang. Bali yang dikenal memiliki nilai-nilai budaya yang adiluhung dengan citranya sebagai Pulau Sorga Terakhir (Kerepun dalam Ardika, 2005:144) selalu menyatakan bahwa masyarakatnya melaksanakan tindakan yang menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan sebagai sang Pencipta berlandaskan falsafah *Trihita Karana*. Berbagai jenis aktivitas keagamaan terkait *Pancayadnya* dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Namun, dengan adanya permasalahan ekologi yang timbul, khususnya pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, maka hal ini merupakan suatu ironi terhadap pengembangan pariwisata tersebut, terlebih-lebih Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia.

Dalam masalah tanah, tidak saja orang luar (pemilik modal) yang perlu disalahkan, orang lokal sering juga berada dalam posisi salah. Menurut Glebet, dalam artikelnya di *Bali Post* tanggal 25 Juni 2004 berjudul "Tanah Bali Tanah Surga",

menyebutkan bahwa masalah tanah di Bali disebabkan oleh faktor-faktor internal/lokal, yaitu *dharma*, *artha*, dan *kama*, di samping berbagai faktor eksternal seperti pengembangan pariwisata budaya dengan keinginan penguasaan tanah seluas-luasnya. Faktor-faktor yang menurutnya menyebabkan orang Bali (sebagai pendukung kebudayaan Bali) menjual tanah-tanahnya adalah karena hal-hal berikut.

- (1) Adanya ritual berbiaya tinggi, dengan tanah yang diwarisi, orang harus mendahulukan upacara agama berupa *pitra yadnya* bagi yang mewariskan. Upacara tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang diperoleh dari penjualan tanah warisan.
- (2) Adanya keinginan untuk berinvestasi, orang tidak menganggap bertani sebagai pekerjaan bergengsi. Untuk itu, tanah dialihkan untuk modal usaha (bisnis) yang diprediksi lebih menjanjikan. Padahal ketika usaha bangkrut karena sesuatu hal, tanah sudah hilang karena dijual.
- (3) Adanya harapan untuk berinvestasi di dunia pendidikan (*ngetohin pianak*) meskipun kesempatan kerja setelah tamat juga sulit. Dalam hal ini apabila gagal, untuk kembali bertani juga tidak bisa, selain karena gengsi, tanah juga sudah habis terjual.
- (4) Adanya perasaan hedonisme, artinya keinginan untuk hidup secara nikmat dan sepuas-puasnya dengan mengonsumsi barang-barang mewah memicu penjualan tanah.
- (5) Adanya kelemahan dalam perangkat hukum, kelemahan tersebut misalnya, perangkat peraturan daerah, harus tunduk pada peraturan di atasnya. Peraturan-peraturan yang bersifat sentralistik dan selalu mendukung mega proyek mempermudah penjualan tanah.
- (6) Adanya kebijakan seolah-olah yang menyangkut tanah, dalam hal ini tukar guling, tukar lokasi, dan tukar menukar lainnya hanya merupakan spekulasi pemindahan hak atas

tanah, pemilikan, penukaran, serta penguasaan tanah-tanah adat dan tanah negara. (7) Adanya dalih tanah untuk kepentingan yang lebih luas, dalam hal ini pemblokiran kawasan, penguasaan alam, penetapan lokasi, dan pembebasan tanah, dilakukan di bawah kekuasaan yang mendukung golongan minoritas, tetapi dengan alasan untuk kepentingan yang lebih luas. (8) Adanya proses pensertifikatan tanah, dalam hal ini terkesan membela kepentingan petani. Pronas mempercepat pemindahan hak atas tanah. Tujuannya adalah untuk mendongkrak target pendapatan asli daerah (PAD) dengan membayar kontribusi mulai dari proses pensertifikatan, penjualan, izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin usaha perdagangan (SIUP), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak perusahaan dan sebagainya; (9) Adanya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang didasarkan nilai jual objek pajak (NJOP), pemerintah secara tidak langsung membujuk masyarakat untuk menjual tanah-tanah objek pajaknya yang strategis. (10) Adanya fenomena "*keh-keh siap*", maksudnya adalah, tanah-tanah habis di meja judi (sabung ayam). Kata bahasa Bali *siap* berarti 'ayam', dan *keh-keh* berarti 'mengais/dikais'. Dalam hal ini "*keh-keh siap*" berarti tanah-tanah habis karena dijual untuk kepuasan orang Bali, khususnya para laki-lakinya, untuk berpoya-poya di arena judi sabungan ayam yang disebut *tajen*, yang justru akhirnya selalu memelaratkan (membuat miskin).

Menurut Scheneider (1993) (dalam Putra, 2008:43) penjualan tanah dapat bermakna inflasi karena barang dan jasa yang dikonsumsi wisatawan mengakibatkan masyarakat lokal harus membayar harga yang sama dengan harga yang dibayar wisatawan. Selanjutnya, penjualan tanah yang diikuti oleh perubahan atau alih fungsi

lahan dapat mengakibatkan ketidakharmonisan pada hubungan manusia (*purusa*) dan alam (*prakerti*). Untuk mengatasi ketidakharmonisan tersebut, menurut Santhiarsa (2004:25-26) secara *skala* (duniawi) dilakukan dengan memelihara lingkungan, seperti melakukan kegiatan yang bersifat ramah lingkungan serta penghijauan, sedangkan secara *niskala* (spiritual-religius) dilaksanakan dengan melakukan *yadnya* berupa *Sadkerthi* atau enam upaya untuk membangun kesucian, kelestarian alam, keharmonisan masyarakat, dan kebahagiaan individual.

*Sadkerthi* terdiri dari *Atma Kerthi*, *Samudra Kerthi*, *Wana Kerthi*, *Danu Kerthi*, *Jagat Kerthi*, dan *Jana Kerthi*. *Atma Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan *Sang Hyang Atma* dari belenggu *Triguna*. *Samudra Kerthi* adalah kelestarian samudra sebagai sumber alam yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dalam kehidupan umat manusia. *Wana Kerthi* adalah kelestarian hutan. *Danu Kerthi* adalah kelestarian sumber-sumber air tawar di daratan, seperti: mata air, danau, sungai, dan lain-lainnya. *Jagat Kerthi* adalah kelestarian dan keharmonisan sosial. *Jana Kerthi* adalah kelestarian kualitas manusia secara individu (Wiana, 2004).

Terkait dengan *Wana Kerthi*, salah satu restoran yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, yaitu Restoran Waka Land Cruise berada tengah hutan bambu wilayah *Subak Munduk Kelesih*. Untuk pelestarian ekologi di tengah hutan sebagai akibat pengembangan usaha pariwisata berupa restoran, yakni dilakukan pembatasan aktivitas yang membahayakan hutan, seperti tidak menyalakan api secara berlebihan, tidak menebang pepohonan sembarangan, tidak membuang sampah plastik, dan membatasi jumlah pengunjung (wawancara dengan I Wayan Mendri, Pengurus *Subak*

Munduk Kelesih, 25 Juni 2008). Menurut Peluso (dalam Hidayat, 2005:10), hal ini merupakan suatu pelaksanaan dari penggunaan lingkungan hutan dengan cara-cara yang khusus. Penggunaan "cara-cara khusus" tersebut merupakan usaha untuk menjaga agar sumber daya tidak berkurang, melindungi hutan agar tidak rusak sehingga tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Terjadinya kontra-hegemoni masyarakat dengan mempergunakan diskursus pariwisata kerakyatan berkelanjutan terhadap hegemoni pemerintah yang mempergunakan diskursus pariwisata berbasis masyarakat, menurut Ardika (2007:98), pariwisata kerakyatan berkelanjutan memiliki pilar berupa kualitas, kontinuitas, dan keseimbangan, yang menyelaraskan kebutuhan masyarakat lokal, kelestarian sumber daya fisik (fisik dan budaya), dan kepuasan wisatawan. Dalam hal ini terkait dengan hal yang dikonsepsikan Ardika (2007:98) sebagai "pariwisata kerakyatan berkelanjutan", maka dengan adanya pembangunan vila di tengah hutan dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, khususnya dari aspek kontinuitas, keterlibatan masyarakat di desa tersebut menjadi suatu masalah yang patut dipertanyakan keberlangsungannya. Oleh karena menurut laporan Brundtland (lihat Chitkara, 1998:108), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi-generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri. Hutan sebagai sumber air, dengan keberadaan bangunan vila akan berpengaruh terhadap ketersediaan air, di samping kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan aktivitas pertanian di desa setempat. Jika pertanian terancam, maka pariwisata juga akan

terancam mengingat daya tarik utama di Desa Wisata Jatiluwih adalah terasering sawah, di samping budaya. Keterancaman pariwisata di desa ini secara otomatis akan mengancam keterlibatan masyarakat.

Dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang menawarkan produk utama berupa bentang alam, yaitu keindahan terasering sawah beserta pemandangan alam yang melatarbelakanginya, syarat konseptual pembangunan berkelanjutan, yakni terdiri atas (1) keberlanjutan ekologi, (2) keberlanjutan sosial dan budaya, dan (3) keberlanjutan ekonomis harus terpenuhi. Selanjutnya, terkait dengan keberlanjutan ekologi, pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dengan dukungan pembangunan sarana-sarana yang diperlukan (seperti sarana pokok yang berupa akomodasi dan restoran), telah menimbulkan penyimpangan dalam pembangunan antara lain dengan dibangunnya vila di tengah hutan yang berfungsi sebagai tempat resapan air serta pemanfaatan hutan bambu sebagai lokasi berdirinya restoran. Penyimpangan ini terjadi karena peran pemerintah yang begitu kuat menghegemoni masyarakat sehingga masyarakat dibuat tidak berdaya dalam menghadapi tekanan khususnya dalam mempertahankan keberlanjutan ekologi wilayahnya. Dengan demikian, hal tersebut secara keseluruhan dalam jangka panjang secara potensial merusak ekologi kawasan hutan, dan dalam jangka pendek mengakibatkan kerusakan pada ekologi desa setempat.

Adat dan agama tidak bisa dilepaskan dari budaya atau kebudayaan Bali, yakni adat Bali dan agama Hindu. Dalam arti yang sempit, kebudayaan Bali adalah agama Hindu. Jadi, antara agama Hindu dengan kebudayaan Bali terdapat hubungan, dalam

hal ini hubungan tersebut terletak pada ketiganya (adat, agama, dan budaya) tidak dapat dipisahkan dan tidak akan pernah dipisahkan. Filsafat agama Hindu yang berwujud *tatwa* dilaksanakan dalam bentuk kebiasaan sehari-hari yang disebut adat Bali. Aktivitas yang berupa adat Bali tersebut selanjutnya menyatu dengan kreativitas masyarakat Hindu Bali yang berwujud seni budaya yang dijiwai agama Hindu. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa agama Hindu adalah jiwanya Bali, kebudayaan Bali adalah nafasnya Bali, dan adat Bali sebagai urat nadinya Bali.

Pengembangan akomodasi masih menampakkan sentimen agama yang sangat kuat dan menonjol. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan bentuk ornamen pada tembok akomodasi yang berupa vila, yakni menyerupai simbol salah satu agama. Penggunaan simbol-simbol merupakan kesadaran spiritual dari para pelakunya (Hendropuspito, 1983:96-102). Simbol-simbol yang terungkap dari berbagai pihak dan diekspresikan itu adalah "kendaraan" pembawa makna (Cassirer, 1987:41-62). Simbol-simbol yang diungkap dalam segala aktivitas masyarakat sebagai dasar untuk bertingkah laku tentang dunia. Simbol-simbol yang dipergunakan oleh orang dalam kehidupan umum, perlu ditangkap sebagai bahasa atau ditafsir maknanya untuk diinformasikan kembali kepada masyarakat (Geertz dalam Susanto, 1992:vi-vii dan Palmer, 2005:103-104) sehingga mampu meningkatkan kesadaran spiritual bagi masyarakat pelakunya.

Kehidupan manusia hampir tidak pernah terlepas dari simbol-simbol yang memiliki makna sangat dalam dan menggambarkan alam pikiran masyarakat

pemilikinya (Soedarso Sp, 2006:37-40). Sebagai makhluk yang berpikir dan bertingkah laku simbolik (*animal symbolicum*), seluruh kemajuan kebudayaan manusia senantiasa berdasarkan hal-hal yang simbolis, tidak saja dalam dunia fisik, tetapi juga dalam dunia simbolis. Hadirnya bahasa, kesenian, mitos, dan agama merupakan bagian-bagian dari dunia simbolis itu. Bahkan simbol tidak hanya dapat dijabarkan menjadi tanda, tetapi ada sesuatu yang dapat hidup di baliknya (Khan, 2002:237-244).

Mitos tentang hutan, juga hadir dalam kehidupan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih. Masyarakatnya yang sebagian besar beragama Hindu, memiliki pandangan bahwa alam dikendalikan oleh kekuatan gaib dan bersifat supernatural. Kepercayaan pada arwah-arwah nenek moyang (*leluhur*) dan kekuatan halus selalu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan alam dan lingkungan. Kepercayaan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih akan adanya kekuatan-kekuatan halus, tercermin pada saat memerlukan binatang untuk keperluan upacara di pura-pura yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, seperti: kera, *kidang* (kijang), atau binatang buas lainnya. Sebelum masyarakat setempat berburu (*meboros*) ke tengah *wana* (hutan), ditandai dengan upacara menghaturkan sesajen di suatu tempat di pinggiran hutan. Sesajen yang dihaturkan merupakan simbol kepatuhan masyarakat terhadap kekuatan supernatural yang ada di hutan. Upacara tersebut dipimpin oleh *Pemangku Patus*. Tujuan upacara tersebut agar binatang yang dicari bisa diperoleh, seluruh masyarakat yang ikut *meboros* selamat dan tidak tersesat di hutan (Wawancara dengan Nyoman Gangsuh, *Pemangku Patus*, 26 Juni 2008).

Menurut Cassirer (dalam Nugroho, 1987:36-62) simbol dan tanda merupakan dua hal yang berbeda. Simbol merupakan bagian dari dunia makna manusiawi yang memiliki nilai fungsional, sedangkan tanda merupakan bagian dari dunia fisik. Lebih lanjut, Sunardi (2002) menyatakan bahwa tanda dan simbol memang saling berhubungan. Suatu tanda memiliki makna yang dihasilkan lewat sistem tanda yang dipakai oleh kelompok masyarakat. Dalam sistem tanda, suatu tanda dapat menghasilkan makna. Oleh karena adanya prinsip perbedaan sehingga mampu menampilkan yang tidak dapat dihadirkan (Lyotard dalam Yulianto, 2005:128). Artinya, makna itu dihasilkan oleh sistem perbedaan atau sistem hubungan tanda-tanda. Oleh karena tanda senantiasa berada dalam posisi relasional yang hidup (Sunardi, 2004:40-83).

Tanda dapat digunakan untuk memaknai sesuatu yang lain secara lahiriah dan simbol membantu mempertajam dalam mengungkap tingkah laku dan prestasi kebudayaan yang memiliki pengaruh emosional serta makna yang lebih dalam, di samping tidak bersifat alamiah (Berger, 2005:11-53). Simbol sangat berperan dalam pembentukan kesadaran kelompok umat beragama terhadap agamanya sehingga mampu meningkatkan kesadaran spiritual. Dalam hal ini, mengungkap peristiwa keagamaan yang abstrak menjadi terang, sehingga jelas bagi para pemeluknya hanya dalam bahasa simbol dan religius magis (Dhavamony, 1995:174-179), seperti upacara *ngaturang* sesajen ke hutan pada saat *meboros* mencari binatang untuk keperluan upacara di pura merupakan budaya unik.

Kehadiran wisatawan serta masyarakat di luar Hindu dari luar Pulau Bali pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, menghadirkan makna keberagaman dalam usaha pelestarian ekologi dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan gambaran simbolik multidimensi, yang menurut Giddens (dalam Herwanto, 2005:188) berpotensi menjadi masyarakat bermasalah (*risk society*). Untuk menjembatani keberagaman dalam pelestarian ekologi dan budaya, maka diperlukan dialog multikultural, yakni dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, asimilasi, dan akulturasi, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang bersifat universal dari pelestarian tersebut. Kemudian, dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan keseimbangan. Menurut Bagus (2004:89) keseimbangan adalah pembangunan yang implementasinya didasarkan atas kearifan lokal yang unik, seperti *Trihita Karana* menuju kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perayaan keberagaman dalam pelestarian ekologi dan budaya pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih perlu dipertimbangkan, terutama terkait keputusan pelestarian yang akan dilakukan.

### **7.2.3 Makna Pemberdayaan**

Makna pemberdayaan dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dimaksudkan sebagai pembangunan yang berwawasan budaya, yakni menurut Bagus (1995:3) sebagai cara pandang bagaimana pembangunan seharusnya memberikan makna hidup kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat jati dirinya. Untuk mencapai maksud itu, masyarakat hendaknya tidak dipandang sebagai objek semata, tetapi sebagai subjek yang

memiliki harkat dan martabat, baik sebagai manusia individu maupun sebagai makhluk sosial. Harkat dan martabat dapat dicapai menurut Aly (1991:308) dengan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar IPTEK menjadi bermakna. Dengan demikian, pembangunan berwawasan budaya bersasaran manusia yang seutuhnya, tidak boleh serakah dan juga harus untuk anak cucu (Soemarwoto, 1991:7).

Berkumpulnya seluruh anggota masyarakat dalam suatu *paruman adat*, di antara mereka saling bertegur sapa dan berada dalam suasana yang khidmat, untuk membicarakan nasib pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih adalah suatu aktivitas yang melahirkan bentuk kesadaran kolektif yang ikut membangun harmoni (Khan, 2002:166-177) yang dinamis terhadap kekuatan untuk menghadirkan kedamaian dalam pengembangan pariwisata. Keserasian dan keseimbangan kekuatan dapat terjadi melalui pendekatan dialogis antarmasyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Kesiediaan untuk hadir sebagai dasar yang bijak dan tulus dalam membangun rasa toleran di antara para ketua, dan anggota *desa adat*, turut memupuk kekuatan serta jati diri budaya pendukung pengembangan pariwisata tanpa meninggalkan modal sosial (Suyatna, 2006:60-64) yang dimiliki masyarakat desa setempat. Hal ini menguatkan bahwa masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda (Sanderson, 1993:59-70), di samping mampu beradaptasi sehingga menghargai perbedaan (Lyotard, 2005:141).

Adanya pertemuan-pertemuan dari anggota masyarakat yang memiliki ideologi yang sama terhadap pengembangan pariwisata, merupakan suatu upaya untuk

memberdayakan seluruh lapisan masyarakat melalui pariwisata. Upaya ini memiliki peranan penting dalam membentuk serta membangun harmoni kekuatan partisipasi berbagai lapisan masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran kolektif. Dalam hal ini kekuatan partisipatif menjungjung identitas dan solidaritas antar anggota masyarakat. Hal ini dilakukan dengan jalan saling melihat, saling mendengar, dan saling berdialog di antara warga desa adat yang ada di Desa Wisata Jatiluwih. Cara seperti ini mampu membangun kekuatan partisipasi yang menghargai perbedaan budaya antara satu dengan yang lainnya, di atas landasan pluralitas iman, yaitu sebagai wujud apresiasi atau heterogenitas ide (Lyotard dalam Yulianto, 2005:142).

Makna yang tersirat dan tersurat dalam membangun harmoni kekuatan di antara masyarakat anggota *desa adat* dalam keterlibatannya pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, mengarah pada penghargaan terhadap keterbukaan, menghormati, menerima orang lain, dan antaranggota masyarakat. Kesadaran itu senantiasa tumbuh, membentuk orang atau komunitas selalu siap, dan terbuka untuk saling mengasihi satu sama lain sehingga menjadi akrab dengan realitas keberagaman (Lajar, 2005:163-174 dan Lyotard dalam Yulianto, 2005:128). Pengembangan pariwisata mengajarkan kepada setiap anggota desa adat untuk senantiasa merayakan keberagaman dalam setiap aspek yang terkait dengan pengembangan pariwisata.

Adanya kemauan baik dari warga desa setempat yang sudah mampu berkiprah dalam bisnis kepariwisataan untuk saling membantu di antara sesama warga desa menjadi simbol gerakan yang membuka interaksi sosial bagi anggota masyarakat yang lain. Bagi setiap manusia yang ber-*yadnya* (Putra, 1982:9-10) mereka dapat

memenuhi kesejahteraan secara seimbang antara lahir dan batin karena mereka selalu membuka ruang interaksi sosial (Sujana, 1994:50) di antara sesama warga desa. Dengan adanya interaksi sosial, maka antara masyarakat yang sudah berhasil dalam bisnis pariwisata dengan yang belum berhasil, akan terjadi pertemuan, bertukar pikiran, menambah pengalaman, dan menambah wawasan di antara anggota masyarakat. Dengan aktivitas seperti ini, mereka akan memperoleh penyegaran sebagai masyarakat yang dinamis (Supriyono, 2005:97). Namun demikian, pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih masih sangat minim, itupun dilakukan oleh masyarakat desa setempat yang sudah berhasil dalam bisnis kepariwisataan, dan bukan dilakukan oleh *political will* penguasa.

Pengembangan desa wisata dengan melibatkan masyarakat setempat, diharapkan melahirkan rasa kebersamaan, rasa kolektivitas, dan solidaritas yang didasari oleh ideologi pengembangan pariwisata yakni berupa kesejahteraan. Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat disadari atau tidak, belum mampu menjadi tali pengikat persaudaraan dan membangun kesadaran kolektif (Hendropuspito, 1983:100-101). Kesadaran bersama akan melahirkan solidaritas di antara para anggota masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata, yang mendorong bangkitnya kesegaran baru. Rasa kebersamaan untuk selalu mengawal pengembangan pariwisata perlu selalu di pupuk, sehingga menjadi fondasi yang kokoh, tidak mudah dipecah belah oleh kekuatan konflik-konflik yang menyesatkan (Kerepun, 2007:21-32).

Apa yang sudah dilakukan oleh Gede Sweden (informan) merupakan bentuk solidaritas positif, yaitu dengan mempekerjakan beberapa orang masyarakat setempat sebagai porter (pengangkut barang) dari rombongan wisatawan yang akan melakukan wisata berjalan kaki (*trecking*) dari Dusun Gunungsari Umakayu menuju Danau Tamblingan menyusuri rute yang dibuat pada masa penjajahan Belanda di Desa Jatiluwih. Gede Sweden sudah lama menjalin kerja sama dengan *Vaya Tour and Travel* dalam memandu rombongan Kontiki. Jalan setapak yang menjadi sasaran *trecking* oleh masyarakat setempat disebut sebagai "jalan *jaran*" karena lebarnya tidak lebih dari lebar badan *jaran* (kuda) ditambah manusia. Masyarakat setempat yang dipekerjakan sebagai *porter* menerima upah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk rute pulang pergi. Masyarakat yang dipekerjakan umumnya masyarakat Dusun Gunungsari, yaitu Dusun Gunungsari Desa ataupun Dusun Gunungsari Umakayu.

Pemberian pekerjaan kepada sesama anggota masyarakat menunjukkan adanya kemauan baik (*political will*) dari anggota masyarakat yang sudah mampu berkiprah dalam bisnis kepariwisataan. Hal ini berarti masyarakat setempat dengan kemandiriannya, di antara anggota masyarakat saling memberdayakan sehingga meskipun tanpa dukungan *political will* dari penguasa, mereka tetap berjalan dan mulai mendapatkan hasil dari pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, meskipun secara kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat setempat masih sangat terbatas. Dalam pengembangan desa wisata, pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat merupakan sebuah keperluan.

### 7.3 Temuan Penelitian

Penelitian pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, menghasilkan tiga temuan yang merupakan pemahaman baru terhadap permasalahan penelitian. Adapun temuan yang dapat diungkap adalah sebagai berikut.

1) Masyarakat Desa Wisata Jatiluwih belum siap menerima pengembangan pariwisata. Hal ini disebabkan oleh (a) masyarakat setempat acuh tak acuh terhadap pengembangan pariwisata; (b) sebagian besar masyarakat setempat lebih tertarik bekerja sebagai petani; (c) pemahaman sebagian besar masyarakat desa setempat terhadap kepariwisataan masih kurang, dan (d) terdapat perbedaan kepentingan dalam masyarakat desa setempat terhadap pengembangan pariwisata. Sebagai akibatnya, program-program yang telah direncanakan terkait pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata belum dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Desa Wisata Jatiluwih.

2) Terjadi hegemoni pada pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. Hegemoni dilakukan dengan mempergunakan diskursus, antara lain pariwisata melestarikan budaya, adat, dan agama; pariwisata meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja; dan pariwisata meningkatkan pendapatan daerah. Selain mempergunakan diskursus, hegemoni juga dilakukan dengan mempergunakan perencanaan pengembangan pariwisata yang bersifat *top*

*down* (perencanaan dibuat oleh pemilik kekuasaan, sedangkan masyarakat setempat mau tidak mau dan suka tidak suka harus melaksanakan perencanaan tersebut).

3) Terjadi fenomena ekonomi pasar pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. Fenomena ini terjadi sebagai akibat kuatnya pengaruh kapitalis pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, sehingga semua potensi yang ada (budaya dan keindahan alam) dijadikan komoditas untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Wilayah-wilayah yang termasuk dalam radius kesucian pura sesuai *Bhisama* Kesucian Pura juga dijadikan komoditas ekonomi, sehingga merupakan pelecehan terhadap *Trihita Karana*.

#### **7.4 Refleksi**

Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih pada masa Orde Baru, menjadi pelajaran penting bagi pengembangan pariwisata. Orde Baru yang sangat hegemonik dan melahirkan konflik kepentingan itu, mengeksploitasi dan mempolitisasi lingkungan, alam, manusia, dan budaya semata-mata hanya untuk pengembangan pariwisata. Eksploitasi yang dilakukan oleh kapitalisme dengan dukungan pemerintah tersebut dilakukan dengan penuh hawa nafsu dan serakah.

Untuk mengendalikan hawa nafsu dan keserakahan kapitalisme dalam pengembangan pariwisata, diperlukan keputusan-keputusan yang berdimensi politik dari pemerintah. Keputusan-keputusan yang berdimensi politik dari pemerintah

seharusnya menjamin aspirasi masyarakat, kelestarian alam, kelestarian budaya, dan berbagai kebutuhan lokal lainnya.

Pada pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, *stakeholders* (masyarakat, pemerintah, dan pengusaha pariwisata) selain berorientasi pada ekonomi, juga harus mampu mensinergikan kearifan lokal, seperti *trihita karana*, *dharma negara*, *dharma agama*, *caturguru bhakti* (terutama *guru wisesa*), *caturpurusa artha* (terutama *artha*), *sadkerthi* (dalam penelitian ini adalah *wana kerthi*), serta *bhisama* kesucian pura dengan konsep global seperti pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini karena pengembangan pariwisata [Bali] tidak bisa terhindar dari pengaruh pariwisata global.

Pengembangan pariwisata yang penuh hegemoni dan sarat kepentingan, hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat, pengusaha pariwisata, dan pemerintah. Masyarakat bersama-sama dengan pemerintah harus mau mengambil pelajaran, terutama dari ketidakberhasilan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih (Kabupaten Tabanan) dan Desa Wisata Sebatu (Kabupaten Gianyar).

Terjadinya konflik kepentingan pada pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, membutuhkan etika politik, etika ekonomi, dan etika budaya. Etika politik dalam pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih dibutuhkan agar pengembangan produk wisata tersebut sesuai dengan norma-norma moral, nilai-nilai, dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi "korban" dari pengembangan pariwisata serta konflik yang timbul dari penggunaan kekuasaan pada pengembangan pariwisata di desa wisata.

Pada pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, pemerintah yang hegemonik terhadap masyarakatnya, berimplikasi pada hubungan antara masyarakat dengan pengusaha pariwisata, merupakan persoalan etika ekonomi atau etika bisnis. Etika bisnis yang terdiri atas prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral tidak ditemukan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

Selain etika politik dan etika ekonomi, dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih juga tidak ada etika budaya (adat dan agama), yang tercermin pada pelecehan radius kesucian pura. Radius kesucian pura ini menjadi permasalahan masyarakat setempat serta *pengempon* pura-pura di sekitarnya karena merupakan pelecehan terhadap simbol-simbol agama Hindu. Meskipun yang memperlakukan masih berada dalam lingkup masyarakat setempat, tetapi pelanggaran terhadap radius kesucian pura saat ini dan masa mendatang merupakan ancaman yang serius. Untuk itu, diperlukan keseriusan dalam mengawasi pelaksanaan pengembangan pariwisata pada radius kesucian pura dengan mempergunakan *Bhisama* sebagai filternya.

Operasionalisasi dari etika politik, etika bisnis (ekonomi), dan etika budaya difokuskan pada pemerintah, karena selama ini pemerintahlah yang paling hegemonik terhadap masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih.



## **BAB VIII**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **8.1 Simpulan**

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan menimbulkan komodifikasi dan konflik kepentingan. Komodifikasi terjadi pada bangunan tradisional *saka roras* dan pergeseran nilai estetis pada terasering sawah dilihat dari nilai ekonomis, nilai hiburan, nilai estetis, dan nilai religius. Namun, pada kesenian (tari-tarian dan gamelan) belum terjadi komodifikasi karena kesenian belum terintegrasi dengan aktivitas kepariwisataan. Konflik kepentingan terjadi karena perbedaan kepentingan dan ketimpangan kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan pemerintah yang sangat hegemonik terhadap masyarakat, dan berujung pada keterpecahan dalam masyarakat Desa Wisata Jatiluwih.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih berupa partisipasi terjadi pada tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasional, tahap pengembangan, dan tahap pengawasan. *Pertama*, tahap persiapan, partisipasi masyarakat berbentuk keikutsertaan pada sosialisasi yang diadakan di desa setempat terkait pengembangan pariwisata. *Kedua*, tahap perencanaan, yang terdiri atas identifikasi kebutuhan dan analisis kemampuan, partisipasi masyarakat bersifat fungsional, artinya partisipasi masyarakat mengikuti keputusan ahli dari luar desa setempat terkait pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

*Ketiga*, tahap operasional, terdiri atas partisipasi berbentuk fisik dan partisipasi berbentuk nonfisik. Partisipasi berbentuk fisik berupa pembangunan pos retribusi masuk di *Dusun Kesambi* dan *Dusun Gunungsari* Desa, pembangunan *Café Jatiluwih*, pembangunan akomodasi oleh salah satu anggota masyarakat desa setempat, dan penyerahan bangunan *saka roras* untuk dipugar menjadi "rumah contoh". Selanjutnya, partisipasi berbentuk nonfisik (menyediakan sumber daya yang tidak berwujud, akan tetapi hasilnya diperlukan dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih), yakni masyarakat mempelajari bahasa asing, belajar menari, belajar mengoperasikan gamelan (*gong*), dan pengiriman lima orang anggota *sekaa teruna* mengikuti pelatihan pariwisata. *Keempat*, tahap pengembangan, partisipasi masyarakat dilakukan secara spontan dengan mendirikan usaha yang terkait dengan kepariwisataan sesuai dengan kemampuan masing-masing, seperti warung makan dan minum, usaha kerajinan perak, usaha cuci pakaian, dan toko-toko penjual kebutuhan sehari-hari. *Kelima*, tahap pengawasan, partisipasi masyarakat bersifat manipulatif karena pengawasan lebih mengacu pada hal-hal praktis dan preventif. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat berjalan karena program pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih berdampak terhadap (1) pengelolaan desa wisata, (2) pengambilan gambar oleh wisatawan, (3) penyerapan pekerja dari masyarakat setempat, dan (4) pelecehan *Trihita Karana* (*parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*). Selanjutnya, makna yang

timbul dari pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih adalah makna kesejahteraan, makna pelestarian, dan makna pemberdayaan.

## **8.2 Saran**

Beberapa hal yang dapat disarankan untuk perbaikan sehubungan dengan terjadinya konflik kepentingan, tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengembangan desa wisata, hegemoni, kontra-hegemoni, perlawanan masyarakat terhadap pemerintah yang mendukung pengusaha pariwisata, serta kasus-kasus yang timbul dalam pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut.

Dengan semakin membaiknya hubungan di antara *stakeholders* (masyarakat-pemerintah-pengusaha pariwisata) saat ini, seluruh pihak hendaknya dapat menjaga keselarasan hubungan di antara ketiga *stakeholders* tersebut. Kepahitan masa lalu (pada masa Orde Baru), dalam hal ini kekuatan pemerintah melalui kekuasaannya tidak tertandingi, sementara masyarakat selalu berada pada posisi yang lemah, yang seharusnya diberdayakan menjadi di-perdaya-kan. Pada sisi lain, dengan mengatasnamakan pariwisata untuk menyejahterakan masyarakat, pemerintah terlalu memberi hati kepada pengusaha pariwisata untuk berbuat semaunya sehingga secara leluasa dapat menjalankan misi kapitalismenya. Bahkan yang tidak kalah menariknya, di antara pemerintah dengan pengusaha pariwisata ada kerja sama mutualisme (saling menguntungkan). Pada kondisi seperti ini masyarakat yang dirugikan.

Dalam rangka pengembangan pariwisata di desa wisata, *pertama*, dengan cara apa pun, masyarakat setempat (tempat produk pariwisata itu dikembangkan) harus dilibatkan mulai tahap persiapan, perencanaan, operasional, pengembangan, dan pengawasan, dengan prinsip di antara *stakeholders* terjadi kesejajaran kedudukan dan dapat bekerja sama secara jujur, transparan, serta fleksibel; *kedua*, untuk menjamin akuntabilitas pengembangan pariwisata di desa wisata, dalam kaitan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai hubungan politik, perlu menempatkan individu-individu yang jujur, benar-benar membela kepentingan masyarakat, peka terhadap berbagai kepentingan lokal, termasuk menghargai kearifan lokal, adat, budaya, dan agamanya; *ketiga*, dalam rangka pengembangan pariwisata di desa wisata, diutamakan untuk mengerahkan kemampuan setempat atau kemampuan lokal sehingga mengurangi bahkan memperkecil resiko yang timbul terkait hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Hubungan yang rusak di antara masyarakat dengan pemerintah akan berimplikasi pada kerusakan hubungan antara masyarakat dengan pengusaha pariwisata, masyarakat dengan lingkungan, masyarakat dengan adat dan agama.

Adanya transformasi dari ekonomi agraris menuju ekonomi jasa, mutlak memerlukan pemberdayaan. Terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, ada bentuk-bentuk pola pemberdayaan yang dapat ditempuh. (1) Pola swadaya, kegiatan yang bertumpu pada masyarakat dengan segala hambatan dan kendalanya. Masyarakat melakukan pengumpulan dana secara bertahap yang berasal dari hasil kegiatan usaha yang

dilakukan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan kegiatan usaha pariwisata. (2) Pola kemitraan, merupakan bentuk kerja sama dengan memadukan unsur kekuatan (modal dalam skala besar) yang dimiliki oleh pengusaha besar dan menengah dengan unsur kemandirian dari wilayah setempat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. (3) Pola pendampingan, merupakan pola pembinaan yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti lembaga swadaya masyarakat, sepanjang masyarakat setempat belum memiliki kemampuan dan kemandirian.

Munculnya trauma di kalangan masyarakat sebagai akibat pengembangan pariwisata berupa sarana pariwisata yang lebih banyak menuai kasus, seperti kasus "Vila Petali" dan kasus "rumah contoh", sudah terlanjur terjadi dan tidak mungkin kembali seperti semula. Pada pengembangan selanjutnya, selayaknya diisi dengan berbagai bentuk tindakan nyata serta membawa hasil positif sehingga semakin memperkokoh sinergi dan keseimbangan di antara *stakeholders* menuju pada hubungan yang lebih bersifat demokratis.

Kegagalan masyarakat dalam melakukan kontra-hegemoni dan perlawanan terhadap pemerintah yang sangat hegemonik pada pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, pemerintah lewat aparatnya wajib melakukan perbaikan terhadap kerusakan hubungan yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara berbuat sebanyak mungkin hal-hal yang bersifat nyata, positif, serta bermanfaat secara cepat dan langsung mengenai pada masyarakat setempat, yakni

untuk memulihkan trauma, pelecehan religiusitas, serta pelecehan harkat dan martabat yang telah dialami oleh masyarakat.

Dari sisi ketenagakerjaan, secara kualitas dan kuantitas masyarakat setempat harus dilibatkan secara nyata. Dalam hal ini munculnya fenomena ”pekerja pendatang” atau ”pekerja dari luar Bali” dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih hendaknya tidak dijadikan ajang konflik, tetapi dipandang sebagai *diversity*, pluralisme, atau multikulturalisme yang sarat dengan nilai-nilai toleransi, penerimaan, saling menghormati, dan saling berbagi, di samping semuanya menjunjung harkat dan martabat manusia sebagai subjek dan objek dalam pengembangan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adams, Kathleen. 1990. *Culture Commoditization in Tana Toraja, Indonesia*. *Culture Survival Quarterly*, 14/1:31-34.
- Aditjondro, George Junus. 1995. *Bali, Jakarta's Colony: Social and Ecological Impact of Jakarta-Based Conglomerates in Bali's Tourism Industry*. Working Papers Number 58, Asia Research Centre. Perth: Murdoch University.
- Agger, Ben. 2003. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Agung, A.A. Gde Putra. 2006. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfian. 1986. *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Anonim. 1978. *Tuntunan Gunaning Masasawahan*. Tabanan: Parisada Hindu Dharma Kabupaten Tabanan. (tidak diterbitkan).
- Anonim. 1992. *Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknik Desa Wisata Terpadu di Bali*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- Anonim. 1999. *Perencanaan Pariwisata Nasional dan Regional*. Jakarta: Bagian Proyek Penerjemahan dan Penerbitan Buku-Buku Pariwisata Jakarta Tahun Anggaran 1999/2000.
- Anonim. 2000. *Bisnis Pariwisata Pedesaan Perspektif Internasional*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Anonim. 2006. *Monografi Desa Jatiluwih*.
- Anonim. 2007. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi*. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Anonim. 2007. *Statistik Pariwisata Bali/Bali Tourism Statistic 2006*. Denpasar: Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

- Anonim. 2008. *Tabanan dalam Angka 2007*. Tabanan: Badan Pusat Statistik.
- Anonim. 2008. *Statistik Pariwisata Bali/Bali Tourism Statistic 2007*. Denpasar: Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- Anonim. 2008. *Bali Membangun 2007*. Denpasar: Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- Anonim. t.t. *Informasi Objek dan Daya Tarik Wisata di Bali*. Denpasar: Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- Anonim. t.t. *Kecamatan Penebel dalam Angka 2006/2007*. Tabanan: Badan Pusat Statistik.
- Ardika, I Wayan. 1995. *Nilai dan Makna Tinggalan Arkeologi sebagai Sumber Daya Budaya*. Makalah disajikan dalam Diskusi Ilmiah Arkeologi. Denpasar 16 Februari.
- Ardika, I Wayan. 2002. *Pariwisata Kerakyatan Berkelanjutan*. Makalah pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi. Denpasar 16-19 Juli 2002. (tidak dipublikasikan).
- Ardika, I Wayan. 2003. *Pariwisata Budaya Berkelanjutan Repleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Ardika, I Wayan. 2004. *Pariwisata Bali: Membangun Pariwisata-Budaya dan Mengendalikan Budaya-Pariwisata*. Dalam: I Nyoman Darma Putra, editor. *Bali Menuju Jagaditha Aneka Perspektif*. Denpasar: Pustaka Bali Post. hal. 20-33.
- Ardika, I Wayan. 2005. *Strategi Bali Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Global*. Dalam: D. Putra, W. Sancaya, editor. *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pusaka Larasan.
- Ardika, I Wayan. 2006. *Membangun Budaya Rohani pada Suatu Peradaban*. Dalam: *Membangun Budaya Rohani Menuju Keluhuran Budi*. Denpasar: Sekretariat Daerah Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Bali.
- Ardika, I Wayan. 2007. *Pusaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

- Arka, I Wayan. 1999. "Pemberdayaan Desa Adat dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Bali: Kasus Desa Wisata Terpadu Penglipuran Bangli" (tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
- Atamadja, 2001. *Kepariwisata dalam Rangka Pemerataan*. Makalah Pada Matrikulasi S2 Kajian Budaya Universitas Udayana. Denpasar 6 Juli 2001.
- Atmadja, N.B., A.T. Atmadja. 2008. Ideologi Tri Hita Karana □ Neoliberalisme = Vilanisasi Radius Suci Pura. Dalam: I Wayan Ardika, editor. *Dinamika Sosial Masyarakat Bali dalam Lintasan Sejarah*. Denpasar: Swasta Nulus. hal. 237-272.
- Bachtiar, Harsya W. 1993. Pengamatan Sebagai Suatu Model Penelitian. Dalam: Koentjaraningrat, editor. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia. hal. 108-128.
- Bagus, I.G.N. 1999. *Refleksi Kearifan Rakyat dalam Berperikehidupan: Konteksnya dalam Pariwisata Bali*. Makalah pada Seminar Internasional Pariwisata Berkelanjutan Menurut Perspektif Orang Bali (Sustainability Tourism: The Balinese Perspective), diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata Universitas Udayana. Denpasar 3 Agustus 1999.
- Bagus, I.G.N. dkk. 2002a. *Pemikiran Baru untuk Pembangunan Bali yang Berkelanjutan dan Perspektif Budaya*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Bagus, I.G.N. dkk. 2002b. *Masalah Budaya dan Pariwisata dalam Pembangunan*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Bagus, I.G.N. dkk. 2002c. *Menuju Terwujudnya Ilmu Pariwisata dalam Pembangunan*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Bagus, I.G.N. 2004. *Mengkritisi Peradaban Hegemonik*. Denpasar: Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Bappeda Provinsi Bali. 2008. *Kajian Sistem Pungutan Retribusi Obyek Wisata Satu Pintu Masuk Bali*. (Laporan Final). Denpasar: Bappeda Provinsi Bali.
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publications.

- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori & Praktik*. (Terjemahan). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. (Terjemahan). Yogyakarta: Bentang.
- Baum, Tom. 1994. *Human Resources Issues in International Tourism*.
- Berger, Athur Asa. 2005. *Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer: Suatu Pengantar Semiotika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bocock, Robert. t.t. *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Bocock, Robert. 1986. *Hegemony*. Chichester: Ellis Horword Limited.
- Boniface, Priscilla. 1999. *Mengelola Wisata Budaya Bermutu*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Bryant, et.al. 1993. *Forest Tranformations and Political Ecology in South East Asia*. Global Ecology and Biogeography Letters Vol 3. p. 101-103.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*. (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burns, PM dan A. Holden. 1997. Alternative and Sustainable Tourism Development, The Way Forward. In: Lesley France, editor. *The Earthscan Reader in Sustainable Tourism*. UK: Earthscan Publication Limited. p. 26-28.
- Butler, R.W. 1975. *Tourism as an Agent of Social Change: Tourism as a Factor in National and Regional Development*. (Occasional Paper 4). Ontario: Department of Geography Trent University.
- Cassirer, Ernst. 1987. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei tentang Manusia*. (Terjemahan Alois A. Nugroho). Jakarta: PT Gramedia.

- Chandoke, Neera. 1995. *State and Civil Society Explorations in Political Theory*. New Delhi: Sage Publications.
- Chitkara, M.G. 1998. *Encyclopedia of Ecology, Environment, and Pollution*. New Delhi: Aph Publishing Corporation.
- Cohen, Erik. 1984. *The Sociologi of Tourism: Approaches, Issues, and Findings*. *Annal of Tourism Research* (30):236-266.
- Cohen, Erik. 1988. *Authenticity and Commoditization in Tourism*. *Annal of Tourism Research* 15 (3):371-386.
- Cohrane, Janet. 1993. Tourism and Conservation in Indonesia and Malaysia. In: Victor T. King, Hitchcock, and Parnwel, editors. *Tourism in South-East Asia*. London and New York: Routledge.
- Cooper, Chris. et.al. 1999. *Kepariwisataaan Prinsip-Prinsip dan Pelaksanaan*. (Terjemahan). Jakarta: Bagian Proyek Penerjemahan dan Penerbitan Buku-Buku Pariwisata Jakarta Tahun Anggaran 1999/2000.
- Dahrendorf, R. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menuju Peneliti Kualitatif, Ancangan, Metodologi, Presentasi, dan Publikasi: Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dawam Raharjo, M. 1987. *Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan dan Krisis*. Jakarta: LP3ES.
- de Kadt, E. 1979. *Tourism, Passport to Development? Perspective on the Social and Cultural Effects of Tourism in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diparda Bali dan Program Studi Pariwisata Unud. 2003. *Studi Pengembangan Desa Wisata Ambengan Berbasis Budaya dan Kerajinan Rakyat*. (Laporan Penelitian). Denpasar: Program Studi Pariwisata Unud.

- Dogan, Hasan Zafer. 1989. *From of Adjustment: Social Culture Impacts of Tourism*. Annals of Tourism Research (16):216-236.
- Dolors, M.G. Canoves and N. Valdovinos. 1995. *Farm Tourism, Gender and The Environment in Spain*. Annals of Tourism Research 22(2):267-282.
- Dowling, R. 1996. *Ecotourism in Thailand*. Annals of Tourism Research 23(2):488-490.
- Dwipayana, A.A.G.N. Ari. 2000. Tanah, *Nation-State*, dan Pergeseran Paradigma Kekuasaan di Bali. Dalam: Dadang Juliantara, Penyusun. *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. hal. 105-132.
- Dwipayana, A.A.G.N. Ari. 2004. Genealogi Politik: Desa Adat Bali dan Ruang Demokrasi. Dalam: I Nyoman Darma Putra, editor. *Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif*. Denpasar: Pusaka Bali Post. hal. 53-82.
- Dwyer, Larry and Peter Forsyth. 1996. *Valuing Heritage Conservation: A Economic Perspective*. Papers in The International Conference on Tourism and Heritage Management Toward a Sustainable Future: Balancing Conservation, Yogyakarta – Indonesia.
- Eagleton, T. 1991. *Ideology*. London: Verso.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erawan, I Nyoman. 2003. *Menuju Pembangunan Pariwisata Bali yang Berkelanjutan*. Makalah pada Seminar Penilaian Dampak Krisis dan Koordinasi Respon Atas Bom Bali Kerja sama UNDP, USAID, dan World Bank. Denpasar 20 Desember 2003.
- Erawan, I Nyoman. 2005. "Dunia Kepariwisata Kita Pasca Krisis". *Bali Post*, 18 April, hal: 7.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. 1995. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Fakih, Mounsur. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fakih, Mounsur. 2001. *Sesat Tafsir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fay, Brian. 2002. *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*. (M. Muhith, Penerjemah). Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Fiske, John. 2004. *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. (Yosal Iriantara dan Idi Subandy Ibrahim, Penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra.
- Foucault, Michael. 2002. *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Foucault 1954-1984*. (Terjemahan). Yogyakarta: Jalasutra.
- France, Lesley. *et al.* 1997. *The Earthscan Reader in Sustainable Tourism*. UK: Earthscan Publication Limited.
- Frondisi, Risieri. 2001. *Pengantar Filsafat Nilai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garna, Judistira K. 1992. *Teori-teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Gee, C.Y. and Fayos-Sola, Eduardo. 1999. *International Tourism: a Global Perspective*. Madrid: WTO.
- Geertz, Clifford. 1992. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Book, Inc. Publishers.
- Geldern, Robert Heine. 1982. *Konsepsi tentang Negara & Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Jakarta: CV Rajawali.
- Giddens, Anthony. 2003. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*. Jakarta: UI Press.
- Gie, The Liang. 1977. *Garis Besar Estetik Filsafat Keindahan*. Yogyakarta: Supersukses.
- Gitosardjono, Sukamdani Sahid. 2005. *Sistem Manajemen Pendidikan Berdasarkan Filsafat Air Jernih*. Jakarta: PT Thema Baru.
- Glebet, N. 2004. "Tanah Bali Tanah Surga". *Bali Post*, 25 Juni.
- Gorz, Andre. 2005. *Anarki Kapitalisme*. (Hendry Heyneardy dkk. Penerjemah). Yogyakarta: Resist Book.

- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from Prison Notebooks*. New York: International Publisher.
- Gramsci, Antonio. 1976. *Selection from The Prison Notebooks*. (Quintin Hoare and Nowell Smith, editors). New York: International Publisher.
- Gramsci, Antonio. 1983. *The Modern Prince and Other Writings*. (Louis Mark, Editor). New York: International Publishers.
- Guerrier, Y. 1994. Bali. In: Tom Baum, editor. *Human Resources Issues in International Tourism*. London: Oxford: Butterworth–Heinemann Ltd. p.108-115.
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Harris, Marvin. 1999. *Theories of Culture in Postmodernisme Time*. New York: Altamira Press.
- Hart, Kevin. 2002. Jacques Derrida. Dalam: Peter Beilharz, editor. *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 73-84.
- Hendropuspito, O.C.D. 1983. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Herwanto, Agustinus. 2005. Budaya, Struktur, dan Pelaku. Dalam: Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, editor. *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. hal. 177-193.
- Hidayat, Herman. 2008. *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hitchcock, Michael, et al. 1993. *Tourism in South Asia-East Asia*. London, New York: Routledge.
- Hobsbawm, E.J. and T.O. Ranger. 1983. *The Invention of Tradition*. New York: Cambridge University Press.
- Hoogendijk, Willem. 1996. *Revolusi Ekonomi: Menuju Masa Depan Berkelanjutan melalui Pembebasan Ekonomi dari Pengejaran Uang Semata*. (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Iakovidou, O. 1995. *The Female Gender in Greek Agrotourism*. *Annals of Tourism Research* 22(2):481-484.

- Inskeep, E. 1991. *Tourism Planning and Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Jaman, I.K. 1999. "Kemitraan Lembaga Adat dengan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Desa Manukaya Tampaksiring" (tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
- Juhl, P.D. 1980. *Interpretation: an Essay in the Philosophy of Literary Criticism*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kaplan, David dan Albert A. Manners. 1999. *Teori Budaya*. (Landung Simatupang, Penterjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu dalam Masyarakat Modern*. (Terjemahan). Jakarta: CV Rajawali.
- Kellner, D. 1992. Popular Culture and The Construction of Postmodern Identity. In: S. Lash and J. Friedman, editors. *Modernity and Identity*. Oxford: Basil Blackwell.
- Kelompok Kerja SKPB. 2003. *Studi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan*. Jakarta: Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan, Deputi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Kerepun, Made Kembar. 2002. *Kelemahan dan Kekuatan Manusia Bali: Sebuah Otokritik*. Denpasar: PT Empat Warna Komunikasi.
- Khan, Hazrat Inayat. 2002. *Ajaran Spiritual Sifi Besar: Dimensi Mistik Musik dan Bunyi*. Yogyakarta: Pustaka Sufi.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Korten, David C. 2002. *Manuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kristeva, Julia. 1980. *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Basil Blackwell, Publisher, Limited: Oxford.
- Lajar, Aloysius Baha. 2005. Jacques Derrida dan Perayaan Kemajemukan. Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, editor. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. hal 163-176.

- Leech, Geoffrey. 1983. *Semantics: The Study of Meaning*. Great Britain: Pelican Books.
- Leu, W. 1992. The Swiss Experiences. Dalam: Nuryanti, editor. *Universal Tourism Enriching or Degrading Culture*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hal. 132-138.
- Linton, Ralph. 1936. *The Study of Man: An Introduction*. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2004. *Setelah Kebenaran dan Kepastian Dihancurkan Masih Adakah Tempat Berpijak bagi Ilmuwan: Sebuah Uraian Filsafat Ilmu Pengetahuan Kaum Posmodernis*. Bogor: Akademia.
- MacNaught, T.J. 1982. Mass Tourism in Pacific Island Communities. *Annals of Tourism Research* (9):359-81.
- Mandra, I M. 1999. *Konsep Pembangunan Pariwisata Bali*. Makalah pada Seminar Internasional Pariwisata Berkelanjutan Menurut Perspektif Orang Bali (Sustainability Tourism: the Balinese Perspective), diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata Universitas Udayana. Denpasar 3 Agustus 1999.
- Mannheim, Karl. 1946. *Man and Society in an Age of Reconstruction*. Edition V. London: Kegan Paul.
- Mantra, I.B. 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Mayo, M. 1998. Community Work. In: Adams, Dominelli and Payne, editors. *Themes, Issues and Critical Debates*. London: MacMillan. p.148-168.
- Metera, I Gde Made. 1996. *Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Fasilitas Pariwisata dan Dampaknya bagi Petani: Kasus Desa Beraban, Tabanan Bali*. Singaraja: Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mowforth, Martin, dan Ian Maunt. 2000. *Pariwisata dan yang Berkelanjutan Pariwisata Baru di Dunia Ketiga*. Jakarta: Bagian Proyek Pengembangan Literatur Pariwisata Tahun Anggaran 2000.

- Mowforth, Martin, and Ian Munt. 1998. *Tourism and Sustainability New Tourism in the Third World*. London and New York: Routledge.
- Mudana, I Gede. 2002. "Bangkitkan Tradisi Bisnis Nyeraki". *Bali Post*, 7 November.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda.
- Murphy, P.E. 1985. *Tourism: A Community Approach*. New York and London: Routledge.
- McIntosh, Robert W. and Charles R. Goeldner. 1986. *Tourism, Principles, Practices, Philosophies*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Naisbitt, J. 1994. *Global Paradox*. (Terjemahan). Jakarta: Binapura Aksara.
- Nasikun. 1997. Model Pariwisata Pedesaan Permodelan Pariwisata Pedesaan untuk Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan. Dalam: Myra P. Gunawan, editor. *Prosiding Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung. hal. 82-89.
- Nasikun. 1999. "Tuntutan Perubahan: Pariwisata Berbasis Komunitas". *Kompas*, 7 Desember.
- Nasution, Torang. 2003. *Pariwisata Berkelanjutan*. Dalam *Jurnal Kebudayaan dan Pariwisata*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta, Volume VI, November 2003.
- Natori, Masahiko, 2001. *A Guide Book for Tourism-Based Community Development*. Yokohama: Asia Pacific Tourism Exchange Center.
- Oppermann, M. 1996. *Rural Tourism in Southern Germany*. *Annals of Tourism Research* 23(1):86-102.
- Page. 1995. *Tourism and Development Model in Africa*. London: John Murray.
- Parimarta, I Gde. 2004. Desa Adat, Desa Dinas, dan Desa Pakraman Di Bali: Tinjauan Historis Kritis. Dalam: I Wayan Ardika dan Darma Putra, editor. *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press. hal. 13-43.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 1999. *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Pendit, Nyoman S. 2001. *Aspek-aspek Agama Hindu: Seputar Weda dan Kebajikan*. Jakarta: Pustaka Manikgeni.
- Perlas, Nicanor. 2000. *Shapping Globalization Civil Society, Cultural Power and Threefolding*. New York: CADI and Global Network for Social Threefolding.
- Peursen, Van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Picard, Michel. 1993. Cultural Tourism in Bali National Integration and Regional Differentiation. In: Hitchcock, editor. *Tourism in South East Asia*. London, New York: Routledge. p. 4-70.
- Picard, Michel. 1996. *Bali Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapura: Archipelago Press.
- Picard, Michel. 2006. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. (Terjemahan). Jakarta: Kerja sama Kepustakaan Populer Gramedia dengan Forum Jakarta-Paris.
- Piliang, Yasraf Amir. 1999. *Hiper-realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Piliang, Yasraf Amir. 2005. *Cultural Studies dan Posmodernisme: Isyu, Teori, dan Metode*. Makalah pada Seminar Cultural Studies: Isu, Teori, dan Metode yang Diselenggarakan oleh Program Magister dan Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana. Denpasar 12 Juli 2005.
- Pitana, I Gde. 1999. *Pelangi Pariwisata Bali*. Denpasar: PT Bali Post.
- Pitana, I Gde. 2002. Daya Dukung Bali terhadap Kepariwisata dan Sosial Budaya. Dalam: I Gusti Ngurah Bagus, editor. *Pembangunan Bali Berwawasan Budaya*. Edisi Khusus. Denpasar: Majalah Ilmiah Pusat Penelitian Universitas Udayana. Tahun I No. 1. hal. 62-70.
- Pitana, I Gde. 2003. Potensi Konflik, Adat Budaya, dan Pariwisata Bali. Dalam: I Gde Janamijaya, I Nyoman Wiratmaja, dan I Wayan Gde Suacana, editor. *Eksistensi Desa Pakraman di Bali*. Denpasar: Yayasan Tri Hita Karana.
- Pitana, I Gde, dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

- Pitana, I Gde. 2006. Industri Budaya dalam Pariwisata Bali: Reproduksi, Presentasi, Konsumsi, dan Konservasi Kebudayaan. Dalam: *Bali Bangkit Bali Kembali*. Jakarta: Kerja sama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Universitas Udayana. hal. 251-278.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasiasa, D.P.O. 2000. "Produk Wisata Desa Wisata Terpadu Sebatu Kabupaten Gianyar Dan Desa Wisata Terpadu Jatiluwih Kabupaten Tabanan Provinsi Bali: Suatu Analisis Persepsi Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara" (tesis). Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Sahid.
- Pujaastawa, I.B.G. dkk. 2005. *Pariwisata Terpadu Alternatif Model Pengembangan Pariwisata Bali Tengah*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Putra, I Gst. Agung Gde. 1982. *Cudamani Tari Wali*. Denpasar: Bali Offset.
- Putra, Ketut Gede Dharma. 2008. Pendekatan Budaya dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Dalam: I Made Suastika, Penulis. *Isu-Isu Kontemporer Cultural Studies*. Bandung: CV Bintang WarliArtika. hal. 37-54.
- Ratcharak, Nattamon. 2007. "Guidelines of Community Participation for Sustainable Tourism Development: The Case Study of Tambon Cherngtalay, Amphur Thalang, Changwat Phuket" (thesis). Phuket: Prince of Songkla University.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme: Perspektif Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2007. *Estetika Sastra dan Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Richards, Greg and Derek Hall. 2000. *Tourism and Sustainable Community Development*. London and New York: Routledge.
- Ritzer, George. 2005. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Robinson, D. and Garratt G. 1976. *Introducing Ethics*. (2 nd Edition). Cambridge: Icon Books.

- Ryan, Chris., and Aicken, Michelle. 2005. *Indigenous Tourism the Commodification and Management of Culture*. Amsterdam: Elsevier.
- Sairin dkk. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sammeng, Andi Mappi. 2000. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. (tidak dipublikasikan).
- Santayana, George. 1961. *The Sense of Beauty: Being the Outline of Aesthetic Theory*. New York: Collier Books.
- Santhiarsa, I Gst Ngr Nitya. 2004. *Kelestarian Alam Menurut Ajaran Hindu*. Wahana: Media Pematang Alumni Udayana. Edisi Nomor 45 Tahun XIX Mei. hal. 25-26.
- Santoso, Simon. 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Saronji, Mohammad. 2001. "Imbas Konflik Elit di Akar Rumput Kelompok". *Suara Merdeka*, 22 Oktober.
- Scott, James. 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Seda, Frans. 1996. *Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setia, Putu. 1993. *Kebangkitan Hindu Menyongsong Abad Ke-21*. Jakarta: Pustaka Manikgeni.
- Sirtha, I Nyoman. 2001. *Pola Kemitraan Lembaga Tradisional dengan Industri Pariwisata*. Makalah pada Simposium dan Lokakarya Internasional II, Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru. Universitas Andalas Padang 18-21 Juli 2001.
- Siswanta. 2006. *Relasi Kekuasaan: Telaah Pemikiran Antonio Gramsci dalam Konteks Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soedarsono. 1999. *Seni Pertunjukan Indonesia dan Pariwisata*. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.

- Soedarsono. 2001. *Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa*. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Soedarsono. 2003. *Seni Pertunjukan dari Perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Spillane, James J. 1994. *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. (Elisabeth dan Misbah Zulfa, Penerjemah). Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Suantina, I Made. 1998. "Implementasi Program Privatisasi dalam Mencapai Keberhasilan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan" (tesis). Surabaya: Magister Sains Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945.
- Suardika, Pasek. 2006. *Memahami Bali: Kebanggaan di Balik Kegundahan*. Denpasar: Bali Aga.
- Subadra, I N. 2007. "Studi Evaluatif Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Jatiluwih" (tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendra, K. 1998. "Peranan Tekno Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat" (disertasi). Bandung: Universitas Padjajaran.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: ALFABETA.
- Sulaeman. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata*. Dalam: Jurnal Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta. Volume VIII Juli 2004, hal. 1-4.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sunardi, S.T. 2002. *Semiotika Negativa, dengan Post Scriptum: Jalan Purgatorio dalam Kajian Budaya*. Yogyakarta: Kanal.
- Suparlan. 1992. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press.

- Supriyono, Johanes. 2005. Paradigma Kultural Masyarakat Durkheimian. Dalam: Mudji Sutrisno, Hendar Putranto, editor. *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. hal. 87-112.
- Surya, Ida Bagus Ketut dkk. 2005. *Laporan Pengkajian Pengembangan Desa Wisata Sembiran Berbasiskan Budaya*. Denpasar: Kerjasama Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Program Studi Pariwisata Universitas Udayana.
- Susilo, Y. Eko Budi. 2003. *Menuju Keselarasan Lingkungan: Memahami Sikap Teologis Manusia terhadap Pencemaran Lingkungan*. Malang: Arerros Press.
- Sutrisno, Mudji. 2005. *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwarsono dan Alvin Y. So. 2000. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Tim Redaksi Bali Post. 2008. Pura Luhur Pucak Petali. Dalam: Wayan Supartha, penyunting. *Mengenal Pura Sad Kahyangan dan Kahyangan Jagat*. Denpasar: Pustaka Bali Post. hal 156-160.
- Turner, B.S. 1992. *Max Weber: From History to Modernity*. London: Routledge.
- Warren, Carrol. 1993. Tanah Lot: The Cultural and Environmental Politics of Resort Development in Bali. In: P. Hirsch and C. Warren, editors. *The Politics of Environment in Southeast Asia: Resources and Resistance*. London: Routledge. p. 229-261.
- WCED. 1998. *Hari Depan Kita Bersama*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wiana, I Ketut. 2004. Menuju Bali Jagadhita: Tri Hita Karana Sehar-hari. Dalam: I Nyoman Darma Putra, editor. *Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif*. Denpasar: Pustaka Bali Post. hal. 264-289.
- Windhu, I Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Windia, Wayan P. 2005. "Melihat RTRWP Bali dari Perspektif Desa Pakraman". *Bali Post*, 23 Maret, hal: 7.
- Wood, Robert E. 1980. *International Tourism and Cultural Change in Southeast Asia, Economic Development, and Cultural Change*. *Annals of Tourism Research* 23 (3):561-581.

Wood, Robert E. 1984. *Ethnic: The State and Cultural Change in Southeast Asia*. Annal of Tourism Research 11 (3):353-374.

Woodley, Alison. 1992. Tourism and Sustainable Development: The Community Perspective. Dalam J.G. Nelson, R. Butler, G. Wall, editors. *Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing*. University of Waterloo, Department of Geography Publication.

World Tourism Organization. 1993. *Sustainable Tourism Development, Guide for Local Planners*. Madrid: WTO Publication.

Yoeti, Oka A. 1993. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Yoeti, Oka A. 1999. *Membangun Ekonomi Pedesaan Melalui Agrowisata*. Makalah pada Penataran Dosen PTS Tingkat Nasional. Cisarua Bogor 23-28 Agustus 1999.

#### **Artikel Surat Kabar**

Anonim. 2002. "Tak Ditoleransi, Vila di Petali segera Dibongkar". *Bali Post*, 17 Mei.

Anonim. 2002. "Vila Petali Langgar Jalur Hijau DPRD Rekomendasikan Pembongkaran". *Bali Post*, 9 Desember.

Anonim. 2003. "Soal Bongkar Vila Petali Pemkab Tabanan Mengaku tak Takut". *Bali Post*, 7 Maret.

Anonim. 2004. "Politik Melalui Media". *Kompas*, 21 Agustus. hal: 44.

Anonim. 2006. "Keamanan, Investasi bagi Industri Pariwisata". *Bali Post*, 22 April, hal: 14, kol. 6-8.

Anonim. 2006. "Jati Luwih Menuju *World Culture Heritage*". *Bali Post*, 4 September, hal: 6, kol. 1-7.

Anonim. 2006. "Bali Rusak karena Pemerintah Berpihak kepada Investor". *Bali Post*, 9 September, hal: 14, kol. 2-4.

Anonim. 2006. "Gairahkan Pariwisata Budaya Lokal Mutlak Dikedepankan". *Bali Post*, 18 September, hal: 14, kol. 2-5.

**Majalah**

Majalah DPRD Bali, Nomor 2 Triwulan II, 2008, hal. 1-12.

**Dokumen Pemerintah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya.

Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.

Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Kawasan Wisata di Bali.

Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 359 Tahun 1993 tentang Kawasan Wisata di Bali.

Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/KEP./I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 188.53/DPRD tentang Persetujuan Pengontrakkan Sumber-sumber Income Daerah.

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih.

Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata.

Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penunjukkan Kepala Desa Jatiluwih sebagai Pengelola dan Petugas Pungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Parkir pada Daya Tarik Wisata Jatiluwih.

Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 337 Tahun 2004 tentang Penetapan Desa Adat Pinge, Kecamatan Marga Menjadi Desa Wisata.

Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penunjukkan Kepala Desa Jatiluwih sebagai Pengelola dan Petugas Pungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Parkir pada Daya Tarik Wisata Jatiluwih.

Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 266 Tahun 2007 tentang Penetapan Bendungan Telaga Tunjung, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan sebagai Daya Tarik Wisata.

### **Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Desa\\_Wisata](http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_Wisata)

<http://www.wakaexperience.com/story.htm>

<http://www.balistariland.com/Bali-Interesting-Place/Jatiluwih-Rice-terrace.html>

<http://www.petawisata.blogspot.com/2007/04/Jatiluwih-Tabanan.html>

<http://www.dee-bali.com/Jatiluwih-the-truly.marvelous-landscape/>

<http://www.trekearth.com/gallery/Asia/Indonesia/Nusa-Tenggara/Bali/Jatiluwih>

<http://www.baliblog.com/travel-tips/Jatiluwih-world-heritage-site.html>

<http://e-kuta.com/blog/index.php/2008/09/28/jatiluwih/>

<http://www.balebengong.net/budaya/2008/10/30/dampak-perubahan-iklim-dan-serangan-hama-di-jatiluwih.html>

<http://www.balebengong.net/tetangga/2008/10/25/tabanan-haus-lakukan-mitigasi-konflik-perebutan-lahan>

## Lampiran 1

## Indeks Nama

**A** \_\_\_\_\_

Abdullah, Irwan, 311, 312  
 Adams, Kathleen, 35  
 Aditjondro, George Junus, 325  
 Agger, Ben, 145  
 Agung, Anak Agung Gde Putra, 343  
 Aicken, 181  
 Aly, 355  
 Amstein, 264  
 Ardika, I Wayan, 2, 6, 8, 15, 23, 33,  
 48, 172, 173, 183, 184, 267, 268,  
 345, 349  
 Arikunto, Suharsimi, 65  
 Arka, I Wayan, 20, 22, 188  
 Ascherson, 6  
 Atamadja, 8  
 Atmadja, Nengah Bawa, 319, 323, 326,  
 331  
 Audumon, 37  
 Arthanegara, I Nyoman, 328, 329  
 Astika, 344

**B** \_\_\_\_\_

Bachtiar, Harsya W., 68  
 Bagus, I Gusti Ngurah, 23, 32, 64,  
 209, 284, 330, 354  
 Barker, Chris, 46, 62, 182, 273, 304,  
 308  
 Baum, Tom, 26  
 Bauman, 167  
 Berger, 353  
 Bocock, Robert, 158, 159, 258  
 Boniface, Priscilla, 163, 339  
 Bourdieu, 221  
 Budiman, Arief, 217  
 Bungin, Burhan, 61, 62, 67, 69  
 Burke, Peter, 16  
 Burns, P.M., 23, 48  
 Butler, R.W., 153

Britton, 269  
 Brundtland, 349  
 Bryant, 213

**C** \_\_\_\_\_

Cassirer, 351, 353  
 Cohen, 25  
 Cochrane, Janet, 25  
 Cooper, Chris, 191  
 Chitkara, M.G., 349  
 Cravens, David, 152

**D** \_\_\_\_\_

Dahrendorf, R., 145  
 Danim, Sudarwan, 62  
 Derrida, Jacques, 49, 50, 51, 333  
 Dolors, 34  
 Dowling, 34  
 Dhavamony, 353  
 Drajat, 173  
 Dwipayana, A.A.G.N. Ari, 221  
 Dwyer, Larry, 149

**E** \_\_\_\_\_

Eagleton, T., 283  
 Eckersley, 164  
 Endraswara, Suwardi, 68  
 Erawan, I Nyoman, 10, 55, 267  
 Eriyanto, 53

**F** \_\_\_\_\_

Fairclough, N., 47  
 Fakhri, Mounsur, 44, 53  
 Fay, Brian, 16  
 Fayos Sola, E, 8, 184  
 Forsyth, 149  
 Foucault, Michel, 52, 53, 302, 304,  
 305, 317  
 France, Lesley, 33

Frondisi, Risieri, 150

**G** \_\_\_\_\_

Galtung, 296  
 Garna, Judistira K., 154  
 Gayatri, Putu G., 160, 261  
 Gee, C.Y., 8, 184  
 Geertz, 336, 343, 351  
 Geldern, 343  
 Getz, 240  
 Giddens, Anthony, 311, 345, 354  
 Gie, The Liang, 150  
 Gitosardjono, Sukamdani Sahid, 327  
 Goeldner, Charles R., 264  
 Gorda, Gusti Ngurah, 334  
 Guerrier, 26  
 Glaser, 71  
 Gramsci, Antonio, 43, 44, 145, 158,  
 217, 257, 273, 320

**H** \_\_\_\_\_

Habermas, 319  
 Hadinoto, Kusudianto, 10  
 Hall, Derek, 4  
 Harris, Marvin, 63  
 Hart, Kevin, 50, 51  
 Hassal, 6  
 Hendropuspito, 337, 351, 357  
 Herwanto, 345, 354  
 Hidayat, Herman, 349  
 Hirsch, 331  
 Hitchcock, Michael, 24, 25, 26, 33  
 Hobsbawn, 261  
 Holden, A., 23, 48  
 Hoogendijk, 14, 206  
 Huda, 332

**I** \_\_\_\_\_

Iakovidou, 34  
 Inskeep, 33

**J** \_\_\_\_\_

Jackson, 217

Juhl, 331

**K** \_\_\_\_\_

Kaplan, David, 62  
 Karyono, 5  
 Keller, Suzanne, 274, 275  
 Kerepun, Made Kembar, 335, 345,  
 357  
 King, Victor T., 24, 25, 26, 33  
 Kirk, 61  
 Koentjaraningrat, 66, 67  
 Korten, David C., 7, 225, 229, 240,  
 250, 301  
 Kleden, Ignas, 16  
 Kristeva, Julia, 49  
 Khan, 337, 352, 355

**L** \_\_\_\_\_

Lajar, Aloysius Baha, 49, 333, 356  
 Lauer, 154  
 Leod, Mac, 172  
 Leu, 34  
 Leech, 332  
 Lubis, 302, 304, 317, 323  
 Lyotard, 353, 355, 356

**M** \_\_\_\_\_

MacNaught, 159  
 Mandra, I Made, 9  
 Manner, Albert A., 62  
 Mannheim, Karl, 274, 275  
 Mantra, Ida Bagus, 8  
 Marisson, 30  
 Marx, Karl, 47  
 Maunt, Ian, 3, 164, 229, 237  
 Mayo, M., 31  
 Metera, I Gde Made, 326  
 Miler, 61  
 Mill, 30  
 Mills, 53  
 Milner, 16  
 Moeljarto, 7  
 Moleong, Lexy J., 61

Mowforth, Martin, 3, 164, 229, 237  
 Mulyana, Deddy, 71  
 Murphy, P.E., 159  
 McIntosh, 264

## N \_\_\_\_\_

Naisbitt, John, 9, 34, 37  
 Nasikun, 32, 239, 271  
 Natori, Masahito, 8, 34, 55, 56, 59,  
 184  
 Nordholt, 343, 344  
 Nugroho, 353

## O \_\_\_\_\_

Oka, Ida Bagus, 10, 168, 219  
 Oppermann, 34

## P \_\_\_\_\_

Page, 29  
 Palmer, 332, 351  
 Parimatha, I Gde, 38, 39, 40, 344  
 Parnwell, Michael J.G., 24, 25, 26, 33  
 Patria, Nezar, 43, 44  
 Payne, 67  
 Pearce, 28  
 Peluso, 349  
 Pendit, Nyoman S., 335  
 Perlas, Nictolar, 13  
 Picard, Michael, 26, 33, 38  
 Piliang, Yasraf Amir, 42, 51, 305, 310,  
 331  
 Pitana, I Gde, 21, 22, 35, 54, 55, 160,  
 161, 223, 269, 300, 310  
 Pujaastawa, Ida Bagus Gde, 153, 161,  
 171, 194, 225, 261, 265, 301, 303  
 Prasiasa, Dewa Putu Oka, 152  
 Pretty, Jules, 229, 237, 238

## R \_\_\_\_\_

Ratna, Nyoman Kutha, 44  
 Ratcharak, Nattamon, 302  
 Richards, Greg, 4  
 Richie, 2

Ritzer, George, 154, 167  
 Robinson, D., 159  
 Rumbodlt, Wilhelm van, 158  
 Ryan, Chris, 181

## S \_\_\_\_\_

Saglio, 34  
 Sairin, 141  
 Sammeng, Andy Mappi, 28  
 Sanapiah, 224  
 Sanderson, 355  
 Santayana, George, 149  
 Santhiarsa, I Gusti Ngurah Nitya,  
 348  
 Santoso, Simon, 296  
 Seda, Frans, 314  
 Setia, Putu, 336  
 Simmel, George, 47  
 Sirtha, I Nyoman, 207  
 Siswanta, 344  
 Soedarsono, 61, 336, 343  
 Soedarsono Sp., 352  
 Soemarwoto, Otto, 355  
 Suantina, I Made, 178  
 Suardika, 335  
 Subadra, I Nengah, 188  
 Sugiono, Muhadi, 44  
 Sujana, 357  
 Sumarto, Hetifah S., 297  
 Sunardi, 353  
 Surpha, I Wayan, 344  
 Supriyono, 357  
 Surya, Ida Bagus Ketut, 202, 268  
 Susanto, 351  
 Susilo, Y. Eko Budi, 328  
 Sutrisno, 334, 336  
 Suyatna, 355  
 Scheneider, 347  
 Slamet, 224, 225  
 Spillane, James J., 284  
 Spradley, James, 69  
 Stockwell, 25  
 Strauss, Levi, 63, 71

Storey, John, 52, 302

**T** \_\_\_\_\_

Turner, B S., 47, 308

Thoma, Gert, 166

**W** \_\_\_\_\_

Wahab, Salah, 300

Warren, Carol, 200, 206

Wiana, I Ketut, 348

Williams, 283

Wilson, David, 24

Windhu, I Marsana, 296

Windia, Wayan P., 345

Wood, Robert E., 24, 300

**Y** \_\_\_\_\_

Yoeti, Oka A., 155

Yulianto, 353, 356

**Z** \_\_\_\_\_

Zein, 2

## Lampiran 2

## Indeks Subjek

**A** \_\_\_\_\_

autentitas, 16; *authenticity*, 159, 162

**B** \_\_\_\_\_

*bhisama*, xviii, 46, 138, 139, 170, 219, 237, 267, 279, 281, 294, 313; *sadkahyangan*, 75, 138, 140; *dang kahyangan*, 138, 139, 140, 211, 212

**C** \_\_\_\_\_

*cultural capital*, 15, 33  
*cultural heritage*, 11, 55  
*cultural sustainability*, 32  
*cultural studies*, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 42, 62, 124, 125

**D** \_\_\_\_\_

daya dukung, 236  
desa wisata, xi, xii, xv, xvii, xix, 10, 12, 18, 22, 33, 34, 37, 38, 48, 100, 143, 144, 145, 181, 226, 230, 231, 232, 265, 266, 272, 305; desa wisata terpadu, 36, 168, 169, 170, 200, 201, 202, 209, 238; rumah contoh, 169, 250, 251, 252, 253, 254, 285, 296, 297; vila petali, 170, 198, 200, 209, 211-217, 219, 222, 274, 279-281, 284, 285, 288, 294; vilanisasi, 45  
dekonstruksi, 49, 51, 323  
*developmentalism*, 30  
diskursus, 14, 52, 145, 158, 224, 266, 271; kontra diskursus, 272, 273  
dominasi, 43, 158, 167  
Dunia Pertama, 19; Dunia Ketiga, 19

**E** \_\_\_\_\_

elite, 204, 205, 213, 264; elite desa, 170, 207, 220, 275; elite luar desa (*supra desa*), 170, 207, 220, 222, 275, 280  
*emic*, 62; *etic*, 63  
entitas, 30  
estetika, 146

**F** \_\_\_\_\_

*fordisme*, 6; *postfordisme*, 6

**G** \_\_\_\_\_

globalisasi, 58; globalisasi pariwisata, 59

**H** \_\_\_\_\_

hegemoni, 5, 42-46, 158, 200, 217, 218, 234, 249, 256, 267, 269, 272, 273, 283, 284, 286, 287, 290, 303; hegemonik, 198, 199, 234; kontra-hegemoni, 17, 267, 269, 272, 287, 289, 294; perlawanan, 273, 274, 284, 287, 292, 293, 299  
*hibrid-spiritualitas*, 331

**I** \_\_\_\_\_

identitas, 16, 162  
ideologi, 44, 273

**J** \_\_\_\_\_

jerami, 162; membakar jerami, 162

**K** \_\_\_\_\_

kapitalis, 48, 137, 141, 166, 167, 199; kapitalisme, 166, 198, 314; kapitalistik, 207  
*keliyanaan*, 310

komodifikasi, xviii, xix, 14, 42, 46, 47, 48, 144, 152, 170, 179, 182, 183, 198, 255, 286; komoditas, 182; logika komodifikasi, 319, 324  
 konflik, 196, 200, 206, 221, 263, 299; konflik kepentingan, 204, 208, 209, 217, 219, 266  
 konsensus, 4, 5, 43, 45

## M \_\_\_\_\_

multikultural, 354

## N \_\_\_\_\_

neoliberalisme, 326

## O \_\_\_\_\_

Orde Baru, 4, 157, 245, 313

otonomi daerah, 283

## P \_\_\_\_\_

pariwisata berbasis masyarakat, 3, 10, 14, 19, 27, 32, 51, 54, 59, 183, 223, 239, 263, 269, 270

pariwisata budaya, 1, 8, 38; budaya pariwisata, 239

partisipasi, 4, 225, 227, 229, 230, 238

pendekatan pewaris, 189

*pengenceng*, 342

*postfordism*, 3; *postfordisme*, 3, 6

*postmodern*, 167; *postmodernisme*, 3, 5

*postpositivisme*, 61

*poststrukturalisme*, 50, 52

*private*, 158, 159

## R \_\_\_\_\_

reproduksi lokalitas, 312

resistensi, 168

*risk society*, 354

## S \_\_\_\_\_

*sekaa*, 68, 100, 104, 140, 141; *sekaa teruna*, 100, 185, 246; *sekaa*

*pesantian*, 101; *sekaa gong*, 102, 140; *sekaa joged bumbung*, 108, 140; *sekaa bale ganjur*, 109; *sekaa okokan*, 109; *sekaa numbeg*, 140; *sekaa manyi*, 140; *sekaa meboros*, 140; *sekaa megeguritan*, 140, *sekaa ngigel*, 140

*stakeholders*, xi, xv, xviii, 4, 11, 13, 58, 59, 124, 153, 191, 208, 305  
*state*, 158, 159, 165, 167, 168

## T \_\_\_\_\_

*top down*, 4, 13, 27, 32, 54, 184, 210, 225, 237, 263, 285, 304, 323

*trihita karana*, xi, xii, xv, xx, xxi, 6, 8, 46, 58, 59, 89, 130, 135, 137, 138, 148, 162, 170, 200, 208, 210, 211, 212, 228, 267, 274, 276, 281, 294, 312



## Lampiran 3

**DAFTAR INFORMAN**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama : I Gede Nurjaya<br>U m u r : 54 tahun<br>Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil<br>Alamat : Denpasar                  | 2. Nama : Wayan Diasa<br>Umur : 52 tahun<br>Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil<br>Alamat : Tabanan               |
| 3. Nama : I Nengah Wirata<br>U m u r : 48 tahun<br>Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil<br>Alamat : Dusun Jatiluwih Kangin   | 4. Nama : Wayan Sumiata<br>Umur : 47 tahun<br>Pekerjaan : Petani<br>Alamat : Dusun Jatiluwih Kawan             |
| 5. Nama : Nyoman Sutama<br>U m u r : 49 tahun<br>Pekerjaan : Swasta<br>Alamat : Dusun Kesambahan Kelod                   | 6. Nama : I Wayan Sukabuana<br>Umur : 46 tahun<br>Pekerjaan : Petani<br>Alamat : Dusun Kesambi                 |
| 7. Nama : Wayan Yasa<br>U m u r : 42 tahun<br>Pekerjaan : Petani<br>Alamat : Dusun Kesambahan Kaja                       | 8. Nama : Ketut Sukaya<br>Umur : 37 tahun<br>Pekerjaan : Sopir<br>Alamat : Dusun Jatiluwih Kawan               |
| 9. Nama : Wayan Pudja<br>U m u r : 58 tahun<br>Pekerjaan : Petani<br>Alamat : Dusun Gunungsari Desa                      | 10. Nama : Gede Sweden<br>U m u r : 57 tahun<br>Pekerjaan : Petani<br>Alamat : Dusun Gunungsari Desa           |
| 11. Nama : Nengah Sutarma<br>U m u r : 45 tahun<br>Pekerjaan : ABRI<br>Alamat : Dusun Jatiluwih Kawan                    | 12. Nama : Ketut Landra<br>U m u r : 52 tahun<br>Pekerjaan : Petani<br>Alamat : Dusun Jatiluwih Kangin         |
| 13. Nama : I Nengah Suastika<br>U m u r : 35 tahun<br>Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil<br>Alamat : Dusun Jatiluwih Kawan | 14. Nama : Ni Ketut Sukasih<br>U m u r : 35 tahun<br>Pekerjaan : Bidan Desa<br>Alamat : Dusun Jatiluwih Kangin |
| 15. Nama : I Nyoman Suwirka<br>U m u r : 45 tahun<br>Pekerjaan : Petani<br>Alamat : Dusun Jatiluwih Kawan                | 16. Nama : Nengah Sukra<br>U m u r : 60 tahun<br>Pekerjaan : Petani<br>Alamat : Dusun Jatiluwih Kawan          |

17. Nama : I Wayan Mendri  
U m u r : 50 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Jatiluwih Kawan
18. Nama : Wayan Mustika  
U m u r : 60 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Jatiluwih Kawan
19. Nama : Made Sumerjaya  
U m u r : 63 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Gunungsari Desa
20. Nama : I Ketut Sukadana  
U m u r : 50 tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Jatiluwih Kangin
21. Nama : I Gede Nyoman Sujendra  
U m u r : 46 tahun  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Dusun Gunungsari  
Umakayu
22. Nama : I Wayan Sulandra H.  
U m u r : 49 tahun  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Dusun Kesambi Kaja
23. Nama : Wayan Sutarja  
U m u r : 44 tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Kesambahan Kaja
24. Nama : Nyoman Gangsuh  
U m u r : 43 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Jatiluwih Kangin
25. Nama : I Nengah Kantra  
U m u r : 49 tahun  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Dusun Kesambahan Kelod
26. Nama : Wayan Suiyasa  
U m u r : 37 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Dusun Jatiluwih Kangin
27. Nama : Nang Genjer  
U m u r : 72 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Jatiluwih Kawan
28. Nama : Pan Juar (alias Rinteh)  
U m u r : 70 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Gunungsari Desa
29. Nama : Pan Nyempeng  
U m u r : 70 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Jatiluwih Kawan
30. Nama : Pan Kajin  
U m u r : 73 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Jatiluwih Kawan
31. Nama : Pan Sunasih  
U m u r : 71 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Jatiluwih Kangin
32. Nama : Nang Mujung  
U m u r : 69 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Jatiluwih Kangin

## Lampiran 4

**PEDOMAN WAWANCARA****A. Pertanyaan Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

1. Bagaimanakah gambaran umum Desa Jatiluwih?
2. Bagaimanakah kondisi kependudukan Desa Jatiluwih?
3. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Jatiluwih?
4. Bagaimanakah kondisi pertanian Desa Jatiluwih?
5. Bagaimanakah kehidupan keagamaan, budaya dan seni di Desa Jatiluwih?
6. Bagaimanakah gambaran Desa Jatiluwih sebelum pengembangan menjadi desa wisata?
7. Bagaimanakah gambaran umum kepariwisataan Kabupaten Tabanan, yang meliputi: daya tarik wisata, sarana pariwisata, dan kunjungan wisatawan?

**B. Pertanyaan Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih**

1. Bagaimanakah gambaran Desa Jatiluwih sebagai desa wisata?
2. Setelah pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, bagaimanakah gambaran tentang usaha sarana pariwisata dan kunjungan wisatawan (termasuk persepsi wisatawan terhadap keterlibatan masyarakat setempat)?
3. Komodifikasi seperti apakah yang terjadi terhadap sumber daya desa ini pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?
4. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?
5. Bagaimanakah bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?
6. Sejauh mana keterlibatan *sekaa-sekaa* dan *Desa Adat* Jatiluwih dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?
7. Bagaimanakah keterlibatan *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?
8. Bagaimanakah hubungan antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?

**C. Pertanyaan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih**

1. Adakah sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sebelum pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?
2. Bagaimanakah bentuk sosialisasi tersebut, serta bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi yang dilaksanakan pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?
3. Diskursus/Wacana apa sajakah yang dipakai dalam sosialisasi tersebut?

4. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?
5. Bagaimanakah bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih pada tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasional, tahap pengembangan, dan tahap pengawasan?
6. Bagaimanakah hubungan antara *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?
7. Bagaimanakah relasi di antara *Desa Adat*, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?
8. Bagaimanakah implementasi kearifan lokal Bali dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih?
9. Bagaimanakah peranan elite masyarakat (elite desa dan elite luar desa dari Kabupaten Tabanan) dalam meng-*counter* pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih yang tidak sesuai dengan budaya atau aturan yang sudah disepakati oleh masyarakat?
10. Kasus "Vila Petali" dan Kasus "rumah contoh"?

**D. Pertanyaan Dampak dan Makna Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih**

1. Dampak apa sajakah yang timbul dari pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih?
2. Bagaimanakah makna kesejahteraan dari pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih?
3. Bagaimanakah makna pelestarian dari pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih?
4. Bagaimanakah makna pemberdayaan dari pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih?



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS UDAYANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KAJIAN BUDAYA

Jalan Nias 13 Denpasar, Bali

Telepon/Fax (0361) 246653

SURAT IZIN PENELITIAN  
Nomor: 368/H14.14.1.5/PL 00.01/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Program Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana:

Nama : Prof. Dr. I Made Suastika, S.U  
NIP : 130 818 146  
Jabatan : Ketua Program Pendidikan Doktor (S3) Kajian Budaya  
Universitas Udayana  
Alamat : Jalan Nias 13 Denpasar.

Memberikan izin kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dewa Putu Oka Prasiasa  
NIM : 0690371017  
Tahun akademik : 2006/2007  
Semester : IV

untuk melakukan peninjauan/penelitian dengan judul: Desa Wisata Terpadu Jatiluwih: Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Mei 2008  
Ketua  
  
Prof. Dr. I Made Suastika, S.U.  
NIP. 130 818 146  




400

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Kampus Bukit Jimbaran      Telp. (0361) 701812, 701954, 701797 Fax. : (0361) 701907

---

Nomor : 2080/H.14.5/DT.03.13/2008  
Lamp. : 1 (satu) Eks.  
Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

JUN 2008

**Yth. :**  
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan**  
**Masyarakat Daerah Provinsi Bali**  
**Di Denpasar.**

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan Dharma ke-2 dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, seorang mahasiswa **Program Doktor S3 Kajian Budaya** Universitas Udayana akan mengadakan penelitian, selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memohonkan ijin bagi :

**N a m a** : Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par.,M.M  
**NIM** : 0690371017  
**Fakultas/PS** : S3 Kajian Budaya  
**Alamat** : Program Doktor S3 Kajian Budaya  
**Lokasi** : Desa Jatiluih, Kecamatan Penebel Kab.Tabanan  
**Judul Penelitian** : **Desa Wisata Terpadu Jatiluih:**  
**Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat**  
**Waktu** : 4 (empat) bulan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama selama ini, kami ucapkan terima kasih.

  
**an. Rektor**  
**Kepala Biro Administrasi Akademik,**  
**I Wayan Antara, S.E.,M.M.**  
**NIP. 130818152.**

**Tembusan Yth. :**

1. Ketua PS. Doktor (S3) Kajian Budaya UNUD
- ② Yang bersangkutan
3. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI BALI  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**  
JL. D.I. PANJAITAN NO. 6 NITI MANDALA TELP.245395 – 245397 DENPASAR

Nomor : 070/3534/KBPM  
Lamp : -  
Perihal : Ijin Rekomendasi

Kepada  
Yth: Bupati Tabanan  
-Up.Ka Kkantor Kesbang Linmas dan Tantib  
di  
T a b a n a n

1. Dasar :

Berdasarkan Surat dari Ketua Program Doktor S3 Kajian Budaya Universitas Udayana Nomor: 2080 A/H.14.5/DT .03.13/2008, Tanggal 4 Juni 2008, Perihal Permohonan Ijin Penelitian

2. Setelah mempelajari rencana kegiatan yang diajukan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Rekomendasi / Ijin Penelitian, Survey KKL/KKN Study Banding, Kerbaksos, PKL, Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa/Dosen, Instansi Pemerintah/Swasta dan Orang Asing, maka dapat diberikan Rekomendasi / Ijin.

Nama : Dewa Putu Oka Prasiasa ,A.Par,M.M  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Perogram Doktor S3 Kajian Budaya  
Bidang/Judul : "Desa Wisata Terpadu Jatiluwih"  
Lokasi : Desa Jatiluwih , Kecamatan Penebel Kab Tabanan.  
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang  
Lamanya : 4 (empat) Bulan, Juni s/d September 2008

3. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati setempat atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/ Ijin dan menghentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/ Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi/ Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- e. Menyerahkan 2 (dua) buah hasil kegiatan kepada Pemda Provinsi Bali, melalui Ketua Bappeda Provinsi Bali 1(satu) dan Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Provinsi Bali 1 (satu) buah.

Denpasar, 5 Juni 2008

An. GUBERNUR BALI  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Dl. KABID. DETEKSI DAN PAMASDA



Tembusan disampaikan kepada:

1. Kapolda Bali di Denpasar
2. Dan Rem 163 Wirasatya
3. Kepala Bappeda Prov. Bali di Denpasar
4. Yang bersangkutan

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**KANTOR KESBANGPOL, LINMAS DAN SATPOL PP**  
 Jalan Pahlawan Nomor 33 Telp. ( 0361 ) 811553 Tabanan 82113

**SURAT KETERANGAN MENGADAKAN PENGABDIAN / PENELITIAN SURVEY  
 STUDY PERBANDINGAN**

NOMOR : 071 / 450 / KPL. Pol PP

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Bali, tanggal 5 Juni 2008 Nomor : 070 / 3534 / KBPM, Maka Bupati Tabanan dapat memberikan ijin mengadakan penelitian, Survey, Kerbaksos, Study Perbandingan, Ijin Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada :

Nama	: Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par, M.M.
Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Program Doktor S3 Kajian Budaya
Masalah/Judul	: " DESA WISATA TERPADU JATILUWIH"
Lokasi	: Desa Jatiluwih, Kec. Penebel Kab. Tabanan
Jumlah Peserta	: 1 (satu) orang
Waktu	: 4 ( empat ) Bulan, Juni s/d September 2008

Yang bersangkutan agar :

1. Sebelum mengadakan Penelitian agar melaporkan kepada pimpinan instansi tempat diadakannya penelitian.
2. Selesai mengadakan Penelitian agar melapor kembali pada Pemerintah Kabupaten Tabanan ( Kantor Kesbangpol, Linmas dan Sat Pol PP Kabupaten Tabanan).
3. Menyerahkan Hasil Penelitian 1 (satu) exemplar kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan ( Kantor Kesbangpol, Linmas dan Sat Pol PP Kabupaten Tabanan).
4. Para Peneliti agar mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di wilayah Desa / Kecamatan yang bersangkutan dan yang melanggar akan dicabut Surat Keteranganannya serta menghentikan segala kegiatannya.

Dikeluarkan di : Tabanan  
 Pada Tanggal : 9 Juni 2008

An. BUPATI TABANAN  
 KEPALA KANTOR KESBANGPOL, LINMAS DAN SATPOL PP  
 KABUPATEN TABANAN

  
 I NYOMAN GEDE GUNAWAN, S.Sos, M.Si.

PEMBINA

NIP. 010226408

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Kesbang Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Propinsi Bali di Denpasar
2. Anggota Muspida Kab. Tabanan.
3. Camat Penebel di Penebel
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
KECAMATAN PENEHEL  
Jl. Raya Penebel No. 29 Telp (0361) 812012  
PENEHEL - 82152

403

**SURAT KETERANGAN MENGADAKAN PENGBDIAN/PENELITIAN SURVEY  
STUDY PERBANDINGAN**

**NOMOR : 071/425/TRANTIB**

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol, Linmas dan Satpol PP Kabupaten Tabanan, Nomor : 071/271/KPL. Pol PP, Tanggal 10 April 2008, maka Camat Penebel dapat memberikan ijin mengadakan Penelitian, Survey, Kerbaksos, Study Perbandingan kepada :

Nama : Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par, M.M  
Jabatan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Batuyang Gang Bangau No. 26 Batubulan, Gianyar  
Masalah / Judul : "DESA WISATA TERPADU JATILUWIH"  
Lokasi : Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan  
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang  
Waktu : 4 (empat) bulan mulai Juni s/d September 2008

Yang bersangkutan agar :

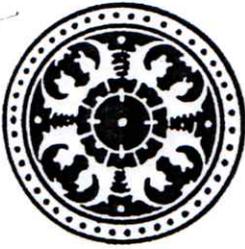
1. Sebelum mengadakan Penelitian agar melapor kepada Pimpinan Instansi tempat diadakannya penelitian
2. Selesai mengadakan Penelitian agar melapor kembali Pemerintah Kabupaten Tabanan (kantor Camat Penebel)
3. Menyerahkan hasil Penelitian 1 (satu) exemplar kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan (Kantor Camat Penebel)
4. Para Peneliti agar mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di wilayah Desa / Kecamatan yang bersangkutan dan yang melanggar akan dicabut Surat Keteranganannya serta menghentikan segala kegiatannya.

Dikeluarkan di : Penebel  
Pada Tanggal : 9 Juni 2008



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Kesbangpol, Linmas dan Satpol PP
2. Muspika Kecamatan Penebel.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS UDAYANA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan P.B. Sudirman Denpasar, Bali

Telp./Fax, (0361) 223797

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
Nomor : 206/H.14.4/HK/2008

Tentang

Susunan Tim Promotor dan Kopromotor Mahasiswa Program Doktor (S3)  
Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana perlu ditetapkan Tim Promotor dan Kopromotor.
2. Bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu ditetapkan Tim Promotor dan Kopromotor Program Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Pendidikan Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana No. 128/H14.4.5/PP.03.01/2008, tanggal 18 Pebruari 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Th. 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 44/J14/KP.02.18/2006, tanggal 19 Januari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Asisten Direktur I dan Asisten Direktur II pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS UDAYANA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan P.B. Sudirman Denpasar, Bali

Telp./Fax, (0361) 223797

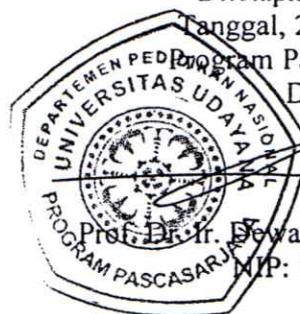
**MEMUTUSKAN**

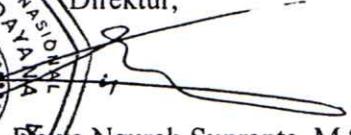
Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Promotor dan Kopromotor Program Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana yang nama dan pelaksanaan ujian-ujianya, seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim Promotor dan Kopromotor dalam tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana Program Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diatur semestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Tanggal, 29 Pebruari 2008

Program Pascasarjana Unud  
Direktur,



Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc.   
NIP: 131 475 047

***Tembusan Yth.***

1. Rektor Universitas Udayana (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Sastra (untuk diketahui)
3. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Arsip



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS UDAYANA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan P.B. Sudirman Denpasar, Bali

Telp./Fax, (0361) 223797

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
Nomor : 206/H.14.4/HK/2008**

Tentang

**Susunan Tim Promotor dan Kopromotor Mahasiswa Program Doktor (S3)  
Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana**

No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Nyoman Sri Subawa, S.Sos., MM NIM. 0690371021	Prof. Dr. I Wayan Tjatera, M.Sc NIP. 130369690/Guru Besar, IV/c	Promotor
		Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS NIP. 130369678/Guru Besar, IV/d	Ko-Promotor I
		Prof. Dr. I Gde Parimartha, MA NIP. 130534319/Guru Besar, IV/d	Ko-Promotor II
2.	Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par.,MM NIM. 0690371017	Prof. Dr. I Wayan Ardika, MA NIP. 130886694/Guru Besar, IV/e	Promotor
		Prof. Dr. I Nyoman Kutha Ratna, SU NIP. 130534228/Guru Besar, IV/d	Ko-Promotor I
		Prof. Dr. Emiliana Mariyah, MS NIP. 131273589/Guru Besar, IV/b	Ko-Promotor II
3.	Drs. A.A. Gde Rai, M.Si NIM. 0690371007	Prof. Dr. I Gde Parimartha, MA NIP. 130534319/Guru Besar, IV/d	Promotor
		Prof. Dr. I Gde Semadi Astra NIP. 130178484/Guru Besar, IV/c	Ko-Promotor I
		Prof. Dr. I Made Suastika, SU. NIP. 130818146/Guru Besar, IV/c	Ko-Promotor II

Denpasar, 29 Pebruari 2008  
Program Pascasarjana Unud  
Direktur,


  
Prof. Dr. I Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc.  
NIP. 131 475 047



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS UDAYANA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan P.B. Sudirman Denpasar, Bali

Telp./Fax, (0361) 223797

SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
Nomor :912/H14.4/HK/2009  
Tentang

Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) Program Doktor (S3) Kajian Budaya  
Program Pascasarjana Universitas Udayana

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup).
2. Bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup ) Program Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana No. 591/H14.4.5/PP.03.08/2009, tanggal 8 September 2009
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th 2003, tentang Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Th. 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 44/J14/KP.02.18/2006, tanggal 19 Januari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Asisten Direktur I dan Asisten Direktur II pada Program Pascasarjana Universitas Udayana
4. Surat keputusan Rektor No. 61/H.14/KU.00.00/2009, tentang Tarif Rektor



408

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan P.B. Sudirman Denpasar, Bali

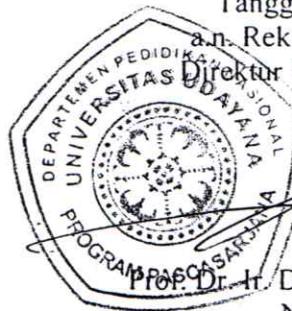
Telp./Fax, (0361) 223797

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Panitia Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) Program Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana yang nama dan pelaksanaan ujian-ujianya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Panitia Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) dalam tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA 2009 Nomor.0229.0/023.04.2/XX/2009, tanggal 31 Desember 2008
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diatur semestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Tanggal 11 September 2009  
a.n. Rektor Universitas Udayana  
Direktur Program Pascasarjana Unud



Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc.  
NIP: 131 475 047

**Tembusan Yth.**

1. Rektor Universitas Udayana (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Sastra (untuk diketahui)
3. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Arsip



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS UDAYANA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan P.B. Sudirman Denpasar, Bali

Telp./Fax, (0361) 223797

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
Nomor :912/H14.4/HK/2009**

Tentang

**Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) Program Doktor (S3) Kajian Budaya  
Program Pascasarjana Universitas Udayana**

No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan
1	Dewa Putu Oka Prasiasa, A.par., M.M NIM 0690371017	Prof. Dr. I Wayan Ardika, MA NIP. 130886694/Guru Besar, IV/e	Promotor
		Prof. Dr. I Nyoman Kutha Ratna, SU NIP. 130534228/Guru Besar, IV/d	Ko-Promotor I
		Prof. Dr. Emiliana Mariyah, M.S. NIP. 130273589/Guru Besar, IV/b	Ko-Promotor II
		Prof. Dr. I Made Suastika, SU NIP. 130818146/Guru Besar, IV/d	Penguji
		Prof. Dr. I Gde Parimartha, MA NIP. 130534319/Guru Besar, IV/d	Penguji
		Prof. Dr. I Gde Semadi Astra NIP. 130178484/Guru Besar, IV/d	Penguji
		Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS NIP. 130369678/Guru Besar, IV/e	Penguji
		Dr. I Gede Mudana, M.Si NIP. 131926971/Guru Besar, IV/da	Penguji

Denpasar, 11 September 2009  
Program Pascasarjana Unud  
Direktur,



Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sch  
NIP: 131 475 047

Jumat Pon, 17 Mei 2002

## Tak Ditoleransi, Vila di Petali segera Dibongkar

**Tabanan (Bali Post) -**

Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama, Kamis (16/5) kemarin mengemukakan, pihaknya tak mentoleransi keberadaan vila di Dusun Petali dan meminta pemiliknya segera melakukan pembongkaran. Masalahnya, bangunan itu lokasinya berdekatan dengan Pura Petali, Penebel.

Dikatakan, tak ada alasan bangunan itu dipertahankan. Tentang kapan akan dilakukan pembongkaran, menurut Bupati, sekitar Juni 2002 setelah *karya* di Pura Petali. "Jika menjelang *karya* dibongkar tentu akan mem-

buat suasana amburadul" jelasnya.

Selain inisiatif pemkab menjadwalkan sudah *karya*, menurut Bupati Adi, hal itu juga atas permintaan masyarakat.

Ditanya apakah pemilik vila pernah menghadap Bupati untuk minta toleransi, Bupati menyatakan tidak pernah. Tapi diakuinya ada sekelompok masyarakat yang datang dan menginginkan keberadaan vila tersebut dipertahankan, namun ia mengaku tetap menolak keberadaannya. "Kami tahu lokasi vila itu sangat dekat dengan tempat sembahyang dan bisa merusak kesucian pura," paparnya. (kmb 16)

## DPRD Tabanan Sidak ke Vila Petali

**Tabanan (Bali Post) -**

Bupati Tabanan diminta segera bertindak tegas yakni membongkar bangunan vila di Banjar Petali, Desa Jatiluwih, Penebel. Alasannya melanggar Perda jalur hijau dan lokasinya berdekatan dengan bangunan suci Pura Petali.

Itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Tabanan I Wayan Supartha S.H., didampingi beberapa ketua komisi usai melakukan sidak gabungan ke areal Vila Petali, Rabu (13/11) kemarin.

Supartha dan rekannya mengaku sangat kecewa dengan pembangkangan yang dilakukan pemilik vila terhadap keputusan Bupati Tabanan yang melarang keberadaan vila tersebut. "Kami benar-benar merasa kecewa pemilik vila berani menentang keputusan bupati, terbukti dengan terus berlanjutnya pembangunan vila itu," ujarnya.

Pembkab diharapkan tal. memberikan toleransi berlebihan terhadap pemilik Vila Petali. Toleransi itu bisa menimbulkan kesan seolah-olah ada apa-apanya di balik kelambanan tersebut. "Timbul preseden buruk di masyarakat, jika Pemkab menunda pembongkaran. Bahkan terkesan Pemkab Tabanan tak berwibawa. Bagaimana jika masyarakat yang lainnya melanggar?" tanyanya. Dalam sidak kemarin, tim DPRD Tabanan tak dapat bertemu langsung dengan pemilik vila, Wawan. Mereka hanya bertemu dengan beberapa tukang bangunan yang tengah bekerja.

(kmb 16)

Senin Wage, 9 Desember 2002

# Vila Petali

## Langgar Jalur Hijau

### DPRD Rekomendasikan Pembongkaran

Tabanan (Bali Post) -

Keberadaan Vila Petali di Desa Jatiluwih, Penebel dinilai melanggar perda tentang jalur hijau di Tabanan. Bangunan ini juga sangat berdekatan dengan Pura Petali. Atas pelanggaran tersebut, Dewan mengeluarkan rekomendasi agar Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama, S.Sos. secepatnya membongkar bangunan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Tabanan Wayan Supartha, S.H. Kamis (5/12) lalu di ruang kerjanya. Sikap tegas itu direkomendasikan setelah Komisi Gabungan yang dipimpinnya melakukan peninjauan ke lokasi beberapa waktu lalu.

Menurut dia, sudah saatnya Pemkab Tabanan khususnya Bupati berani memerintahkan aparatnya

yang berwenang untuk melakukan pembongkaran sesuai dengan SK yang pernah dikeluarkan Bupati Tabanan beberapa waktu lalu menyangkut larangan keberadaan vila tersebut. "Seharusnya tidak ada toleransi lagi bagi pemilik vila untuk melanjutkan pembangunan jika Pemkab ingin mempunyai wibawa di mata masyarakat," katanya sembari menyebut rekomendasi

yang ditandatanganinya itu sudah dilayangkan seminggu lalu.

Selain itu, kader PDI-P asal Bonian, Selemadeg ini juga meminta Pemkab tidak hanya melakukan peninjauan, tetapi harus segera membongkar paksa bangunan vila itu jika pemiliknya tetap melakukan upaya pembangkangan terhadap keputusan Bupati. "Jika dibiarkan terus, ada kesan persoalan ini dibekingi oleh pihak-pihak yang ingin bermain," tandas Supartha.

Dia juga berharap, pemilik vila sadar kalau dirinya telah melanggar peraturan daerah. "Saya yakin tidak ada pihak-pihak yang men-

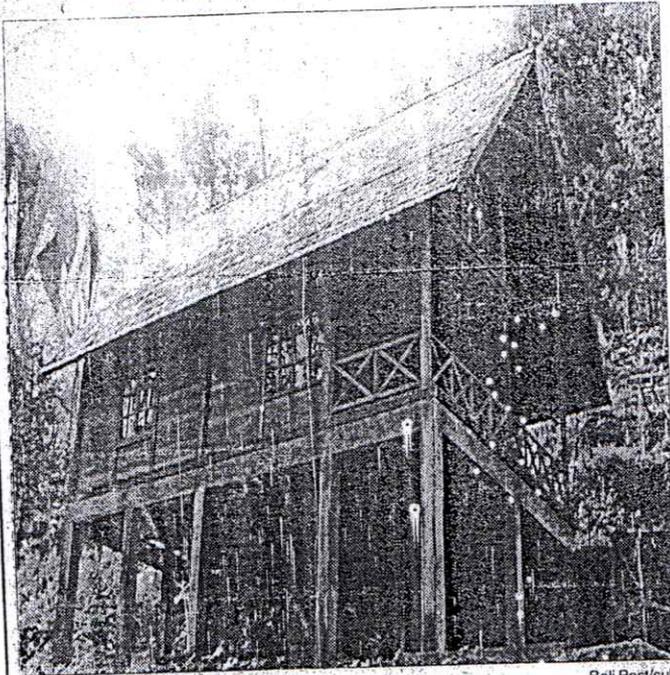
coba mencari keuntungan dengan cara melindungi pengusaha yang melanggar aturan," paparnya.

Sumber terdekat yang minta namanya dirahasiakan menuturkan, Vila Petali memang sudah berjalan terlihat dari adanya beberapa tamu asing yang berlama-lama di daerah yang berhawa sejuk tersebut. Namun kedatangan tamu untuk menginap di sana tak rutin. Selain itu, proses pembangunan vila itu tetap berlanjut kendati pemiliknya jarang ada di lokasi. "Setahu saya sudah beberapa kali ada tamu asing yang menginap di sana," tandasnya.

(kmb16)

Soal Dongkal Vila Petali

# Pemkab Tabanan Mengaku tak Takut



Bali Post/Sub

Vila Petali

IBARAF gayung bersambut, rencana Pemerintah Kabupaten Tabanan membongkar Vila Petali milik Wawan Setiawan, di Desa Jatiluwih, Tenebel, mendapat dukungan dari semua pihak. Setelah Paruman Saba Desa Pekraman se-Kecamatan Penebel memberikan dukungan, Selasa (11/3) kemarin, giran *pengemong* Pura Rsi dan Manik Selaka sependapat, penertiban bangunan merupakan salah satu usaha untuk menjaga kesucian pura.

Sikap kedua *pengemong* pura tersebut tercetus dalam rapat yang dipimpin Asisten I Drs. Made Tantra, MM. Pada kesempatan itu juga hadir Kesanglinmas Made Sutardjana, S.Sc., Kabag Tapem Drs. Nyairi Satiana dan sejumlah tusan dinas lainnya. Sementara para *pengemong* didampingi Camat Penebel Nyoman Bede Gunawan, S.Sos.

Bendesa Pekraman Piling Nyoman Sudarmana, S.Pd. sebagai wakil *pengemong* Pura Manik Selaka mendukung kebijakan Pemkab Tabanan dalam melakukan penertiban bangunan. "Pura Manik Sela-

ka letaknya memang berjauhan dengan Vila Petali namun untuk mencegah preseden buruk di kemudian hari, kami setuju dilakukan penertiban," kata Sudarmana. Ditambahkan, di dekat Pura Ninggar Sari—*pengemong*-nya masyarakat Piling—juga berdiri Vila Waka Loka, yang letaknya juga dikhawatirkan mengganggu kesucian pura.

Pada kesempatan itu juga ditanyakan soal perizinan Vila Petali. Sehubungan dengan pertanyaan ini, Made Tantra menjawab bahwa vila itu tidak memiliki izin apa pun. "Apalagi belum mengantongi izin, tidak ada istilah bagi pemkab surut melangkah. Kalaupun ada izin jika peruntukannya salah juga tidak ada istilah takut," paparnya.

Sedangkan Ida Bagus Gde Artana mewakili *pengemong* Pura Rsi menyerahkan permasalahan tersebut kepada Desa Pekraman Jatiluwih. Bila Desa Pekraman Jatiluwih menyatakan tidak, semua *pengemong* dan penyungusung pura yang terletak di seluruh Bali itu bersikap serupa. "Kami sadar tempat kami ting-

gal dengan lokasi pura cukup berjauhan. Sangatlah tidak bijaksana kami bersikap berlawanan dengan masyarakat setempat," kilahnya.

## Dijadikan Pertimbangan

Made Tantra menyatakan, masukan yang diberikan dua *pengemong* pura tersebut selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Masalah surat peringatan yang pernah dua kali dikeluarkan, dinyatakan masih tetap berlaku. Selain masukan dua *pengemong* pura tersebut, dikatakan, semua *pengemong* pura lain yang berada di sekitar wilayah Pura Puncak Luhur Petali juga diminta pendapatnya.

Menurutnya, pijakan yang telah diambil pemerintah dalam menerbitkan lewat surat peringatan sebenarnya sudah tepat. Namun guna menghindari risiko di kemu-

dian hari, masukan dari masyarakat juga akan dijadikan bahan pijakan.

"Dalam mengambil keputusan, pemerintah juga perlu memikirkan hal lainnya. Apalagi sebelumnya sempat memunculkan pro dan kontra. Bagaimana pun keputusan jangan sampai menimbulkan keresahan masyarakat. Termasuk para pemiliknya bisa menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Drs. Wayan Kawi S. yang ditemui terpisah tetap mengharapkan eksekutif segera mengambil tindakan. Soal mencari masukan dari para *pengemong*, menurutnya, merupakan hal wajar di dalam mencegah munculnya gugatan hukum di kemudian hari. "Yang terpenting, keputusan yang diambil jangan sampai menimbulkan preseden buruk di kemudian hari," pintanya. (sub)

Pertahankan Potensi Lokal

# Jati Luwih Menuju 'World Culture Heritage'

Di tengah carut-marutnya dunia pertanian, Jati Luwih yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Penebel, Tabanan mampu mempertahankan potensi lokal yang dimilikinya. Beras merah atau beras Bali yang diproduksi petani Jati Luwih telah menjadi primadona masyarakat Bali dari dulu hingga sekarang. Bahkan, karena kemampuannya untuk menjaga potensi lokal, desa yang memiliki pesona pertanian sangat indah dan unik ini akan segera menjadi *World Culture Heritage* atau warisan budaya dunia. Apa upaya masyarakat dalam mempertahankan *local genius* yang dimiliki?

MELALUI SK Bupati tahun 2005, Jati Luwih yang bernuansa pegunungan telah ditetapkan menjadi desa wisata. Namun, sebelumnya keberadaan Desa Jati Luwih telah menjadi primadona tersendiri bagi dunia pariwisata Bali. Setiap hari dapat kita saksikan para wisatawan mancanegara selalu berdatangan untuk menyaksikan keindahan dan berbagai keunikan dari desa ini. Pemandangan sawah

terasering disertai dengan udara yang sejuk dan asri mampu membius para pengunjung ke desa ini. Bahkan sejak dulu, keunikan yang dimiliki berupa pertanian organik beras merah, alam yang indah dan beberapa faktor penyangga ternyata telah menjadi perhatian dunia internasional. Pihak Unesco telah mengantongi berbagai informasi dan telah terdaftar sebagai salah satu kandidat warisan budaya dunia. Der-

gan sawah seluas 303 ha, Jati Luwih telah menjadi kandidat warisan budaya dunia bersama dengan Candi Borobudur dan Prambanan.

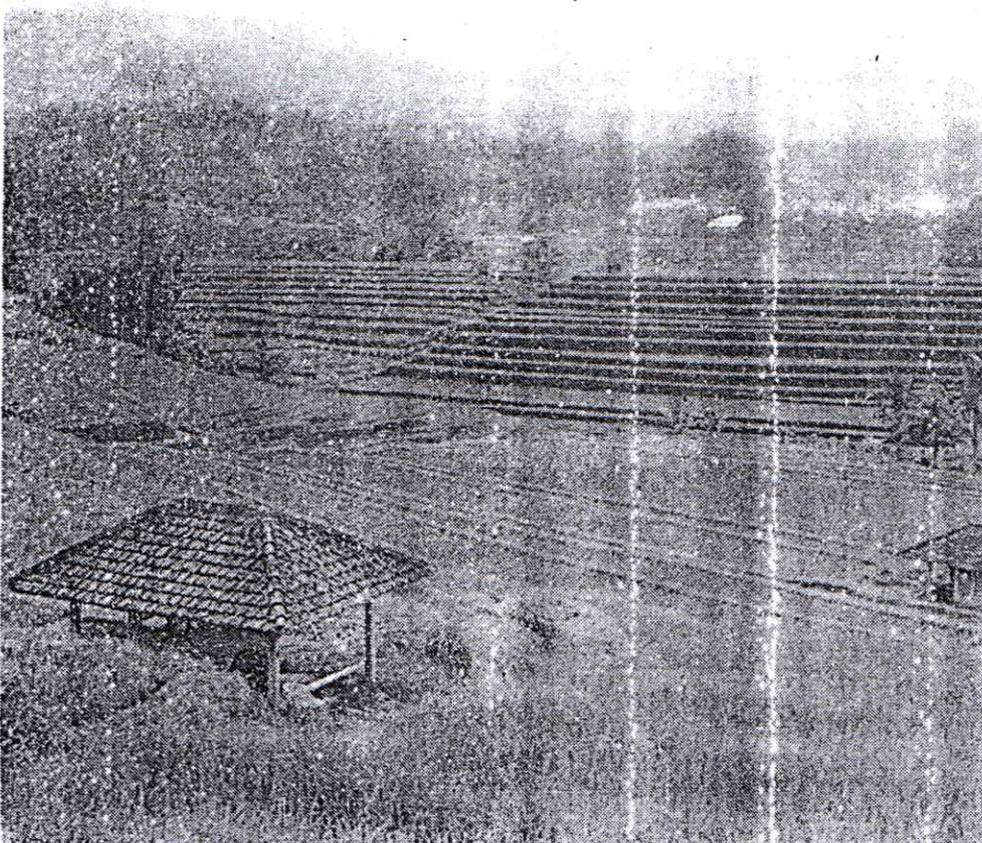
Kepala Dinas Pertanian I Wayan Diasa yang sekaligus tergabung dalam panitia persiapan penentuan warisan budaya dunia menyatakan berdasarkan komunikasi yang telah dilakukannya dengan pihak Unesco, sangat dimungkinkan Jati Luwih akan segera ditetapkan

kan karena keunikan yang dimilikinya.

Diasa menyatakan konservasi alam dan budaya menjadi titik berat pada areal sawah yang sangat indah tersebut. Sawah yang juga didukung dengan zona penyangga di antaranya Pura-pura besar yang ada di Desa Jati Luwih seperti Pura Patali, Pura Luhur Maha Warga Bhujangga Waisnawa, Pura Rambut Sedana dan beberapa pura besar lainnya ini telah menjadi perhatian dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sejak tahun 2002 telah diupayakan foto udara melalui satelit di daerah ini.

Menurut Diasa, pihaknya sedang membicarakan dengan pihak Unesco mengenai hak-hak dan kewajiban dari masyarakat setempat maupun pmda. Kawasan tersebut nantinya juga akan dijadikan sebagai tempat studi lapangan bagi dunia pendidikan tentang pertanian. Pembangunan vila ataupun *art shop* hanya dapat dibangun pada kawasan penyangga, untuk tetap menjaga keunikan lokal yang dimilikinya.

Model pertanian yang diterapkan secara turun-temurun di desa yang berada pada ketinggian 500-1.500 meter ini sangat unik. Masyarakat di desa ini masih menggunakan cara tradisional dalam mengerjakan sawahnya. Ada dua musim penanaman yakni penanaman padi beras merah (yang disebut padi lokal) pada bulan Desember sampai Januari dan varietas lain pada bulan Juli yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan musim gadu. Pada musim gadu masyarakat bebas menanam jenis padi yang diinginkan seperti padi Mansur, ketan atau ketan hitam, tetapi setelah musim itu berlalu, masyarakat kembali menanam padi lokal atau padi Bali. Warna, rasa dan bau beras merah yang dihasilkan sangat khas dan berbeda dengan beras dari desa sekitarnya, seh-



**BERAS MERAH** - Sawah dengan terasering menjadi keunikan dan pemandangan indah tersendiri di Jati Luwih. Beras merah atau beras Bali yang diproduksi petani Jati Luwih telah menjadi primadona masyarakat Bali dari dulu hingga sekarang.

ingga sangat laku di pasaran.

#### Komitmen Masyarakat

Kepala Desa Jati Luwih I Nengah Wirata menyatakan masyarakat juga menyambut baik rencana menjadikan wilayahnya sebagai warisan budaya dunia. Namun, masyarakat masih bertanya-tanya hak yang didapatkan dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan dijadikan warisan budaya dunia. Komitmen masyarakat akan pelestarian alam juga sangat tinggi. Sepanjang tahun, kata dia, alih fungsi lahan pertanian sangat kurang, karena masyarakat lebih suka menggarap lahan pertaniannya serta bertekad mempertahankan kekayaan alam yang penuh keunikan tersebut.

Wakil Bupati Tabanan IGG Putra Wirasana juga memiliki perhatian khusus terhadap daerah penghasil padi Bali tersebut. Selain kualitas beras merah yang harus selalu dipertahankan, menurutnya, pengembangan pariwisata ke depan tidak boleh menghilangkan *local genius* dari Jati Luwih. Menurut dia, Pemkab Tabanan akan terus mengadakan pemantauan terhadap pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Jati Luwih, baginya, adalah daerah yang

memiliki kekhasan yang harus dipelihara dan dipertahankan. Selain itu, perekonomian masyarakat setempat harus ditingkatkan tanpa harus mengubah struktur budaya dan cara kerja pertanian lokal yang telah diterapkan masyarakat secara turun-temurun. ■ **surpi**

#### Profil Desa Jati Luwih

Luas wilayah	: 22 ribu km
Jumlah penduduk	: 2.680 jiwa
Mata pencarian	: petani (90%)
Agama	: 100% Hindu
Potensi alam	: 303 hektar, menghasilkan sekitar 1.515 ton beras merah pertahun
Desa Adat	: Jati Luwih dan Gunung Sari



Bali Post/upi

**INDAH** - Desa Jati Luwih dengan pepadungan alam yang indah dan sejuk. Desa yang memiliki pesona pertanian sangat indah dan unik ini akan segera menjadi *World Culture Heritage* atau warisan budaya dunia.

Bali Post Selasa Wage, 4 Agustus 2009

## Menuju Pertanian Organik

# Manfaatkan Jerami untuk Memuliakan Tanah

Denpasar (Bali Post) -

Jika ingin tanah pertanian terutama tanah sawah tetap terjaga kesuburannya, jerami sisa dari hasil panen padi hendaknya jangan sampai dibakar. Jerami tersebut amat baik digunakan sebagai pupuk organik yang dapat memuliakan tanah, menjadikan tanah tetap subur. Guru besar Fakultas Pertanian Unud Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, Senin (3/8) kemarin mengatakan jerami sangat baik digunakan untuk mempertahankan unsur hara dalam tanah.

Dikatakan, ada dua keuntungan jika jerami digunakan langsung sebagai pupuk dengan mencampurnya ke dalam tanah. Pertama, setelah membusuk, jerami itu akan menjadi *lelemekan* (pupuk alami) yang amat berguna untuk meningkatkan kadar organik dalam tanah. Akibatnya, tanah akan semakin subur karena *gumatat-gumilit* tumbuh dengan baik. *Gumatat-gumilit* seperti cacing, akan membantu memelihara kesuburan tanah.

Jika jerami dibakar, ada dua kerugian yang diperoleh yakni pertama asap pembakaran jerami dapat mencemari udara. Kedua, unsur hara yang terkandung dalam jerami tidak dimanfaatkan secara maksimal atau hilang percuma. Akibatnya, tanah menjadi miskin organik, sehingga produktivitas menjadi menurun. Karena itu dalam rangka mencapai Bali organik, mesti ada gerakan untuk tidak membakar jerami. "Hal itu penting untuk menjadikan tanah Bali subur alami, hasil produksi pertanian meningkat dan masyarakat menjadi sehat walafiat karena mengonsumsi hasil pertanian yang organik," ujar Dewa Suprpta yang Direktur Program Pascasarjana tersebut.

Kecenderungan petani membakar jerami usai panen, kata dia, karena didorong oleh ingin praktis dan cepat tanam padi kembali. Padahal, tanah sawah perlu istirahat sebentar untuk memulihkan kesehatannya. Agar tanah tetap menjadi subur, unsur haranya mesti tetap dipertahankan. Jerami sisa panen itu cukup disebar di dalam tanah, tanah

akan menjadi subur.

Satu hektar tanah yang memerlukan 10-15 ton pupuk organik akan tercukupi oleh jerami yang tersedia. Sebab, satu hektar tanah mampu menghasilkan 5 ton gabah dan sekitar 15-20 ton jerami. Penggunaan pupuk organik akan sangat membantu sifat-sifat biologi, fisik, dan sifat kimia tanah. Sedangkan, jika menggunakan pupuk sintetis hanya akan membantu satu sifat tanah saja yakni sifat kimia.

Ketika ditanya apa yang mesti dilakukan petani untuk mengatasi hama tikus yang merajalela akhir-akhir ini, Dewa Suprpta mengatakan sistem kropyokan yang dilakukan petani sudah sangat baik. Sistem itu mesti dilakukan secara serentak, melibatkan lebih banyak petani dan dukungan pemerintah. Makin merembaknya hama tikus belakangan ini, karena rantai makanan ada yang terputus. Burung pemakan tikus dan ular sawah sudah berkurang, sehingga tikus semakin berkembang. (08)